





# MODUL **SEPEDA KEREN**

*Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan  
Kelompok Rentan Lainnya*

## **MODUL SEPEDA KEREN**

### **Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya**

ISBN: 978-623-6080-08-5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

#### *Penanggungjawab*

Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek)

Novita Hardini, SE (Ketua Umum PUSPA Kabupaten Trenggalek)

#### *Pembina*

dr. Ratna Sulistyowati, M.Kes (Kepala Dinas Sosial LPPA Kabupaten Trenggalek)

Christina Ambarwati S, S.Sos (Kepala Bidang ... Dinas Sosial LPPA Kabupaten Trenggalek)

#### *Tim Penyusun*

Ayatullah Rohulloh Khomaini, SH (SAPDA)

Dakelan, S.Pd, M.IP (FITRA Jatim)

Dhesi Vienayanti, STP (PEKKA)

Endang Suprapti, S Pt (LPA Trenggalek)

Lany Verayanti, S.Sos, M.Si (KOMPAK)

Nurul Saadah Andriani, SH, M.Hum (SAPDA)

Suti'ah, S.Pd (LPKP Jawa Timur)

Wiwik Afifah, S.pi, SH, MH (KPI Jawa Timur)

#### *Kontributor*

Bovi Villa Suprianto, ST (KOMPAK)

Lilis Suryani, S.Pd, M.A (KOMPAK)

Nurul Affandy, SE, M.KP (KOMPAK)

Ratna Fitriani, S.E, Mdp (KOMPAK)

#### *Penyunting*

KOMPAK Communication and Knowledge Management

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini.

Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)

Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

#### **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

##### **Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

# KATA PENGANTAR

Kewenangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan wajib non-pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan sub-urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016–2021 melalui misi kelima, yaitu meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator sasaran pembangunan meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

Salah satu strategi pokok pembangunan Kabupaten Trenggalek 2016–2021 adalah pengarusutamaan gender. Artinya, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Trenggalek memperhitungkan dimensi gender, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan di Kabupaten Trenggalek memberikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat kepada perempuan dan laki-laki sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau organisasi masyarakat (Forum PUSPA).

Forum PUSPA Kabupaten Trenggalek telah menginisiasi Sepeda Keren, singkatan dari Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan.

Trenggalek, November 2019  
KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK



dr. RATNA SULISTYOWATI, M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670331 199603 2 003

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	lii
Daftar Isi.....	iv
Kurikulum Sepeda Keren.....	1
Silabus Sepeda Keren.....	5
Bina Suasana dan Orientasi Belajar .....	23
Sepeda Keren .....	41
Fitrah Manusia.....	61
Gender dan Inklusi Sosial .....	103
Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Disabilitas dan Hak Anak.....	153
Tata Kelola Pemerintahan .....	183
Pengorganisasian Komunitas.....	209
Analisis Sosial.....	241
Advokasi .....	269
Kepemimpinan .....	285
Evaluasi.....	299
Praktik Lapangan dan Pengorganisasian Komunitas .....	307

# KURIKULUM SEPEDA KEREN

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN		JAMPEL
<b>PB. 1.</b>	<b>BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR</b>	<b>2</b>
SPB 1.1	Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta	1
SPB 1.2	Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta	1
<b>PB. 2.</b>	<b>SEPEDA KEREN</b>	<b>2</b>
SPB 2.1	Latar Belakang dan Tujuan SEPEDA KEREN	1
SPB 2.2	Prinsip dan Peran Monitor SEPEDA KEREN	1
<b>PB. 3.</b>	<b>FITRAH MANUSIA</b>	<b>5</b>
SPB 3.1	Identitas Diri	2
SPB 3.2	Individu sebagai Mahluk Hidup dan Siklus Kehidupan	1
SPB 3.3	Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas	1
SPB 3.4	Peran Individu dalam Keluarga dan Masyarakat	1
<b>PB. 4.</b>	<b>GENDER DAN INKLUSII SOSIAL</b>	<b>6</b>
SPB 4.1	Kesetaraan dan Keadilan Gender	2
SPB 4.2	Kebutuhan Praktis dan Strategis	1
SPB 4.3	Konsep dan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1
<b>PB. 5</b>	<b>HAK AZASI MANUSIA, HAK PEREMPUAN, HAK DISABILITAS, HAK ANAK</b>	<b>4</b>
SPB 5.1	Wawasan Kebangsaan Indonesia dan Hak Azasi Manusia	2
SPB 5.2	Hak Perempuan, Disabilitas, Anak sebagai Bagian dari HAM	2
<b>PB. 6.</b>	<b>TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<b>7</b>
SPB 6.1	Konsep Dasar, Pendekatan Kebijakan Pembangunan dan Pembangunan Inklusif	2
SPB 6.2	Prinsip dan Kewenangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah	1
SPB 6.3	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2
SPB 6.4	Mekanisme Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat	2
<b>PB. 7.</b>	<b>PENGORGANISASIAN KOMUNITAS</b>	<b>9</b>
SPB 7.1	Konsep dan Langkah Pengorganisasian Komunitas	2
SPB 7.2	Konsep dan Penerapan Metode dalam Pendidikan Orang Dewasa (POD)	3
SPB 7.3	Keterampilan Dasar Fasilitasi dan Teknik Komunikasi dalam Pengorganisasian Komunitas	4



POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN		JAMPEL
<b>PB. 8.</b>	<b>ANALISIS SOSIAL</b>	<b>5</b>
SPB 8.1	Pengenalan Analisis Sosial dan Alat Analisis Sosial	3
SPB 8.2	Analisis Sosial Berbasis Kerentanan	2
<b>PB. 9.</b>	<b>ADVOKASI</b>	<b>4</b>
SPB 9.1	Advokasi Kebijakan untuk Perubahan Sosial	2
SPB 9.2	Keterampilan Advokasi	2
<b>PB. 10.</b>	<b>KEPEMIMPINAN</b>	<b>2</b>
SPB 10.1	Kepemimpinan sebagai Faktor Perubahan Sosial	1
SPB 10.2	Pemimpin sebagai Pelaku Perubahan Sosial	1
<b>PB. 11.</b>	<b>EVALUASI PELATIHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGORGANISASIAN KOMUNITAS</b>	<b>2</b>
SPB 11.1	Evaluasi Pelatihan Calon Mentor SEPEDA KEREN	1
SPB 11.2	Menyusun Rencana Pengorganisasian Komunitas	1
<b>PB. 12.</b>	<b>PRAKTIK LAPANGAN DAN EVALUASI PENGORGANISASIAN</b>	<b>40</b>
SPB 12.1	Praktik Pengorganisasian Komunitas	20
SPB 12.2	Evaluasi dan Pembelajaran Praktik Pengorganisasian Komunitas	20
<b>TOTAL JUMLAH JP</b>		<b>88</b>



# SILABUS SEPEDA KEREN

## SILABUS SEPEDA KEREN

### Pokok Bahasan

### Bina Suasana dan Orientasi Belajar

Tujuan : 1. Peserta dapat memahami Perkenalan dan Pengorganisasian Kelas  
2. Peserta dapat memahami Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta

Waktu : 2 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
1.1 Perkenalan dan pengorganisasian peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat saling mengenal dengan sesama peserta, fasilitator, dan panitia</li> <li>2. Peserta dapat membangun suasana akrab, terbuka, dan nyaman, sehingga terbentuk lingkungan belajar yang kondusif</li> <li>3. Peserta dapat membentuk kepengurusan kelas</li> <li>4. Peserta dapat merumuskan aturan selama proses pelatihan berlangsung</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan kelas dalam pelatihan</li> <li>• Aturan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun suasana akrab, terbuka, dan nyaman</li> <li>• Merumuskan aturan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akrab</li> <li>• Terbuka</li> <li>• Demokratis</li> <li>• Disiplin</li> </ul>	1 JP	
1.2 Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan tujuan pelatihan</li> <li>2. Peserta dapat menyebutkan alur pelatihan</li> <li>3. Peserta dapat mengemukakan harapan-harapan selama mengikuti pelatihan</li> <li>4. Peserta dapat merumuskan dukungan yang akan diberikan agar pelatihan berjalan dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan pelatihan</li> <li>• Agenda pelatihan</li> <li>• Harapan pada pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dukungan dalam pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokratis</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Tanggungjawab</li> </ul>	1 JP	

## SILABUS PELATIHAN CALON MENTOR (*TRAINING FOR MENTOR*) SEPEDA KEREN

### Pokok Bahasan

### SEPEDA KEREN

Tujuan : 1. Peserta dapat memahami latar belakang dan Tujuan SEPEDA KEREN  
2. Peserta dapat memahami prinsip dan peran mentor SEPEDA KEREN

Waktu : 2 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
2.1 Latar belakang dan tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan Latar belakang dan filosofi SEPEDA KEREN</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan visi dan misi dan Tujuan SEPEDA KEREN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang SEPEDA KEREN</li> <li>• Filosofi dan pengertian SEPEDA KEREN</li> <li>• Visi - misi SEPEDA KEREN</li> <li>• Tujuan SEPEDA KEREN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kelompok rentan di desa maupun daerah</li> <li>• Identifikasi masalah umum partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan di desa maupun daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Keberpihakan kepada kelompok rentan</li> </ul>	1 JP	
2.2 Prinsip dan Peran Mentor SEPEDA KEREN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan prinsip SEPEDA KEREN</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan penerima manfaat SEPEDA KEREN</li> <li>3. Peserta dapat menjelaskan perannya sebagai mentor SEPEDA KEREN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip SEPEDA KEREN</li> <li>• Penerima manfaat SEPEDAKEREN</li> <li>• Peran mentor SEPEDA KEREN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi prinsip umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>• Identifikasi umum peran fasilitator dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukarela</li> <li>• Tanggung jawab</li> <li>• Percaya diri</li> </ul>	1 JP	

Pokok Bahasan

**Fitrah Manusia**

- Tujuan : 1. Peserta dapat memahami identitas diri  
 2. Peserta dapat memahami individu sebagai makhluk hidup dan siklus kehidupan  
 3. Peserta dapat memahami kesehatan reproduksi dan seksualitas  
 4. Peserta dapat memahami peran individu dalam keluarga dan masyarakat
- Waktu : 5 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
3.1 Identitas Diri	1. Peserta dapat menjelaskan organ tubuh 2. Peserta dapat menjelaskan fungsi organ tubuh 3. Peserta mampu mengidentifikasi sisi negatif, positif dan potensi dirinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organ-organ tubuh beserta fungsinya</li> <li>Pengenalan diri sebagai manusia dengan berbagai prasyarat</li> <li>Keberadaan manusia secara utuh</li> <li>Memahami sisi positif, negatif dan potensi diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengeluarkan karakter positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflektif</li> <li>Berfikir positif</li> <li>Penerimaan diri secara positif</li> </ul>	1 JP	1 JP
3.2 Individu sebagai makhluk hidup dan siklus kehidupan	1. Peserta dapat menjelaskan tumbuh kembang manusia dalam siklus kehidupan 2. Peserta dapat menjelaskan perubahan fisik dan perilaku pada setiap tahapan pertumbuhan 3. Peserta mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pada setiap tahapan tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siklus kehidupan manusia secara biologis (mahluk hidup)</li> <li>Perubahan fisik dan perilaku pada setiap tahapan pertumbuhan</li> <li>Persoalan pada setiap tahapan tumbuh kembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi persoalan dalam siklus kehidupan manusia</li> <li>Identifikasi perilaku dalam siklus kehidupan manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empati</li> <li>Solidaritas</li> <li>Kritis</li> <li>Egaliter</li> </ul>	1 JP	

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
3.3 Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu mengidentifikasi masalah yang terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan masalah yang terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Kesehatan Reproduksi</li> <li>• Keterkaitan kesehatan reproduksi dengan seksualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenali organ reproduksi, fungsi dan perawatannya</li> <li>• Mengidentifikasi permasalahan terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Reflektif</li> </ul>	1 JP	
3.4 Peran individu dalam keluarga dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan posisi diri sebagai individu dan mahluk sosial dalam keluarga dan masyarakat</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan nilai dan norma masyarakat</li> <li>3. Peserta dapat menjelaskan peran sosial individu dalam masyarakat</li> <li>4. Peserta mampu merumuskan karakter, dan kontribusi secara luas dan terbatas sebagai agen perubahan sosial di masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manusia sebagai mahluk sosial</li> <li>• Nilai dan norma di masyarakat</li> <li>• Peran sosial individu dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan karakter dan kontribusi di masyarakat secara terbatas luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Tanggung jawab sosial</li> </ul>	1 JP	

Pokok Bahasan

**Gender dan Inklusi Sosial**

- Tujuan : 1. Peserta dapat memahami kesetaraan dan keadilan gender  
 2. Peserta dapat memahami kebutuhan praktis dan strategis  
 3. Peserta dapat memahami konsep dan penerapan pengarusutamaan gender (PUG)  
 4. Peserta dapat memahami inklusi dan eksklusi sosial  
 5. Peserta dapat memahami realitas keberadaan dan dukungan kepada kelompok rentan

Waktu : 8 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
4.1 Kesetaraan dan keadilan gender	1. Peserta dapat menjelaskan konsep gender 2. Peserta dapat menjelaskan peran gender di masyarakat 3. Peserta dapat mengidentifikasi bentuk dan dampak ketidakadilan gender di keluarga, masyarakat dan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep jenis kelamin dan gender</li> <li>Peran gender yang disepakati di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membedakan jenis kelamin dengan gender</li> <li>Mengidentifikasi bentuk dan dampak ketidakadilan gender pada individu, keluarga, masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif</li> <li>Kritis</li> <li>Reflektif</li> <li>Menghormati dan menghargai perbedaan gender</li> <li>Adil dan setara gender</li> <li>Komitmen meminimalkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender</li> </ul>	1 JP	1 JP
4.2 Kebutuhan Praktis Strategis Kelompok Rentan	1. Peserta dapat menjelaskan konsep kebutuhan praktis dan strategis perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya 2. Peserta mampu mengidentifikasi realitas dan kepentingan atas kesetaraan gender dengan alat analisis akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep kebutuhan praktis dan strategis perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan analisa kebutuhan praktis dan strategis pada perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktif</li> <li>Kritis</li> <li>Keberpihakan kepada kelompok rentan</li> </ul>	1 JP	



SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
4.3 Pengarusutamaan gender (PUG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan konsep pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan pembangunan yang responsif gender</li> <li>3. Peserta dapat mengidentifikasi proses dan hasil pembangunan di desa yang tidak responsif gender</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dan regulasi terkait PUG</li> <li>• PUG dan pembangunan yang responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi proses dan hasil pembangunan di desa yang tidak responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Adil dan setara gender</li> </ul>	1 JP	
4.4 Inklusi dan eksklusi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan konsep serta bentuk inklusi dan eksklusi sosial</li> <li>2. Peserta mampu mengidentifikasi akar eksklusi sosial</li> <li>3. Peserta mampu mengidentifikasi dampak eksklusi sosial terhadap kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep inklusi dan eksklusi sosial</li> <li>• Bentuk eksklusi sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi bentuk dan dampak eksklusi sosial</li> <li>• Identifikasi akar eksklusi sosial</li> <li>• Identifikasi dampak eksklusi sosial terhadap kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empati</li> <li>• Solidaritas</li> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Tanggungjawab Sosial</li> </ul>	1 JP	
4.5 Memahami realitas keberadaan dan dukungan kepada kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat melakukan Identifikasi kelompok rentan lainnya</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan berbagai metode dan pendekatan (penjangkauan)</li> <li>3. Peserta dapat menjelaskan etika berinteraksi Mentor ke Kelompok Rentan dan antar Kelompok Rentan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui definisi kelompok rentan dan berbagai kerentanan pada perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya</li> <li>• Menjelaskan berbagai metode dan pendekatan (penjangkauan)</li> <li>• Menjelaskan etika berinteraksi Mentor ke Kelompok Rentan dan antar Kelompok Rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi kelompok rentan di komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empati</li> <li>• Solidaritas</li> <li>• Kritis</li> <li>• Egaliter</li> <li>• Tanggungjawab sosial</li> <li>• Saling menghargai posisi dan peran</li> <li>• Komitmen atas kemudahan akses</li> </ul>	1 JP	

Pokok Bahasan

**Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Disabilitas, Hak Anak dan Hak Kelompok Rentan Lainnya**

- Tujuan : 1. Peserta memahami wawasan kebangsaan Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM)  
 2. Peserta memahami hak perempuan, disabilitas dan anak sebagai bagian dari HAM
- Waktu : 2 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
5.1 Wawasan Kebangsaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Peserta dapat menjelaskan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara 2. Peserta dapat menjelaskan Konsep HAM 3. Peserta dapat menganalisa dan menjelaskan pelanggaran terhadap HAM dan Hak Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak dan Kewajiban</li> <li>Negara dan Warga Negara</li> <li>Konsep HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa dan menjelaskan pelanggaran terhadap HAM dan Hak Warga Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patriotisme dan cinta tanah air</li> <li>Menghargai keberagaman</li> <li>Penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan</li> <li>Keberpihakan terhadap kelompok rentan</li> </ul>	1 JP	1 JP
5.2 Hak Perempuan, Disabilitas dan Anak sebagai bagian dari HAM	1. Peserta dapat menjelaskan konsep hak perempuan, disabilitas dan anak 2. Peserta mampu mengidentifikasi masing-masing hak dan regulasi pendukung pemenuhan hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep hak perempuan</li> <li>Konsep Hak Disabilitas</li> <li>Konsep hak Anak</li> <li>Konsep Hak Pekerja Migran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi masing-masing hak dan regulasi pendukung pemenuhan hak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kritis</li> <li>Aktif</li> <li>Reflektif</li> </ul>	1 JP	1 JP

Pokok Bahasan

**Tata Kelola Pemerintahan**

- Tujuan : 1. Peserta memahami konsep dasar dan pendekatan pembangunan inklusif  
 2. Peserta memahami prinsip dan kewenangan dalam Perencanaan pembangunan desa dan daerah  
 3. Peserta memahami pembangunan inklusif  
 4. Peserta memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Waktu : 8 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
6.1 Konsep dasar dan pendekatan kebijakan pembangunan inklusif	1. Peserta dapat menjelaskan konsep dan pendekatan kebijakan pembangunan di tingkat desa dan daerah 2. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa pelaku dan kepentingan dalam pembangunan desa dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep dan pendekatan kebijakan pembangunan di tingkat desa dan daerah</li> <li>Pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa pelaku dan kepentingan pembangunan di tingkat desa dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kritis</li> <li>Analitis</li> <li>Aktif</li> <li>Kreatif</li> <li>Tanggung jawab sosial</li> </ul>	1 JP	1 JP
6.2. Prinsip dan kewenangan dalam perencanaan pembangunan desa dan daerah	1. Peserta dapat menjelaskan prinsip perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah 2. Peserta dapat menjelaskan kewenangan desa dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prinsip perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah</li> <li>Kewenangan desa dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kritis</li> <li>Analitis</li> <li>Aktif</li> <li>Tanggung jawab sosial</li> <li>Percaya diri</li> </ul>	1 JP	

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
6.3 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan urgensi partisipasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan peluang dan jaminan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>3. Peserta dapat menjelaskan pemanfaatan ruang partisipasi untuk mendorong perubahan kebijakan</li> <li>4. Peserta dapat memahami dan mempraktikkan beberapa model pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa hingga Kabupaten</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urgensi partisipasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>• Peluang dan jaminan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>• Pemanfaatan ruang partisipasi untuk mendorong perubahan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik memberikan pemahaman kepada kelompok perempuan, disabilitas dan anak untuk terlibat dalam setiap forum musyawarah pembangunan</li> <li>• Teknik pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa hingga kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Aktif</li> <li>• Tanggung jawab sosial</li> <li>• Percaya diri</li> </ul>	1 JP	1 JP
6.4 Mekanisme Penanganan Pelaporan dan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan media atau saluran pengaduan dan laporan inklusif dan aksesibel yang dapat digunakan oleh masyarakat</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan mekanisme penanganan pelaporan dan pengaduan</li> <li>3. Peserta mampu menyusun pengaduan dan laporan yang sesuai dengan standar media pengaduan dan laporan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media atau saluran pengaduan dan laporan inklusif dan aksesibel yang dapat digunakan oleh masyarakat</li> <li>• Mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan dan laporan yang aksesibel dan inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun pengaduan dan laporan yang sesuai dengan standar media pengaduan dan laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritis</li> <li>• Teliti</li> <li>• Aktif</li> <li>• Kreatif</li> </ul>	1 JP	1 JP

Pokok Bahasan

**Pengorganisasian Komunitas**

- Tujuan : 1. Peserta memahami konsep, prinsip dan langkah pengorganisasian komunitas  
 2. Peserta memahami Konsep dan mampu menerapkan metode dalam Pendidikan Orang Dewasa (POD)  
 3. Peserta mampu menerapkan keterampilan dasar fasilitasi  
 4. Peserta memahami konsep dan mampu menerapkan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas

Waktu : 9 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
7.1 Konsep, prinsip dan langkah pengorganisasian komunitas	1. Peserta dapat memahami konsep pengorganisasian komunitas 2. Peserta dapat memahami pentingnya pengorganisasian komunitas 3. Peserta dapat mengidentifikasi prinsip pengorganisasian komunitas 4. Peserta dapat mengetahui langkah-langkah pengorganisasian komunitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep pengorganisasian komunitas</li> <li>Pentingnya pengorganisasian komunitas</li> <li>Langkah-langkah pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi langkah-langkah pengorganisasian komunitas</li> <li>Mengidentifikasi prinsip pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empati</li> <li>Komitmen</li> <li>Percaya diri</li> </ul>	1 JP	1 JP
7.2 Konsep Dasar dan Penerapan Metode dalam Pendidikan Orang Dewasa (POD)	1. Peserta dapat memahami Filosofi Pendidikan Orang Dewasa (POD) 2. Peserta dapat memahami Azas dan konsep POD 3. Peserta dapat mengidentifikasi teknik/metode pendidikan orang dewasa 4. Peserta mampu menerapkan POD dalam proses pengorganisasian komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filosofi Pendidikan Orang Dewasa (POD)</li> <li>Azas dan konsep POD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi teknik/metode pendidikan orang dewasa</li> <li>Menerapkan POD dalam proses pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbuka</li> <li>Demokratis</li> <li>Percaya diri</li> <li>Empati</li> <li>Berpikir Positif</li> </ul>	1 JP	2 JP

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
7.3 Teknik fasilitasi dan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat memahami pengertian dan prinsip dasar fasilitasi</li> <li>2. Peserta dapat menyebutkan berbagai teknik dan komunikasi dalam memfasilitasi</li> <li>3. Peserta dapat mempraktikkan teknik fasilitasi dan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian dan prinsip dasar fasilitasi</li> <li>• Berbagai teknik dan komunikasi dalam memfasilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempraktikkan teknik fasilitasi dan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Dinamis</li> <li>• Kritis</li> <li>• Percaya diri</li> <li>• Tanggung jawab</li> </ul>	1 JP	3 JP

## Pokok Bahasan

**Analisis Sosial**

Tujuan : 1. Peserta memahami konsep dan alat analisis sosial  
2. Peserta mampu mempraktikkan analisis sosial berbasis kerentanan

Waktu : 5 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
8.1 Konsep dan alat analisis sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan konsep analisis sosial;</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan berbagai aspek dalam analisis sosial</li> <li>3. Peserta dapat mempraktikkan penggunaan alat analisis sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep analisis sosial</li> <li>• Berbagai aspek dalam melakukan analisis sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempraktikkan penggunaan alat analisis sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empati</li> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Aktif</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Tanggung jawab</li> </ul>	1 JP	2 JP
8.2 Analisis sosial berbasis kerentanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan konsep kerentanan</li> <li>2. Peserta mampu melakukan analisa masalah dan solusi kelompok rentan di desa</li> <li>3. Peserta mampu menyusun strategi rekonstruksi sosial terhadap kelompok rentan di desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep kerentanan</li> <li>• Konsep Kelompok</li> <li>• Rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisa masalah dan solusi kelompok rentan di desa</li> <li>• Menyusun strategi rekonstruksi sosial di desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empati</li> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Aktif</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Tanggung jawab</li> </ul>		2 JP

Pokok Bahasan

**Advokasi**

Tujuan : 1. Peserta memahami advokasi kebijakan untuk perubahan sosial  
 2. Peserta memahami dan mempraktikkan keterampilan advokasi

Waktu : 4 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
9.1 Advokasi kebijakan untuk perubahan sosial	1. Peserta dapat menjelaskan pengertian advokasi dan kebijakan publik 2. Peserta dapat menjelaskan prinsip advokasi kebijakan publik 3. Peserta mampu melakukan analisa keterlibatan kelompok rentan dalam advokasi kebijakan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian advokasi dan kebijakan publik</li> <li>• Prinsip advokasi kebijakan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisa keterlibatan dan dampak keterlibatan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan kebijakan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Reflektif</li> <li>• Perubahan pola pikir</li> </ul>	1 JP	1 JP
9.2 Keterampilan advokasi	1. Peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktikkan penyusunan strategi advokasi kebijakan publik 2. Peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktikkan teknik advokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi dan teknik advokasi kebijakan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempraktikkan penyusunan strategi dan teknik advokasi kebijakan publik di desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif</li> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Berani</li> <li>• Tanggung jawab sosial</li> </ul>		2 JP



## Pokok Bahasan

**Kepemimpinan**

Tujuan : 1. Peserta memahami kepemimpinan sebagai faktor perubahan sosial  
2. Peserta memahami pemimpin sebagai pelaku perubahan sosial

Waktu : 3 jam pelajaran (JP)

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
10.1 Kepemimpinan sebagai faktor perubahan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan makna kepemimpinan</li> <li>2. Peserta mampu mengidentifikasi faktor kepemimpinan yang mempengaruhi perubahan sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian kepemimpinan</li> <li>• Karakter kepemimpinan</li> <li>• Kualitas kepemimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi terhadap faktor kepemimpinan yang mempengaruhi perubahan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analitis</li> <li>• Kritis</li> <li>• Empati</li> </ul>	1 JP	
10.2 Pemimpin sebagai pelaku perubahan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan makna pemimpin</li> <li>2. Peserta mampu mengidentifikasi pemimpin sebagai pelaku perubahan sosial</li> <li>3. Peserta mampu menganalisa kekuatan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam melakukan perubahan sosial</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pemimpin</li> <li>• Visi, sikap, kekuatan yang harus dimiliki dan tugas seorang pemimpin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisa terhadap kekuatan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam melakukan perubahan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analitis</li> <li>• Kritis</li> </ul>	1 JP	

Pokok Bahasan

**Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- Tujuan : 1. Peserta melakukan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN  
 2. Peserta menyusun rencana tindak lanjut pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN
- Waktu : 2 JP

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
11.1 Evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan tujuan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan manfaat evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN</li> <li>3. Peserta dapat melakukan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan manfaat evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritis</li> <li>• Aktif</li> <li>• Reflektif</li> </ul>		1 JP
11.2. Menyusun rencana Tindak Lanjut Pelatihan Calon Mentor SEPEDA KEREN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menjelaskan tujuan penyusunan rencana tindak lanjut</li> <li>2. Peserta dapat menjelaskan manfaat penyusunan rencana tindak lanjut</li> <li>3. Peserta mampu melakukan penyusunan rencana rencana tindak lanjut</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan manfaat penyusunan rencana pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyusunan rencana tindak lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kritis</li> <li>• Analitis</li> <li>• Aktif</li> <li>• Tanggung jawab sosial</li> <li>• Percaya diri</li> </ul>		1 JP

## Pokok Bahasan

**Praktik Lapangan dan Evaluasi Pengorganisasian Komunitas**

Tujuan : 1. Peserta mempraktikkan pengorganisasian komunitas  
2. Peserta mengevaluasi praktik pengorganisasian komunitas

Waktu : 20 JP

SUB POKOK BAHASAN	TUJUAN	MATERI PEMBELAJARAN			PERKIRAN WAKTU	
		PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP	P	K
12.1 Praktik pengorganisasian komunitas	1. Peserta mampu melakukan pengorganisasian komunitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempraktikkan rencana pengorganisasian komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empati</li> <li>Komitmen</li> <li>Aktif</li> <li>Kreatif</li> <li>Percaya diri</li> <li>Tanggung jawab</li> </ul>		20 JP
12.2 Evaluasi dan pembelajaran praktik pengorganisasian komunitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta mampu mempresentasikan hasil praktik pengorganisasian komunitas</li> <li>Peserta mampu menganalisa kelemahan, hambatan dan peluang dalam pengorganisasian masyarakat</li> <li>Peserta mampu menyusun pembelajaran pengorganisasian komunitas berdasarkan pengalaman praktik lapangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa kelemahan, hambatan dan peluang dalam pengorganisasian masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempresentasikan hasil praktik pengorganisasian komunitas</li> <li>Melakukan analisa kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang dalam pengorganisasian masyarakat</li> <li>Menyusun pembelajaran pengorganisasian komunitas berdasarkan pengalaman praktik lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflektif</li> <li>Kritis</li> <li>Tanggung jawab</li> </ul>	5 JP	15 JP



# BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR

- POKOK BAHASAN** : **1. BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Memahami pengenalan dan pengorganisasian peserta.
  2. Memahami tujuan pelatihan dan ungkapan harapan peserta.
- SUB POKOK BAHASAN** : **1.1. PERKENALAN DAN PENGORGANISASIAN PESERTA**
- 1.2. TUJUAN PELATIHAN DAN UNGKAPAN HARAPAN PESERTA**
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit

**POKOK BAHASAN** : **1. BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR**

**SUB POKOK BAHASAN** : **1.1. PERKENALAN DAN PENGORGANISASIAN PESERTA**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Saling mengenal dengan sesama peserta, fasilitator, dan panitia
2. Membangun suasana akrab, terbuka, dan nyaman, sehingga terbentuk lingkungan belajar yang kondusif
3. Membentuk kepengurusan kelas dalam pelatihan.
4. Merumuskan aturan selama proses pelatihan berlangsung

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>a. Fasilitator mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, yang dilanjutkan dengan kalimat pembukaan yang dapat membangun suasana akrab, segar, hangat, positif, dan apresiatif;</p> <p>b. Fasilitator memperkenalkan diri secara singkat kepada peserta;</p> <p>c. Fasilitator menjelaskan tentang judul PB dan SPB, beserta tujuan dan waktu yang diperlukan (M.1.1.1 dan M.1.1.2);</p> <p>d. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan secara umum sehingga peserta dapat mengetahui gambaran pembahasan pada sesi tersebut.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.1.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.1.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Permainan</b></p> <p>a. Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan untuk perkenalan dengan menggunakan Lembar Panduan Perkenalan (M.1.1.3) atau dapat mengganti teknik perkenalan lain yang dikuasai fasilitator;</p> <p>b. Peserta diminta untuk menyampaikan pembelajaran terbaik yang diperoleh dari proses perkenalan tersebut;</p> <p>c. Fasilitator menjelaskan manfaat perkenalan untuk kegiatan pelatihan sesuai dengan Bahan Bacaan Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta (M.1.1.6)</p>	20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Panduan Perkenalan (M.1.1.3)</li> <li>• Bahan Bacaan Perkenalan (M.1.1.6)</li> <li>• Media bantu lain seperti Slide Powerpoint Presentasi, video, dll</li> </ul>
<p>3. <b>Ceramah dan Penugasan Individu</b></p> <p>a. Fasilitator menjelaskan pentingnya membentuk struktur organisasi kelas, dan tugasnya;</p> <p>b. Peserta diminta mengajukan 5 nama untuk dicalonkan menjadi pemimpin kelas, dan meminta kesediaan kelimanya untuk maju kedepan menjadi kandidat pemimpin kelas;</p> <p>c. Fasilitator meminta setiap peserta untuk memilih satu di antaranya untuk menjadi pemimpin kelas (ketua, kepala suku, atau sebutan lain);</p> <p>d. Fasilitator meminta pemimpin kelas membentuk kepengurusan kelas yang terdiri dari sekretaris, seksi materi, seksi evaluasi dan seksi penjaga waktu dengan meminta kesediaan empat orang kandidat lainnya mengisi posisi tersebut (M.1.1.4);</p> <p>e. Fasilitator menempelkan struktur organisasi kelas dan uraian tugas pada dinding kelas yang telah disiapkan sebelumnya berdasarkan Lembar Panduan Uraian Tugas Pengurus Kelas (M.1.1.5).</p>	15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagan Struktur Organisasi Kelas (M.1.1.4)</li> <li>• Lembar Panduan Uraian Tugas Pengurus Kelas (M.1.1.5)</li> </ul>



LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
4. <b>Penegasan</b> a. Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan bahwa sesi perkenalan merupakan kunci pembuka pelatihan yang juga menjadi salah satu penentu dinamika atau interaksi di antara semua yang terlibat dalam kelas selama ToT Calon Mentor dan Kader SEPEDA KEREN.	5'	

## LEMBAR PANDUAN PERKENALAN

### Saya adalah ...

#### Garis besar

1. Peserta menulis hal-hal tentang mereka untuk dilihat oleh peserta lainnya.
2. Perkenalan dilakukan secara umum dan dilanjutkan dengan perkenalan lebih mendalam secara berpasangan untuk mendalami karakter masing-masing.
3. Ada proses interaksi dengan peserta lainnya untuk menebak asal peserta yang diperkenalkan

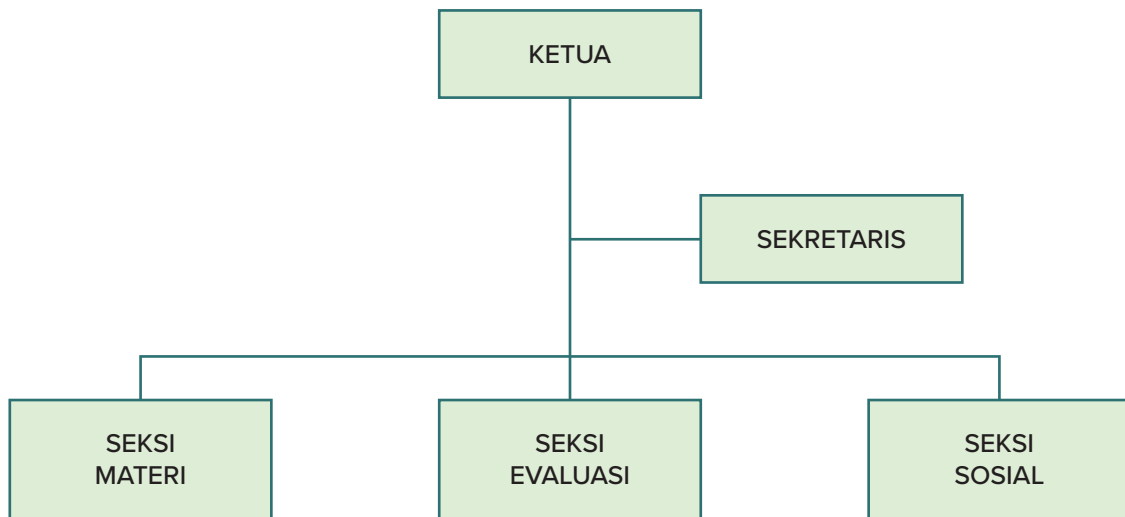
#### Alat yang dibutuhkan

1. Sel lembar kertas ukuran 50 cm x 30 cm untuk setiap peserta dengan tulisan: 'Saya adalah ...' dan 4 pertanyaan.
2. Sebuah pulpen untuk masing-masing peserta.
3. Selotip kertas untuk memasang kertas di bagian depan baju peserta.

#### Prosedur

1. Informasikan kepada peserta bahwa mereka akan memperkenalkan diri secara bergantian
2. Bagikan kertas bertuliskan "Saya adalah ..." dan pulpen untuk masing-masing peserta.
3. Beritahukan kepada peserta mereka memiliki waktu 3 menit untuk menulis jawaban atas 4 pertanyaan berikut:
  - a. Nama :
  - b. Asal Desa dan Kecamatan :
  - c. Hobi :
  - d. Cita-cita masa kecil :
4. Setelah 3 menit, mintalah peserta untuk memasang kertas tersebut di depan baju mereka menggunakan selotip kertas yang telah disediakan;
5. Peserta diminta berdiri di pinggir kursi masing-masing dan jelaskan kepada peserta bahwa setiap orang akan berjalan ke depan kelas untuk membaca kertas peserta lainnya, tidak bersuara, salami dan sebutkan nama dengan berbisik;
6. Proses perkenalan dimulai oleh fasilitator dan mengundang peserta pertama untuk berjalan ke arahnya, berdiri berhadapan dengan fasilitator untuk saling membaca kertas perkenalan dan bersalaman. Setelah selesai, peserta tersebut diminta untuk berdiri di samping fasilitator;
7. Minta peserta kedua berjalan menuju ke depan kelas, membaca kertas perkenalan fasilitator dan peserta pertama. Setelah selesai, peserta kedua diminta untuk bersalaman dengan fasilitator dan peserta pertama lalu berdiri di samping peserta pertama;
8. Ulangi langkah 7 hingga semua peserta mendapatkan kesempatan untuk membaca kertas perkenalan peserta lainnya;
9. Setelah tahap ini selesai, minta peserta mencari pasangan untuk saling mengajukan pertanyaan mendetil tentang karakter pribadi selama 5 menit;
10. Informasikan bahwa setiap peserta akan memperkenalkan pasangannya di hadapan peserta lain dengan cara atau gaya sesuai asal dan karakter pribadi pasangan. Jika dalam 3 kali tebak peserta lain salah mengidentifikasi karakter pasangannya, berikan jawaban yang benar;
11. Setiap satu pasang peserta selesai memperkenalkan diri, lanjutkan ke pasangan berikutnya hingga semua peserta mendapat kesempatan untuk diperkenalkan oleh pasangannya masing-masing.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS



## URAIAN TUGAS PENGURUS KELAS

JABATAN	TUGAS
KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin kepengurusan kelas</li> <li>• Penghubung antar peserta, fasilitator dan pantia</li> <li>• Mengkordinir / mengendalikan kegiatan, bersama dengan sekretaris, membantu proses pelatihan</li> <li>• Memastikan penataan ruang kelas pelatihan nyaman bagi peserta</li> <li>• Memastikan kehadiran peserta.</li> <li>• Memastikan review kegiatan harian terlaksana.</li> </ul>
SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewakili, membantu tugas tugas ketua.</li> <li>• Mengkoordinir kegiatan review harian.</li> <li>• Bertanggung jawab pada ketua kelas.</li> </ul>
SEKSI EVALUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu ketua kelas di bidang evaluasi</li> <li>• Membantu membagikan evaluasi ke peserta.</li> <li>• Melaporkan ke panitia penyelenggara tentang evaluasi.</li> </ul>
SEKSI MATERI :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu ketua kelas dalam membagi materi.</li> <li>• Menginformasikan ke panitia pelaksana tentang kekurangan materi.</li> <li>• Bertanggung jawab pada ketua kelas.</li> </ul>
SEKSI SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu ketua kelas apabila ada peserta yang sakit</li> <li>• Bila ada kegiatan keluar, seksi sosial yang mengurus.</li> <li>• Bertanggung jawab pada ketua kelas.</li> </ul>

## BAHAN BACAAN

**PERKENALAN DAN PENGORGANISASIAN PESERTA**

Pelatihan merupakan proses membantu peserta pelatihan untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas tertentu melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan. Didalam sebuah pelatihan, penyajian materi atau bahan ajar “Orientasi dan Bina Suasana” dilakukan pada sesi pertama dengan tujuan menyiapkan atau mengkondisikan peserta supaya siap, aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan, mencairkan kebekuan diantara peserta dan mengarahkan peserta untuk dapat mengenal satu sama lain sehingga mereka dapat bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Lebih dari itu, melalui bina suasana fasilitator juga diharapkan bisa menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan urutan penyajian materi, serta metode dan media yang digunakan selama pelatihan.

Secara psikologis “Orientasi dan Bina Suasana” sangat menentukan proses dan hasil yang ingin dicapai selama pelatihan berlangsung, karena kegiatan ini akan mendorong kesiapan peserta untuk menerima pengalaman baru dan mempunyai rasa percaya diri, serta menciptakan suasana saling percaya, keterbukaan, bertanggung jawab yang pada akhirnya dapat memotivasi mereka untuk aktif, kreatif, inovatif dan berprestasi. Sedangkan bagi fasilitator kegiatan ini akan memberi gambaran menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan dan karakteristik kelompok sasaran akan menentukan bentuk interaksi dan strategi pelatihan yang akan digunakan.

**Perkenalan**

Perkenalan merupakan proses yang sangat penting dalam suatu pelatihan. Fasilitator harus menyiapkan suasana para peserta untuk saling mengenal satu sama lain, termasuk fasilitator sendiri, sehingga tercipta suasana akrab dan dinamika positif. Pada saat perkenalan ini tidak saja saling mengenal semata tetapi dapat mencairkan suasana sehingga tercipta suasana kondusif yang mendukung para peserta dapat dengan leluasa mengungkapkan gagasan, ide serta pengalamannya. Proses belajar akan lebih kaya dengan pembuktian yang ada di masyarakat. Untuk pelatihan PAD, perkenalan ini merupakan pintu masuk yang sangat penting.

Pada saat melakukan perkenalan, libatkanlah seluruh peserta melalui aktivitas permainan yang mendorong keterbukaan dan mencairnya suasana. Namun, pembatasan waktu perlu dilakukan agar tidak berlarut-larut. Hindari pertanyaan yang bersifat menyelidik atau pribadi. Fasilitator disarankan untuk memperhatikan kecenderungan perilaku umum peserta seperti pemalu, berbicara lugas, santai atau membosankan. Hal ini diperlukan untuk menetapkan strategi lain yang diperlukan agar suasana mencair dan siap untuk mengikuti pelatihan.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode perkenalan;

- Kondisi awal menghadapi situasi baru
- Sejauhmana di antara peserta sudah saling mengenal satu dengan lainnya.
- Waktu dan lamanya pelatihan berlangsung

Kondisi awal peserta akan menentukan persepsi dan respon terhadap lingkungan yang baru. Jika peserta pelatihan sudah saling mengenal dan pelatihan berlangsung hanya satu atau dua hari, mungkin perkenalan dilakukan seperlunya dan bersifat penegasan atau fasilitator sendiri yang memperkenalkannya. Namun apabila peserta belum saling mengenal dan waktu pelatihan cukup lama, perkenalan dapat dilakukan dalam beberapa kali kegiatan dengan metode yang bervariasi.

Beberapa hal yang penting dikembangkan dalam pembahasan aturan main adalah terkait dengan kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, ruang, kesediaan alat-alat belajar, waktu, tata cara diskusi.

## **Pengorganisasian Peserta dengan Aturan Main (Tata Tertib Kelas)**

Pada pembelajaran orang dewasa, aturan main (tata tertib kelas) sangat membantu fasilitator dalam memandu, mengatur dan mengelola proses belajar. Karena pada topik-topik tertentu yang membutuhkan pendalaman, peserta antusias dengan perdebatan dan cenderung sulit dikendalikan. Aturan main ditetapkan untuk menjembatani kebutuhan fasilitator, peserta dan penyelenggara.

Pembuatan aturan main disesuaikan dengan lama dan tujuan pelatihan serta dilaksanakan secara partisipatif dan hasil rumusannya akan menjadi pedoman bagi peserta dan fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan. Aturan yang disepakati secara bersama tersebut akan mengikat seluruh peserta, fasilitator dan panitia penyelenggara, sehingga proses pelatihan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai tujuannya. Lebih dari itu, aturan main juga menjadi bahagian penting untuk mengatasi konflik yang terjadi selama pelatihan berlangsung. Beberapa hal yang penting dikembangkan dalam pembahasan aturan main adalah terkait dengan kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, ruang, kesediaan alat-alat belajar, waktu, tata cara diskusi.

- POKOK BAHASAN** : **1. BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR**
- SUB POKOK BAHASAN** : **1.2. TUJUAN PELATIHAN DAN UNGKAPAN HARAPAN PESERTA**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan tujuan pelatihan
  2. Menyebutkan alur pelatihan
  3. Mengemukakan harapan-harapan selama mengikuti pelatihan
  4. Merumuskan dukungan yang akan diberikan agar pelatihan berjalan dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>a. Fasilitator menjelaskan tujuan sub pokok bahasan, proses pembelajaran serta alokasi waktu yang dibutuhkan.</p> <p>b. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan secara umum sehingga peserta dapat mengetahui gambaran pembahasan pada sesi tersebut.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.1.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menyampaikan pokok bahasan secara umum dan menjelaskan tujuan pelatihan dengan menggunakan Lembar Panduan Tujuan Pelatihan (M.1.2.2);</p> <p>b. Fasilitator menyebutkan agenda pembahasan selama pelatihan dengan menggunakan Lembar Panduan Alur Pelatihan SEPEDA KEREN (M.1.2.3).</p>	15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Panduan Tujuan Pelatihan (M.1.2.2)</li> <li>Lembar Panduan Alur Pelatihan SEPEDA KEREN (M.1.2.3)</li> </ul>
<p>3. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menempelkan gambar pohon harapan (dengan ukuran besar) yang sudah disiapkan sebelumnya di tempat yang strategis dan dapat dilihat oleh semua peserta (M.1.2.4);</p> <p>b. Fasilitator membagikan 2 kertas tempel berwarna (<i>post-it</i>) atau metaplan (kuning dan merah) kepada masing masing peserta.</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan masing-masing:</p> <p>d. 1 harapan mengikuti pelatihan pada kertas tempel berwarna (<i>post-it</i>) atau metaplan warna kuning terkait Misi SEPEDA KEREN yakni;</p> <p>(i) Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif;</p> <p>(ii) Menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif;</p> <p>(iii) Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan;</p> <p>(iv) Mendorong pengelolaan sumberdaya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan.</p> <p>e. 1 kontribusi yang akan diberikan agar pelatihan ini berjalan dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan pada kertas tempel berwarna (<i>post-it</i>) atau <i>metaplan</i> warna merah;</p>	20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gambar Pohon Harapan (M.1.2.4)</li> </ul>



LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>f. Fasilitator meminta peserta menempelkan masing masing metaplan pada tempat yang telah disediakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Harapan (<i>post-it</i> atau <i>metaplan</i> warna kuning) di tempel pada area sekitar akar pohon hingga batang pohon;</li> <li>(ii) Kontribusi (<i>post-it</i> atau <i>metaplan</i> warna merah) di tempel pada area bawah akar (tanah);</li> <li>(iii) Fasilitator membacakan hasil dan merangkum harapan dan kontribusi peserta;</li> <li>(iv) Fasilitator menjelaskan bahwa harapan dan dukungan peserta akan digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan.</li> </ul>		
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>a. Fasilitator memberikan penegasan tentang manfaat proses perkenalan serta ungkapan harapan dan kontribusi peserta terhadap proses pelatihan (M.1.2.5).</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Bacaan Ungkapan Harapan Peserta (M.1.2.5)</li> </ul>

## TUJUAN PELATIHAN

### TUJUAN UMUM

Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Peserta agar dapat Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Mentor dan Kader SEPEDA KEREN secara Optimal.

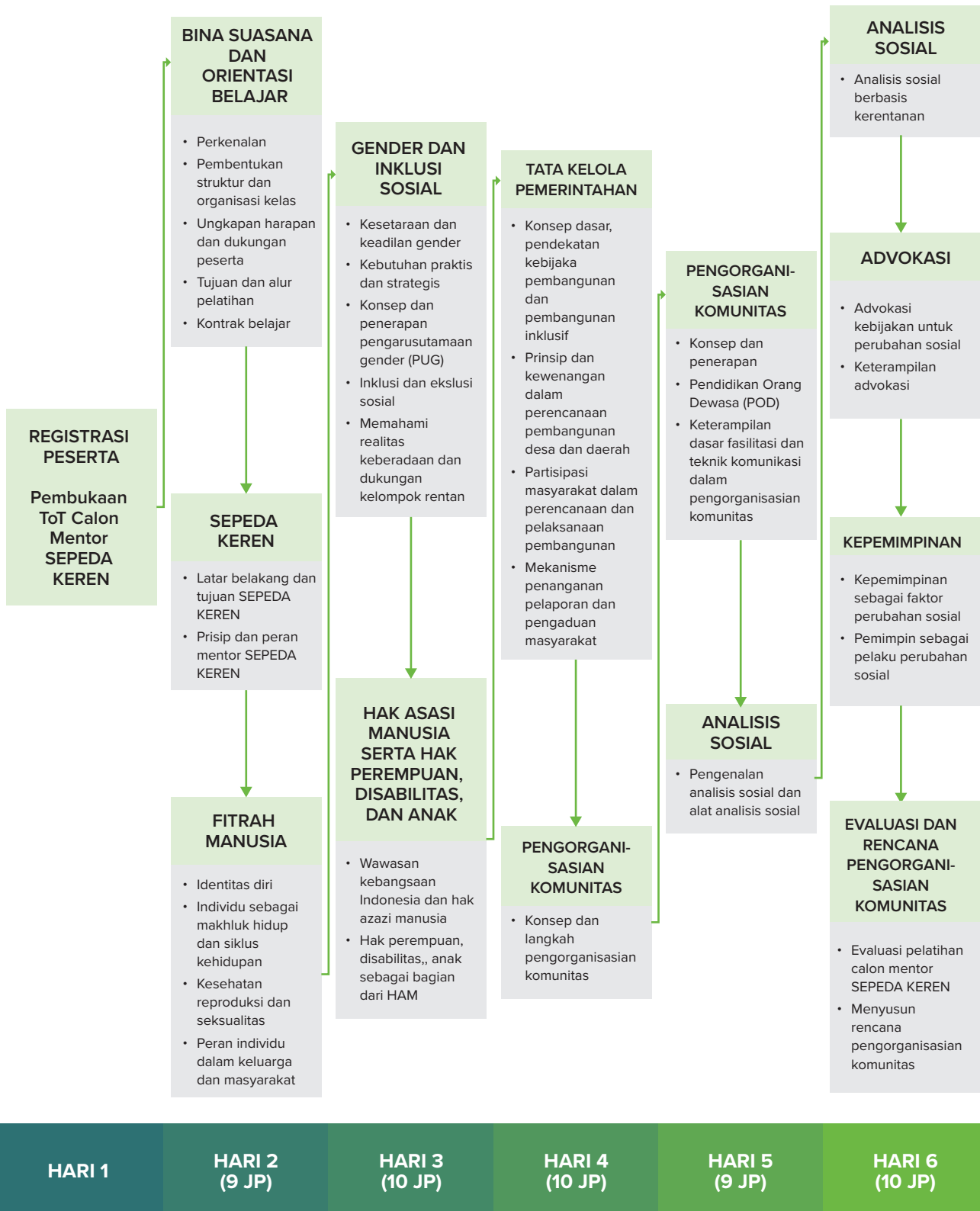
### TUJUAN KHUSUS

Memahami konsep dan mampu menerapkan materi yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari yakni:

1. Pelaksanaan SEPEDA KEREN;
2. Fitrah Manusia dan Peran Sosialnya sebagai Bagian dari Masyarakat;
3. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial;
4. Hak Dasar Manusia
5. Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik;
6. Pengorganisasian Masyarakat serta Kelompok Rentan;
7. Analisis Sosial
8. Fasilitasi Kebutuhan Advokasi Kelompok Rentan;
9. Kepemimpinan;

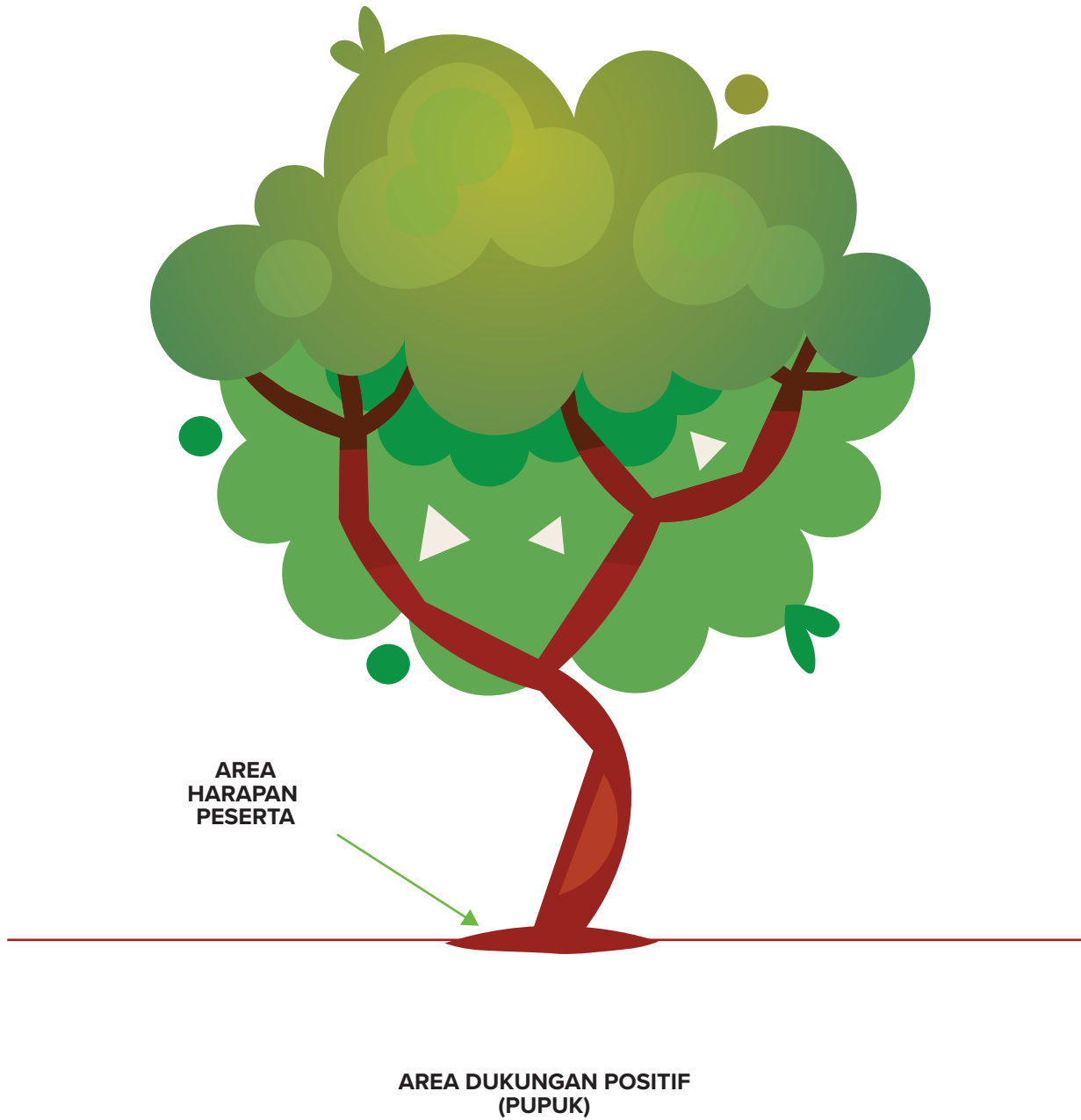
M. 1.2.3

## ALUR TOT CALON MENTOR SEPEDA KEREN



Catatan: Alur ini adalah alur ToT Calon Mentor SEPEDA KEREN. Untuk pelaksanaan Pelatihan Calon Kader SEPEDA KEREN disesuaikan dengan ketersediaan waktu peserta dan atas dasar kesepakatan bersama

## POHON HARAPAN



## BAHAN BACAAN

**UNGKAPAN HARAPAN PESERTA****a. Pembahasan Harapan dan Dukungan Peserta**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas harapan dan dukungan mereka terhadap pelatihan. Harapan yang dimaksud adalah harapan para peserta sebagai output pelaksanaan kegiatan, biasanya berupa tambahan pengetahuan dan peningkatan kualitas diri. Sedangkan dukungan adalah hal-hal terbaik yang bisa diberikan oleh peserta selama proses pelatihan berlangsung, berupa disiplin, terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan dan lainnya. Pembahasan harapan dan dukungan peserta terhadap pelatihan dapat dilakukan melalui curah pendapat, diskusi kelompok atau memvisualisasikannya dalam bentuk gambar.

Jika rancangan pelatihan yang disusun mencerminkan pengalaman yang sudah teruji, maka biasanya harapan peserta tidak akan banyak berbeda dengan pemetaan awal. Meskipun demikian, pembahasan harapan tetap penting dilakukan untuk mengkonfirmasi cerminan awal dengan kenyataan. Harapan yang muncul dari peserta menjadi masukan bagi fasilitator atau tim penyelenggara untuk menegosiasikan hal apa saja yang bisa diakomodir dan menyamakan persepsi tentang pelatihan yang akan berlangsung. Lebih dari itu, Informasi yang diungkapkan oleh peserta melalui harapannya bermanfaat sebagai indikator untuk mengevaluasi pelatihan.

**b. Memahami Kemampuan Awal Peserta**

Memahami kemampuan awal peserta menjadi bagian penting dari keseluruhan proses pelatihan. Mengawali sesuatu dengan benar lebih penting dari pada memperbaikinya pada saat proses berjalan. Fasilitator harus mampu mengidentifikasi kemampuan apa saja (pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan nilai-nilai) yang berkaitan dengan tema pelatihan. Hal ini sangat penting untuk memahami kondisi dan kapasitas awal peserta sehingga mempermudah dalam menetapkan mulai dari mana urutan penyajian dimulai dan metode apa yang sesuai. Kemampuan awal digali melalui pertanyaan pemicu atau permainan tentang topik yang akan dibahas. Cara lain yang dapat ditempuh dengan meminta kepada beberapa orang peserta menjadi nara sumber untuk menjelaskan pengalaman tentang bidang dibahas. Keuntungan cara ini untuk menghindari pengulangan yang tidak berguna dan membuat suasana menjemukan pada saat memulai pelatihan karena peserta telah mengetahui banyak tentang hal tersebut. Dari sisi waktu akan lebih efektif untuk membahas hal lain yang belum dipahami peserta.



# SEPEDA KEREN

<b>POKOK BAHASAN</b>	:	<b>2. SEPEDA KEREN</b>
<b>TUJUAN</b>	:	Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami latar belakang dan Tujuan SEPEDA KEREN</li><li>2. Memahami prinsip dan peran mentor SEPEDA KEREN</li></ol>
<b>SUB POKOK BAHASAN</b>	:	<b>2.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SEPEDA KEREN</b> <b>2.2 PRINSIP DAN PERAN MENTOR SEPEDA KEREN</b>
<b>WAKTU</b>	:	2 Jampel @ 45 menit = 90 menit



- POKOK BAHASAN** : **2. SEPEDA KEREN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **2,1 LATAR BELAKANG SEPEDA KEREN**
- TUJUAN** : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan Latar belakang dan filosofi SEPEDA KEREN
  2. Menjelaskan visi dan misi dan Tujuan SEPEDA KEREN
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>a. Fasilitator menyapa peserta dan mencairkan suasana dengan mengajak peserta melakukan gerak dan lagu “hallo apa kabar”, gerak dan lagu dilakukan berulang kali sampai suasana belajar menyenangkan. Dapat diganti dengan permainan lain yang dikuasai fasilitator;</p> <p>b. Fasilitator menjelaskan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian (M.2.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian (M.2.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta;</p> <p>b. Fasilitator mengajak peserta melakukan curah pendapat tentang tujuan pembangunan desa (dan Kabupaten Trenggalek);</p> <p>c. Fasilitator menyimpulkan pendapat peserta dan memberikan penekanan pada latar belakang lahirnya inisiatif SEPEDA KEREN (M.2.1.3);</p> <p>d. Fasilitator mengajak peserta curah pendapat tentang situasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di desa (dan Kabupaten Trenggalek), dengan pertanyaan kunci: Bagaimana situasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Trenggalek? jangan lupa galilah data pendukungnya;</p> <p>e. Fasilitator mencatat jawaban peserta pada kertas Plano yang telah disiapkan;</p> <p>f. Fasilitator menanyakan pendapat peserta mengenai bagaimana akses, partisipasi, manfaat dan kontrol mereka dalam pembangunan di desa (dan Kabupaten Trenggalek);</p> <p>g. Fasilitator mencatat jawaban peserta pada kertas Plano yang telah disiapkan dan merangkum jawaban peserta dan berdasarkan hasil curah pendapat tersebut fasilitator menjelaskan tentang hubungan Musrena Keren dan Sepeda Keren;</p> <p>h. Fasilitator membuka menjelaskan dasar hukum Sepeda Keren (M.2.1.4) dan menjelaskan peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan Permendagri no.114/2014;</p> <p>i. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran dengan menekankan pentingnya kelompok rentan terlibat dalam proses pembangunan.</p>	15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Informasi Latar Belakang SEPEDA KEREN (M.2.1.3)</li> <li>• Lembar Informasi Dasar Hukum SEPEDA KEREN (M.2.1.4)</li> </ul>

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menayangkan gambar sepeda dan meminta peserta mendeskripsikan bagian-bagian sepeda beserta fungsinya dengan menggunakan panduan pada Lembar Curah Pendapat SEPEDA KEREN (M.2.1.5);</p> <p>b. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas plano dan merangkum jawaban peserta;</p> <p>c. Fasilitator menayangkan slide filosofi sepeda keren (M.2.1.6) dan menjelaskannya;</p> <p>d. Fasilitator menayangkan slide dan menjelaskan pengertian, visi misi dan tujuan SEPEDA KEREN (M.2.1.7), (M.2.1.8), (M.2.1.9) dan mengacu pada Bahan Bacaan SEPEDA KEREN (M.2.1.10);</p> <p>e. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.</p>	20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Curah Pendapat SEPEDA Keren (M.2.1.5)</li> <li>• Slide filosofi sepeda keren (M.2.1.6)</li> <li>• Slide pengertian sepeda keren (M.2.1.7)</li> <li>• Slide visi misi sepeda keren M.2.1.8)</li> <li>• Slide tujuan sepeda keren (M.2.1.9)</li> <li>• Bahan Bacaan SEPEDA KEREN (M.2.1.10)</li> </ul>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>a. Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan bahwa melalui SEPEDA KEREN diharapkan kelompok rentan dapat mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat sumber daya serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan di Desa.</p>	5'	



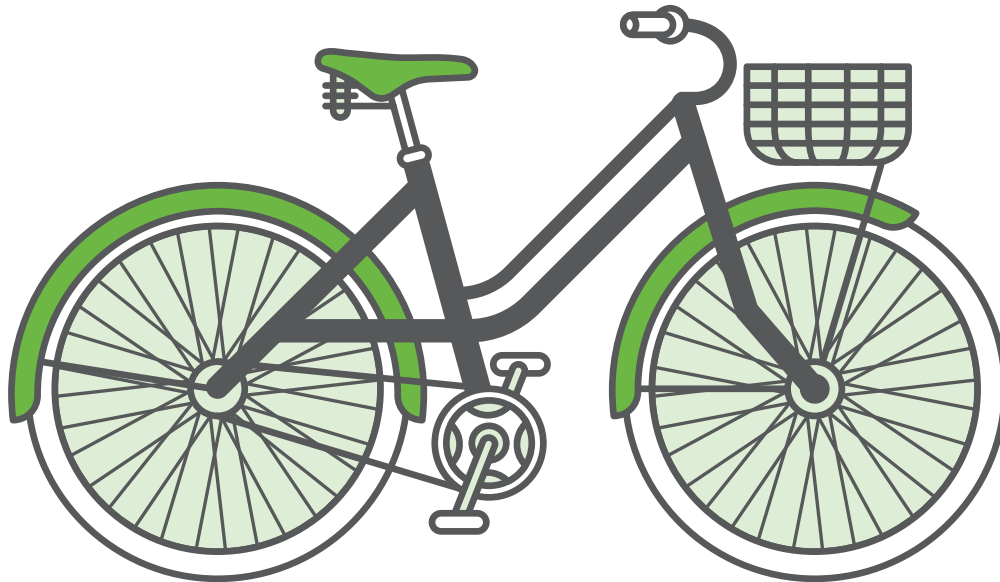
### DASAR HUKUM

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak;</li> <li>2. UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;</li> <li>3. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, telah diubah dengan UU 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>4. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>5. UU No. 23/2004 tentang PKDRT;</li> <li>6. UU No. 25/2004 tentang SPPN</li> <li>7. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPPO;</li> <li>8. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>9. UU No. 6/2014 tentang Desa;</li> <li>10. UU No. 23/2014 tentang Pemda, telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2014;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas</li> <li>12. PP No. 4/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47/2015 tentang Perubahan atas PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014;</li> <li>13. PP NO. 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;</li> <li>14. Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 No. 67/2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah</li> <li>15. PerMen PPPA No. 011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;</li> <li>16. Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Perda No. 10/2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;</li> <li>18. Perbup No. 59/2013 tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-Hak Anak;</li> <li>19. Perda No. 17/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>20. Perda No. 6/2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan;</li> <li>21. Perbup No. 62/2015 tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender;</li> <li>22. Perbup No. 1/2019 tentang MUSRENA KEREN dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan.</li> </ol> |
|---|---|---|

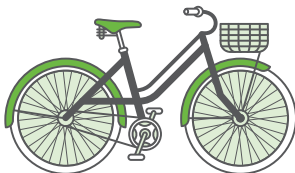


## M. 2.1.5

## APA YANG ANDA PIKIRKAN DENGAN MELIHAT GAMBAR INI?



## M. 2.1.6



### FILOSOFI SEPEDA KEREN

**SEPEDA KEREN** merepresentasikan **sepeda onthel** sebagai alat transportasi yang sejak dulu menjadi identitas masyarakat Trenggalek karena secara umum dan luas digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti ke pasar, sekolah, dan lain sebagainya. Sementara kata **keren** dapat berarti tampak gagah dan tangkas atau lekas berlari cepat.

**SEPEDA KEREN** dimaksudkan sebagai sebuah kendaraan atau alat untuk menggerakkan masyarakat menuju tujuan, harapan dan cita-cita bersama yakni sebuah kondisi dimana perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya yang selama ini masalah dan kebutuhan mereka masih belum terakomodasi di dalam pembangunan, akhirnya mereka mempunyai akses, berpartisipasi, mendapatkan manfaat dan mempunyai kontrol dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan maupun anggaran pembangunan sepenuhnya menjawab atau memberikan solusi atas masalah dan kebutuhan riil mereka.



### PENGERTIAN

**SEPEDA KEREN** diartikan sebagai “Suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan”



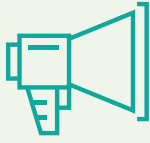
### VISI

“Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.



### MISI

- ▶ Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang inklusif.
- ▶ Menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif.
- ▶ Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan.
- ▶ Mendorong pengelolaan sumber daya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan.



## MAKSUD

Sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup dalam upaya mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.



## TUJUAN

Mempersiapkan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan

## BAHAN BACAAN

**SEKOLAH PEREMPUAN DISABILITAS ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA (SEPEDA KEREN)****Pengertian**

SEPEDA KEREN adalah kependekan dari SEkolah PErempuan Disabilitas, Anak dan KElompok RENTan lainnya. SEPEDA KEREN diartikan sebagai “Suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.”

Secara filosofis, SEPEDA KEREN merepresentasikan sepeda onthel sebagai alat transportasi yang sejak dulu menjadi identitas masyarakat Trenggalek karena secara umum dan luas digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti ke pasar, sekolah dan lain sebagainya. Sementara kata keren dapat berarti tampak gagah dan tangkas atau lekas berlari cepat. SEPEDA KEREN dimaksudkan sebagai sebuah kendaraan atau alat untuk menggerakkan masyarakat menuju tujuan, harapan dan cita-cita bersama yakni sebuah kondisi di mana perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya selama ini masalah dan kebutuhan mereka masih belum terakomodasi di dalam pembangunan. Artinya akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kelompok rentan di dalam pembangunan masih belum optimal sehingga program dan kegiatan maupun anggaran pembangunan belum sepenuhnya menjawab atau memberikan solusi atas masalah dan kebutuhan riil kelompok rentan.

Dengan SEPEDA KEREN diharapkan kesadaran perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya akan pentingnya partisipasi mereka di dalam proses pembangunan menjadi meningkat sehingga akses dan fungsi kontrol dapat dilakukan dan membawa manfaat nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan kelompok rentan.

Mentor SEPEDA KEREN adalah individu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dan direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang memiliki jiwa pengabdian dan kerelawanan yang tinggi serta berkomitmen untuk ikut serta memajukan masyarakat Trenggalek khususnya kelompok rentan (perempuan, disabilitas, anak dan lainnya) dengan mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan di dalam proses pembangunan untuk membuka akses, mengelola manfaat dan menjalankan fungsi atau mengisi posisi kontrol dalam seluruh tahapan atau proses pembangunan Desa dan Daerah.

Mentor SEPEDA KEREN dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu meliputi pelatihan dalam kelas, praktik lapangan serta refleksi dan evaluasi oleh para pelatih atau fasilitator berpengalaman dan menguasai berbagai metode dalam POD. Pelatihan Mentor SEPEDA KEREN menggunakan kurikulum, silabus dan rencana atau tahapan pembelajaran yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan mitra pembangunan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun organisasi sektoral dari beberapa OPD yang ada dan berkegiatan di Kabupaten Trenggalek dan Jawa Timur.



Kader SEPEDA KEREN adalah individu yang berdomisili di Desa dalam lingkup Kabupaten Trenggalek dan direkrut oleh Mentor SEPEDA KEREN yang memiliki jiwa pengabdian dan kerelawanan yang tinggi serta berkomitmen untuk ikut serta memajukan masyarakat Desa dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan, pendampingan dan penguatan khususnya pada kelompok rentan (perempuan, disabilitas, anak dan lainnya) di Desa. Berbagai upaya itu dilakukan dengan kegiatan yang terencana dan tahapan yang jelas dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan di dalam proses pembangunan untuk membuka akses, mengelola manfaat dan menjalankan fungsi atau mengisi posisi kontrol dalam seluruh tahapan atau proses pembangunan Desa dan Daerah.

Kader SEPEDA KEREN dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu meliputi pelatihan dalam kelas, praktik lapangan serta refleksi dan evaluasi oleh Mentor SEPEDA KEREN menggunakan kurikulum, silabus dan rencana atau tahapan pembelajaran yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan mitra pembangunan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat maupun organisasi sektoral dari beberapa OPD yang ada dan berkegiatan di Kabupaten Trenggalek dan Jawa Timur.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan SEPEDA KEREN adalah sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup dalam upaya mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan..

Tujuan dari penyelenggaraan SEPEDA KEREN adalah mempersiapkan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

**Visi SEPEDA KEREN** adalah “Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat”

Misi SEPEDA KEREN adalah:

- a. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif
- b. Menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif (gender champion)
- c. Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan
- d. Mendorong pengelolaan sumberdaya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan

- POKOK BAHASAN** : **2. SEPEDA KEREN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **2.2 PRINSIP DAN PERAN MENTOR SEPEDA KEREN**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan prinsip SEPEDA KEREN
  2. Menjelaskan penerima manfaat SEPEDA KEREN
  3. Menjelaskan perannya sebagai mentor SEPEDA KEREN
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.


## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
1. <b>Pengantar</b> a. Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.	5'	Lembar Penyajian SPB (M.2.2.1)
2. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b> a. Fasilitator mengajak peserta mengingat kembali pengertian, visi, misi dan tujuan SEPEDA KEREN b. Fasilitator menjelaskan Lembar Informasi Prinsip SEPEDA KEREN (M.2.2.2) atau menayangkan media bantu Ppt yang telah disiapkan untuk memandu curah pendapat; c. Fasilitator mengajak peserta memahami setiap prinsip SEPEDA KEREN; d. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.	15'	Lembar Informasi Prinsip SEPEDA KEREN (M.2.2.2)
3. <b>Ceramah, curah pendapat dan Tanya Jawab</b> a. Fasilitator menjelaskan Lembar Informasi Penerima Manfaat SEPEDA KEREN (M.2.2.3) atau menayangkan media bantu Ppt yang telah disiapkan untuk menjelaskan penerima manfaat SEPEDA KEREN. b. Fasilitator mengajak peserta mendefinisikan mentor dan Kader SEPEDA KEREN c. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas plano dan jawaban peserta; d. Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi peran mentor SEPEDA KEREN berdasarkan definisi mentor; e. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas plano dan merangkum jawaban peserta; f. Fasilitator menjelaskan Lembar Informasi pengertian Mentor, Kader, peran mentor dan Kader SEPEDA KEREN atau menayangkan media bantu Ppt yang telah disiapkan (M.2.2.4, M.2.2.5, M.2.2.6); g. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran dan menjelaskan Bagan Alur Pelaksanaan SEPEDA KEREN (M.2.2.8) atau menayangkan media bantu Ppt yang telah disiapkan.	20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Informasi Penerima Manfaat SEPEDA KEREN (M.2.2.3)</li> <li>• Lembar Informasi pengertian Mentor SEPEDA KEREN (M.2.2.4)</li> <li>• Lembar Informasi pengertian Kader SEPEDA KEREN (M.2.2.5)</li> <li>• Slide Peran Mentor dan Kader SEPEDA KEREN (M.2.2.6)</li> <li>• Bagan Alur Pelaksanaan SEPEDA KEREN (M.2.2.7)</li> <li>• Bahan Bacaan Penyelenggaraan SEPEDA KEREN (M.2.2.8)</li> </ul>
4. <b>Penegasan</b> a. Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan pentingnya komitmen kerelawanan dan pemahaman mentor terhadap prinsip dan perannya dalam memfasilitasi SEPEDA KEREN mengacu pada Bahan Bacaan Kerelawanan (M.2.2.9) dan Potret Relawan (M.2.2.10).	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Bacaan Kerelawanan (M.2.2.9)</li> <li>• Bahan Bacaan Potret Relawan (M.2.2.10)</li> </ul>

## LEMBAR INFORMASI PRINSIP SEPEDA KEREN



## LEMBAR INFORMASI PENERIMA MANFAAT SEPEDA KEREN



- Komunitas perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya
- Mentor SEPEDA KEREN tingkat kabupaten
- Kader SEPEDA KEREN di tingkat kecamatan dan/atau desa
- Forum PUSPA
- Pemerintah desa
- Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

## M. 2.2.4

## LEMBAR INFORMASI PENGERTIAN MENTOR SEPEDA KEREN

**MENTOR SEPEDA KEREN?**

- ☑ Individu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek
- ☑ Direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
- ☑ Memiliki jiwa pengabdian dan kerelawanan yang tinggi
- ☑ Berkomitmen untuk ikut serta memajukan masyarakat Trenggalek khususnya kelompok rentan
- ☑ Dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu, mencakup:
  - Pelatihan dalam kelas
  - Praktik lapangan
  - Refleksi dan evaluasi

## M. 2.2.5

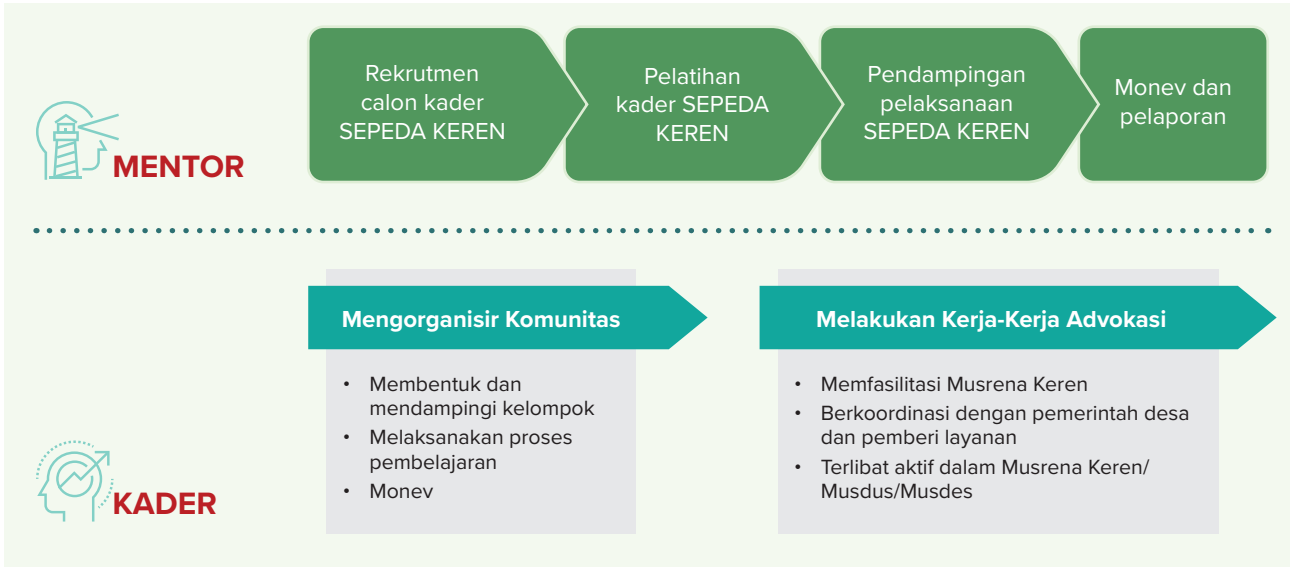
## LEMBAR INFORMASI PENGERTIAN KADER SEPEDA KEREN

**KADER SEPEDA KEREN?**

- ☑ Individu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek
- ☑ Direkrut oleh Mentor SEPEDA KEREN
- ☑ Memiliki jiwa pengabdian dan kerelawanan yang tinggi
- ☑ Berkomitmen untuk:
  - Ikut serta memajukan masyarakat desa
  - Melakukan berbagai upaya yang terencana dan tahapan yang jelas untuk mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan
- ☑ Dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu oleh Mentor SEPEDA KEREN, mencakup:
  - Pelatihan dalam kelas
  - Praktik lapangan
  - Refleksi dan evaluasi

M. 2.2.6

## LEMBAR INFORMASI PERAN MENTOR DAN KADER SEPEDA KEREN



M. 2.2.7

## LEMBAR INFORMASI BAGAN ALUR PELAKSANAAN SEPEDA KEREN

PERSIAPAN					PELAKSANAAN					
Rekrutmen Mentor	ToT Mentor (10 hari)			Penguuhan Mentor (wisuda)	Rekrutmen Kader	ToT Kader (6 - 8 bulan)			Penguuhan Kader (wisuda)	LAPORAN PELAKSANAAN
	Kelas (5 hari)	Praktek Lapangan (5 hari)	Refleksi & Evaluasi (5 hari)			Kelas	Pengorganisasian Komunitas	Advokasi		
					Refreshing Mentor					
					Pelatihan Tematik Mentor/Kader					
					Pembentukan/Penguatan Forum					
					Pengembangan Media Komunitas					
					Advokasi					
MONITORING & EVALUASI										

## BAHAN BACAAN

**PENYELENGGARAAN SEPEDA KEREN****Prinsip penyelenggaraan Sepeda Keren**

- a. Penghormatan terhadap martabat. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia termasuk menghormati keragaman manusia dan kemanusiaan serta otonomi individu dan tidak melakukan tindakan diskriminasi.
- b. Inklusif. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal mendorong perubahan cara pandang, pendekatan dan pelaksanaan mekanisme pembangunan daerah dan desa ke arah yang inklusif. Yakni mengupayakan terbukanya akses mengambil peran, menerima dan mengelola manfaat terhadap sumber daya serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan kepada seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat tanpa ada satupun yang ditinggalkan.
- c. Kesetaraan. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menjadikan setiap orang yang terlibat memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan. Baik dalam dan di antara kelembagaan/ organisasi pelaksana maupun dalam setiap proses atau tahapan pelaksanaannya.
- d. Partisipasi penuh. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal berpartisipasi penuh dan aktif dalam proses atau setiap tahapan pembangunan dan kegiatan lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita dalam mengisi pembangunan.
- e. Kejelasan informasi (transparansi). Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menerapkan transparansi dan membuka akses informasi bagi siapa saja yang membutuhkan dan berkepentingan.
- f. Keselamatan dan Perlindungan. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk perlakuan khusus dan perlindungan lebih kepada kelompok disabilitas, anak dan lansia serta memastikan kesediaan anak sebelum dilibatkan.
- g. Cukup sumberdaya. Setiap yang terlibat dalam Sepeda Keren berupaya optimal memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan cukup baik dengan cara menggali potensi internal maupun dengan cara bekerja sama dengan pihak lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita dalam mengisi pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Penerima Manfaat**

- a. Mentor SEPEDA KEREN tingkat Kabupaten
- b. Fasilitator SEPEDA KEREN di tingkat kecamatan dan/atau desa
- c. Komunitas perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya
- d. Forum PUSPA
- e. Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

## Peran Mentor dan Kader SEPEDA KEREN

Dalam menjalankan tugasnya, Mentor SEPEDA KEREN berperan:

- a. Merekrut Kader SEPEDA KEREN
- b. Melatih Kader SEPEDA KEREN
- c. Melakukan pendampingan kelompok atau forum yang terbentuk
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN di masing-masing Desa/Kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- f. Memfasilitasi Musrena keren di Kecamatan dan kabupaten

Dalam menjalankan tugasnya, Kader SEPEDA KEREN berperan:

- a. Pengorganisasian komunitas yakni membentuk dan mendampingi kelompok, melakukan pembelajaran serta melakukan monitoring dan evaluasi
- b. Memfasilitasi Musrena Keren
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Desa dan pemberi layanan
- d. Terlibat aktif dalam Musrenbangdes



## BAHAN BACAAN

# KERELAWANAN

Kerelawanan merupakan sumbangan masyarakat bagi pengembangan pembangunan masyarakat sipil. Relawan memiliki peranan penting dalam pembangunan terutama apabila dikaitkan dengan pengembangan sector nirlaba khususnya organisasi nirlaba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Masyarakat sipil yang kuat hanya mungkin dibangun dengan dukungan keberadaan organisasi nirlaba yang berdaya dan filantropi yang efektif. Kerelawanan juga merupakan proses pendidikan masyarakat. Tidak ada seorang pun bersedia menjadi relawan tanpa menanyakan “saya bekerja untuk apa?” Lembaga harus menjelaskan isu apa yang sedang diperjuangkan secara menarik sehingga hati dan pikiran calon relawan menjadi terbuka serta secara sukarela bersedia menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membantu lembaga mencapai visi dan misi lembaga.

Masyarakat sipil yang kuat dapat dipastikan memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. Kerelawanan menjadi elemen penting untuk pembangunan perekonomian negara dan masyarakat sipil. Sehingga pengelolaan kerelawanan menjadi salah satu prioritas negara. Di setiap provinsi setiap negara memiliki pusat pengelolaan kerelawanan. Bahkan di setiap lembaga yang membutuhkan jasa relawan pasti memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap manajemen kerelawanan lembaga.

Dalam budaya Indonesia kerelawanan sebenarnya bukan hal baru. Sejak jaman dahulu, kerelawanan sudah mengakar dalam tradisi dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerelawanan yang paling umum dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia terutama di pedesaan adalah gotong royong dalam kegiatan pembangunan rumah, pembangunan sarana sosial, perkawinan, maupun kematian. Para pemuda, orang tua, dan wanita secara sukarela memberikan kontribusi baik berupa tenaga, uang dan sarana sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan perkotaan, nilai-nilai kerelawanan sudah mulai luntur. Di kota, setiap tenaga atau bantuan yang dikeluarkan selalu diukur dengan uang atau materi. Dalam kegiatan semacam kerja bakti atau ronda, warga lebih memilih membayar orang atau mewakilkan ke pembantu daripada harus terkena giliran.

Namun demikian, seiring dengan menjamurnya lembaga nirlaba atau LSM di Indonesia paska-reformasi dan rentetan bencana alam serta kerusakan yang kuantitasnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, semangat kerelawanan (*voluntarism*) dan solidaritas kemanusiaan (*genuine solidarity*) nampak semakin menonjol. Bahkan Prof. Mitsua Nakamura, research fellow di Harvard University mengatakan bahwa meningkatnya kerelawanan dan solidaritas kemanusiaan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan partisipasi masyarakat sipil (*civil society*) dan kemungkinan besar dapat menjadi sebuah faktor politik yang penting di masa mendatang. Pertumbuhan partisipasi di masa mendatang. Pertumbuhan partisipasi masyarakat sipil tersebut harus dipertahankan bahkan diperkuat agar semangat solidaritas kemanusiaan dan kerelawanan di masyarakat Indonesia tidak hilang.

Pemerintah Indonesia juga mulai memandang pentingnya peran kerelawanan dalam pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan kerelawanan dan meningkatkan kapasitas relawan di Indonesia, pada bulan Agustus 2003 Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bekerjasama dengan UNDP membuka Pusat Pengembangan Kerelawanan (*Volunteer Development Center* atau VDC). Di samping sebagai pusat informasi relawan dan kerelawanan di Indonesia, VDC juga berfungsi sebagai forum bagi relawan, organisasi kerelawanan dan stakeholder yang lain untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, skill dan keahlian.

Peranan relawan perlu dipandang sebagai salah satu sumber daya lembaga yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai visi dan misi lembaga. Karenanya relawan perlu dikelola secara profesional di mana sistem pendekatan manajemen kerelawanan yang dipakai hampir sama dengan sistem manajemen staf lembaga. Dengan adanya sistem manajemen kerelawanan yang bagus maka peran dan fungsi relawan akan dapat menjadi optimal dan akhirnya dapat membantu lembaga dalam mencapai misi lembaga.

## Apa dan Siapa Relawan

Relawan adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan. Menjadi relawan adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap sebuah visi tertentu. Hampir semua relawan yang terlibat dalam pekerjaan kerelawanan termotivasi oleh semangat untuk menolong orang lain sebagai bentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain. Tentu saja motivasi yang bersifat altruistik tersebut juga diikuti oleh motivasi-motivasi pribadi yang lain, misalnya keinginan untuk memperoleh pengalaman baru, mendapatkan teman baru, mendapatkan perspektif baru, menggali potensi atau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Melalui kerelawanan, relawan dapat saling belajar, dapat lebih memahami isu yang diminati secara lebih kritis, lebih mampu mengorganisasi diri dan sekaligus mampu melakukan aksi nyata dalam keterlibatannya di berbagai kegiatan.

## Prinsip Dasar Kerelawanan

### 1. Pilihan

Kesukarelawan harus merupakan pilihan bebas masing-masing individu tanpa paksaan dari siapa pun. Dorongan, dalam bentuk apapun, untuk terlibat dalam kesukarelawan harus tidak berakibat pada paksaan. Kebebasan untuk menjadi relawan sama halnya dengan kebebasan untuk tidak terlibat.

### 2. Keragaman

Kesukarelawan harus terbuka bagi siapa pun, tanpa membedakan latar belakang, umur, ras, orientasi seksual, kepercayaan/agama, dsb. Keterlibatan menjadi relawan dapat membangun keterikatan, membantu sekelompok orang yang beragam sehingga ia merasa berguna dengan keterlibatannya itu. Penghalang atau batasan-batasan sosial dapat diatasi oleh keterampilan, pengalaman, percaya diri dan kontak yang didapat ketika membantu yang lain. Prinsip kesempatan yang sama merupakan dasar untuk mendukung keragaman.

### 3. Timbal balik

Relawan menawarkan untuk berkontribusi tanpa harus dibayar, tetapi sebagai gantinya mendapatkan manfaat dengan cara lain. Menyediakan waktu dan keterampilan secara sukarela harus diakui sebagai upaya untuk mendukung hubungan timbal balik dimana relawan menerima sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Manfaat yang diharapkan oleh relawan termasuk perasaan pencapaian yang berguna, keterampilan yang berguna, pengalaman dan bertambahnya kontak/relasi, pergaulan dan kesenangan, dan keterlibatannya dalam kehidupan berorganisasi.

### 4. Pengakuan

Pengakuan secara eksplisit terhadap nilai sumbangan relawan terhadap organisasi, komunitas, maupun tujuan sosial yang lebih luas, merupakan dasar untuk membangun hubungan yang adil antara relawan dengan organisasi.

*Disarikan dari:*

*(Nurani Galuh Savutri dalam "Panduan Manajemen Kerelawanan, Ford Foundation – PIRAC)*

*Sri Indiyastuti & Cecep AB, Relawan Sebagai Agen Perubahan, dalam Aliansi Vol. 31 No. XXXV Agustus - September 2006)*

# FITRAH MANUSIA

- POKOK BAHASAN** : **3. Fitrah Manusia**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Memahami identitas diri
  2. Memahami individu sebagai makhluk hidup dan siklus kehidupan
  3. Memahami kesehatan reproduksi dan seksualitas
  4. Memahami peran individu dalam keluarga dan masyarakat
- SUB POKOK BAHASAN** : **3.1 IDENTITAS DIRI**
- 3.2 INDIVIDU SEBAGAI MAKHLUK HIDUP DAN SIKLUS KEHIDUPAN**
- 3.3 KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS**
- 3.4 PERAN INDIVIDU DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT**
- WAKTU** : 5 Jampel @ 45 menit = 225 menit

**POKOK BAHASAN** : **3. FITRAH MANUSIA**

**SUB POKOK BAHASAN** : **3.1 IDENTITAS DIRI**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

Menjelaskan organ tubuh

Menjelaskan fungsi organ tubuh

Mampu mengidentifikasi sisi negatif, positif dan potensi dirinya

**WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<p>Lembar Penyajian PB (M.3.1.1)</p> <p>Lembar Penyajian SPB (M.3.1.2)</p>
<p>2. <b>Penugasan Kelompok-Pleno, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan materi sesi secara singkat dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator membagi kelompok menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung 1,2,3,4;</p> <p>c. Fasilitator memberikan intruksi kepada kelompok untuk menggambar tubuh manusia mengacu Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.3.1.3);</p> <p>d. Fasilitator meminta kepada satu orang perwakilan kelompok untuk tetap ditempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, sementara anggota kelompok yang lain berkunjung ke kelompok lainnya untuk mengamati, bertanya, memberi masukan atau butuh penjelasan lebih lanjut (teknik presentasi world café);</p> <p>e. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali gambar yang dihasilkan oleh masing masing peserta, mengajukan pertanyaan, memberikan input atau klarifikasi;</p> <p>f. Fasilitator membahas hasil identifikasi dan menyimpulkan.</p>	45'	Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.3.1.3)

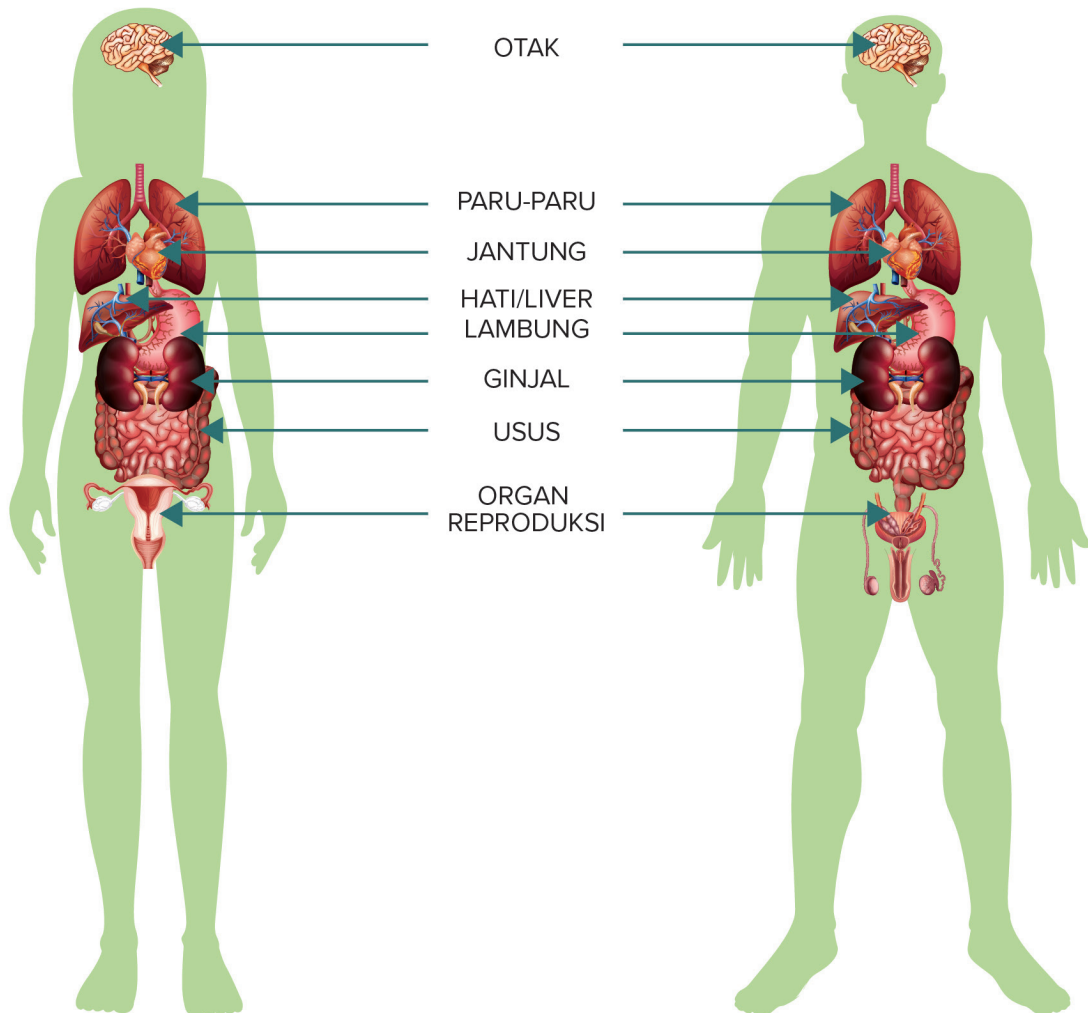
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Penugasan Individu dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator mempersilahkan seluruh peserta kembali ke tempat duduknya, dan menjelaskan tentang perlunya identifikasi sisi negatif, positif dan potensi diri;</p> <p>b. Fasilitator mengajak peserta untuk merenung mengidentifikasi sisi negatif, positif dan potensi yang ada pada dirinya masing-masing;</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta menggambarkan menyebutkan gambaran hasil perenungan diri tentang dirinya dengan simbol seperti bunga, air matahari, binatang, dll, pada kertas metaplan;</p> <p>d. Fasilitator meminta peserta menjelaskan arti simbol dan alasan mengapa memilih simbol tersebut lalu menempelkannya pada lembar kertas plano bergambar gunung yang sudah disediakan (M.3.1.4);</p> <p>e. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk menyimpulkan hasil-hasil penggambaran dirinya melalui simbol yang telah dipresentasikan;</p> <p>f. Fasilitator meminta peserta menuliskan hambatan dan potensi diri pada kertas meta plan dan menempelkannya pada kertas plano yang telah disiapkan (M.3.1.5);</p> <p>g. Fasilitator menayangkan dan menjelaskan Lembar Informasi Perbedaan Perempuan dengan Laki-laki dan Potensinya (M.3.1.6).</p>	30'	<p>Lembar Kerja Identifikasi Hambatan, Potensi Diri Dan Apa yang Bisa Dikembangkan (M.3.1.4)</p> <p>Gambar Gunung (M.3.1.5)</p> <p>Lembar Informasi Perbedaan Perempuan dengan Laki-laki dan Potensinya (M.3.1.6)</p> <p>Bahan Bacaan Struktur Kepribadian (M.3.1.7)</p> <p>Bahan Bacaan Cara Mengenal dan Mengembangkan Kepribadian (M.3.1.8)</p>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan pentingnya mengidentifikasi sisi negatif, positif dan potensi diri agar dapat menjadi Mentor/ Kader SEPEDA KEREN yang baik mengacu pada Bahan Bacaan Struktur Kepribadian (M.3.1.7) dan Mengenal dan Mengembangkan Kepribadian (M.3.1.8).</p>	10'	

## LEMBAR TUGAS DISKUSI KELOMPOK

GAMBARKAN TUBUH MANUSIA SECARA UTUH BERIKUT ORGAN TUBUH DAN FUNGSINYA BESERTA ASPEK POSITIF, NEGATIF DAN POTENSINYA :

1. Kelompok 1 menggambar laki laki
2. Kelompok 2 menggambar perempuan
3. Kelompok 3 menggambar laki laki disabilitas
4. Kelompok 4 menggambar perempuan disabilitas

Seluruh gambar dilengkapi dengan penjelasan organ tubuh beserta sisi negatif dan positif.



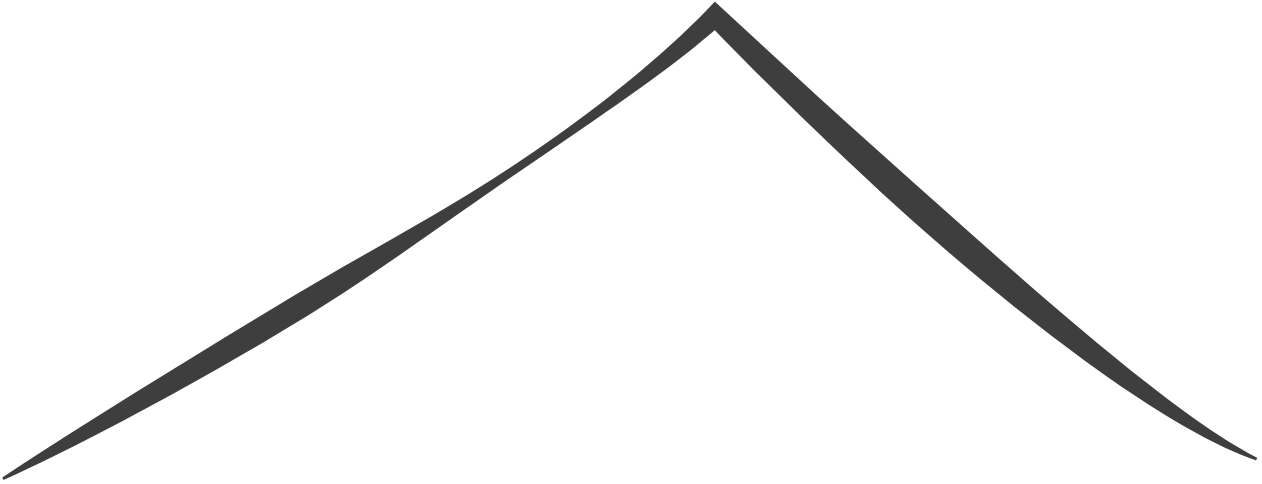


## M. 3.1.4

HAMBATAN	POTENSI DIRI	APA YANG HARUS DIKEMBANGKAN

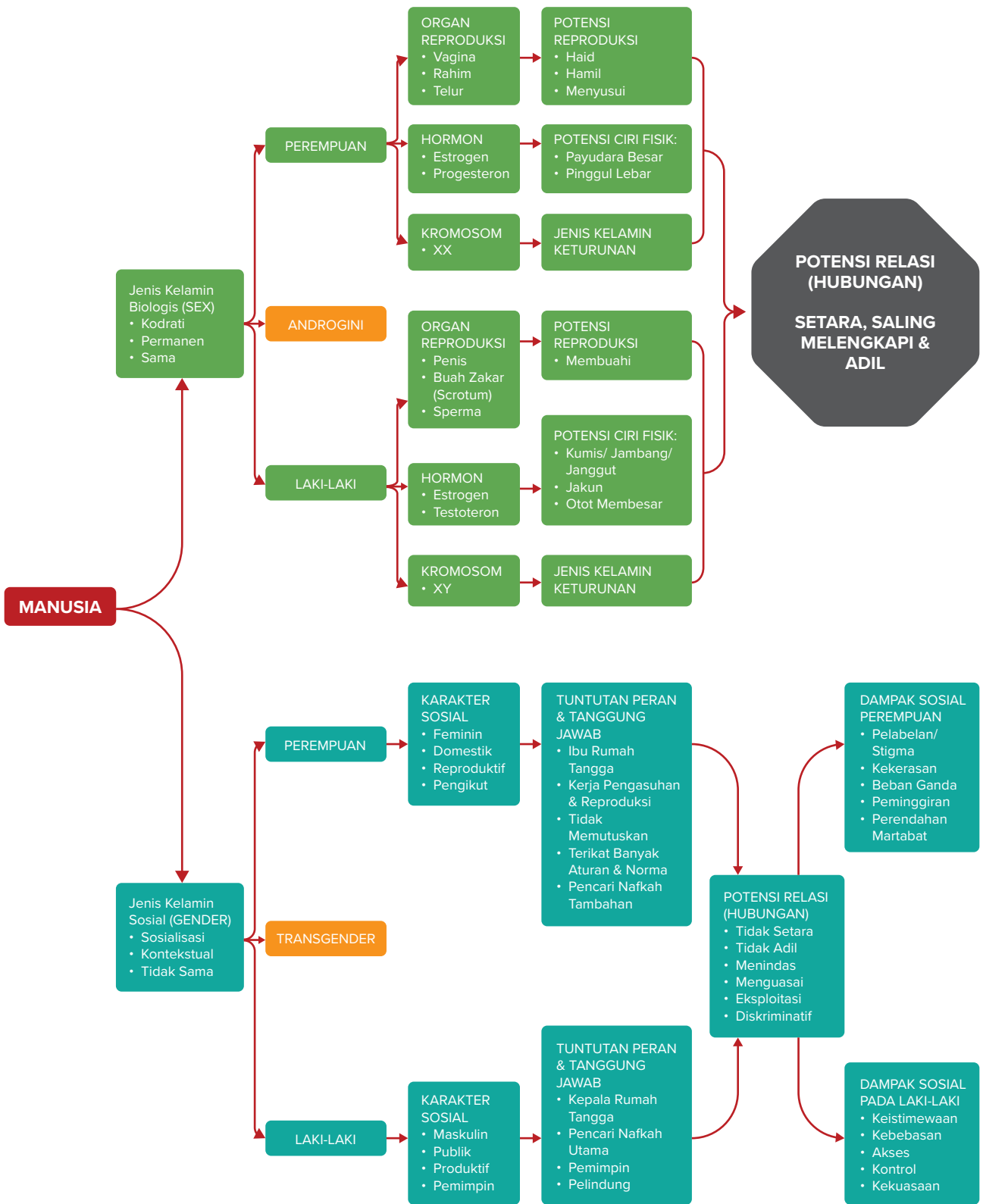
## GAMBAR GUNUNG

(SILAHKAN PILIH GAMBAR YANG SESUAI)



M. 3.1.6

# PERBEDAAN PEREMPUAN DENGAN LAKI-LAKI DAN POTENSINYA



Sumber: Disarikan oleh Nani Zulminarni untuk bahan pelatihan PEKKA

## BAHAN BACAAN

**CARA MENGENALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI**

Setiap orang tentu akan memiliki potensi di dalam dirinya, meski mungkin saja jumlah potensi ini tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam potensi diri inilah yang kemudian akan membantu kita untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dan kendala yang kita temui di dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya untuk memiliki potensi diri yang maksimal di dalam hidup ini, agar semua bisa berjalan dengan lebih mudah dan menyenangkan bagi diri kita sendiri.

Orang yang tidak mampu menemukan potensi dirinya sangat merugi, mengingat potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Ketika seseorang tidak mampu menemukan potensi dirinya, maka besar kemungkinan orang tersebut hanya akan melakukan pencapaian yang itu-itu saja sepanjang hidupnya. Orang tersebut tidak akan bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai titik terbaik di dalam kehidupannya, atau bahkan bisa jadi lebih buruk dari kondisi tersebut. Beberapa cara berikut ini, yang bisa membantu untuk melakukannya:

**1. Sudah Berapa Besar dalam Memahami Diri Sendiri?**

Orang lain mungkin kenal dan paham dengan diri Anda, terutama orang-orang terdekat yang memang berasal dari lingkungan pribadi. Namun bukan orang-orang ini yang dapat menemukan potensi diri, sebab hal seperti ini seharusnya Anda temukan sendiri di dalam diri sendiri. Penting untuk menyadari apa saja yang Anda inginkan dan apa saja yang akan membuat bahagia, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian hidup ke depannya. Apa saja yang akan membuat sedih dan bagaimana mengatasi hal tersebut jika sampai terjadi, sehingga tidak terpuruk dan roboh ketika sewaktu-waktu dihadapkan pada sebuah kesedihan yang dalam. Hal tersulit dalam hidup ini adalah mengatasi diri sendiri dan bukan mengatasi orang lain atau musuh kita sekalipun, sebab kita seringkali tidak ingin bercermin dan melihat semua yang ada di dalam diri kita (keburukan dan kebaikan).

**2. Apa yang Ingin Dicapai dalam Hidup?**

Hidup ini harus dijalani dengan satu tujuan, di mana titik inilah yang akan dijadikan sebagai sebuah pencapaian maksimal yang akan membuat bahagia. Bagaimana mungkin seseorang menjalani hidup tanpa tujuan yang tepat, bukankah dia akan selalu “hilang” atau bahkan tenggelam di jalan yang akan membawanya entah ke mana?

Tentukan dan milikilah tujuan hidup mulai sekarang, atau jika sudah memilikinya, maka mulailah menetapkan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan hidup tidaklah selalu harus yang muluk-muluk dan luar biasa, sebab sesuatu yang sederhana juga terkadang luar biasa pada pandangan seseorang. Tujuan hidup inilah yang akan menjadi titik di mana Anda merasa “utuh” dan berhasil dengan sempurna.

**3. Seberapa Besar Upaya yang Dikeluarkan dalam Mencapai Tujuan Hidup?**

Terkait dengan tujuan hidup, Anda tentu wajib melakukan semua yang terbaik untuk mencapainya. Bukan hanya itu saja, berbagai upaya dan juga kemampuan yang dimiliki haruslah dikerahkan dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, seberapa besar Anda telah berupaya selama ini? Tujuan hidup bukanlah mimpi panjang yang indah dan harus dirawat seumur hidup, sebab ini adalah sesuatu yang harus direalisasikan dan

segera dicapai dengan baik. Untuk mencapai ini, kerahkan semua yang Anda bisa, termasuk semua potensi diri Anda yang belum pernah digunakan selama ini.

#### **4. Sudah Yakin pada Kemampuan yang Dimiliki?**

Percaya diri itu penting, bahkan sangat penting untuk selalu dimiliki di dalam diri. Namun di luar sana, ada banyak sekali orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup di dalam diri mereka, meskipun mereka memiliki banyak kemampuan di dalam diri mereka. Jika selalu takut jatuh, maka bagaimana Anda akan berlari dengan kencang dan melalui semua rintangan yang ada? Jangankan berlari, berjalan saja mungkin akan selalu penuh pertimbangan, bahkan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan.

Percayalah pada kemampuan diri, bahwa apapun masalah yang akan terjadi nanti, maka akan siap dan bisa mengatasinya dengan baik. Jangan mengecilkan potensi diri dengan membunuh rasa percaya diri Anda sendiri, sebab hal ini akan sangat merugikan diri sendiri.

#### **5. Apa Motivasi Terbesar ?**

Untuk mencapai titik yang tinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab akan dibutuhkan sebuah kerja keras yang maksimal untuk mencapai hal tersebut dengan baik. Motivasi adalah sesuatu yang akan membuat kembali “hidup”, meskipun telah hampir mati ketika berupaya untuk mencapai tujuan hidup. Jadi sudah jelas, Anda harus memiliki sesuatu yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai motivasi hidup. Sebuah motivasi yang kuat juga akan membantu untuk menggali semua potensi diri, sebab akan membutuhkan kombinasi kedua hal tersebut untuk mencapai tujuan hidup.

#### **6. Bisakah Memaafkan Diri Sendiri?**

Marah kepada diri sendiri atau kecewa atas perbuatan diri sendiri, ini bukan sebuah masalah yang besar, selama bisa memaafkan diri sendiri setelahnya. Penting untuk sesekali “memaklumi” diri sendiri, agar bisa memaafkan diri ketika kecewa atau marah atas sebuah hal yang terjadi di luar keinginan.

#### **7. Mampukah Menerima Kekurangan dan Mengatasinya?**

Tidak ada manusia yang sempurna. Pahami hal tersebut dengan baik, agar bisa menerima kekurangan diri sendiri. Sadarilah kekurangan dan berusahalah dengan keras untuk memperbaiki / mengatasinya. Belajar, belajar, dan belajarlal hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

#### **8. Berusaha Memahami Diri Sendiri secara Utuh**

Pada dasarnya semua orang memiliki potensi diri, meskipun tidak semua orang menyadari hal ini di dalam diri mereka. Bukan orang lain, namun diri sendirilah yang harusnya paham dan menemukan potensi tersebut di dalam diri. Mulailah menggali dan memahami diri sendiri, agar bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri.

Sumber: <https://www.cermati.com/artikel/cara-mengenali-dan-mengembangkan-potensi-diri>

**POKOK BAHASAN** : **3. FITRAH MANUSIA**

**SUB POKOK BAHASAN** : **3.2 INDIVIDU SEBAGAI MAKHLUK HIDUP DAN SIKLUS KEHIDUPAN**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan tumbuh kembang manusia dalam siklus kehidupan
2. Menjelaskan perubahan fisik dan perilaku pada setiap tahapan pertumbuhan
3. Mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pada setiap tahapan tumbuh kembang

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit

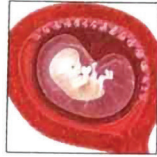
## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b> Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.3.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah dan Curah Pendapat</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator memberikan penjelasan mengenai tentang tumbuh kembang manusia dengan menggunakan Lembar Informasi Tumbuh Kembang Janin dalam Kandungan (M.3.2.2);</p> <p>c. Fasilitator menjelaskan proses perubahan fisik manusia dengan menggunakan Lembar Informasi Siklus Kehidupan Manusia (M.3.2.3);</p> <p>d. Fasilitator mengajak untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dalam proses kehidupan manusia mengacu pada Lembar Kerja Identifikasi Persoalan dalam Siklus Kehidupan Manusia (M.3.2.4);</p> <p>e. Dalam kelompok yang sama dengan kelompok Identifikasi Diri sesi sebelumnya;</p> <p>f. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran mengacu pada Bahan Bacaan Siklus Kehidupan Sebuah Keluarga (M.3.2.5).</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Informasi Tumbuh Kembang Janin Dalam Kandungan (M.3.2.2)</li> <li>Lembar Informasi Siklus Kehidupan Manusia (M.3.2.3)</li> <li>Lembar Kerja Identifikasi Persoalan dalam Siklus Kehidupan Manusia (M.3.2.4)</li> <li>Bahan Bacaan Siklus Kehidupan Sebuah Keluarga (M.3.2.5)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b> Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan tentang pentingnya merangkai siklus kehidupan dan kerentanan Disabilitas dan Non Disabilitas.</p>	10	

## LEMBAR INFORMASI TUMBUH KEMBANG JANIN DI DALAM KANDUNGAN



Usia 1 bulan



Usia 2 bulan



Usia 3 bulan



Usia 4 bulan



Usia 5 bulan



Usia 6 bulan



Usia 7 bulan



Usia 8 bulan



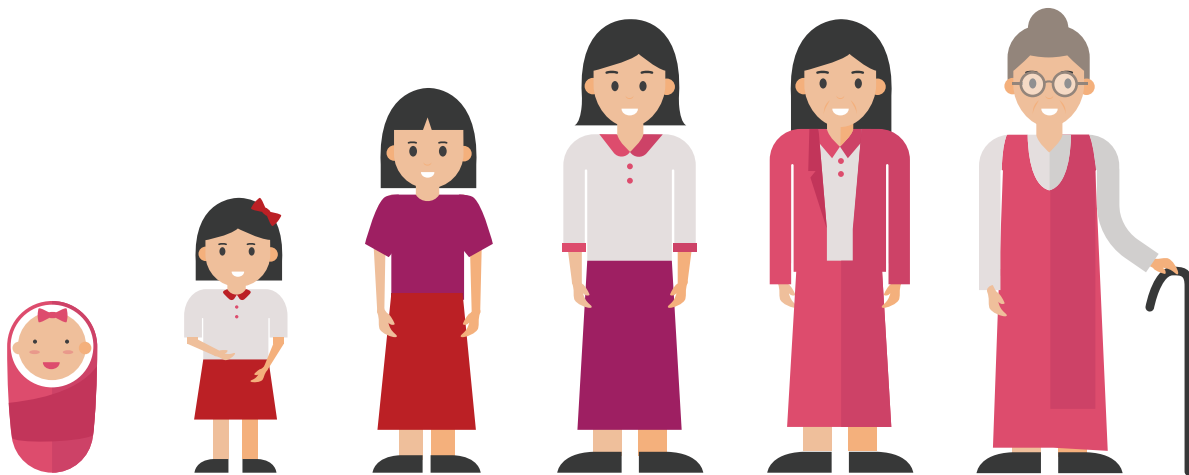
Usia 9 bulan



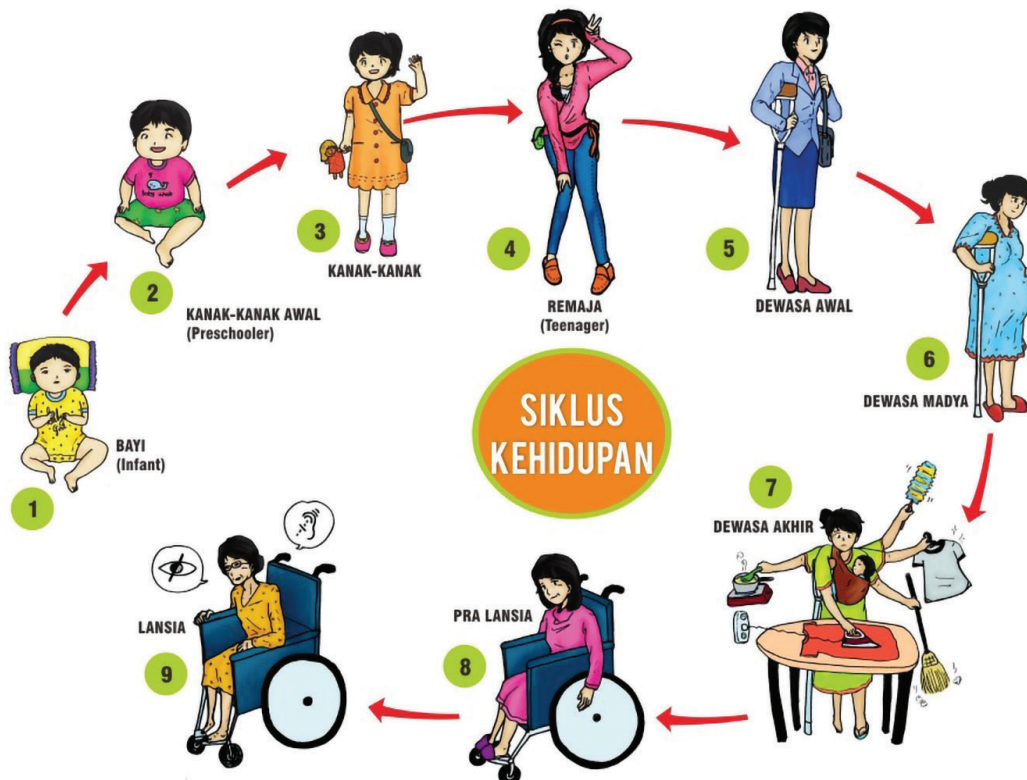
M. 3.2.3

## LEMBAR INFORMASI SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA

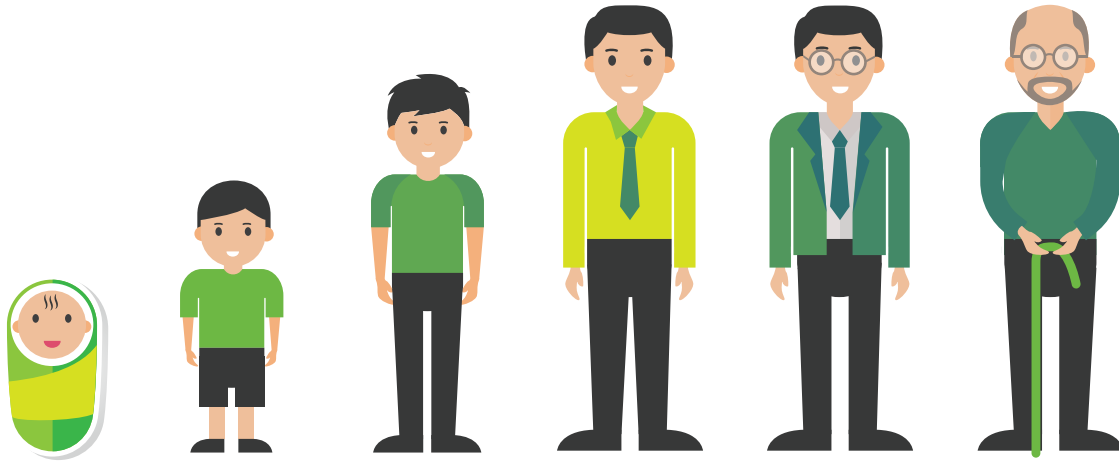
### Perempuan pada umumnya



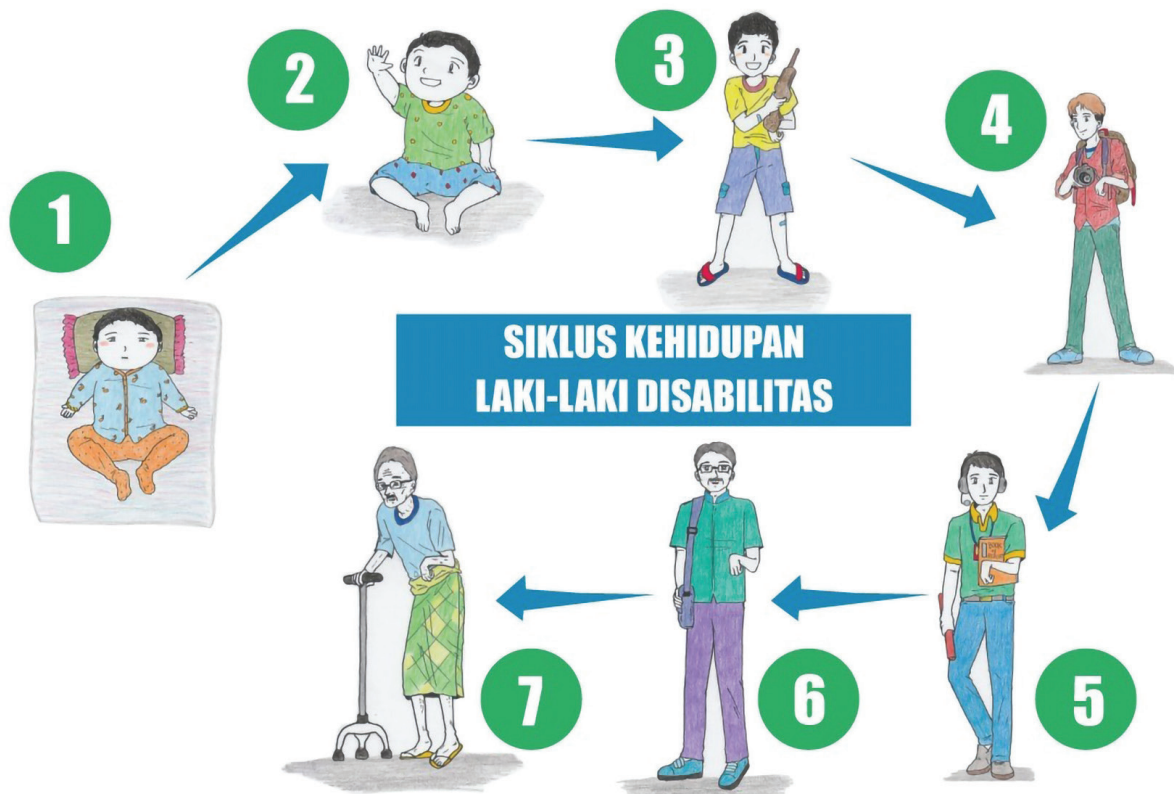
### Perempuan dengan disabilitas



## Laki-laki pada umumnya



## Laki-laki dengan disabilitas





## BAHAN BACAAN

**SIKLUS KEHIDUPAN SEBUAH KELUARGA**

Membangun kehidupan keluarga dimulai sejak masa pernikahan hingga menua bersama. Tentu saja setiap pasangan yang sedang membina rumah tangga ingin berhasil melewati setiap tangga kehidupan keluarga dengan mulus, namun beberapa pasangan tidak mengetahui gambaran tangga-tangga yang akan dinaiki, sehingga ia tidak bisa memprediksi potensi kesempatan dan ancaman yang mungkin saja menerpa kehidupannya. Oleh karena itu, untuk bisa sukses melewati tangga-tangga kehidupan keluarga, setiap pasangan perlu memahami tahapan-tahapan yang akan dilalui. Dalam memahami potensi dan permasalahan yang ada, tentunya diperlukan strategi untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin terjadi pada tangga-tangga yang sedang kita lalui.

Tangga pertama, **masa pernikahan**, dimulai sejak menikah hingga seorang istri mulai menyadari bahwa dirinya telah mengandung bayi. Potensi konflik pada masa ini salah satunya diakibatkan hubungan menantu dan mertua yang kurang harmonis, hal ini semakin besar kemungkinan terjadi pada pasangan yang tinggal di rumah mertua. Masa ini merupakan masa yang begitu indah, sehingga bagi sebagian pasangan kesederhanaan tetap menjadi kebahagiaan. Pada pasangan baru menikah, baik suami maupun istri memungkinkan untuk bekerja, karena istri belum memiliki anak yang harus ia rawat, sehingga sumber pendapatan bisa berasal dari keduanya.

Tangga kedua, **masa kehamilan**. Masa ini merupakan masa berbahagia, bercampur haru, dan cemas karena akan hadir sang buah hati. Pengeluaran keluarga akan mengalami peningkatan, namun pendapatan bisa saja menurun karena istri terpaksa harus berhenti bekerja akibat kondisi kehamilannya. Hal yang disarankan adalah senantiasa memperhatikan dengan benar antara kebutuhan dan keinginan.

Tangga ketiga, **keluarga memiliki bayi**. Pada saat anak lahir maka anggota keluarga bertambah, secara otomatis pengeluaran pun bertambah. Ibu menyusui memerlukan gizi yang seimbang, dengan porsi makan yang lebih besar dari pada biasanya, apalagi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Tangga keempat, **keluarga dengan anak pra-sekolah**. Anak usia pra-sekolah berada pada rentang usia sekitar 3-5 tahun, mereka begitu aktif bereksplorasi dan ingin tau banyak hal. Masa ini anak memerlukan stimulasi yang optimal untuk merangsang tumbuh kembang yang optimal. Tugas utama perkembangan anak pada masa ini adalah bermain dan bereksplorasi, diperlukan lingkungan yang aman, luas, dan nyaman untuk anak bermain.

Tangga kelima, **keluarga dengan anak usia sekolah**. Anak usia sekolah berada pada rentang usia sekitar 6-12 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai mengikuti pembelajaran formal di sekolah dan memiliki teman-teman baru. Biasanya anak usia sekolah tumbuh begitu pesat, anak sering berganti sepatu karena sudah tidak cukup, berganti rok atau celana sekolah karena anak begitu cepat bertumbuh tinggi. Masa ini sering disebut usia geng, dimana anak ingin segalanya sama dengan teman-temannya, merasa minder jika tidak bisa memiliki barang yang sama dengan teman sepermainannya, untuk mengatasi hal ini, ajarilah anak hidup sederhana sejak dini.

Tangga keenam, **keluarga dengan anak usia remaja**. Anak usia remaja berada pada rentang usia 13-18 tahun. Pada masa ini anak sudah mandiri, sehingga kedua orang tua bisa fokus bekerja, menambah penghasilan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, orang tua bisa membantu dan menyemangati anak untuk berprestasi. Agar anak tidak menjadi remaja nakal, orang tua harus menyeimbangkan kontrol dan kebebasan kepada anak remajanya, tidak terlalu mengekang dan tidak juga terlalu membiarkan.

Selanjutnya memasuki tangga ketujuh, yaitu **keluarga masa launching**. Masa launching adalah masa anak meninggalkan rumah karena alasan menikah, bekerja, atau melanjutkan pendidikan. Masa ini berlanjut hingga anak terakhir meninggalkan rumah (empty nest.). Saat anak menikah, orang tua disarankan membantu anak mempertimbangkan biaya pernikahan yang efisien.

Tangga kedelapan, **keluarga dewasa menengah dan masa empty nest** (sarang kosong). Pada masa ini orang tua lebih leluasa untuk bekerja karena anak-anak sudah keluar rumah bahkan banyak orang tua yang sedang mencapai karir puncak.

Tangga terakhir (kesembilan), **keluarga lansia**. Tahap akhir dari siklus kehidupan keluarga dimulai ketika tiba masa pensiun atau masa menua bersama, lalu meninggalkannya salah satu pasangan hingga keduanya meninggal.

Sukses melewati setiap tahapannya hingga menua bersama dengan bahagia adalah harapan setiap pasangan. Selamat melewati setiap anak tangga kehidupan keluarga anda dengan penuh kebahagiaan

Sumber: <https://www.kompasiana.com/yuninurafiah/5c4c0c0b12ae9425094d1e65/terdiri-dari-berapa-tahapkah-siklus-kehidupan-sebuah-keluarga>

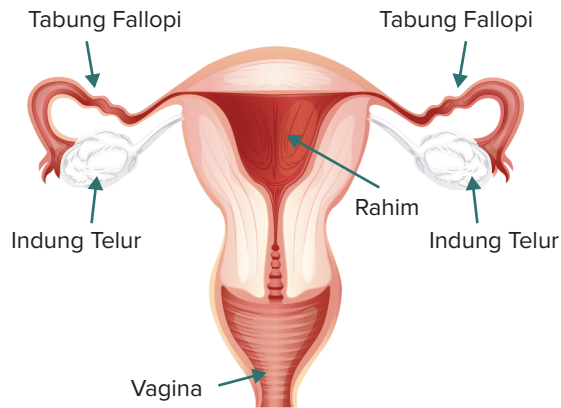
- POKOK BAHASAN** : **3. FITRAH MANUSIA**
- SUB POKOK BAHASAN** : **3.3. KESEHATAN REPRODUKSI**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Mampu mengidentifikasi masalah yang terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas
  2. Menjelaskan masalah yang terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

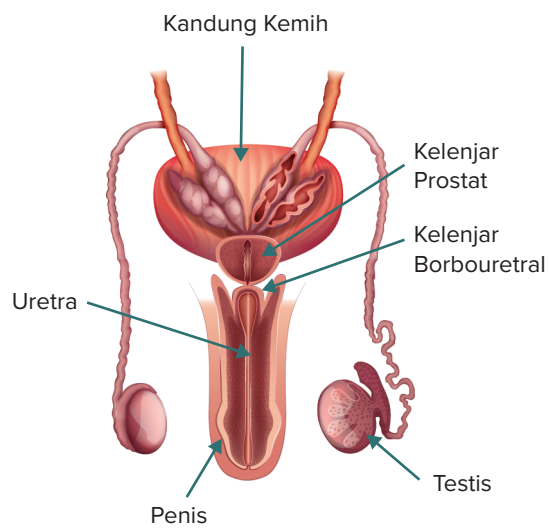
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.3.3.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah dan Curah Pendapat</b></p> <p>a. Fasilitator memberikan penjelasan mengenai materi tentang kesehatan reproduksi secara singkat</p> <p>b. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat gambar yang dibuat peserta pada sesi awal tentang identitas diri;</p> <p>c. Fasilitator menayangkan gambar organ reproduksi laki-laki dan perempuan (M.3.3.2) dan mengajak peserta mengidentifikasi perbedaan alat reproduksi yang ada dalam gambar dan mendiskusikannya;</p> <p>d. Fasilitator menjelaskan secara singkat kerentanan dan persoalan dalam kesehatan reproduksi manusia termasuk mitos dan fakta serta 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan HIV/AIDS (M.3.3.3, M.3.3.4 dan M.3.3.5);</p> <p>e. Fasilitator memutar Video Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas bagi Remaja Tuli dan Grahita dan mengajak peserta diskusi mengenai isi video tersebut;</p> <p>f. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran dan menjelaskan slide presentasi.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gambar Organ Reproduksi Perempuan dan Laki laki dan (M.3.3.2)</li> <li>Bahan Bacaan Anatomi Dan Fungsi Organ Reproduksi Manusia (M.3.3.3)</li> <li>Bahan Bacaan Ibu, Anak, Dan Masa Depan Indonesia dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (M.3.3.4)</li> <li>Bahan Bacaan Kesehatan Reproduksi dan HIV/Aids (M.3.3.5)</li> <li>Video Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas bagi Remaja Tuli dan Grahita</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk lebih mendalami persoalan spesifik yang dialami perempuan maupun laki-laki.</p>	10	

## LEMBAR INFORMASI ORGAN REPRODUKSI MANUSIA

### ORGAN REPRODUKSI PEREMPUAN



### ORGAN REPRODUKSI LAKI-LAKI





## BAHAN BACAAN

**ANATOMI DAN FUNGSI ORGAN REPRODUKSI MANUSIA****Organ Reproduksi Perempuan**

Organ luar terdiri atas area yang dikenal sebagai vulva dengan struktur pembangun sepasang labia (bibir) bagian luar dan dalam yang menutupi klitoris, lubang saluran kencing dan liang peranakan (Vagina). Fungsi vagina adalah untuk senggama (koitus) dan melahirkan. Leher rahim adalah semacam pintu masuk yang bisa terbuka menuju rahim, sehingga janin bisa keluar selama proses persalinan. Rahim terbuat dari otot yang kuat dan nampak seperti lobang yang lebar. Di saat rahim kosong, bentuknya seperti buah alpokat yang muda dan segar. Rahim juga adalah sebuah tempat yang elastis, dimana janin bisa tumbuh. Tuba falopi adalah saluran yang digunakan ovum selama perjalanannya dari ovarium menuju rahim. Ukuran kedua tuba falopi pada kedua sisi rahim adalah sebesar buah anggur. Ovum dihasilkan dari ovarium. Ketika seorang anak perempuan lahir, terdapat sekitar 1-2 juta sel ovum pada ovariumnya, yang akan berkurang menjadi 300-400 ribu sel ketika memasuki usia remaja.

## a. Bagian luar:

- Bibir luar/*labia majora*
- Bibir dalam/*labia minora*
- Kelentit (*clitoris*) yang sangat peka karena banyak syaraf, ini merupakan bagian yang paling sensitif dalam menerima rangsangan seksual.
- Lubang kemaluan (lubang vagina) terletak antara lubang kencing dan anus (dubur)
- Rambut kemaluan yang tumbuhnya saat perempuan memasuki usia pubertas

## b. Bagian dalam:

- Vagina (liang kemaluan/liang senggama), bersifat elastis dan dapat membesar serta memanjang sesuai kebutuhan fungsinya sebagai organ baik saat berhubungan seks, jalan keluarnya bayi saat melahirkan atau saluran keluarnya darah saat haid.
- Mulut rahim (*cervix*), saat berhubungan seks, sperma yang dikeluarkan penis laki-laki di dalam vagina akan masuk ke dalam mulut rahim hingga bertemu sel telur perempuan.
- Rahim (*uterus*) adalah tempat rumbuhnya janin hingga dilahirkan. Rahim dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan (hamil dan setelah melahirkan).
- Dua buah saluran telur (*tuba falopi*) yang terletak disebelah kanan dan kiri rahim. Sel telur yang sudah matang atau yang sudah dibuahi akan disalurkan ke dalam rahim melalui saluran ini.
- Dua buah indung telur (*ovarium*) kanan dan kiri. Ketika seorang perempuan lahir, ia sudah memiliki ovarium yang mempunyai sekitar setengah juta ova (cikal bakal telur). Tiap ova punya kemungkinan untuk berkembang menjadi telur matang. Dari sekian banyak ova, hanya sekitar 400 saja yang berhasil berkembang menjadi telur semasa usia produktif perempuan.

## Organ Reproduksi Laki-laki

Organ luar yang bisa dilihat adalah penis dan skrotum (kantong buah zakar). Organ tersebut berada diantara paha, lebih mudah dilihat daripada organ reproduksi wanita. Skrotum berisi Testis (sepasang) yang terbuat dari kulit yang sangat lembut dan keriput. Penis terbuat dari jaringan yang lembut serta elastis dan dari pembuluh darah. Urine keluar dari tubuh melalui lubang kecil pada ujung penis. Ketika seorang bayi laki-laki lahir, penis ditutupi oleh sejenis kulit luar. Untuk alasan kebersihan dan kesehatan, kulit penutup tersebut dipotong (disunat) sepanjang kira-kira 1-1,5 cm, sehingga penis mudah dibersihkan. Bagian organ reproduksi yang tak terlihat adalah testis, dimana sperma dihasilkan. Sperma menghasilkan 100-300 juta spermatozoa setiap harinya.

- Zakar atau penis. Berbentuk buak memanjang dan memiliki ujung berbentuk seperti helm disebut *Glans*. Ujung penis ini dipenuhi serabut syaraf yang peka. Penis tidak memiliki tulang, hanya daging yang dipenuhi dengan pembuluh darah. Penis dapat menegang yang disebut ereksi. Ereksi terjadi karena rangsangan yang membuat darah dalam jumlah besar mengalir dan memenuhi pembuluh darah yang ada di dalam penis, dan membuat penis menjadi besar, tegang dan keras.
- Buah zakar atau *testis*. Jumlahnya dua berbentuk bulat lonjong dan menggantung pada pangkal penis. Testis inilah yang menghasilkan sel kelamin pria (sperma).
- Saluran zakar atau *uretra*. Berfungsi untuk mengeluarkan air mani dan air seni.
- Kantong pelir atau *skrotum*, yaitu lapisan kulit yang agak berkerut membentuk kantong yang menggantung di belakang penis. *Skrotum* gunanya untuk mengontrol suhu dari testis, yaitu 6 derajat celcius lebih rendah dari suhu bagian tubuh lainnya agar testis dapat berfungsi menghasilkan sperma..
- *Epididimis*, yaitu tempat pematangan sperma sesudah dibentuk dalam testis
- Saluran sperma atau *vas deferens*. Saluran sperma dari testis menuju seminal vesicle.
- *Seminal Vesicle*, yang berguna untuk memproduksi semacam gula. Ini berguna sebagai sumber kekuatan untuk sperma agar dapat bertahan hidup dan berenang mencari telur di dalam alat reproduksi perempuan. Pada saat ejakulasi seminal vesicle mengalirkan gula tersebut ke vas deferens.
- Kelenjar prostat, yang menghasilkan cairan yang berisi zat makanan untuk menghidupi sperma/*Bladder* (kandung kencing), tempat terkumpulnya air seni yang nantinya disalurkan ke uretra ketika buang air kecil.
- Tubuh laki-laki pada awal pubertas akan memproduksi air-mani (sperma) secara terus menerus. Secara alamiah air-maninya akan keluar saat tidur, sering pada saat mimpi tentang seks, disebut "mimpi basah". Ini adalah pengalaman yang normal bagi semua remaja laki-laki. Mimpi basah adalah tanda seorang anak laki-laki telah memiliki kemampuan bereproduksi.

## Mitos dan Fakta Kesehatan Reproduksi

NO	MITOS	FAKTA
<b>Kesehatan Reproduksi untuk remaja disabilitas dan remaja tanpa disabilitas</b>		
1.	Remaja belum perlu mengetahui informasi kesehatan reproduksi	Sangat penting untuk mengetahui informasi kesehatan reproduksi agar mampu menjaga diri, terhindar dari kekerasan seksual (baik sebagai korban maupun menjadi pelaku)
2.	Remaja akan mengetahui sendiri mengenai informasi kesehatan reproduksi	Remaja akan salah menerapkan informasi yang salah jika tidak sedari kecil tidak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi
<b>Mengenai Selaput Dara</b>		
1	Setiap perempuan dilahirkan dengan memiliki selaput dara	Tidak semua perempuan lahir dengan selaput dara pada vaginanya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bayi perempuan lahir tanpa selaput dara, itu berarti tidak akan mengalami pendarahan pada hubungan seks pertama.
2	Selaput dara bentuknya sama pada setiap perempuan, seperti selaput tipis tanpa lubang	Seperti juga manusia memiliki wajah yang berbeda, demikian juga selaput dara. Selaput dara memiliki lubang atau pori yang bentuk, ukuran dan kelenturan bervariasi. Lubang tersebut dapat bertambah lebar setelah seorang perempuan mengalami menstruasi yang pertama kali.
3	Selaput dara yang robek berarti pemiliknya sudah pernah melakukan hubungan seksual alias tidak perawan lagi	Selaput dara merupakan selaput kulit tipis yang dapat meregang dan robek karena beberapa hal, misalnya hubungan seks, kecelakaan, ataupun olahraga tertentu seperti berkuda atau naik sepeda. Kelenturan selaput dara bervariasi. Jadi perawan atau tidaknya perempuan tidak semata-mata ditandai dengan robeknya selaput dara, tetapi karena sudah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sebaliknya ada juga perempuan yang walaupun sudah menikah dan berhubungan seks berkali-kali tapi selaput daranya masih utuh dan enggak terkoyak, karena selaput daranya sangat elastis.
4	Hubungan seks pertama kali selalu ditandai dengan keluarnya darah dari vagina, sebagai penanda keperawanan seorang perempuan	Hubungan seksual pertama kali tidak selalu mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari vagina setelah berhubungan seks pertama kali timbul karena terjadinya peregangan dan perobekan pada selaput dara. Karena selaput dara ini merupakan selaput kulit yang juga memiliki pembuluh darah, apabila robekan terjadi pada bagian yang terdapat pembuluh darah, maka terjadi pendarahan. Apabila terjadi robekan tetapi tidak mengenai pembuluh darah, pendarahan tidak terjadi. Karena jika pasangan berkomunikasi tentang keinginan satu sama lain dan sebelum melakukan hubungan seksual terlebih dahulu melakukan foreplay (pemanasan) sehingga perempuan mampu mengeluarkan cairan vagina maka sangat mungkin tidak timbul pendarahan.  Selaput dara memiliki bentuk elastis. Perempuan akan mengeluarkan cairan vagina jika terangsang sehingga tidak semua perempuan mengalami pendarahan saat berhubungan seks untuk pertama kalinya.

NO	MITOS	FAKTA
5	Keperawanan bisa ditebak dari cara berjalan dan bentuk pinggul.	Keperawanan tidak bisa dilihat dari cara berjalan ataupun bentuk pinggul seseorang. Keperawanan seseorang terkadang dipandang dari dua sisi yakni fisik dan psikososial. Dari sisi fisik dengan melakukan pemeriksaan khusus yang hanya bisa dilakukan tenaga kesehatan terhadap kondisi selaput dara. Dari sisi psikososial yang didasarkan apakah seseorang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum.

### Menstruasi

1	Perempuan yang lebih cepat mendapat haid pertama (menarche)=perempuan nakal	Tidak ada hubungannya antara menarche dengan perilaku nakal. Menarche pada usia 10-15 tahun dipengaruhi faktor gizi dan keturunan. Semakin muda usia menarche, semakin tua usia menopause.
2	PMS dapat dicegah dengan mencuci kelamin.	<i>Pre-menstrual Syndrome (PMS)</i> adalah serangkaian kondisi saat perempuan hendak menstruasi. Tidak ada sabun atau disinfektan apapun yang dapat mencegah PMS.
3	Menstruasi yang normal itu lamanya pasti seminggu.	Setiap perempuan pasti memiliki masa menstruasi yang berbeda dan tidak selalu harus tujuh hari. Perempuan yang memiliki masa menstruasi tiga, empat, atau lima hari masih dianggap normal.
4	Jangan minum es saat menstruasi.	Sesungguhnya air dingin tidak memiliki efek apapun saat menstruasi. Terutama efek menghambat aliran darah.
5	Tidak boleh berenang saat menstruasi karena akan menyebabkan kematian.	Berenang saat menstruasi boleh dilakukan selama memakai pembalut dan tidak merasa risih. Hal ini sama sekali tidak berpengaruh kepada kesehatan apalagi menyebabkan kematian.
6	Perempuan yang sedang menstruasi akan merusak makanan (misalnya tape) yang dimasukkannya	Tidak ada hubungan antara menstruasi dengan apa yang dikerjakan sepanjang menjaga kebersihan diri dalam melakukan pekerjaannya.
7	Menstruasi dapat berhenti kalau keramas	Justru yang harus diperhatikan adalah kebersihan badan selama menstruasi. Kalau sudah waktunya cuci rambut, ya cuci saja.
8	Selama menstruasi tidak boleh makan telur dan ikan karena darah akan amis	Darah menstruasi memang berbau khas. Berbeda dengan bau amis ikan atau karena makan telur. Oleh karena itu menjaga kebersihan diri.
9	Pembalut dapat menyebabkan kemandulan.	Penggunaan pembalut saat sedang menstruasi justru menjaga agar vagina tetap bersih dan tidak lembab.  Meski begitu, sebaiknya pembalut diganti setiap empat jam sekali terutama saat haid sedang banyak-banyaknya. Jika pembalut jarang diganti, jamur dapat tumbuh dan menyebabkan keputihan.

NO	MITOS	FAKTA
10	Saat sedang menstruasi jangan mencukur bulu kemaluan atau bulu kemaluan, rambut, dan kuku yang dipotong harus ikut dimandikan bersama saat mandi besar.	Mencukur bulu kemaluan akan menyebabkan vagina lebih bersih dan terjaga, apalagi saat haid dimana vagina perlu dijaga agar tidak lembab.
11	Tidak boleh memakan nanas dan ketimun, meminum air es, tidak boleh memakan makanan yang pedas,  Tidak boleh tidur siang karena darah menstruasi akan naik menuju mata,	Makanan adalah sumber vitamin dan energi yang diperlukan oleh tubuh. Tidur siang, dapat memulihkan tenaga saat menstruasi.
12	Tidak boleh masuk masjid, karena nanti darahnya berceceran di lantai	Jaman dulu, belum ada pembalut, maka kemungkinan untuk darah bisa saja terjadi.

### Dorongan Seksual

1	Lelaki memiliki dorongan seksual lebih besar ketimbang perempuan.	Dorongan seksual merupakan hal yang alamiah muncul pada setiap individu pada umumnya dimulai saat ia menginjak masa pubertas.
2	Masturbasi atau onani hanya dilakukan oleh laki-laki	Masturbasi bisa dilakukan baik perempuan ataupun laki-laki. Dan perilaku ini bisa menyebabkan luka, keletihan dan kelelahan jika berlebihan, merasa berdosa dan tidak konsentrasi, ketergantungan dan tidak merasa butuh pasangan
3	Sering masturbasi atau onani bisa membuat mandul.	Secara medis, masturbasi tidak mengganggu kesehatan fisik selama dilakukan secara aman (tidak menimbulkan luka atau lecet). Risiko fisik biasanya berupa kelelahan. Pengaruh masturbasi biasanya berupa psikologis seperti perasaan bersalah, berdosa, dan kadarnya berbeda-beda pada tiap orang. Kemandulan biasanya akibat dari IMS (Infeksi Menular Seksual) atau penyakit lainnya seperti kanker atau karena sebab fisik lainnya misalnya kualitas sperma yang kurang baik.
4	Masturbasi atau onani yang dapat menyebabkan lutut “kopong”.	Masturbasi atau onani tidak dapat menyebabkan lutut kopong. Sebab, Spermatozoa tidak diproduksi dan tidak disimpan di dalam lutut, melainkan di testis. Pada remaja laki-laki yang sehat, dalam sehari sperma diproduksi lebih dari 50 juta sel sperma. Setelah masturbasi biasanya timbul rasa lelah karena masturbasi mengeluarkan energi. Pada saat itu seluruh otot memang berada pada kondisi amat rileks.
5	Berhubungan seksual hanya satu kali tidak akan menyebabkan kehamilan.	Berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan kehamilan. Karena selama perempuan dalam masa subur saat pertama kali berhubungan seks, dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini dikarenakan, pada masa subur dan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, pertemuan antara sperma dan sel telur dapat terjadi yang kemudian berkembang menjadi kehamilan.

NO	MITOS	FAKTA
<b>Kehamilan</b>		
1	Hamil karena berenang	Kemungkinan untuk hamil sangat kecil, karena sperma akan mati bila berada di luar alat kelamin (seperti dalam air kolam renang). Untuk anak laki-laki, tidak sepatasnya mengeluarkan spermanya di kolam renang.
2	Kalau cuma menempelkan penis di celana perempuan tidak akan hamil	Jangan salah, kalau sperma merembes dan aktif masuk ke dalam vagina, bisa juga hamil.
3	Berhubungan seksual saat menstruasi tidak menyebabkan hamil.	Masa subur (ovulasi) terjadi sekitar 14 hari setelah haid hari pertama. Lama haid berkisar antara lima sampai tujuh hari sehingga berhubungan seksual saat menstruasi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Namun hubungan seksual saat menstruasi dapat berisiko terjadinya luka-luka kecil, infeksi menular seksual, dan penyumbatan pembuluh darah oleh udara (emboli) yang dapat berakibat fatal atau kematian.
4	Loncat-loncat setelah berhubungan seks tidak menyebabkan kehamilan.	Ketika sperma telah melewati vagina, sperma akan mencari sel telur yang matang dan sudah siap dibuahi, kemungkinan hamil tetap saja bisa terjadi.
<b>Aborsi</b>		
1	Makan nanas menyebabkan keguguran	Apapun yang dimakan secara berlebihan akan menyebabkan gangguan. Pengaruh makanan akan berdampak pada lambung dan usus, bukan pada alat reproduksi.
2	Minum obat pelancar haid, memakai jeans ketat dan makan nanas adalah cara aborsi yang aman.	Aborsi yang tidak dilakukan secara medis dengan pengawasan dokter tidak aman dan mengakibatkan infeksi berbahaya maupun kecacatan pada bayi yang dikandung.
3	Minum obat antibiotik sebelum hubungan seksual akan mencegah penularan IMS.	Minum obat antibiotik sebelum hubungan seksual tidak dapat mencegah IMS
<b>Pacaran Sehat</b>		
1	Berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta	Kalimat yang seringkali dipercaya oleh remaja perempuan maupun laki-laki. Berhubungan seksual bukan cara untuk menunjukkan kasih sayang pada saat masih pacaran, melainkan karena disebabkan adanya dorongan seksual yang tidak terkontrol. Banyak cara untuk menunjukkan rasa sayang atau cinta kepada pasangan/pacar kita dan tidak melulu hubungan seks. Apapun bentuk rasa sayang itu harus dilandasi oleh kepercayaan dan kemampuan untuk menentukan pilihan tanpa adanya paksaan dari pasangan, teman, keluarga, dan lainnya. Kamu berhak untuk berkata tidak, ketika pacar mengajak berhubungan seksual. Karena hanya kamu yang berhak atas tubuh kamu. Karena hubungan seks seharusnya bebas dari paksaan, ancaman, dan dari risiko infeksi menular seksual. Jadi kenali tubuhmu dan hak-hakmu.

NO	MITOS	FAKTA
<b>HKSR pada Disabilitas</b>		
1	Penyandang disabilitas tidak berkembang organ reproduksinya	Sama dengan tanpa disabilitas, penyandang disabilitas mengalami perkembangan organ reproduksi. Penyandang disabilitas laki-laki dapat mengalami mimpi basah, mempunyai dorongan seksual dan mampu membuahi sel telur di rahim perempuan.  Sedang perempuan disabilitas mengalami menstruasi, hamil, menyusui dan melahirkan.
2	Perempuan dengan disabilitas aseksual	Perempuan disabilitas mempunyai dorongan seksual yang sama dengan orang tanpa disabilitas
3	Orang dengan disabilitas, terutama disabilitas mental/intelektual hiperseksual	Dorongan seksual pada orang disabilitas sama dengan orang tanpa disabilitas. Anggapan bahwa disabilitas mental/intelektual hiperseksual timbul karena ketidaktahuan. Selama ini, orang tanpa disabilitas diajarkan nilai dan norma terkait tata susila/sopan santun yang berlaku di masyarakat. Sementara, pada kebanyakan disabilitas mental/intelektual, nilai/norma ini tidak pernah diajarkan. Sehingga mereka seringkali tidak paham apa yang boleh/tidak boleh, aib/buruk, benar/salah dimasyarakat
4	Orang dengan disabilitas lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan orang 'normal' dan kehidupan mereka berbeda sama sekali.	Apa yang disebut dengan 'normal'? Semua orang memiliki kemampuan yang berbeda, bakat, ketertarikan dan personalitas. Orang dengan disabilitas pergi ke sekolah, bisa memilih menikah atau tidak menikah, bekerja, bermain, mencuci, berbelanja, bepergian, menjadi relawan sosial, memiliki hak pilih, membayar pajak, tertawa, berteriak, bermimpi. Orang dengan disabilitas adalah kita
5	Orang dengan disabilitas akan melahirkan keturunan disabilitas.	Banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi disabilitas, misalnya, malnutrisi, virus, salah penggunaan obat, bencana dan peperangan
6	perempuan disabilitas fisik akan selalu melahirkan dengan operasi caesar	Proses melahirkan caesar/vaginal dipengaruhi oleh banyak faktor, dan disabilitas bukanlah salah satunya. Keadaan rahim, posisi bayi, kesehatan ibu dan janin, serta berbagai faktor lain akan mempengaruhi keputusan dokter untuk membantu kelahiran bayi melalui proses vaginal/caesar. Anggapan bahwa perempuan disabilitas tidak akan mampu mengejan, tidak memiliki kaki yang cukup kuat untuk mengejan, dan postur tubuh seringkali dijadikan alasan bahwa proses kelahirannya harus dengan caesar. Banyak kasus dimana perempuan disabilitas fisik mampu melahirkan dengan vaginal ketika kehamilan dipantau sejak awal dengan arahan yang tepat dari tim dokter/bidan.

NO	MITOS	FAKTA
7	<p>Orang dengan paraplegia tidak mampu merasakan kenikmatan seksual</p> <p>Laki laki paraplegia tidak bisa ereksi, dan perempuan paraplegia tidak akan mengeluarkan cairan pelumas vagina.</p>	<p>Orang dengan paraplegia mengalami masalah pada syaraf tulang belakangnya, ini akan mengakibatkan kelumpuhan pada anggota badan mulai pinggang ke bawah. Hal ini sering diasumsikan bahwa orang dengan paraplegia tidak akan mampu merasakan kenikmatan seksual karena organ seksualnya sudah “mati”</p> <p>Pada kenyataannya, kenikmatan seksual bukan hanya soal penetrasi penis ke vagina, namu dapat berasal dari berbagai sumber seperti sentuhan, kata-kata, rasa cinta, suasana yang dibangun, dan lain sebagainya. Menjadi sangat penting utuk setiap pasangan melakukan eksplorasi atas hal tersebut. Kondisi paraplegia seseorang tidak akan mengganggu produksi hormon yang terkait dengan seksualitas.</p>
8	<p>Sebagian besar orang dengan disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas tidak mampu merawat bayi dan membesarkan anak.</p>	<p>Setiap orang akan memiliki cara masing-masing sesuai dengan kondisinya untuk merawat dan mengasuh anaknya. Pun dengan orang dengan disabilitas, pengalaman hidup mereka akan menuntun mereka untuk dapat mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan menemukan cara tersendiri dalam mengasuh dan mengasihi anaknya.</p>



## BAHAN BACAAN

**KESEHATAN REPRODUKSI DAN HIV/AIDS**

Kesehatan Reproduksi (Kespro) adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi. Kebebasan untuk memutuskan bilamana atau seberapa banyak melakukannya. Hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi dan akses. Hak untuk mendapat tingkat pelayanan kesehatan dan untuk perempuan mempunyai kesempatan menjalani proses kehamilan secara aman.

**Faktor Berdampak Buruk untuk Kespro**

- Sosial ekonomi & demografi
- Kemiskinan
- Tingkat pendidikan rendah
- Ketidaktahuan tentang perkembangan seksual & proses reproduksi)
- Budaya dan lingkungan praktek tradisional
- Kepercayaan 'banyak anak banyak rejeki'
- Informasi ttg fungsi reproduksi yang salah
- Faktor psikologis
- Masalah keluarga
- Depresi
- Karena ketidakseimbangan hormonal
- Faktor biologis cacat lahir
- Cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit

**Berfungsinya Organ Reproduksi**

Pada laki-laki testisnya telah mampu menghasilkan sperma, dan hormon testosteron berfungsi timbulnya tanda2 kelamin sekunder: suara berubah menjadi besar, tumbuh rambut ditempat tertentu (kumis, jenggot), dada bidang, jakun. Pada perempuan ovariumnya mampu menghasilkan sel telur (ovum) dan hormon estrogen mempengaruhi timbulnya tanda2 kelamin sekunder: kulit menjadi halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuh payudara dan pinggul membesar. Mulai berfungsi: usia 9-14 tahun.

**Penyakit Menular Seksual-PMS**

PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Kelompok remaja dan dewasa muda (15-24 tahun) adalah kelompok umur yang memiliki risiko paling tinggi untuk tertular PMS. PMS yang mudah diobati seperti gonore telah menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik generasi lama. PMS lain, seperti herpes, AIDS, dan kutil kelamin, seluruhnya adalah PMS yang disebabkan oleh virus, tidak dapat disembuhkan. Beberapa PMS dapat berlanjut pada berbagai kondisi seperti Penyakit Radang Panggul (PRP), kanker serviks dan berbagai komplikasi kehamilan. Kontak seksual tidak hanya hubungan seksual melalui alat kelamin. Kontak seksual juga meliputi ciuman, kontak oral-genital, dan pemakaian "mainan seksual", seperti vibrator.

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah retrovirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun kekebalan tubuh manusia. Penurunan sistem kekebalan tubuh pada penderita HIV sehingga mudah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan AIDS. Lebih dari 90% bayi terinfeksi tertular HIV dari ibu HIV positif, penularan dapat terjadi pada masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) atau *Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission* (PMTCT) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penularan HIV dan diintegrasikan dengan upaya eliminasi sifilis kongenital yang mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan pada ibu dan bayi.

## Faktor Risiko (Prevalensi) HIV

Di Indonesia sejak pertama kali ditemukan sampai Juni 2018, HIV/AIDS telah dilaporkan 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif infeksi HIV AIDS sampai Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (45% dari estimasi jumlah orang yang HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa) paling banyak ditemukan pada umur 25-49 tahun dan 20-24 tahun. Penderita HIV 2,1 juta adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun dan sekitar 18,8 juta adalah perempuan. Setiap hari 500 orang baru terinfeksi HIV dan sekitar 2.800 orang meninggal karena AIDS (WHO, 2018).

Penderita HIV perempuan mempunyai prevalensi tertinggi pada usia 15-24 tahun dan kematian paling tinggi pada usia 15-49 tahun. Hal ini memungkinkan perempuan untuk menularkan virus kepada bayi dari ibu yang mempunyai status HIV positif berkisar 15-45%. Kementerian RI memperkirakan jika di Indonesia setiap tahun terdapat 9.000 ibu hamil dengan HIV positif melahirkan bayi, berarti akan lahir sekitar 3.000 bayi dengan HIV positif tiap tahun. Ibu hamil dengan HIV AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri seperti bayi lahir prematur, premature rupture of membran (PROM), berat bayi lahir rendah, anemia, restriksi pertumbuhan intrauterus, kematian perinatal dan endometritis postpartum.

## Faktor penyebab penularan HIV dari ibu ke janin

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke janin yaitu :

- Kadar HIV (*vira load*) merupakan faktor yang paling utama terjadi penularan HIV dari ibu ke anak semakin tinggi kadarnya semakin besar tingkat penularannya, khususnya pada saat/menjelang persalinan dan masa menyusui bayi.
- Kadar CD4, ibu dengan kadar CD4 rendah bila jumlah sel dibawah 350 sel/mm menunjukkan daya tahan tubuh yang rendah karena banyak sel limfosit yang pecah/rusak. Kadar CD4 tidak selalu sebanding dengan viral load.
- Status gizi selama kehamilan, berat badan yang rendah serta kekurangan zat gizi terutama protein, vitamin dan mineral selama kehamilan meningkatkan risiko ibu untuk mengalami penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kadar HIV dalam darah ibu, sehingga menambah risiko penularan ke bayi.
- Penyakit infeksi karena kehamilan, IMS (infeksi menular seksual) misalnya sifilis, infeksi organ reproduksi, malaria dan tuberkulosis berisiko meningkatkan kadar HIV pada darah ibu, sehingga penularan HIV ke bayi semakin besar.
- Masalah pada payudara, misalnya puting lecet (jika menyusui), mastitis dan abses pada payudara akan meningkatkan faktor penularan HIV melalui pemberian ASI.

## Dukungan psikologis ibu hamil dengan HIV

Masalah yang muncul terkait stress dan coping pada ibu yang menjalani kehamilan dengan HIV diantaranya khawatir terhadap keselamatan bayi, diperlakukan berbeda dari ibu hamil lainnya, banyak membutuhkan biaya pengobatan, serta tidak nyaman didiagnosis HIV/AIDS. Ibu hamil dengan HIV membutuhkan dukungan emosional, sikap dan dukungan positif dari keluarga dan teman agar mereka dapat memberikan perawatan terbaik bagi anak mereka.

*Disarikan dari:*

<https://www.kompasiana.com/diyahpurnamasari/5cb5a3d195760e65965e4ef5/hiv-pada-ibu-hamil?page=all>

<https://slideplayer.info/slide/2866123/>

**POKOK BAHASAN** : **3. FITRAH MANUSIA**

**SUB POKOK BAHASAN** : **3.4. PERAN INDIVIDU DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan posisi diri sebagai individu dan makhluk sosial dalam keluarga dan masyarakat
2. Menjelaskan nilai dan norma masyarakat
3. Menjelaskan peran sosial individu dalam masyarakat
4. Mampu merumuskan karakter, dan kontribusi secara luas dan terbatas sebagai agen perubahan sosial di masyarakat

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.3.4.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Diskusi Kelompok, Permainan dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi siapa saja yang ada di keluarga, masyarakat dan melakukan identifikasi perannya di keluarga dan masyarakat serta mengidentifikasi persoalan apabila perannya digantikan orang lain di dalam keluarga dan masyarakat dengan mengisi tabel (M.3.4.2) di kelompok pada sesi sebelumnya (Identitas Diri dan persoalan dalam siklus hidup);</p> <p>b. Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi dan kelompok lain menanggapi, menuliskan poin-poin diskusi dan menyimpulkan hasil pembahasan;</p> <p>c. Fasilitator mengajak peserta membentuk lingkaran bermain jaring laba laba untuk mengidentifikasi kepekaan sosial dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan di keluarga atau masyarakat mengacu pada Lembar Instruksi Permainan Jaring Laba-laba (M.3.4.3);</p> <p>d. Fasilitator menyimpulkan hasil pembelajaran.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja Identifikasi Peran Dalam Keluarga, Masyarakat dan Keluarga (M.3.4.2)</li> <li>Lembar Instruksi Permainan Jaring Laba-laba (M.3.4.3)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan dengan menjelaskan pentingnya Mentor/Kader SEPEDA KEREN sebagai individu yang memiliki pengetahuan dan kepekaan sosial mengambil peran di dalam keluarga dan masyarakat serta kebijakan dengan mengacu pada Bahan Bacaan (M.3.4.4)</p>	10	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI PERAN DALAM KELUARGA, MASYARAKAT DAN KELUARGA

KELOMPOK:

1. Balita
2. Anak
3. Dewasa
4. Lansia

JENIS KELAMIN	PERAN KELUARGA	MASYARAKAT	KEBIJAKAN
LK			
PR			
LK Disabilitas			
PR Disabilitas			

## LEMBAR INSTRUKSI PERMAINAN JARING LABA-LABA

### Tujuan permainan:

1. Memberikan ilustrasi tentang penyelesaian masalah/ persoalan dari seorang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak , bahkan dari lingkaran yang diluar lingkaran inti tetapi mempunyai kaitan
2. Memberikan ilustrasi bahwa sesungguhnya dalam masyarakat / negara semua pihak seharusnya saling terhubung dan berkomunikasi sesuai dengan peran sosial atau posisinya untuk dapat menyelesaikan masalah

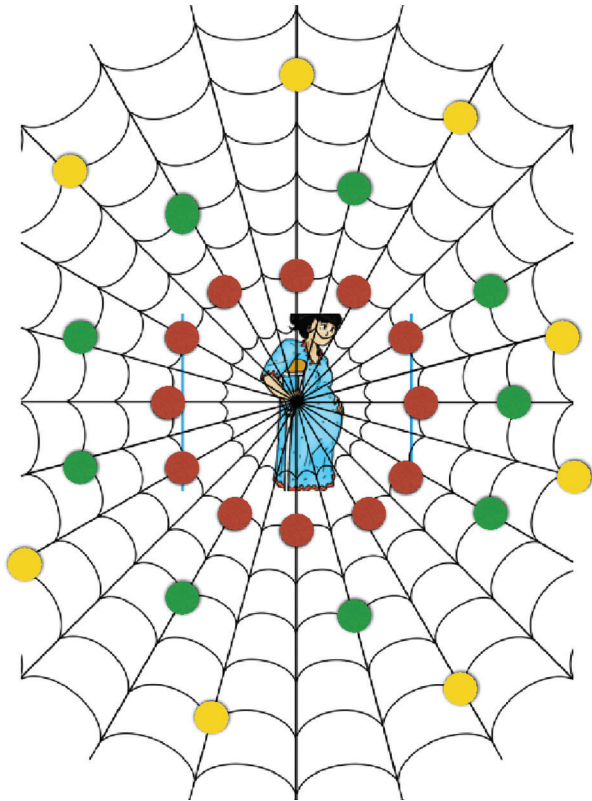
### Alat permainan:

1. Tali rafia / benang besar dengan gulungan besar
2. Kertas peran dan pertanyaan yang sesuai dengan materi
3. Peran yang dimainkan adalah individu atau tokoh serta sejumlah peran sentral di masyarakat termasuk anggota keluarga yang diperkitakan dapat mempengaruhi dapat memberikan solusi atau memberikan dukungan positif seperti kepala desa, bidan, kepala dinas kesehatan, kader posyandu, ayah, ibu, kakak, mertua, dll

### Metode permainan:

1. Fasilitator menuliskan beberapa peran dalam masyarakat (anggota keluarga, tetangga, aparat desa/ bidan desa atau apapun yang berada dilingkungan desa/ kecamatan, pegawai pemerintah/ kepala dinas/ bupati
2. Fasilitator menyiapkan ruangan yang lapang ditengah ruangan training atau diluar ruang training yang dapat menampung semua peserta bergerak bebas
3. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk berperan sebagai orang yang mempunyai persoalan yang kompleks dan membutuhkan banyak pertolongan, dan meminta peserta tersebut untuk memposisikan di tengah arena / ruangan permainan yang disebut sebagai tokoh utama
4. Fasilitator meminta peserta dengan peran masing-masing untuk menempatkan diri dalam lingkaran pertama, kedua, ketiga, keempat berdasar kedekatan hubungan dan intensitas interaksi dengan pemilik masalah/ persoalan (tokoh utama)
5. Fasilitator meminta tokoh utama untuk menyampaikan masalahnya dan meminta bantuan kepada orang-orang disana dengan melemparkan tali kepada seorang dilingkaran terdekat
6. Peserta yang menerima tali tersebut menjelaskan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan perannya tetapi kemudian mengembalikan ke tokoh utama, kemudian tokoh utama melemparkan ke pihak lain yang mempunyai peran dan kapasitas yang menurutnya bisa membantu dari lingkaran yang sama atau lingkaran lain.
7. Fasilitator meminta tali tersebut lalu di lemparkan ke semua peserta dan tidak boleh lepas, harus terhubung dan peserta terakhir akan mengembalikan kepada tokoh utama.  
Fasilitator meminta refleksi dari peserta terhadap proses itu dengan pertanyaan
  - a. Apa yang dirasakan oleh peserta dalam memainkan perannya
  - b. Apa yang dirasakan peserta dengan keterhubungan mereka dalam jarring laba-laba ini
8. Fasilitator menjelaskan rangkuman dari proses permainan ini

Gambar 1



Gambar 2





## BAHAN BACAAN

### KELUARGA

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).

#### Tiga elemen utama dalam keluarga

Terdapat tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga :

1. **Status sosial.** Di mana dalam keluarga distrukturkan oleh tiga struktur utama, yaitubapak/suami, ibu/istri dan anak-anak. Sehingga keberadaan status sosial menjadi pentingkarena dapat memberikan identitas kepada individu serta memberikan rasa memiliki,karena ia merupakan bagian dari sistem tersebut.
2. **Peran sosial.** Yang menggambarkan peran dari masing-masing individu atau kelompok menurut status sosialnya.
3. **Norma sosial.** yaitu standar tingkah laku berupa sebuah peraturan yangmenggambarkan sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosial.

#### Keluarga inti

Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga batih ialah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang mata pencahariaannya adalah berburu dan bertani, keluarga sudah merupakan struktur yang cukup memadai untuk menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting.

##### 1. Peranan

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
- b. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
- c. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

## 2. Tugas

Pada dasarnya tugas keluarga ada delapan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya.
- b. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
- c. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
- d. Sosialisasi antar anggota keluarga.
- e. Pengaturan jumlah anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga.
- g. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.
- h. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya.

## 3. Fungsi

Fungsi yang dijalankan keluarga adalah:

- a. Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.
- b. Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- c. Fungsi Perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
- d. Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
- e. Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
- f. Fungsi Ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- g. Fungsi Rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lainnya.
- h. Fungsi Biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya.
- i. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.

## Pokok-pokok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera

### 1. Pembinaan ketahanan fisik keluarga

Kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan ketahanan fisik keluarga. Contoh: pembinaan gizi keluarga termasuk gizi ibu hamil, stimulasi pertumbuhan balita, pembinaan kesehatan lingkungan keluarga, usaha tanaman obat keluarga, dan lain-lain.

### 2. Pembinaan ketahanan non fisik keluarga

Kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan ketahanan non fisik keluarga. Contoh : pembinaan kesehatan mental keluarga, stimulasi perkembangan balita, konseling keluarga, dan lain-lain.

### 3. Pembinaan Keluarga Sejahtera

Pembinaan Keluarga Sejahtera dalam Aspek Agama, Pendidikan, Sosial, Budaya, dan Ekonomi.

#### a. Aspek agama

Agama memiliki peran penting dalam membina keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah keluarga haruslah memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakininya agar pembinaan keluarga sejahtera dapat terwujud sejalan dengan apa yang diajarkan oleh agama.

#### b. Aspek pendidikan

Pendidikan keluarga sangat penting namun seringkali dianggap tidak penting. Etika yang benar harus diajarkan kepada anak semenjak kecil, sehingga ketika seorang anak menjadi dewasa, ia akan berperilaku baik. Tentu saja perilaku orang tua juga harus baik dan benar sebagai contoh untuk anaknya. Jikalau semenjak kecil seorang anak diajarkan dengan baik dan benar maka keluarga tersebut akan harmonis. Dan seandainya setiap keluarga mengajarkan nilai-nilai etika yang benar maka semua manusia akan hidup berdampingan dan damai. Keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam pendidikan karakter anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, maka akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar keluarga (sekolah) untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan (karakter) pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya.

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum, dll) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang, dll), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak.

#### c. Aspek ekonomi

Pemerintah mengelompokkan keluarga di Indonesia ke dalam dua tipe: keluarga pra-sejahtera yang kita bayangkan ketika mendengar keluarga tipe ini adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Tipe keluarga sejahtera yang terbayang ketika mendengar keluarga tipe ini adalah sebuah keluarga yang sudah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

#### d. Aspek sosial budaya

Perkembangan anak pada usia antara 3-6 tahun adalah perkembangan sikap sosialnya. Konsep perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya dengan lingkungan sosial untuk mandiri dan dapat berinteraksi atau untuk menjadi manusia sosial. Interaksi adalah komunikasi dengan manusia lain, suatu hubungan yang menimbulkan perasaan sosial yang mengikatkan individu dengan sesama manusia, perasaan hidup bermasyarakat seperti tolong menolong, saling memberi dan menerima, simpati dan empati, rasa setia kawan dan sebagainya.



# GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

**POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Memahami kesetaraan dan keadilan gender
2. Memahami kebutuhan praktis dan strategis
3. Memahami konsep dan penerapan pengarusutamaan gender (PUG)
4. Memahami Inklusi dan Eksklusi sosial
5. Memahami realitas keberadaan dan dukungan kepada kelompok rentan

**SUB POKOK BAHASAN** : **4.1 KESETARAAN DAN Keadilan GENDER**

**4.2 KEBUTUHAN PRAKTIS STRATEGI KELOMPOK RENTAN**

**4.3 PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

**4.4 INKLUSI SOSIAL DAN EKLUSI SOSIAL**

**4.5 MEMAHAMI REALITAS KEBERADAAN DAN DUKUNGAN KEPADA KELOMPOK RENTAN**

**WAKTU** : 8 Jampel @ 45 menit = 360menit

- POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**
- SUB POKOK BAHASAN** : **4.1 KESETARAAN DAN Keadilan Gender**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep gender
  2. Menjelaskan peran gender di masyarakat
  3. Mengidentifikasi bentuk dan dampak ketidakadilan gender di keluarga, masyarakat dan negara
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator memperkenalkan diri serta menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian PB (M.4.1.1)</li> <li>Lembar Penyajian SPB (M.4.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat dan Permainan</b></p> <p>a. Fasilitator meminta peserta mengingat kembali diskusi dan pembahasan perbedaan tubuh beserta organ reproduksi laki-laki dan perempuan;</p> <p>b. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang istilah gender dan peran gender, mencatatnya pada kertas plano;</p> <p>c. Fasilitator membahas hasil curah pendapat dan menyimpulkan;</p> <p>d. Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok sebelumnya untuk mendiskusikan bentuk dan dampak ketidakadilan gender mengacu pada Lembar kerja Bentuk dan Dampak Ketidakadilan Gender (M.4.1.3);</p> <p>e. Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi dan peserta kelompok lain menghampiri untuk melakukan tanya jawab, klarifikasi dan input;</p> <p>f. Fasilitator mencatat seluruh poin pembahasan dan menyimpulkan di akhir pembahasan kelompok dengan menggunakan Lembar Informasi Kerangka Ketidakadilan Gender Pekka (M.4.1.4).</p>	45'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar kERJA Bentuk dan Dampak Ketidakadilan Gender (M.4.1.3)</li> <li>Lembar Informasi Kerangka Ketidakadilan Gender Pekka (M.4.1.4)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan tentang proses konstruksi gender dengan mengacu pada Bahan Bacaan Pengertian dan Perbedaan Gender dengan Seks (M.4.1.5) dan Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (M.4.1.6) antara lain:</p> <p>a. Pelabelan berdasarkan konstruksi sosial yang membawa perbedaan peran dan dampak pada perempuan dan laki-laki</p> <p>b. Bentuk ketidakadilan pada laki-laki dan perempuan disabilitas dan non disabilitas</p>	10'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Pengertian dan Perbedaan Gender dengan Seks (M.4.1.5)</li> <li>Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (M.4.1.6)</li> </ul>



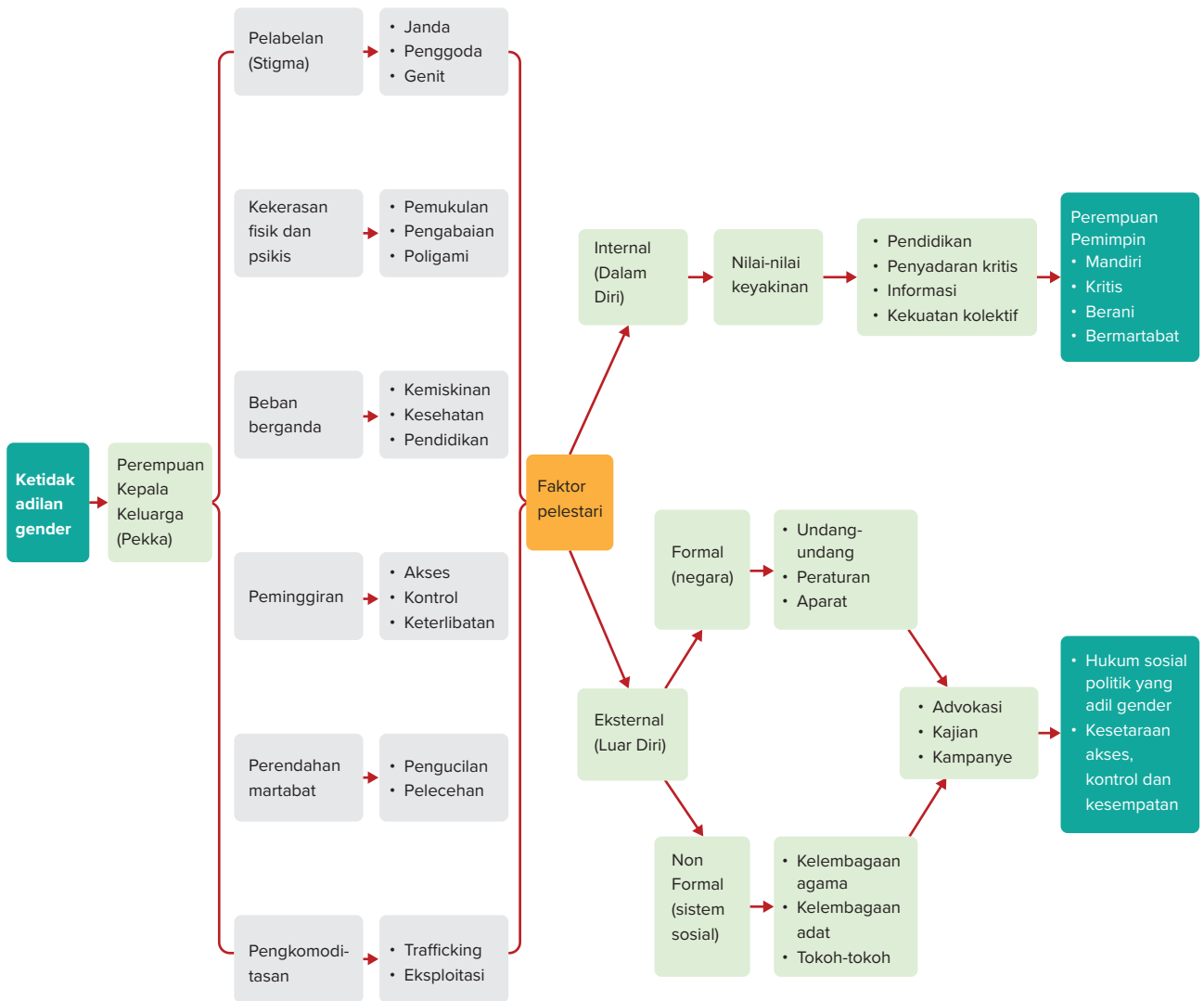
## LEMBAR KERJA BENTUK DAN DAMPAK KETIDAKADILAN GENDER

KELOMPOK:

1. Balita
2. Anak
3. Dewasa
4. Lansia

LEVEL	BENTUK KETIDAKADILAN GENDER	DAMPAK KETIDAKADILAN GENDER
Keluarga		
Masyarakat		
Negara		

## LEMBAR INFORMASI KERANGKA KETIDAKADILAN GENDER



## BAHAN BACAAN

**PENGERTIAN DAN PERBEDAAN GENDER DENGAN SEKS**

Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial.

Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan istilah jenis kelamin (seks). Padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat, seperti laki-laki memiliki penis, scrotum, memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Tuhan (*nature*).

Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, perkasa. Sedangkan perempuan itu lembut, lebih berperasaan, dan keibuan.

Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan. Misalnya ada laki-laki yang lembut dan lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda di masing-masing tempat. Jaman dulu, di suatu tempat, perempuan bisa menjadi kepala suku, tapi sekarang di tempat yang sama, laki-laki yang menjadi kepala suku. Sementara di tempat lain justru sebaliknya.

Artinya, segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, komunitas ke komunitas yang lain, dikenal dengan gender.

Perbedaan gender dengan seks dapat dengan lebih mudah diamati melalui tabel berikut:

Jenis Kelamin (Seks)	Gender
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologis, dibawa sejak lahir (<i>nature</i>)</li> <li>• Tidak dapat diubah</li> <li>• Bersifat Universal</li> <li>• Sama dari waktu ke waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibentuk oleh Sosial (<i>nurture</i>)</li> <li>• Dapat diubah</li> <li>• Berbeda di setiap budaya</li> <li>• Berbeda dari waktu ke waktu</li> </ul>

Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan, ide tentang karakter feminin dan maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi.

Ide bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender dapat dicerminkan melalui peran-peran, status sosial, kekuasaan politik dan ekonomi antara laki-laki- dan perempuan. (Bruynde, Jackson, 7, Knought & Berkven, 1997: 7).

Catatan Praktis:

1. Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal. Misalnya: vagina dan rahim untuk perempuan; penis dan sperma untuk laki-laki.
2. Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki penakluk; perempuan penurut.
3. Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga.
4. Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (*stereotype*). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
  - a. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
  - b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
  - c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain;
  - d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

Sumber: <https://pkbi-diy.info/pengertian-dan-perbedaan-gender-dengan-seks/>

## BAHAN BACAAN

**BENTUK – BENTUK KETIDAKADILAN GENDER****Mengapa Gender dipermasalahkan?**

Perbedaan biologis atau seks melahirkan perbedaan gender. Perbedaan gender ini lama kelamaan melahirkan peran gender dan peran gender ini selanjutnya mendorong timbulnya ketidakadilan gender, perbedaan gender membawa akibat diskriminasi. Diskriminasi inilah yang menjadi permasalahan.

**Apa itu Diskriminasi?**

Diskriminasi pada dasarnya adalah setiap pembedaan, penghilangan atau pembatasan yang dilakukan seseorang karena alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan hak dasar antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

**Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender?****1. Subordinasi**

Sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Contoh :

- Masih sedikitnya perempuan yang bekerja dalam peran pengambil keputusan dan menduduki peran penentu kebijakan
- Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki
- Pekerjaan reproduktif hanya merupakan tanggung jawab perempuan
- Kontribusi perempuan, yang umumnya melakukan pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, pertanian subsisten, pekerjaan pengelolaan komunitas dan pekerjaan-pekerjaan sektor informal dianggap rendah sehingga tidak diperhitungkan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto

**2. Marjinalisasi**

Peminggiran peran ekonomi dan politik perempuan yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap perempuan tersebut. Contoh :

- Kerja perempuan dalam rumah tangga tidak dinilai/diperhitungkan
- Perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Walaupun memiliki akses, perempuan tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya tersebut
- Untuk pekerjaan yang sama, perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah dari laki-laki

**3. Beban Berlebihan**

Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Contoh :

- Walau perempuan bekerja mencari nafkah tetapi peran dan tanggung jawab reproduksi dan domestik berupa pemeliharaan dan pengasuhan anak serta pekerjaan rumah tangga lainnya tetap di tangan perempuan
- Di tempat kerja menjalankan peran produksi/publik di rumah menjalankan peran reproduksi/domestik
- Di komunitas menjalankan peran pengelolaan komunitas

#### 4. Kekerasan

- Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakter sering memunculkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan itu feminin, lemah dan lain-lain secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik, seksual atau kekerasan lainnya
- Pelaku kekerasan bukan hanya individu, tetapi juga dilakukan oleh institusi keluarga, masyarakat bahkan negara. Kekerasan terhadap perempuan dalam membangun seringkali terwujud pengabaian hak-hak mereka yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang bias gender

#### 5. Steriotipe - Pelabelan

Pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam hubungan sosial dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan sebuah tindakan dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau didasari pada perbedaan kelas, ras, suku budaya, suku bangsa maupun jenis kelamin.

Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Pada umumnya pihak yang lebih kuat atau dominan dapat lebih punya daya dalam membangun stereotipe pihak lainnya. Contoh :

- Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dibayar sebagai pekerja lajang dengan anggapan setiap perempuan adalah pencari nafkah tambahan meskipun secara de facto harus menafkahi keluarga
- Perempuan sebagai pekerja reproduktif dan pengelolaan komunitas
- Sempitnya kesempatan kerja dimanapun dan kapanpun, karena anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya sehingga banyak halangan dalam bekerja
- Anggapan bahwa perempuan penurut, tidak berani protes sehingga diminati sebagai pekerja menjadi buruh karena pasti mau dibayar lebih murah

**POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**

**SUB POKOK BAHASAN** : **4.2. KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS KELOMPOK RENTAN**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep kebutuhan praktis dan strategis perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya
2. Mampu mengidentifikasi realitas dan peluang kesetaraan gender dengan alat analisis Peluang, Partisipasi, kontrol dan manfaat

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan sesi dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.4.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah, Dskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai kebutuhan praktis dan strategis serta peluang;</p> <p>b. Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok sebelumnya dan berdiskusi Lembar Kasus (M.4.2.2) dan Lembar Kerja Realitas Masalah dan Peluang Mengatasinya (M.4.2.3);</p> <p>c. Fasilitator meminta kelompok mempresentasikan hasil diskusi panel dengan teknik <i>Gallery Walk</i> (M.4.2.3) dan mencatat hasil diskusi serta pembahasan;</p> <p>d. Fasilitator menutup sesi dengan catatan–catatan kritis terhadap hasil presentasi yang merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan beserta strategi pemenuhannya pada perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kasus (M.4.2.2)</li> <li>Lembar Kerja Realitas Masalah dan Peluang Mengatasinya (M.4.2.3)</li> <li>Teknik Presentasi <i>Gallery Walk</i> (M.4.2.4)</li> <li>Bahan Bacaan Analisa Gender (M.4.2.5)</li> <li>Bahan Bacaan Kerangka Analisa <i>Gender Analysis Pathway</i> (M.4.2.6)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan terkait pentingnya Mentor SEPEDA KEREN memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan praktis dan startegis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan disabilitas dan non disabilitas.</p>	10'	



## STUDI KASUS

**PEREMPUAN DISABILITAS DI DESA**

Ani adalah seorang perempuan dengan disabilitas fisik berusia 30 tahun menikah dengan Anto seorang laki-laki bukan disabilitas yang bekerja sebagai guru honorer. Ani tinggal di lingkungan dengan keluarga besar suaminya yang cukup kaya dirumah mertuanya. Bahwa suaminya sebagai guru honorer mempunyai menerima gaji 300.000 rupiah/bulan dari sekolah. Sementara Ani merupakan perempuan disabilitas menggunakan alat bantu 2 tongkat ketiak untuk keseharian bergantian dengan kursi roda. saat ini Ani mengalami kehamilan dengan usia 5 bulan, pernah datang ke posyandu sekali tetapi kemudian tidak lagi datang karena petugas menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. setelah sampai di puskesmas disarankan oleh Bidan puskesmas untuk melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan karena melihat bahwa kehamilannya berisiko. Ani kebingungan untuk datang ke dokter kandungan di RS karena tidak mempunyai kartu BPJS dan tidak mempunyai biaya yang cukup, dengan vonis awal bidan kalau kehamilannya berisiko.

Sementara Ani yang sebelum menikah cukup aktif menjalankan usaha makanan ringan dan memasarkan di kota tempat asal dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (modifikasi), tetapi setelah menikah dan berpindah ke desa suami yang cukup jauh dari kota, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena dari rumah menuju jalan desa bertangga dan tidak mungkin dilalui dengan sepeda motor roda 3, dan keluarga besar suaminya melarang Ani keluar rumah dan berkumpul dengan masyarakat di lingkungan barunya karena dianggap merepotkan dan malu, karena proses pernikahan Ani dan Anto yang dilakukan di rumah Ani tidak diketahui oleh semua tetangga di lingkungan rumah Anto.

**STUDI KASUS ANAK**

Giza adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun, merupakan siswa berprestasi sekolah kelas 8 SMP di desa Karang, bahwa Giza mempunyai adik laki-laki yang bernama Dino berusia 3 tahun. mereka tinggal bersama nenek dan kakeknya karena ibunya bekerja di luar negeri yang kembali kedesa setiap 3 tahun. tahun terakhir ibunya pulang adalah untuk melahirkan Dino dan kembali bekerja setelah anaknya berusia 4 bulan. Setelah kepergian ibunya maka Giza yang mengurus Dino karena kondisi neneknya yang sudah sering sakit. Dalam kesehariannya Giza seringkali mendapatkan bullying dari teman sekolahnya karena sering disebut sebagai anak "oleh-oleh" dan mempunyai adik "oleh-oleh" karena ibunya melahirkan anak setelah bekerja di luar negeri dan sudah bercerai dari suaminya setelah kelahiran Giza yang secara fisik tidak seperti pada umumnya orang desa.

Tekanan yang dialami Giza sebetulnya banyak dialami oleh anak-anak lain yang ibunya bekerja di luar negeri, sehingga mereka seringkali diajak berkumpul sampai malam dirumah salah satu temannya yang tidak terdapat orang dewasa/ orang tua. disana Giza melihat temannya mencoba minum minuman keras, narkoba dan bahkan melakukan hubungan sex. Giza merasa tidak nyaman karena selalu dipaksa mencoba sementara dia merasa bahwa harus sekolah dan mempunyai adik bayi yang harus diurus. sampai pada waktu tertentu teman perempuannya mengalami kehamilan, dan ketahuan oleh sekolah yang kemudian keputusan sekolah dikeluarkan. Giza sedih sekali melihat teman dekatnya dengan kondisi itu, tetapi tidak tahu harus bagaimana, sementara disaat yang sama dia juga mengalami kesulitan karena ibunya sudah beberapa bulan tidak mengirim uang sekolah. Giza mendapatkan tagihan dari sekolah untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan sebelum ujian akhir sekolah untuk dapat naik kelas 9 dan adiknya sudah ingin masuk PAUD yang akan membutuhkan biaya dan

ditanyakan tentang Akta lahir Dino. Giza tidak tahu kemana harus bekerja dan mencari uang untuk membayar sekolah, karena hasil tani kakeknya hanya cukup untuk makan sehari-hari, juga tidak tahu bagaimana mencari akta lahir bagi Dino. Diantara kebingungan untuk terus sekolah dan kesedihan itu Giza sudah didekati oleh orang-orang yang berjanji untuk mencarikan pekerjaan baginya di restoran di dalam dan luar negeri, tetapi Giza tidak tega untuk meninggalkan Dino.

## M. 4.2.3

## LEMBAR KERJA REALITAS MASALAH DAN PELUANG MENGATASINYA

KELOMPOK:

1. Perempuan Disabilitas
2. Perempuan Disabilitas
3. Anak
4. Anak

REALITAS MASALAH	PELUANG MENGATASI MASALAH	
	KEBUTUHAN PRAKTIS	KEBUTUHAN STRATEGIS

## M. 4.2.4

## TEKNIK GALLERY WALK

1. Tempel hasil diskusi kelompok di dinding dan bergerak mengunjungi kelompok lain;
2. Minta salah satu wakil kelompok yang dinilai paling menguasai materi untuk menjadi presenter kelompok dan tetap tinggal di tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain yang “datang berkunjung”
3. Selain presentasi dan menjawab pertanyaan atau menanggapi respon kelompok lain, tugas presenter lainnya adalah langsung mencatat koreksi jika dibutuhkan;
4. Tugas kelompok yang berkunjung adalah mengamati dan merespon hasil kerja kelompok yang dikunjungi.

## BAHAN BACAAN

**KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER**

Kebutuhan gender (*gender needs*) adalah konsep yang dikembangkan oleh C. Moser lebih lanjut dari konsep M. Molyneux (1985). Dasar pemikiran dari konsep ini adalah bahwa perempuan -sebagai sebuah kelompok- mempunyai kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki sebagai sebuah kelompok; ini bukan hanya disebabkan oleh 3 peran kerja perempuan (kerja reproduktif, kerja produktif dan kerja komunitas) tetapi juga karena posisi perempuan yang tersubordinat dari laki-laki dalam masyarakat. pemenuhan kebutuhan ini akan menolong aktivitas dan hidup perempuan (atau laki-laki) tanpa melakukan perubahan pada sistem pembagian kerja berdasarkan gender atau tanpa menantang perubahan posisi subordinatif perempuan dalam masyarakat.

***Kebutuhan Praktis***

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan praktis supaya seseorang bisa menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan peran gender masing-masing. Kebutuhan praktis gender juga merupakan respons untuk lebih mendekatkan pada kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan praktis gender ini biasanya diformulasikan dari kondisi nyata pengalaman perempuan dan untuk kelangsungan hidup manusia. pemenuhan kebutuhan ini dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Intervensi untuk memenuhi kebutuhan praktis ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang bersifat langsung dalam konteks tertentu, seringkali kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi hidup yang tidak layak. Kebutuhan praktis gender untuk kelompok perempuan misalnya: pengadaan air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan untuk pemenuhan

kebutuhan rumah tangga, penyediaan rumah dan layanan kebutuhan dasar, pembagian makanan, dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini sering dianggap sebagai kebutuhan khusus perempuan karena merekalah yang dianggap bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

***Kebutuhan Strategis***

Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. Kebutuhan strategis ini berkaitan dengan peningkatan posisi perempuan yang memerlukan waktu lama untuk mewujudkannya. Kebutuhan strategis gender juga mempersoalkan peran subordinat perempuan dan akibatnya terhadap ketidakadilan atau diskriminasi gender. Kebutuhan strategis gender ini berkaitan dengan pembagian kerja, kekuasaan, dan kontrol.

Pemenuhan kebutuhan ini dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat. Kebutuhan ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara lain mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender

bagi laki-laki antara lain seperti transformasi peran mereka (dalam rangka dapat berpartisipasi dalam mengambil bagian dalam pengasuhan anak atau menolak untuk wajib militer), transformasi dari tanggungjawab membayar 'mas kawin' yang mahal pada yang terjadi pada budaya tertentu, dll.

#### Perbedaan Kebutuhan Praktis dan Strategis

1. Kebutuhan Praktis: fokus pada Perempuan
  - a. Memenuhi kebutuhan dasar pada saat ini (jangka pendek)
  - b. Ditujukan untuk meningkatkan kondisi perempuan
  - c. Ditujukan pada kondisi perempuan di kelompok tertentu
  
2. Kebutuhan Strategis: fokus pada relasi gender (pola hubungan perempuan dengan laki-laki)
  - a. Untuk meningkatkan posisi perempuan (jangka panjang)
  - b. Ditujukan pada posisi perempuan dalam kategori relatif terhadap laki-laki

## BAHAN BACAAN

**MENGIDENTIFIKASI ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya (perempuan dan laki-laki) untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kendali (kontrol) terhadap sumberdaya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Untuk mengidentifikasi isu gender dalam pembangunan dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan faktor pendukung terkait dengan urusan tersebut dengan menggunakan kerangka pohon masalah, sebagai berikut:
  - Sebab Kesenjangan (Akar Masalah)
  - Faktor Pendukung
  - Fakta/fenomena
  
2. Identifikasi isu strategis merupakan suatu isu dengan ciri, antara lain:
  - Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan.
  - Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan.
  - Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan).
  - Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
  - Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat) atau bersifat sistemik.
  - Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan.
  - Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) atau memiliki daya ungkit kepada penyelesaian masalah.
  - Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

**Data Pembuka Wawasan**

- Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.
- Data pembuka wawasan sebaiknya merupakan data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.
- Namun tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan atau angka kematian ibu.

Sumber dan jenis data pembuka wawasan bisa berupa data dan informasi yang didapat dari:

- Hasil studi *baseline* (idealnya harus dilakukan studi *baseline* sebelum kebijakan/ program/kegiatan dimulai),
- Hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan.

Jenis data bisa berupa:

- Data statistik yang kuantitatif, misalnya data BPS, data sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya.
- Data kualitatif; misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, dan wawancara mendalam atau data hasil riset kualitatif.

### Memahami kesetaraan gender dalam pembangunan

Kesetaraan Gender Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan.

#### 1. Indikator Kesetaraan

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

#### 2. Indikator tingkat dampak:

Indikator yang bersifat makro yang biasanya mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, misalnya:

- a. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index-GDI*) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
- b. Variabel GDI: angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan.
- c. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik.
- d. Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
- e. Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), terkait dengan tujuan “kesetaraan gender” terintegrasi ke dalam seluruh tujuan MDGs serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan. o Indikator pada tingkat hasil/outcome, yakni indikator yang merupakan hasil langsung dari pelayanan yang diberikan oleh SKPD dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
  - Misalnya: Data/indeks yang menjelaskan hasil suatu layanan, seperti: populasi laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan yang berkualitas;
  - jumlah rumah tangga miskin laki-laki maupun perempuan yang mendapat pelayanan air bersih;
  - jumlah pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja;
  - perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terpadu;
  - capaian NSPK, SPM serta SOP.

#### 3. Indikator pada tingkat output

Yakni indikator yang merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, misalnya:

- a. Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agribisnis;
- b. Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang;
- c. Rasio laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan
- d. dll

#### 4. Indikator spesifik gender

Yakni indikator yang secara khusus terkait dengan satu jenis kelamin saja, misalnya:

- a. Angka kekerasan terhadap perempuan,
- b. Jumlah kasus *trafficking* di kalangan perempuan

## Dari Kesejahteraan ke Perempuan dalam Pembangunan (WID)

	1940-an s/d 1960-an	1970-an	1980-an/1990-an	
Pendekatan Kebijakan terhadap Pembangunan	Pertumbuhan ekonomi	Pemerataan dengan pertumbuhan (kesempatan kerja dan kebutuhan dasar)	Efisiensi ekonomi dan pengembalian hutang (penyesuaian struktural)	
Pendekatan Kebijakan terhadap Perempuan/ Gender	Pra WID Kesejahteraan	WID Kesetaraan	WID Anti –kemiskinan	
Saat paling populer	1950-1970 Masih digunakan secara luas	1075-1985 Selama & setelah dekade perempuan	1970-an, masih populer	
Asal-usul	Model peninggalan dari kesejahteraan sosial dibawah pemerintahan kolonial  Modernisasi/ model pertumbuhan yang dipercepat	Kegagalan kebijakan modernisasi pembangunan  Dekade Perempuan	Kegagalan Pendekatan kesetaraan  Kebutuhan dasar dan pertumbuhan	Kemunduran ekonomi dunia  Politik penyesuaian struktural menggantungkan sumbangan perempuan pada perekonomian
Tujuan	Perempuan harus menjadi ibu yang baik dan “perawat” keluarga	Mengarah pada kesetaraan dlm pembangunan	Meningkatkan peran produktif kaum miskin; peningkatan pendapatan perempuan	Pembangunan harus efisien dan efektif; partisipasi ekonomi perempuan mengarah pada kesetaraan
Kebutuhan gender yang dipenuhi	Fokus pada peran reproduktif  Akses atas bantuan pangan, kontrasepsi, perbaikan gizi, perawatan kesehatan  Kebutuhan praktis gender perempuan sebagai istri dan ibu	Menjawab peran reproduktif dan produktif & politik perempuan di komunitas  Akses dan kontrol terhadap faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan (KPG & KSG)	Menjawab peran produktif dan reproduktif perempuan  Akses terhadap tanah, kredit, ketrampilan dan kontrasepsi  KPG: peningkatan pendapatan	Menjawab peran produktif dan pengelolaan komunitas perempuan yang mempengaruhi peran reproduktif; meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan pendapatan dan pelayanan dasar sebagai imbalan untuk partisipasi; menuntut “jaring pengaman” bagi kaum perempuan miskin.  KPG: penurunan pelayanan sosial



	1940-an s/d 1960-an	1970-an	1980-an/1990-an	
Kritik Gender	Fokus pada pertumbuhan industri/mechanisasi pekerjaan, pekerjaan bagi laki-laki, perempuan sebagai istri dan ibu	Mempertanyakan hubungan antara perempuan dan laki-laki Feminisme barat Ancaman (deskriminalisasi positif)	Fokus pada kaum miskin; laki-laki dilihat sebagai pencari nafkah utama, perempuan sebagai penyumbang	Tidak mengakui peran ganda perempuan; tidak mengakui struktur rumah tangga

## Dari WID (Woman in Development) ke GAD (Woman and Development)

	1940-an s/d 1960-an	1970-an	1980-an/1990-an
Pendekatan Kebijakan terhadap Pembangunan	Pembangunan negara sosialis	Kemandirian ekonomi dan “political non –alignment”	Keberlanjutan sosial dengan reformasi ekonomi dan politik (liberalisasi ekonomi dan restrukturisasi kelembagaan)
Pendekatan Kebijakan terhadap Perempuan/ Gender	Emansipasi	Pemberdayaan	GAD mainstreaming
Saat paling populer	Tahun 50-an dan 70-an	1975 s/d 80-an, masih agak populer	80-an sampai saat ini
Asal-usul	Negara sosialis	Timbulnya kegagalan pada pendekatan kesetaraan Feminis dunia ketiga dan organisasi-organisasi akar rumput	Pendekatan terbaru, perubahan dari WID ke GAD, reaksi terhadap marginalisasi kegiatan WID yang terlembagakan
Tujuan	Meningkatkan partisipasi politik perempuan dan meningkatkan kemampuan bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional	Pembangunan harus memberdayakan perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuannya	Mengintegrasikan kesadaran dan kemampuan gender dalam pembangunan
Kebutuhan gender yang dipenuhi	Peran produktif, reproduktif dan politik perempuan di komunitas  Akses <ul style="list-style-type: none"> <li>• terhadap pekerjaan dan pendapatan, tetapi tidak terhadap faktor-faktor produksi</li> <li>• terhadap pelayanan dan fasilitas sosial, tetapi tidak pada kebijakan</li> <li>• pada sistim legal</li> </ul> KPG: kesempatan kerja/ pendapatan KSG: partisipasi politik	Peran produktif, reproduktif, pengelolaan komunitas, politik di komunitas  <ul style="list-style-type: none"> <li>• akses terhadap faktor produksi/barang/ pelayanan</li> <li>• akses dan kontrol atas informasi; peningkatan kepercayaan diri, ketrampilan berpartisipasi dan mengambil keputusan</li> </ul> KPG: mobilisasi dari bawah KSG: organisasi	Peran produktif, reproduktif, pengelolaan komunitas, politik perempuan dan laki-laki di komunitas  KPG perempuan dan laki-laki. KSG perempuan dan laki-laki diusahakan: Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, Akses dan kontrol atas sumberdaya pembangunan dan manfaat dari hasil – hasil pembangunan
Kritik Gender	Isu-isu perempuan penting tetapi tersubordinasi oleh tujuan pembangunan nasional  Tidak menentang hubungan gender yang ada  Memusuhi organisasi-organisasi perempuan yang otonom	Mengakui hubungan gender, dengan perempuan yang terorganisir secara otonom  Fokus pada solidaritas antara perempuan dan laki-laki di dunia ketiga menantang model pembangunan barat	

Catatan: Diadaptasi dari C. Moser 1986 oleh GTZ/StS 04/WID-Project Egypt/Augustin, Ebba 1995, *People and Gender Responsive Management. Konsep, Panduan Pertanyaan dan Modul Latihan bagi Staf Proyek*, Eschborn

## **Pendekatan Kebijakan Women In Development (WID)/Gender And Development (GAD)**

Alat evaluasi untuk menguji pendekatan apakah yang dipakai dalam proyek meski dapat digunakan untuk mempertimbangkan apa yang sesuai di masa depan

- Kesejahteraan: Pendekatan paling awal, 1950-70. Tujuannya memasukkan kaum perempuan dalam pembangunan sebagai ibu. Perempuan dipandang sebagai ahli waris pembangunan yang pasif.
- Persamaan: pendekatan WID yang asli, digunakan dalam dekade perempuan PBB 1975-1986. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan bagi kaum perempuan yang dilihat sebagai partisipan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini mengakui tiga peran perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan gender strategis melalui intervensi negara langsung yang memberi otonomi politik ekonomi, serta mengurangi ketidakadilan untuk laki-laki
- Anti kemiskinan: pendekatan WID kedua, diadopsi sejak 1970-an. Tujuan untuk memastikan bahwa perempuan miskin meningkatkan produktivitas. Kemiskinan perempuan dipandang sebagai masalah keterbelakangan, bukan subordinasi. Pendekatan ini mengakui peran produktif perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan praktis
- Efisiensi: pendekatan WID ketiga, diadopsi sejak krisis utang 1980-an. Tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan jadi lebih efektif dan efisien melalui sumbangan ekonomi perempuan. Pendekatan ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan praktis. Perempuan dipandang secara menyeluruh berkenaan dengan kapasitasnya untuk mengimbangi berkurangnya pelayanan sosial dengan memperbanyak kerja sehari-hari.
- Pemberdayaan: Pendekatan terbaru. Tujuannya untuk memberdayakan kaum perempuan melalui percaya diri yang lebih besar. Subordinasi perempuan diekspresikan bukan karena penindasan laki-laki tetapi juga karena penindasan kolonial dan neokolonial. Perempuan harus mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk mengubah posisi mereka.

- POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**
- SUB POKOK BAHASAN** : **4.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep pengarusutamaan gender (PUG)
  2. Menjelaskan pembangunan yang responsif gender
  3. Mengidentifikasi proses dan hasil pembangunan di desa yang tidak responsif gender
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan sesi dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.4.3.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah dan Diskusi Kelompok-Pleno</b></p> <p>a. Fasilitator menjelaskan beberapa hal berikut dengan mengacu pada Bahan Bacaan Pengarusutamaan Gender (M.4.3.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pengertian pengarusutamaan gender;</li> <li>(ii) Contoh program responsif gender beserta contoh pembangunan yang responsif;</li> <li>(iii) Contoh program tidak responsif gender;</li> <li>(iv) Kerangka analisa Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM) atau Gender Analysis Pathway – GAP.</li> </ul> <p>b. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan contoh program di desa yang responsive dan tidak responsif gender pada ranah APKM mengacu pada Lembar Kerja APKM (M.4.3.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kelompok Akses</li> <li>(ii) Kelompok Partisipasi</li> <li>(iii) Kelompok Kontrol</li> <li>(iv) Kelompok Manfaat</li> </ul> <p>c. Fasilitator meminta peserta diminta menempelkan jawaban peserta di dinding dan membahas setiap hasil kerja kelompok;</p> <p>d. Fasilitator menyimpulkan jawaban peserta dan menambahkan penjelasan mengenai beberapa alat analisis gender mengacu pada Bahan Bacaan (M.4.3.4).</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja APKM (M.4.3.2)</li> <li>Bahan Bacaan Pengarusutamaan Gender (M.4.3.3)</li> <li>Bahan Bacaan Alat-alat Analisis Gender (M.4.3.4)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan terkait pentingnya melakukan analisa program pembangunan dengan menggunakan alat analisis APKM agar kelompok rentan tidak lagi tereksklusi pada proses pembangunan di Desa.</p>	10	

**LEMBAR KERJA APKM**

<b>RANAH</b>	<b>RESPONSIF GENDER</b>	<b>TIDAK RESPONSIVE GENDER</b>
Akses		
Partisipasi		
Kontrol		
Manfaat		

## BAHAN BACAAN

**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. (KPPPA: 2012: xxi). Tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui PUG gender terintegrasi sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Kesetaraan gender (gender equality) bermakna kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki Untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Keadilan gender (gender equity) bermakna perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan laki-laki sehingga dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya yang punya perbedaan kebutuhan dan karena itu kebutuhan tersebut harus dipenuhi.

Integrasi gender dalam kebijakan, program ataupun kegiatan SKPD dapat dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *affirmative action*. *Affirmative Action* adalah pengembangan program khusus (pemberdayaan perempuan) dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan dan pembangunan. (KPPPA, UNFPA dan BKKBN, 2004). *Affirmative action* memihak terhadap satu pihak (jenis kelamin) yang tertinggal dibandingkan pihak (jenis kelamin) lain untuk meningkatkan kesetaraan gender.

**Gender Analysis Pathway (GAP)**

Merupakan alat suatu analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/dana).

Terdiri dari 4 (empat) fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat

- e. **Akses:** Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
- f. **Partisipasi:** Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
- g. **Kontrol:** Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/ kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut?
- h. **Manfaat:** Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?

Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan. Metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* yang direkomendasikan secara nasional.

## BAHAN BACAAN

**ALAT-ALAT ANALISIS GENDER****1. Kerangka Moser: Analisis Kebutuhan Gender**

Kerangka ini berusaha memasukkan agenda pemberdayaan dalam perencanaan. “Sasaran perencanaan adalah pembebasan perempuan dari subordinasinya, dan mencapai persamaan, keadilan, dan pemberdayaan bagi mereka.

Inti kerangka ini adalah konsep:

- a. Tiga Peran
- b. Kebutuhan Praktis dan Strategis gender
- c. Kategori Pendekatan kebijakan bagi Perempuan (Women and Development - WAD/Women in Development - WID), dan Gender dan Pembangunan (GAD)

**Instrumen dan penggunaan:**

- a. Identifikasi Peran gender
  - Menjawab pertanyaan siapa mengerjakan apa?
  - Kerja reproduktif, produktif, kerja komunitas (manajemen komunitas: aktivitas yang terutama dilakukan perempuan perluasan peran reproduksi, dan kerja politik komunitas)
- b. Penilaian kebutuhan gender: Menjawab pertanyaan kebutuhan praktis dan strategis apa?
  - Kebutuhan praktis: kebutuhan yang segera dirasakan yg diidentifikasi dalam konteks spesifik, praktis, seringkali mengenai kekurangan-kekurangan dalam kondisi sehari-hari seperti persediaan air, perawatan kesehatan, dan lapangan kerja.
  - Kebutuhan strategis kebutuhan yang diidentifikasi untuk mengubah hubungan atasan bawahan. Memenuhi kebutuhan strategis akan membantu perempuan mencapai kesetaraan. Hal itu juga akan mengubah peran-peran yang ada dan karenanya menolak posisi subordinat perempuan. Kebutuhan strategis gender meliputi: penghapusan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, pengurangan beban kerja rumah tangga dan perawatan anak, penghapusan bentuk diskriminasi yg dilembagakan seperti hak untuk memiliki tanah atau harta benda, perceraian, pemeliharaan anak-anak, akses terhadap kredit dan sumberdaya lainnya.

**2. Pendekatan Kebijakan Women In Development (WID)/Gender And Development (GAD)**

Alat evaluasi untuk menguji pendekatan apakah yang dipakai dalam proyek meski dapat digunakan untuk mempertimbangkan apa yang sesuai di masa depan

- a. Kesejahteraan: Pendekatan paling awal, 1950-70. Tujuannya memasukkan kaum perempuan dalam pembangunan sebagai ibu. Perempuan dipandang sebagai ahli waris pembangunan yang pasif.
- b. Persamaan: pendekatan WID yang asli, digunakan dalam dekade perempuan PBB 1975-1986. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan bagi kaum perempuan yang dilihat sebagai partisipan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini mengakui tiga peran perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan gender strategis melalui intervensi negara langsung yang memberi otonomi politik ekonomi, serta mengurangi ketidakadilan untuk laki-laki
- c. Anti kemiskinan: pendekatan WID kedua, diadopsi sejak 1970-an. Tujuan untuk memastikan bahwa perempuan miskin meningkatkan produktivitas. Kemiskinan perempuan dipandang sebagai masalah



keterbelakangan, bukan subordinasi. Pendekatan ini mengakui peran produktif perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan praktis.

- d. Efisiensi: pendekatan WID ketiga, diadopsi sejak krisis utang 1980-an. Tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan jadi lebih efektif dan efisien melalui sumbangan ekonomi perempuan. Pendekatan ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan praktis. Perempuan dipandang secara menyeluruh berkenaan dengan kapasitasnya untuk mengimbangi berkurangnya pelayanan sosial dengan memperbanyak kerja sehari-hari.
- e. Pemberdayaan: Pendekatan terbaru. Tujuannya untuk memberdayakan kaum perempuan melalui percaya diri yang lebih besar. Subordinasi perempuan diekspresikan bukan karena penindasan laki-laki tetapi juga karena penindasan kolonial dan neokolonial. Perempuan harus mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk mengubah posisi mereka.

### 3. Kerangka Parker: Matriks Analisis Gender

- a. Alat untuk merencanakan, merancang, memantau, dan mengevaluasi proyek di tingkat basis (komunitas)
- b. Dikhususkan bagi aktivis pembangunan yang bekerja di tingkat akar rumput
- c. Empat tingkat analisis, yaitu: Perempuan, Laki-laki, rumah tangga (termasuk anak-anak dan anggota keluarga lain dalam RT), komunitas
- d. Perempuan – mengacu pada semua perempuan segala umur dalam kelompok sasaran atau komunitas.
- e. Laki-laki - mengacu pada semua laki - laki segala umur dalam kelompok sasaran atau komunitas.
- f. Rumah Tangga (RT) – mengacu pada semua anggota dalam rumah tangga(perempuan, laki – laki, anak2 dan anggota keluarga lain. Tipe RT bervariasi).
- g. Komunitas – mengacu pada semua orang dalam wilayah proyek secara keseluruhan.

#### Kategori analisis

1. Pekerjaan.  
Menunjuk pada perubahan dalam tugas-tugas, misalnya mengangsu air dari sungai, tingkat keterampilan yang diperlukan, dan kapasitas kerja, misalnya berapa orang dan berapa banyak yang dapat mereka kerjakan, apakah orang perlu digaji atau dapatkah anggota rumah tangga mengerjakan hal tersebut?
2. Waktu  
Menunjuk pada perubahan dalam jumlah waktu yang terpakai untuk menyelesaikan tugas berkenaan dengan proyek atau aktivitas.
3. Sumberdaya  
Menunjuk pada perubahan dalam akses terhadap kapital (pendapatan, lahan, kredit) sebagai konsekuensi proyek, dan tingkat kontrol atas sumberdaya.
4. Faktor – faktor budaya  
Menunjuk pada perubahan dalam aspek sosial kehidupan partisipan (perubahan dalam peran dan status gender) sebagai akibat proyek.

#### Tujuan Proyek:

	Pekerjaan	Waktu	Sumberdaya	Budaya
Perempuan				
Laki - Laki				
Rumah Tangga				
Komunitas				

Analisis tergantung pada penggunaan alat ini. Lebih banyak digunakan untuk evaluasi.

#### 4. Kerangka Longwe: Kerangka Pemberdayaan Perempuan

Tingkat Pemberdayaan	Kesetaraan	Pemberdayaan
Kontrol		
Partisipasi		
Penyadaran		
Akses		
Kesejahteraan		

#### 5. Kerangka Kabeer: Kerangka Relasi Sosial

##### Tujuan

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis ketidakadilan gender yang ada dalam distribusi sumberdaya, tanggung jawab dan kekuasaan, serta untuk merancang kebijakan dan program yang memungkinkan bagi kaum perempuan untuk menjadi agen bagi pembangunannya sendiri. Konsep Utama Kerangka ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pembangunan adalah kesejahteraan manusia  
 Dalam pendekatan ini, pendekatan terutama akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan bukan diutamakan untuk pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki produktivitas materi.
- b. Relasi Sosial  
 Kemiskinan muncul dari relasi sosial yang tidak sama yang mempengaruhi relasi yang tidak sama terhadap sumberdaya, tanggung jawab. Singkatnya, orang tidak memulai pada titik yang sama dalam sistem sosial, dan karena orang memiliki kapasitas yang sangat berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan atau status quo.  
 Istilah relasi sosial digunakan untuk menggambarkan pelbagai hubungan struktural yang menciptakan dan memproduksi perbedaan sistematis dalam penempatan posisi pelbagai kelompok orang. Relasi sosial menghasilkan ketidakadilan yang bersilangan yang menganggap berasal dari posisi individu dalam struktur dan hierarki masyarakat mereka; mereka memberi makna tentang siapa kita, apa kita, apa peran dan tanggungjawab kita serta tuntutan apa yang dapat kita buat, hak-hak kita, kontrol yang kita punyai atas hidup kita sendiri dan kehidupan orang lain.
- c. Analisis Kelembagaan  
 Sebab-sebab yang mendasari ketidakadilan gender tidak dibatasi kepada rumah tangga dan keluarga tetapi direproduksi melintasi rentang institusi, termasuk komunitas internasional, negara dan pasar.

Lokasi Kelembagaan	Bentuk Organisasional/Struktur
Negara	Organisasi hukum, militer, administratif
Pasar	Perusahaan jasa, perusahaan keuangan, perusahaan pertanian, multinasional, dll
Komunitas	Tribunal desa, perkumpulan sukarela, jaringan informal, hubungan patron-klien, NGO's
Keluarga/kekerabatan	Rumah tangga, keluarga yang diperluas, kelompok adat, dll

## 6. Kerangka Harvard: Kerangka Analisis Peran Gender (Gender Analysis Pathway – GAP)

### Instrumen & Penggunaan:

#### a. Profil Kegiatan

- Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi seluruh tugas dengan mengajukan pertanyaan kunci: Siapa mengerjakan apa, dimana dan kapan?
- Rinciannya tergantung pada konteks proyek: pertanian, peternakan, perikanan, mata pencaharian lain) dan umur (apakah perempuan dan laki - laki dewasa, perempuan remaja, atau anak-anak.

Jenis Kegiatan	Perempuan/Anak Perempuan	Laki-laki/Anak Laki-laki
<b>Kegiatan produktif</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian/Peternakan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kegiatan 1.</li> <li>(ii) Kegiatan 2.</li> <li>(iii) dst</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Kegiatan reproduksi (yang berkaitan dengan kebutuhan)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air bersih</li> <li>• Bahan bakar untuk memasak</li> <li>• Penyiapan makanan</li> <li>• Pengasuhan anak</li> <li>• Kebersihan dan perbaikan rumah</li> </ul>		
<b>Kegiatan Komunitas</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upacara dan perayaan</li> <li>• Pertemuan Komunitas</li> <li>• Kegiatan Pertanian Kolektif</li> </ul>		

**Profil Akses dan Kontrol**

Pertanian	Akses		Kontrol	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki

**Sumberdaya:**

- Tanah/Lahan
- Peralatan
- Uang
- Pendidikan / pelatihan
- Dll

**Manfaat:**

- Pendapatan dalam bentuk uang
- Pendapatan dalam bentuk lain
- Pendidikan atau ketrampilan
- Kepemilikan
- Kebutuhan Pokok (pangan, sandang)
- Kekuasaan Politik/Prestige
- Dll

**b. Faktor-faktor yang berpengaruh**

	Faktor – faktor yang mempengaruhi			
	Deskripsi	Dampak	Kesempatan	Hambatan
Sosial – Budaya				
Ekonomi				
Demografi				
Politik				
Legal/Hukum				
Ekologi				
Dll				

- Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor apa yang memengaruhi kegiatan, akses dan kontrol, serta bagaimana faktor-faktor itu memengaruhi
- Merupakan daftar faktor-faktor, seperti budaya, kepercayaan, pertumbuhan penduduk, perubahan/peristiwa politik, perusakan lingkungan, norma komunitas dan hirarki sosial seperti struktur kekuasaan keluarga / komunitas, dan kondisi ekonomi dsb. yang memengaruhi perbedaan kesempatan dan hambatan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Dampak perubahan yang terjadi berulang-ulang dalam batasan budaya dan situasi ekonomi harus diperhitungkan dalam analisis ini.
- Mengidentifikasi pengaruh yang lampau dan sekarang untuk melihat perubahan dan kecenderungan di masa depan, sekaligus dapat mengidentifikasi kesempatan dan keterbatasan yang dihadapi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan.

c. **Analisis Siklus Proyek**

Alat ini digunakan untuk memastikan apakah kesetaraan gender sudah diperhatikan dalam setiap tahapan siklus proyek.

- Analisis Kerentanan dan Kapasitas. Kerangka ini punya 3 kategori kemampuan dan kerentanan:
  - Fisik atau material
  - Sosial atau organisasional
  - Motivasi dan Sikap

Dengan tambahan dimensi:

- Disagregasi gender
- Disagregasi menurut perbedaan lainnya (kelas ekonomi, etnis...)
- Perubahan Sepanjang Waktu

d. **Analisis Kerentanan dan Kapasitas**

	Kerentanan	Kapasitas
Fisik/material		
Apa sumberdaya produktif, ketrampilan, dan bahaya yang ada?		
Sosial/organisasi		
Bagaimana hubungan dan organisasi antar orang?		
Motivasi/sikap		
Bagaimana komunitas memandang kemampuannya untuk menciptakan perubahan?		

e. **Analisis Disagregasi gender**

	Kerentanan		Kapasitas	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Fisik/materi				
Sosial/organisasi				
Motivasi/sikap				

f. **Analisis Disagregasi Kelas Ekonomi**

	Kerentanan			Kapasitas		
	Kaya	Sedang	Miskin	Kaya	Sedang	Miskin
Fisik/materi						
Sosial/organi sasi						
Motivasi/sikap						

## **Kerangka Gender Analisis Pathway (GAP)**

*Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan instrumen untuk menganalisis isu gender dalam perencanaan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mereformulasi tujuan, menetapkan rencana, menetapkan baseline, dan terakhir adalah untuk merumuskan indikator-indikator yang dapat mengatasi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kendali/kontrol, dan manfaat. GAP merupakan instrumen analisis gender yang diperuntukkan bagi para perencana untuk menganalisis kebijakan/program/kegiatan dengan menggunakan perspektif gender.

### **9 Langkah dalam Gender Analysis Pathway (GAP):**

1. **Tentukan Tujuan Kebijakan**  
Identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan, memilih apa yang kita analisis, apakah kebijakan, jika kebijakan yang menjadi fokus analisis maka yang menjadi acuan kita adalah tujuan dari kebijakan tersebut, demikian juga jika kita memilih program atau kegiatan yang dianalisis.
2. **Menyajikan Data terpilah**  
Sajikan data pembuka wawasan, data yang dimaksud adalah data terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD atau review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan.
3. **Mengenali Isu Kesenjangan Gender**  
Menemukanali isu gender di dalam proses perencanaan kebijakan/ program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan cara memperhatikan 4 faktor indikator gender yaitu (1). Akses (2). Kontrol (3). Partisipasi dan (4). Manfaat.
4. **Menemukanali Isu Gender di Internal Lembaga**  
Menemukanali isu gender di internal lembaga atau budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih terbatas/kurang diantara pengambil keputusan, perencana dan juga political will dari pembuat kebijakan.
5. **Menemukanali Isu Gender di Eksternal Lembaga**  
Menemukanali isu gender di eksternal lembaga pada proses perencanaan, misalnya apakah perencana program sensitif gender terhadap kondisi isu gender di dalam masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat sasaran yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarki dan stereotipe.
6. **Merumuskan Kebijakan**  
Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan.
7. **Menyusun Rencana Aksi**  
Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan program/kegiatan yang telah direformulasi sesuai langkah 6.
8. **Pengukuran Hasil**  
Menetapkan data dasar untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar dimaksud dapat diambil dari data pembuka wawasan seperti yang telah diungkapkan pada langkah 2.
9. **Indikator Gender**  
Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperhatikan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau berkurang.

## Kerangka Gender & Disability Analysis Pathway

Sebagai sebuah dasar membangun inklusi sosial dengan tools yang ditawarkan SAPDA, dimulai dengan melakukan beberapa alat yang mempermudah melihat posisi perempuan penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial dan kebijakan dengan membandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas, laki laki penyandang disabilitas dan laki-laki bukan penyandang disabilitas. Analisa ini mengembangkan konsep *gender pathway* yang melihat akses, kontrol, partisipasi dan manfaat terhadap perempuan terhadap program dan kebijakan publik.

*Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/ kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender ke dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan. Model atau metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat pembangunan. Selain itu model GAP kita mengetahui kesenjangan gender dan permasalahan gender. Dengan mengetahui kesenjangan gender tersebut para perencana atau pembuat kebijakan dapat menyusun rencana melalui penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender.

Untuk melakukan analisis keadilan berbasis gender dan disabilitas misalkan keadilan terhadap perempuan penyandang disabilitas ataupun laki-laki penyandang disabilitas, maka tidak cukup hanya menggunakan *gender analysis pathway* yang lebih melihat konstruksi gender laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Sedangkan pada isu disabilitas akan menganalisa lebih detail terkait dengan disabilitas dan peran gender nya di ranah domestik dan publik dengan alat analisis AKPM yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Sehingga kerangka analisis ini dapat disebut sebagai 7 langkah analisis kesenjangan gender dan disabilitas atau 7 langkah dalam Gender analysis pathways yang berusaha mengkolaborasikan isu gender dan disabilitas dalam ranah domestik dan publik.

Domestik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau masalah dalam negeri. Arti domestik juga bermakna segala sesuatu yang berkenaan dengan kerumahtanggaan. Hal ini berarti istilah domestik mencakup segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup internal dalam negeri ataupun rumah tangga. Dalam dokumen ini domestik dibatasi pada hal-hal yang bersifat kerumahtanggaan baik berupa fisik ataupun non fisik termasuk rumah, peralatan pembuatan keputusan atas diri ataupun orang lain dalam rumah tangga.

Ruang publik adalah Areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata (*Real Space*) ataupun dunia maya (*Virtual Space*). *Real space* dapat berupa taman-taman, sekolah, gedung-gedung bersama, Gym dll. Sedangkan *virtual space* dapat berupa grup-grup Facebook, WhatsApp, LINE dll. Jika diambil contoh dalam sebuah grup Bahasa Inggris di Facebook, semua orang yang berada didalam grup itu bisa dikatakan memiliki satu tujuan sama, yaitu belajar bahasa inggris (tanpa menghitung beberapa orang yang bertujuan untuk berjualan atau tujuan lain yang tidak diungkapkan).

Di dalam grup ini nantinya akan dibahas materi-materi yang dipelajari. Selain itu, admin (ataupun pengurus) grup biasanya akan bertanya tentang hal apa yang menjadi permasalahan anggota grup, seperti pada bagian mana seorang anggota grup masih sangat kurang dalam memahami materi. Selanjutnya pengurus grup bisa memberikan solusi. Jika pengurus tidak mampu, maka pengurus tersebut bisa melemparnya ke semua member untuk didiskusikan bersama. Contoh lain, pada taman-taman kota ataupun tempat wisata. areal taman ini tentu saja fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk *refreshing*, sebagai tempat mendapatkan *relaxation* setelah melewati pekerjaan yang cukup membebani pikiran, atau juga sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga.





Keputusan Atas Diri Pribadi, Pasangan dan/atau Anggota Keluarga (Anak, Orang Tua)				Catatan
	Perempuan tanpa disabilitas	Perempuan penyandang disabilitas	Laki-laki	Laki-laki penyandang disabilitas
Akses	Apakah mempunyai akses atas informasi sebagai dasar pembuatan keputusan untuk diri sendiri, pasangannya dan atau anggota keluarga dalam rumahtangganya ?			Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pembuka yang kemudian akan ditelusuri penyebab utama seorang perempuan disabilitas tidak mempunyai kesetaraan dengan orang lain membuat keputusan atas diri, anggota keluarga dan atau pasangannya
Kontrol	Apakah mempunyai kontrol untuk membuat keputusan pada dirinya sendiri dan atau pasangannya? Atau terhadap anggota keluarga yang ada dalam rumahtangganya. (seperti keputusan mempunyai anak, menikah, memasang alat kontrasepsi, bekerja atau tidak bekerja, pendidikan atau layanan kesehatan).			
Partisipasi	Apakah berpartisipasi dalam menentukan keputusan terhadap pasangan dan anggota lain dalam keluarganya			
Manfaat	Apakah mendapatkan manfaat atas keputusan yang diambil atas diri atau pasangannya?			

## 2. Ranah Publik dalam lingkungan sosial terdekat

Ranah publik dalam lingkungan sosial terdekat merupakan ruang sosial yang secara keseharian menjadi ruang hidup dan bersosialisasi bagi perempuan penyandang disabilitas, secara sederhana adalah lingkungan hidup bertetangga dalam lingkup dusun, RT, bale. Beberapa hal yang menjadi bahan analisa adalah terkait dengan aktivitas sosial semacam kerja bakti, upacara adat, hajatan atau pembangunan bangunan ibadah atau upacara, dimana hal tersebut diluar ranah negara atau bahkan untuk melakukan intervensi.

Kerja Bakti di Kampung				Catatan
	Perempuan tanpa disabilitas	Perempuan penyandang disabilitas	Laki-laki	Laki-laki penyandang disabilitas
Akses	Apakah mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kerjabakti di kampung? apakah mempunyai akses atas peralatan atau bahan kerjabakti			Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pembuka yang kemudian akan ditelusuri penyebab utama seorang perempuan disabilitas tidak mempunyai kesetaraan dengan orang lain membuat keputusan kerja bakti/ gotong royong yang dilaksanakan
Kontrol	Apakah mempunyai kontrol untuk waktu, cara dan lokasi kerjabakti di kampung?			
Partisipasi	Apakah dapat berpartisipasi secara bermakna sesuai kondisi individu			
Manfaat	Apakah mendapatkan manfaat atas kerjabakti yang dilaksanakan oleh masyarakat			

Bangunan Tempat Ibadah/ Balai Kampung				Catatan
	Perempuan tanpa disabilitas	Perempuan penyandang disabilitas	Laki-laki	Laki-laki penyandang disabilitas
Akses	Apakah mempunyai akses untuk menggunakan tempat ibadah/ balai kampung			Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pembuka yang kemudian akan ditelusuri penyebab utama seorang perempuan disabilitas tidak mempunyai kesetaraan dengan orang lain dalam pembangunan, keberadaan dan pemanfaatan tempat ibadah atau balai kampung
Kontrol	Apakah mempunyai kontrol untuk pembangunan atau pemanfaatan tempat ibadah/balai kampung			
Partisipasi	Apakah dapat berpartisipasi dalam pembangunan atau pemanfaatan tempat ibadah/balai kampung			
Manfaat	Apakah mendapatkan manfaat atas pembangunan, keberadaan atau pemanfaatan tempat ibadah/balai kampung			

### 3. Ranah Publik program dan kebijakan

Ranah publik program dan kebijakan disini dapat bermula dari level desa yang mempunyai kewenangan untuk membuat program, kebijakan bahkan untuk pengalokasian anggaran secara mandiri.

Beberapa hal yang menjadi penting untuk dilakukan analisa adalah sebagai berikut:

#### a. Penyusunan regulasi dan kebijakan

Penyusunan Regulasi dan Kebijakan				Catatan
	Perempuan tanpa disabilitas	Perempuan penyandang disabilitas	Laki-laki	Laki-laki penyandang disabilitas
Akses	Apakah mempunyai akses untuk penyusunan regulasi/kebijakan di desa/daerah			Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pembuka yang kemudian akan ditelusuri penyebab utama seorang perempuan disabilitas tidak mempunyai kesetaraan dengan orang lain penyusunan regulasi atau kebijakan yang disusun
Kontrol	Apakah mempunyai kontrol atas substansi atau proses regulasi/ kebijakan yang akan disusun			
Partisipasi	Apakah dapat berpartisipasi penuh dalam penyusunan regulasi/ kebijakan			
Manfaat	Apakah mendapatkan manfaat dari regulasi/kebijakan yang disusun/disahkan			

#### b. Program pembangunan desa/daerah

#### c. Pelayanan publik

#### d. Pembangunan fasilitas publik

**POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**

**SUB POKOK BAHASAN** : **4.4. INKLUSI SOSIAL DAN EKLUSI SOSIAL**

**TUJUAN** : Setelah penyajian pokok bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep serta bentuk inklusi dan eksklusi sosial
2. Mampu mengidentifikasi akar eksklusi sosial
3. Mampu mengidentifikasi dampak eksklusi sosial terhadap kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

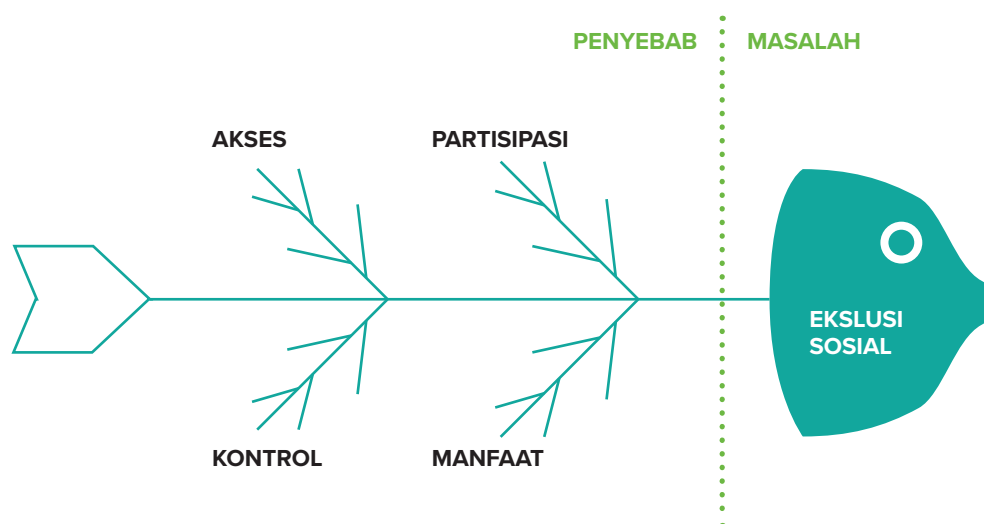
## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan sesi dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.4.4.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Permainan, Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan dengan mengacu pada Lembar Instruksi Permainan Merebut Barang (M.4.4.2);</p> <p>b. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan masalah dan penyebab eksklusi sosial dengan menggunakan Lembar Tugas Menentukan Akar Masalah Eksklusi Sosial (M.4.4.3);</p> <p>c. Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi ditanggapi oleh kelompok lain;</p> <p>d. Fasilitator mencatat poin-poin penting diskusi dan pembahasan pada kertas plano;</p> <p>e. Fasilitator menyampaikan catatan hasil diskusi dan mempresentasikan konsep gerakan inklusi dan eksklusi sosial mengacu pada Bahan Bacaan (M.4.4.3).</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Instruksi Permainan Merebut Barang (M.4.4.2)</li> <li>Lembar Tugas Menentukan Akar Masalah Eksklusi Sosial (M.4.4.3)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan terkait pengertian, penyebab dan dampak inklusi dan eksklusi sosial dan menambahkan informasi terkait Disabilitas serta gerakan inklusi sosial serta perkembangannya (M.4.4.4).</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Disabilitas (M.4.4.4)</li> </ul>

## LEMBAR INSTRUKSI PERMAINAN MEREbut BARANG

1. Sediakan berbagai macam barang (selain benda tajam) yang ada di ruang kelas sebanyak-banyaknya sebelum materi dimulai;
2. Jelaskan kepada peserta bahwa sebelum sesi dimulai akan dilakukan permainan untuk membuat peserta kembali focus dan siap memulai materi berikutnya;
3. Letakkan semua barang pada ruang agak luas di luar area duduk peserta;
4. Minta semua peserta berdiri melingkar. Usahakan jaraknya dengan barang agak jauh;
5. Jelaskan bahwa pada hitungan ketiga, semua peserta harus bergegas mengambil barang sebanyak-banyaknya dan langsung kembali ke tempat semula di mana mereka berdiri;
6. Mulai hitungan 1, 2, 3;
7. Setelah semua peserta kembali berada di tempatnya semula, tanyakan beberapa pertanyaan berikut:
  - a. Apa perasaan mereka saat melakukan permainan?
  - b. Siapa yang paling banyak mendapatkan barang? Berapa jumlahnya? Mengapa ont dapat sebanyak itu?
  - c. Siapa yang sama sekali tidak mendapatkan barang? Mengapa?
8. Ulas kembali pendapat peserta mengenai faktor penyebab mendapatkan banyak barang dan sama sekali tidak mendapatkan barang;
9. Minta peserta kembali ke tempat duduk semula;
10. Ajak peserta melakukan analisa mengajukan pertanyaan:
  - a. Jika semua barang di tegah tadi diumpamakan sebagai program atau kegiatan di Desa, kira-kira siapa atau kelompok mana yang mendapatkan banyak manfaat dari program/kegiatan?
  - b. Siapa yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali? Mengapa?
  - c. Apa yang ont dilakukan agar semua kelompok masyarakat ont berpartisipasi, mendapatkan akses dan manfaat serta ontrol dalam proses pembangunan di Desa?
  - d. Jika belum muncul jawaban terkait APKM perempuan, disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, gali kembali dengan memfokuskan pertanyaan 10 b dan c;
11. Simpulkan dan kaitkan dengan konsep inklusi dan eksklusi sosial serta normalitas dan abnormalitas;
12. Sampaikan informasi bahwa permainan tadi adalah pengantar materi dan Mentor SEPEDA KEREN diharapkan juga dapat memanfaatkan, mencari dan mengembangkan permainan untuk membuat sebuah pelatihan atau pertemuan lebih dinamis dan menyenangkan serta bermanfaat secara optimal. Berikan penekanan pentingnya mengajak peserta yang hadir melakukan analisa setelah permainan selesai dengan menghubungkannya ke materi yang sedang dibahas.

## LEMBAR TUGAS MENENTUKAN AKAR MASALAH EKSKLUSI SOSIAL



### Langkah-Langkah Pembuatan *Fishbone* Diagram

#### Langkah 1: Menyepakati pernyataan masalah

- Pernyataan masalah (*problem statement*) adalah Eksklusi Sosial yang secara visual terletak pada “kepala ikan”.
- Gambar kotak-kotak tersebut adalah Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat

#### Langkah 2: Mengidentifikasi kategori-kategori

- Dari garis horisontal terdapat garis miring tebal yang menjadi “cabang utama”. Setiap cabang utama mewakili “sebab utama” dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan secara visual dalam *fishbone* seperti “tulang ikan”.
- Kategori sebab utama itu sedemikian rupa hingga betul-betul dianggap menjadi sebab dengan masalah yang terjadi. Kategori yang digunakan adalah:
  - Akses
  - Partisipasi
  - Kontrol
  - Manfaat

#### Langkah 3: Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara *brainstorming*

- Setiap kategori mempunyai sebab-sebab (faktor yang mempengaruhi terjadinya sebab utama) yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming* di dalam kelompok menjadi “anak cabang” pada *fishbone* diagram.
- Saat faktor-faktor dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam *fishbone* diagram.
- Faktor-faktor penyebab itu ditulis pada *sticky note* (*Post-it*) dan tempatkan pada garis miring (anak cabang) yang ada di sepanjang “garis miring utama” (cabang utama).
- Satu faktor penyebab bisa ditulis di beberapa tempat jika faktor tersebut berhubungan dengan beberapa kategori.

**Langkah 4: Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin**

- Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin.
- Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan (sebab yang tampaknya paling memungkinkan) dan tanyakan, “Mengapa ini menjadi sebab?”
- Tanyakan “Mengapa?” sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Pertanyaan “Mengapa?” akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi.
- Lingkarilah sebab yang tampaknya paling mungkin pada fishbone diagram
- Salin temuan dalam tabel berikut:

**Masalah: Eksklusi Sosial**

Sebab Utama	Faktor Penyebab	Tawaran Solusi	Pihak Terkait	Dukungan yang Dibutuhkan
Akses				
Partisipasi				
Kontrol				
Manfaat				

## BAHAN BACAAN

### DISABILITAS

Definisi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 “orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama” yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penulisan terminologi yang tepat dan sah secara hukum adalah penyandang disabilitas. Mengingat disabilitas ini merupakan kondisi yang dapat berubah-ubah, terminologi dapat di elaborasi menjadi siswa dengan disabilitas, pekerja dengan disabilitas, penumpang dengan disabilitas atau orang yang mengalami disabilitas. Istilah lain yang dapat diterima untuk digunakan adalah difabel dan berkebutuhan khusus. Istilah ini dinilai tidak merendahkan martabat orang-orang yang mengalami disabilitas. Terkait juga penyebabnya apa, karena penyebab itu terkait aspek psikologis juga. Disabilitas kecelakaan berbeda dengan disabilitas dari kecil, ketika terjadi kekerasan pasti akan ada hubungannya dengan hal tsb.

Sebagai lawan kata dari disabilitas, gunakan kata tidak mengalami disabilitas atau merujuk ke kondisi impairment dari orang tersebut. Misalnya: disabilitas netra lawan katanya adalah tidak disabilitas netra atau bisa melihat. Tuli, lawan katanya adalah dapat mendengar. Pengguna kursi roda, lawan katanya adalah orang yang bisa berjalan atau tidak menggunakan kursi roda. Jangan pernah menggunakan kata sehat, normal, sempurna, beruntung. Tidak perlu berupaya untuk memperhalus terminologi disabilitas dengan terminologi lain seperti: manusia special, orang-orang yang luar biasa, manusia pilihan Tuhan dan lain-lain. Ingat, semangat inklusi adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam kesetaraan.

Orang yang memiliki disabilitas adalah individu selayaknya orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Meskipun terkadang ada yang memiliki perilaku, sifat, sikap yang sama, setiap individu harus dianggap berbeda. Oleh sebab itu, janganlah menyamaratakan perlakuan terhadap mereka, terutama yang berdasarkan pada disabilitas. Berdasarkan undang-undang tersebut, disabilitas dikategorikan<sup>1</sup> menjadi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Seseorang bisa juga mengalami gabungan 2 disabilitas atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah disabilitas ganda atau multi disabilitas.

### Jenis atau Ragam Disabilitas

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya:
  - skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
  - disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

<sup>1</sup> Ibid. Pasal 4 dan penjelasannya



- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- e. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

## Sejarah Singkat Gerakan Disabilitas

Pelabelan dan stigma soal disabilitas-non disabilitas hingga saat ini belum bisa lepas dari bagaimana masyarakat memandang dan/atau menilai seseorang. Ukuran-ukuran yang masih sering dipakai dan berlaku dalam tatanan sosial biasanya masih terkait dengan ketubuhan, anggapan cantik/molek, bentuk/proporsi tubuh, penampilan seseorang, kondisi medis/kesehatan seseorang, serta asumsi ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Ideologi ini berkembang karena pada awalnya, disabilitas/kecacatan memang dipandang sebagai sesuatu yang harus diperbaiki melalui pendekatan medis. Bahwa bentuk tubuh yang tidak sama dengan kebanyakan orang atau bagian tubuh yang hilang, haruslah dibuat sama dengan orang lain atau diganti dengan anggota tubuh palsu (prostetik).

Ideologi ini berkembang pada jaman perang dunia I dan II, dimana banyak sekali tentara yang kehilangan bagian atau fungsi terhadap tubuhnya karena peperangan, dan untuk bisa menjalankan kembali kehidupannya di masyarakat bagian tubuh yang hilang/rusak tersebut harus dilengkapkan/diperbaiki kembali. Ideologi memperbaiki/menambahkan bagian tubuh inilah yang disebut dengan *Medical Model* (model medis).

Gerakan-gerakan disabilitas yang kemudian berkembang, adalah gerakan yang mencoba mengikis stigma/anggapan negatif diatas melalui pendekatan sosial. Bahwa setiap penyandang disabilitas, masih mampu menjalani kehidupannya saat diberikan kesempatan, kepercayaan, dan dukungan dari orang-orang disekitarnya. Bagaimana keberhasilan seorang penyandang disabilitas, kemandirian bermobilitas dan mengurus diri sendiri akan sangat dipengaruhi oleh dukungan orang disekitar dan kondisi lingkungan. Rasa kasihan, amal kebaikan, dan ganjaran dari Tuhan seringkali menjadi alasan utama masyarakat memberikan akses kepada penyandang disabilitas dalam kesehariannya. Hal ini, mengakibatkan ketergantungan bagi penyandang disabilitas. Jika tidak ada orang yang bersedia membantu, memberikan jalan, merasa belas kasihan dan menyediakan akses lingkungan kepada penyandang disabilitas, maka mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Pada pendekatan *Social Model* (model sosial) ini, disabilitas dianggap sebagai masalah sosial dimana menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan *support* dan dukungan dari masyarakat untuk dapat berkembang, mandiri, dan berperan aktif didalam kehidupan bermasyarakat.

Dua ideologi di atas ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu pada stigma normal/tidak normal dalam memandang penyandang disabilitas. Seseorang yang berjalan dengan cara berbeda dengan kebanyakan orang akan dianggap sebagai kecacatan yang harus diperbaiki, ketidakmampuan melihat/mendengar pada seseorang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, dan lain sebagainya. Ideologi yang saat ini berkembang, mencoba mengikis kelemahan tersebut. Perjuangan atas kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah soal Hak Asazi Manusia, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dengan orang lain tanpa kecuali.

- POKOK BAHASAN** : **4. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL**
- SUB POKOK BAHASAN** : **4.5. MEMAHAMI REALITAS KEBERADAAN DAN DUKUNGAN KEPADA KELOMPOK RENTAN LAINNYA**
- TUJUAN** : Setelah penyajian pokok bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Melakukan Identifikasi kelompok rentan lainnya
  2. Menjelaskan berbagai metode dan pendekatan (penjangkauan)
  3. Menjelaskan etika berinteraksi Mentor dan Kader ke Kelompok Rentan dan antar Kelompok Rentan
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan sesi dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (4.5.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada peserta dan meminta mereka mengidentifikasi kelompok rentan yang berada di sekitar atau lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Usia</li> <li>(ii) Ekonomi</li> <li>(iii) Situasi Sosial (Korban bencana, minoritas, korban stigma sosial, tunawisma, korban konflik sosial, ODHA)</li> </ul> <p>b. Fasilitator meminta hasil identifikasi ditempel pada kertas plano atau di dinding kelas, meminta salah seorang peserta menjadi relawan untuk membacakannya;</p> <p>c. Fasilitator membagikan Bahan Bacaan Peran Sosial Penyandang Disabilitas (M.4.5.2) dan meminta peserta membaca serta memahami bahan bacaan tersebut selama 5 menit;</p> <p>d. Fasilitator meminta 2 orang relawan maju ke depan kelas untuk memfasilitasi pembahasan identifikasi kelompok rentan lainnya. Satu orang memfasilitasi proses dan lainnya menuliskan poin-poin pembahasan pada kertas plano. Ajukan pertanyaan kunci berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Apa yang dapat dipelajari dari bahan bacaan tersebut?</li> <li>(ii) Jika kita kontekstualkan informasi dalam bahan bacaan kepada kelompok rentan lainnya yang telah teridentifikasi sebelumnya, bagaimana posisi mereka saat ini di dalam masyarakat?</li> <li>(iii) Perlakuan apa yang menyebabkan kondisi kelompok rentan belum menunjukkan perbaikan posisi mereka?</li> <li>(iv) Bagaimana cara Mentor mendorong perubahan perlakuan? Prinsip dan etika apa saja yang harus dikembangkan kepada kelompok rentan dan antar kelompok rentan?</li> </ul> <p>e. Fasilitator mengapresiasi kedua relawan dan menyimpulkan hasil diskusi.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Peran Sosial Penyandang Disabilitas (M.4.5.2)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan bagaimana cara mengetahui hambatan dan cara berinteraksi sehingga dapat membantu dan memberikan dukungan serta mendapatkan penerimaan kelompok rentan.</p>	10'	

## BAHAN BACAAN

## PERAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS “NORMALIZATION DAN SOCIAL VOLARIZATION”

Teori *Normalization*, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an berisi tentang penerimaan seorang penyandang disabilitas dengan disabilitas mereka, penerimaan bahwa mereka mempunyai kesamaan kondisi dengan sebagai warga Negara. Hal ini melibatkan sebuah kesadaran tentang ritme yang normal termasuk ritme yang normal pada satu hari, satu minggu, satu tahun dan semua siklus hidupnya (contohnya adalah perayaan hari besar, hari kerja dan *weekend*). Melibatkan semua kondisi kehidupan yang normal seperti perumahan, sekolah, ketenaga kerjaan, olah raga, rekreasi dan pilihan untuk memilih untuk semua penyandang disabilitas baik ringan ataupun signifikan.

Definisi dari Dr. Wofensberger berdasar pada konsep kultural *normative*, yaitu budaya normatif akan dimanfaatkan sebisa mungkin, dalam tugasnya untuk menegakkan atau memelihara perilaku personal dan karakter-karakternya se-normatif mungkin. Sehingga prosedur medis seperti *treatment shock* atau pemejaraan, tidak hanya hukuman tetapi juga tidak sesuai norma budaya. Prinsipnya adalah berdasar pada integrasi social dan budaya. Sehingga teori ini menjadi dasar untuk mengembangkan *de-institutionalization*, *family care* atau *community living* sebagai ideologi HAM.

Teory ini kemudian berkembang atau bahkan mengalami perubahan dengan adanya teori *Sosial Role Volarization* (SRV) pada tahun 1983 yang juga dikembangkan oleh Dr. Wolf Wolfenberger. SRV sendiri berarti “Teori tentang Menaikkan Peran Sosial” yang bersifat general, bukan hanya membahas tentang penyandang disabilitas tetapi juga masyarakat yang lain. Konsep dari teori ini adalah bahwa seorang penyandang disabilitas juga mempunyai peran sosial dalam masyarakat. Karena memang dalam kenyataannya ada banyak penolakan dalam masyarakat yang menganggap seorang penyandang Disabilitas tidak mempunyai peran sosial, bahkan memberikan peran negatif (*negative role*) dan pelabelan kepada mereka, yaitu sebagai:

- *Sub human* misalkan sebagai obyek, binatang bahkan tumbuhan
- Obyek yang menakutkan
- Obyek untuk ejekan
- Obyek untuk dikasihani
- Beban dari keluarga
- Bahwa disabilitas berkaitan dengan dosa
- Selalu menjadi klien
- Orang sakit
- Sampah masyarakat
- Lebih baik mati saja

Sehingga mereka dapat dikeluarkan dari pelabelan atau peran negatif tersebut dengan mengembalikan kembali kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana penyandang disabilitas berperan dalam masyarakat dengan melihat potensi yang dimiliki dan bukan hanya hambatannya.

Dalam Konteks Indonesia ada perbedaan sistem yang signifikan terkait sistem sosial masyarakat. Kehidupan sosial bersifat gotong royong dalam komunitas dan keluarga, sehingga peran keluarga dan masyarakat cukup besar dalam mendampingi penyandang disabilitas. Peran panti rehabilitasi berbeda dengan negara lain karena di Indonesia lebih bersifat sementara untuk meningkatkan *life skills* untuk menaikkan peran sosial dalam masyarakat, untuk kemudian dikembalikan ke kehidupan masyarakat. Sehingga dalam hal ini di Indonesia masih belum diperlukan pembubaran Panti Rehabilitasi, tetapi akan didorong efektifitas dan perannya untuk mendekatkan penyandang disabilitas kepada keluarga dan masyarakatnya, di mana panti merupakan pilihan merupakan pilihan terakhir di Indonesia.



# HAK ASASI MANUSIA, HAK PEREMPUAN, HAK DISABILITAS DAN HAK ANAK

**POKOK BAHASAN** : **5. HAK ASASI MANUSIA, HAK PEREMPUAN, HAK DISABILITAS DAN HAK ANAK**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Memahami Wawasan Kebangsaan Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memahami Hak Perempuan Disabilitas dan Anak sebagai bagian dari HAM

**SUB POKOK BAHASAN** : **5.1. WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**  
**5.2. HAK PEREMPUAN, DISABILITAS DAN ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI HAM**

**WAKTU** : 4 Jampel @ 45 menit = 180 menit



- POKOK BAHASAN** : **5. HAK ASASI MANUSIA, HAK PEREMPUAN, HAK DISABILITAS DAN HAK ANAK**
- SUB POKOK BAHASAN** : **5.1. WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
  2. Menjelaskan Konsep HAM
  3. Menganalisa dan menjelaskan pelanggaran terhadap HAM dan Hak Warga Negara
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator memperkenalkan diri serta menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.5.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.5.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu, Penugasan Kelompok dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menyapa peserta dengan hangat dan mengajak peserta untuk melakukan ice breaker untuk menghilangkan jarak;</p> <p>b. Fasilitator meminta dua atau tiga peserta untuk membacakan Pancasila secara benar dan membagi peserta menjadi lima kelompok sesuai dengan Sila dalam Pancasila;</p> <p>c. Fasilitator mengajak kelompok melakukan cerdas cermat mengacu pada Lembar Pertanyaan Cerdas Cermat Pancasila (M.5.1.3);</p> <p>d. Fasilitator mengumumkan pemenang cerdas cermat Pancasila dan memberikan apresiasi terhadap antusias semua peserta serta mengkritisi hal-hal dari jawaban peserta yang dianggap penting (mengenai wawasan kebangsaan);</p> <p>e. Fasilitator menayangkan Media Tayang atau menjelaskan poin-poin Wawasan Kebangsaan dan HAM mengacu pada Bahan Bacaan Wawasan Kebangsaan (M.5.2.5) dan Hak Asasi Manusia (M.5.2.6);</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Pertanyaan Cerdas Cermat Pancasila (M.5.1.3)</li> <li>• Lembar Studi Kasus Nilai-nilai dalam Pancasila (M.5.1.4)</li> <li>• Bahan Bacaan Wawasan Kebangsaan (M.5.2.5)</li> <li>• Bahan Bacaan Hak Asasi Manusia (M.5.2.6)</li> </ul>
<p>3. a. Fasilitator membagi Lembar Studi Kasus Nilai-nilai dalam Pancasila (M.5.1.4) lalu menginstruksikan setiap peserta dalam kelompok membaca dan membahas studi kasus serta menjawab pertanyaan pokok berikut;</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) Nilai-nilai apakah yang terkandung dengan sila-sila Pancasila</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) Pelanggaran Hak Apakah yang muncul dari studi kasus tersebut?</p> <p>b. Fasilitator menyilahkan perwakilan kelompok presentasi dan meminta tanggapan dari kelompok lainnya;</p> <p>c. Fasilitator merangkum hasil diskusi dan pembahasan.</p>	45'	
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan tentang pentingnya peran Mentor dan Kader SEPEDA KEREN dalam mendorong masyarakat untuk selalu bersikap sesuai dengan nilai yang ada pada ke lima sila dalam Pancasila dan meneguhkan sikap dan kebanggaan menjadi Bangsa Indonesia.</p>	10'	

## LEMBAR PERTANYAAN CERDAS CERMAT KELOMPOK PANCASILA

1. Berapa banyak jumlah pulau di Indonesia? **17.504**
2. Berapa banyak jumlah suku bangsa/etnis yang hidup di Indonesia? **lebih dari 750**
3. Pasal berapa dalam UUD 45 yang menjamin kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? **pasal 29 Ayat 2**
4. Apa yang disebut sebagai hak? **Suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum**
5. Apa yang disebut sebagai kewajiban? **Suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan**
6. “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan “ Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” . Terdapat di pasal berapakah kalimat di atas dalam UUD 45? **Pasal 30**
7. “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Terdapat dalam pasal berapakah kalimat tersebut di dalam Undang-Undang apakah Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM? **Pasal 1**
8. Sebutkan dua jenis atau macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara **(Terorisme Internasional dan Nasional/ Aksi kekerasan yang berbau SARA/ Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa/ Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru/ Kejahatan dan gangguan lintas negara/ Pengrusakan lingkungan)**

## LEMBAR STUDI KASUS NILAI-NILAI DALAM PANCASILA

### Kelompok 1: Sila ke – 1

Adanya dana desa adalah angin segar bagi warga desa untuk membangun desa. Pembangunan di desa Artomoro diawali dengan pembangunan masjid, karena pemerintah desa meyakini bila warganya taat beribadah maka akan semakin baik perilaku warga desa dan mendukung pembangunan desa. Sayangnya di masjid yang baru hanya ada undak-undak untuk masuk masjid, ini menyulitkan warga desa yang memiliki disabilitas fisik, karena tidak bisa masuk masjid. 3 orang warga menggunakan kursi roda, dan 7 orang warga menggunakan tongkat masih sulit masuk karena undak-undak terlalu tinggi. Bahkan mbok minah seorang lansia di desa bilang “pak, ini tinggi sekali tidak ada bidang miring/ plesengan yang membuat mudah untuk berjalan, jadi saya harus mengangkat sewek/rok dan pegangan ke tembok untuk masuk ke masjid”

### Kelompok 2: Sila ke – 2

Pembangunan mendorong industry membutuhkan tenaga kerja, begitu adanya kebutuhan pekerjaan bagi masyarakat. Dina bercita-cita menjadi guru, namun cita-citanya hancur karena dia tidak bisa melanjutkan ke SMA bahkan kuliah. Dia lulus SMP dan harus mau dikawinkan dengan pak Bahar yang suaminya 15 tahun lebih tua darinya agar utang keluarganya bisa lunas. 1 tahun perkawinan Dina melahirkan anak dengan susah payah karena mengalami pendarahan. Dia anak perempuan yang anemia dan anaknya mengamai gizi buruk karena dia harus mengutamakan makanan bergizi untuk suami dibandingkan dia perempuan, meskipun dia sedang hamil. Jerat utang dalam perkawinan ini membuat Dina menderita karena dia juga harus berusaha menghidupi anaknya – nafkah dari suami hanya cukup untuk makan sehari-hari. Umur anaknya 1 tahun, dina diultimatum suaminya bila utang keluarganya masih kurang berapa juta, dan suaminya meminta dina segera melunasi karena mertuanya sedang sakit. Dina diminta menjadi TKW agar ada sumber keuangan membayar utang dan sumber keuangan keluarga, karena sumi harus merawat orang tua. Di Malaysia, dina ternyata tidak dipekerjakan saja sebagai PRT, dia juga harus menjaga toko milik majikannya dari sore hingga larut malam. Namun bayaran yang diterima tidak sesuai, dia seringkali menerima bayaran lebih sedikit dari kontrak sehingga kiriman kepada keluarga.

### Kelompok 3: Sila ke – 3

Kondisi desa Magersari yang miskin karena pasca bencana alam, membuat pemerintah desa harus menyelesaikan masalah kemiskinan, gizi buruk, dll. Bantuan dari banyak pihak semakin sedikit, sedangkan dana desa masih difokuskan untuk membangun rumah dan jalan desa yang menghubungkan ke desa lain. Kesulitan itu membuat ibu-ibu menghidupkan kembali jimpitan beras. Setiap orang diminta kerelaannya menyediakan beras sebesar gelas air mineral dan ditaruh di depan rumah. Ibu-ibu kader akan mengambil setiap hari jumat dan mengumpulkannya di balai desa untuk dibagikan ke keluarga yang miskin dan berkesulitan pangan. Namun hal tersebut masih kurang, Pak Johan sebagai pastur, menerima bantuan beras dari gereja yang ada di desa lain, dia dan keluarganya ikut membagikan beras ke warga. Sedangkan pak Slamet sebagai takmir masjid di Kabupaten mendapatkan bantuan sandang dari jamaah, dan dibagikan pula kepada warga sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Tanpa memandang perbedaan agama, warga desa saling membantun mengentaskan kesulitan di desa.

## Kelompok 4: Sila ke – 4

Perempuan di desa Sumberboto sangat jarang diikuti dalam rapat di desa. Dalam 3 tahun terakhir mulai diikuti dan diwakili oleh PKK. Namun dengan adanya pemerintan desa yang baru, pak Kades membolehkan ada perwakilan 2 perempuan dari perwakilan kader posyandu dan kader lingkungan. Ibu Rina adalah perempuan miskin yang menjadi kader lingkungan karena dia rajin mengumpulkan sampah untuk dijual kembali menjadi pendapatan bagi keluarganya. Saat pertemuan ibu-ibu desa, bu mina merasa bisa membawa aspirasi ibu-ibu untuk disampaikan dalam musrenbangdes. Dia dipilih oleh teman-temannya untuk mewakili. Hari itu dia mengikuti musrenbang dan menanggung malu. Bagaimana tidak, saat bu rina menyampaikan usulannya bahwa perempuan di desanya membutuhkan bibit terong, tomat, cabai dan timun. Karena dengan adanya bibit tersebut, tidak perlu membeli ke mlijo. Salah satu peserta menyatakan “uleg-ulegnya ditaruh dulu di rumah, jangan dibawa-bawa pada rapat desa”. Peserta lainnya menyauti “makanya lain kali ibu-ibu tidak perlu ikut rapat, nanti ndak nyambung”.

## Kelompok 5: Sila ke – 5

Musim paceklik membuat desa Tanamera gagal panen bahkan kelaparan. Untuk memenuhi pangan, mereka makan dengan nasi karak yang bisa didapat dengan menukarkan piring di rumahnya, karena mereka tidak memiliki uang membeli beras. Ibu-ibu berusaha melarang anak perempuannya yang remaja pergi ke Hongkong menjadi TKW dan anak laki-lakinya pergi ke Kalimantan bekerja sebagai penjaga kebun sawit. Tapi karena kondisi yang sulit, hal itu tidak terelakkan. 4 tahun berikutnya Riska pulang ke desa dalam kondisi hamil karena dia mendapatkan eksploitasi kerja dari majikan dan mendapatkan pemerkosaan. Bahkan disatu tahun terakhir, dia diperdagangkan di rumah bordir. Riska pulang berhadap bisa diterima keluarga dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun karena dia hamil tanpa diketahui suami, warga sekitar mencap dia “perempuan nakal”, dan saat periksa dipuskesmas dia harus membayar meski dia orang miskin karena dia tidak memiliki kartu Indonesia sehat (KIS). Orang tua Riska tidak memiliki biaya melahirkan di puskesmas, mereka melahirkan di dukun. Anak Riska cantik namun dia gizi buruk. Sedangkan perubahan data kemiskinan dapat dilakukan 6 bulan sekali dalam musdes.

## BAHAN BACAAN

# WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan Kebangsaan merupakan modal penting kehidupan kemajemukan bangsa Indonesia dan harus terus menerus dirawat dan diperkuat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perempuan sebagai salah satu ujung tombak dinamika kehidupan dalam masyarakat, dapat mengambil peran penting dengan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanamkan oleh para perintis kemerdekaan dan pendiri negara ini. Selama ini pendidikan kebangsaan cenderung dilakukan hanya melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Padahal tantangan kehidupan berbangsa saat ini justru terjadi didalam keseharian kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kebangsaan harus diberikan sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat yang berkesinambungan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia - 17.504 pulau sekaligus sebagai Negara maritim terbesar di dunia 4 juta km<sup>2</sup>. Panjang pantai sekitar 81 ribu km atau hampir 25% panjang pantai di dunia menjadikan Indonesia urutan ke 13 untuk luas daratan, dan ke 6 untuk jika termasuk wilayah lautan. Dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia - lebih dari 750 suku bangsa/etnis serta Bahasa daerah yang terbanyak - 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk mempertegas keragaman yang dimiliki Indonesia sebagai ciri khasnya. Selain itu, Indonesia memiliki penduduk dengan agama dan keyakinan yang beragam terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong hu chu dan keyakinan lain yang ada di Negara yang masyarakat. Negara menjamin kebebasan bagi pemeluknya untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang tercantum dalam pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar.

Pancasila sebagai sikap dan nilai luhur serta kesepakatan warga bangsa dalam bernegara telah mengakomodir semua kepentingan dari keragaman yang ada. Mengutip [bphn.go.id/data/documents/butir-butir\\_pancasila\\_1.doc](http://bphn.go.id/data/documents/butir-butir_pancasila_1.doc) berikut penjelasan di dalam butir-butir Pancasila.

## 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

## 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

## 3. Persatuan Indonesia

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

## 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

## **5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## **Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Hukum itu mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya.

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Perwujudan hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan adanya perantaraan peristiwa hukum. Segala peristiwa atau kejadian dalam keadaan tertentu adalah peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban diperlukan terjadinya peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat. Karena pada umumnya hukum itu bersifat pasif.

Tiap negara memiliki aturan terkait status kewarganegaraan yang berbeda-beda, termasuk juga di Indonesia. Syarat kewarganegaraan ini diatur dalam UUD 1945. Terdapat hak-hak warga negara yang ditetapkan dalam undang-undang, begitu pula dengan kewajibannya. Warga negara Indonesia biasa disingkat WNI merupakan orang yang diakui secara sah dan legal sebagai warga negara Indonesia sesuai syarat dan aturan yang berlaku. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi warga negara Indonesia. Tiap warga negara juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Hal-hal terkait hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU lainnya.

Baik kewajiban maupun hak warga negara ini didapatkan oleh tiap-tiap orang yang memenuhi syarat sebagai warga negara. Sesuai asasnya, tiap warga negara juga memiliki HAM atau hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.



## BAHAN BACAAN

# HAK ASASI MANUSIA (HAM)

## Pengertian HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat kodrati, melekat dalam diri manusia karena dia adalah manusia. HAM berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang tanpa kecuali memiliki HAM sebagai perwujudan dari martabat kemanusiaannya, seperti hak hidup, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak beragama, diperlakukan sama di depan hukum, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, serta bebas dari perbudakan, penyiksaan, ancaman, kekerasan, dan diskriminasi yang menciderai martabat kemanusiaannya. Hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Meski HAM telah diadopsi dalam berbagai peraturan (hukum) di tingkat internasional dan nasional, bahkan telah menjadi bagian dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia<sup>1</sup> kita tetap menyaksikan adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

## Karakteristik HAM

- HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia.
- HAM merupakan instrument untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur.

## Sejarah Singkat HAM

### Perjanjian Madinah (Shahifatul Madinah - 622)

- Disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib
- Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah; sehinggamembuat mereka menjadi suatu umat

### Magna Charta (1215)

- Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat Undang-Undang.

### Bill of Rights (1689)

- Ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa “manusia sama di muka hukum” (*equality before law*). Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

### Declaration of Independence (Amerika Serikat - 1776)

- Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776
- Disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu
- Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan

### Declaration des Droits de L'homme et Du Citoyen (1789)

- Piagam ini banyak dipengaruhi oleh *Declaration of Independence*, merupakan dasar dari *rule of law* yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang.
- Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), dan kebebasan beragama (*freedom of religion*), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (*right of property*).

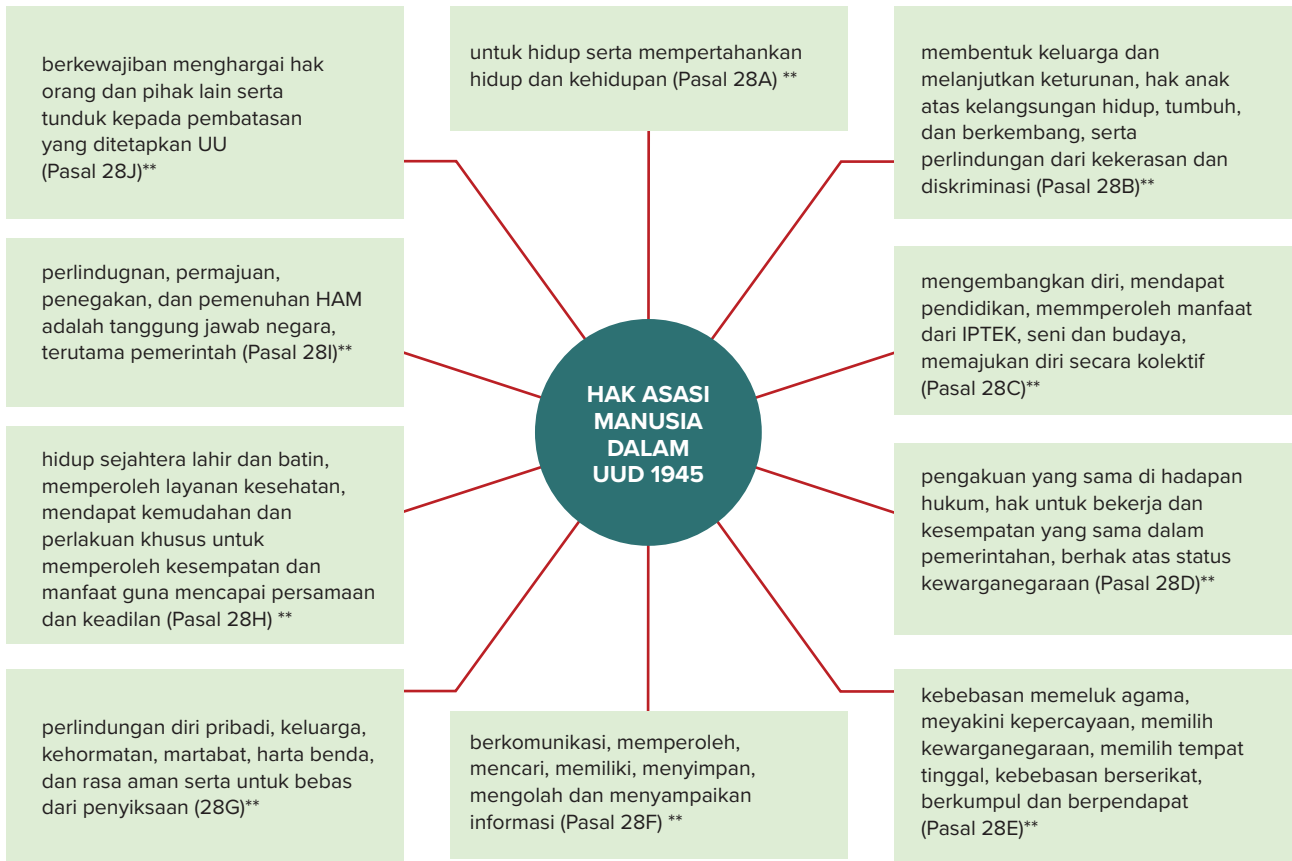
### The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)

- Dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan secara resmi dalam Sidang Umum PBB

## Perjuangan HAM di Indonesia

- Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908
- Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928
- Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945
- Rumusan HAM secara eksplisit telah dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950.
- Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan TAP MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara.
- UU Penghapusan Diskriminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: UU No.7/1984 (ratifikasi UN-CEDAW).
- Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
- Terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

## Kedudukan HAM dalam UUD 45



## Kategori HAM

“*first generation of rights*”, diatur dalam beberapa pasal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik

“*second generation of rights*”, diatur dalam beberapa pasal DUHAM dan secara khusus dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

**HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

**HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

**HAK-HAK SOLIDARITAS**

“*third generation of rights*”, Hak atas perdamaian, lingkungan, dan pembangunan, tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986 dan Deklarasi HAM Dunia di Wina tahun 1993

## Prinsip-prinsip Pokok HAM

### UNIVERSAL

Berlaku bagi semua orang, apa pun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau kebangsaannya

### TIDAK DAPAT DILEPASKAN

Siapa pun dengan alasan apa pun tidak dapat dan tidak boleh menceraabut atau mengambil hak asasi seseorang

### TIDAK DAPAT DIPISAHKAN

Ketiga kategori HAM tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakkannya

### SALING TERGANTUNG

HAM saling tergantung satu sama lainnya sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya

### KESEIMBANGAN

Ada keseimbangan dan keselarasan di antara Hak Asasi dengan kewajiban/tanggung jawab asasi

### PARTIKULARISME

Pelaksanaan HAM mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama

- POKOK BAHASAN** : **5. HAK AZASI MANUSIA, HAK PEREMPUAN, HAK DISABILITAS, HAK ANAK DAN HAK KELOMPOK RENTAN LAINNYA**
- SUB POKOK BAHASAN** : **5.2. HAK ASASI PEREMPUAN, DISABILITAS DAN ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI HAM**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep hak perempuan, Disabilitas dan Anak
  2. Mampu mengidentifikasi masing-masing hak dan regulasi pendukung pemenuhan hak
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator memperkenalkan diri serta menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.5.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu, Diskusi Kelompok-Pleno, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dan membagikan bahan bacaan kepada setiap peserta sesuai dengan penugasan kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kelompok 1: Perempuan</li> <li>(ii) Kelompok 2: Disabilitas</li> <li>(iii) Kelompok 3: Anak</li> <li>(iv) Kelompok 4: Pekerja Migran</li> </ul> <p>b. Fasilitator memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk membaca dan memahaminya selama 15 menit;</p> <p>c. Fasilitator meminta setiap kelompok mendiskusikan dan menjawab pertanyaan berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Identifikasi masing-masing hak;</li> <li>(ii) Kebijakan-kebijakan apa yang mendukung Pemenuhan Hak tersebut</li> </ul> <p>d. Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi dan kelompok lain menanggapi;</p> <p>e. Fasilitator mencatat semua jawaban peserta dan menayangkan slide presentasi atau menjelaskan Hak Perempuan, Disabilitas, Anak dan Pekerja Migran sesuai dengan Bahan Bacaan Hak Pekerja Migran (M.5.2.2, 5.2.3, M.5.2.4 dan 5.2.5) dan kaitannya dengan HAM;</p> <p>f. Fasilitator menyilahkan peserta untuk bertanya atau mengonfirmasi beberapa hal yang dianggap masih membingungkan.</p>	75'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Hak Asasi Perempuan (M.5.2.2)</li> <li>Bahan Bacaan Hak Disabilitas (M.5.2.3)</li> <li>Bahan Bacaan Hak Anak (M.5.2.4)</li> <li>Bahan Bacaan Hak Pekerja Migran (M.5.3.5)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan tentang kaitan antara Hak Asasi Perempuan, Disabilitas, Anak dan Pekerja Migran dengan HAM.</p>	10'	

## BAHAN BACAAN

# HAK ASASI PEREMPUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Adanya kesadaran ini maka kemudian perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khazanah hukum, hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Dengan ratifikasi Konvensi tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh perempuan dibawah upah buruh laki-laki harus dihapus. Begitu pula dunia politik bukanlah milik laki-laki saja. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian perbedaan penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi.

Pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan serta mendidik anak. Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara perempuan dengan laki-laki dan masyarakat sebagai keseluruhan. Bukan dijadikan dasar diskriminasi.

Penegakkan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan .

Dari berbagai kajian tentang perempuan, terlihat bahwa kaum perempuan sudah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang kehidupan .Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Berbagai usaha telah lama diperjuangkan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan.

Mengatasi hal ini, di perlukan berbagai instrumen nasional tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Di level Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah perlindungan hak asasi perempuan sudah sangat dipahami antara lain melalui Deklarasi Beijing Platform, pada tahun 1995 yang melahirkan program –program penting untuk mencapai keadilan gender. Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal.

Bila dicermati dengan seksama, sesungguhnya banyak kondisi –kondisi rawan terhadap kemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Dengan struktur masyarakat patriarkhi, secara sosio- kultural kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan, bahkan terjadi praktik peminggiran perempuan. Perilaku budaya yang menetapkan perempuan pada peran ibu dan isteri merupakan hambatan besar dalam pemajuan hak asasi perempuan. Disamping itu, interpretasi keliru dari ajaran agama tentang gender telah mengurangi universalitas hak asasi perempuan di Indonesia.

Dengan lambatnya pemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia, maka nampaknya diperlukan upaya-upaya disamping kegiatan sosialisasi yang optimal mengenai hak asasi perempuan, juga penambahan Peraturan Perundang-undangan tentang hak asasi perempuan. Disamping itu, dengan banyaknya masalah yang muncul tentang kehidupan perempuan, maka perangkat undang-undang masih sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan, seperti eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, persoalan perempuan di wilayah konflik, prostitusi dan lain-lainnya.

## **Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Perempuan**

Tiga hak pokok dalam Hak Asasi Manusia adalah,

- a. hak hidup,
- b. hak memiliki sesuatu, dan
- c. hak tentang kebebasan.

Hak-hak asasi tersebut tentunya memiliki sebuah lembaga, yang sering disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bahkan dalam Undang-Undang hak-hak tersebut juga dilindungi. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia termasuk terhadap perempuan. Kasus ini terpotret dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh konkrit misalnya saja kasus penyiksaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia. Tak jarang mereka mendapat siksaan lahir maupun batin, pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat-tempat umum, kekerasan dalam rumah tangga baik berupa penganiayaan fisik maupun tekanan psikologis serta penelantaran ekonomi dari suami terhadap istri.

Berbagai kritik dan advokasi yang dilontarkan atas kelemahan sistem hak asasi manusia dari perspektif pengalaman perempuan berdampak pada adanya perkembangan pemikiran baru tentang konsep hak asasi manusia. Pemikiran-pemikiran tersebut diakomodir dalam instrumen hukum internasional yang spesifik memuat persoalan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) pada tahun 1976 dan mulai berlaku pada tahun 1979. Dari sinilah kemudian muncul istilah hak asasi perempuan.



## Apa itu CEDAW?

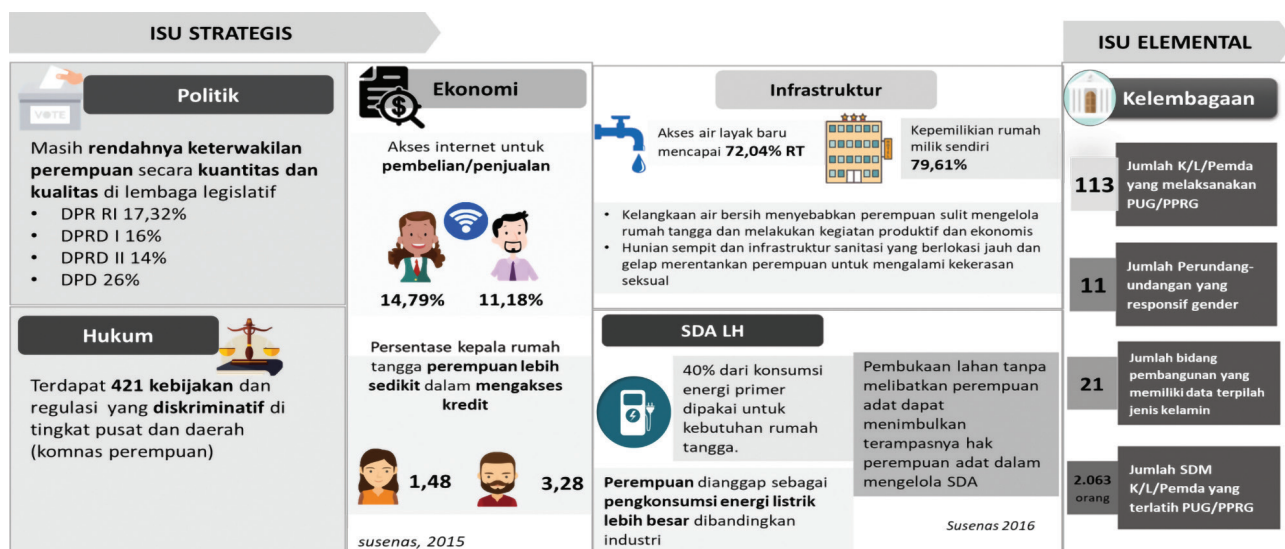
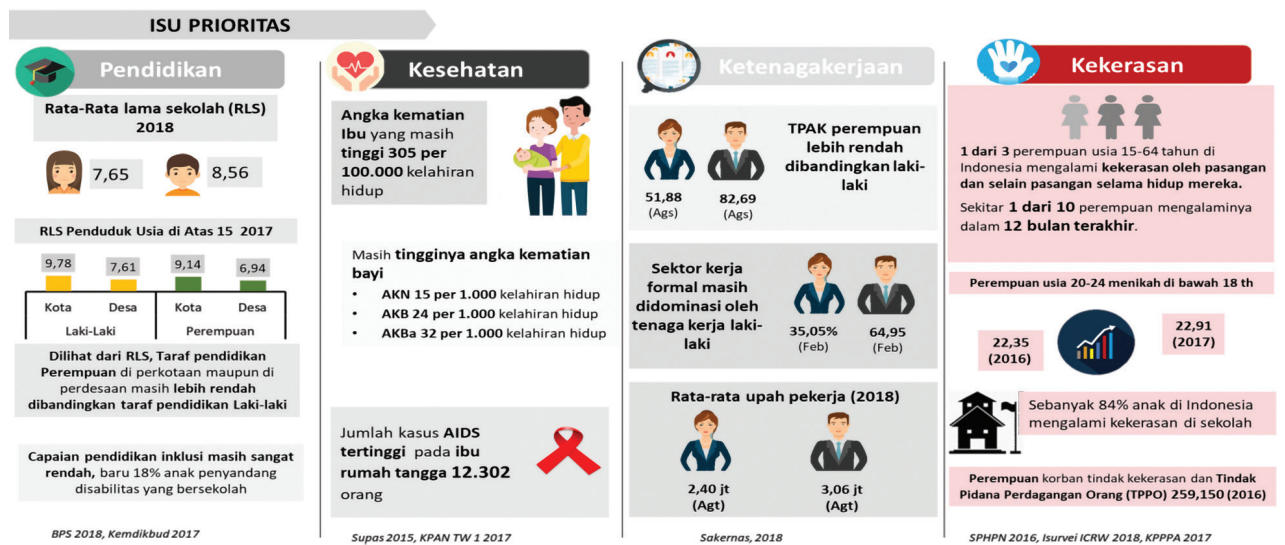
CEDAW atau *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengatur dan mengakui hak asasi perempuan secara komprehensif. Pada 1984, Indonesia meratifikasi dan mengesahkan konvensi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada. Konvensi ini juga meletakkan strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan. Dalam CEDAW dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat-dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia.

### Hak-hak asasi perempuan dalam CEDAW meliputi:

1. Hak-hak Sipil dan Politik Perempuan, yaitu:
  - a. Hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan, hak: (Pasal 7) untuk: memilih dan dipilih; berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya; memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat; serta berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
  - b. Hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional (Pasal 8)
  - c. Hak perempuan dalam kaitan dengan kewarganegaraannya (Pasal 9) yang meliputi: hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya; hak untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya; serta hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.
2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi perempuan, meliputi: Hak dibidang pendidikan (Pasal 10); Hak dalam pekerjaan; (Pasal 11); Hak atas kesehatan (Pasal 12); Hak-hak lainnya dibidang ekonomi dan social (Pasal 13); Hak-hak khusus untuk perempuan pedesaan (Pasal 14); Hak yang menjamin persamaan dihadapan hukum (Pasal 15) serta Hak-hak perempuan didalam perkawinan (Pasal 16).

## Isu Strategis dan Analisa Situasi Ketimpangan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan



## BAHAN BACAAN

**HAK DISABILITAS**

Kajian disabilitas terpisah-pisah. Para ahli, akademisi dan aktivis gerakan sosial dengan disabilitas dan tanpa disabilitas melakukan banyak kajian dan penelitian mengenai disabilitas. Awalnya, melakukan kajian sesuai disiplin ilmu masing-masing. Ahli kedokteran melakukan kajian terkait dengan persoalan medis, pengobatan, perawatan, dan pembedahan. Para ahli kebudayaan melakukan kajian mengenai hambatan budaya yang dihadapi orang dengan disabilitas. Misalnya, mengenai prasangka, sebagai akar persoalan terjadinya pengucilan, dan berkembangnya berbagai mitos mengenai orang dengan disabilitas. Para aktivis gerakan sosial melakukan kajian dan merancang strategi pelibatan orang dengan disabilitas dalam bidang politik dan ekonomi. Mereka melakukan kampanye besar-besaran agar orang dengan disabilitas diterima sebagai warga negara secara penuh, dan menolak habis-habisan pemahaman normalitas dan abnormalitas terkait orang dengan disabilitas.

**Kajian Lintas Disiplin dan Kawasan**

Dalam perkembangannya, kajian disabilitas dilakukan dengan pendekatan lintas-disiplin ilmu dan lintas kawasan. Kajian-kajian ini memberikan kesimpulan, disabilitas bukanlah persoalan tubuh, melainkan persoalan sosial, kebudayaan, dan politik yang menjadikan seseorang dianggap sebagai orang dengan disabilitas dan orang tanpa disabilitas.

Ketertindasan yang dialami. Orang dengan disabilitas mengalami ketertindasan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ketertindasan tidak lagi memandang sebab disabilitasnya: bawaan, perang dan kekerasan, malnutrisi, virus, kecelakaan, pekerja anak, dan bencana alam. Dalam teori dan praktiknya, orang dengan disabilitas terus menerus mengalami penindasan dari pengobatan, ilmu pengetahuan dan kontrol para profesional.

**Disabilisme**

Penindasan sosial terhadap orang dengan disabilitas disebut disabilisme. Penindasan terhadap orang dengan disabilitas terjadi dalam berbagai bentuk dan di semua bidang kehidupan. Penindasan ini lebih berat dibandingkan dengan yang dialami kelompok lain. Misalnya, perempuan tanpa disabilitas mengalami kejahatan seksisme dan rasisme, sedangkan perempuan dengan disabilitas mengalami kejahatan disabilisme, seksisme, dan rasisme.

**Seksisme dan Rasisme**

Seksisme mengajarkan kebencian, pengucilan sosial, dan hukuman-hukuman berdasarkan jenis kelamin. Rasisme mengajarkan kebencian, pengucilan sosial, dan hukuman-hukuman berdasarkan suku. Sementara itu, disabilisme mengajarkan kebencian, pengucilan sosial, dan hukuman-hukuman berdasarkan disabilitas. Pengucilan sebagai Pelanggaran HAM. Kebencian, pengucilan, diskriminasi, dan pengingkaran sosial terhadap orang dengan disabilitas merupakan pelanggaran HAM secara terang-terangan. Negara sebagai pemilik kewajiban atas HAM seluruh warga negara, tak sepenuhnya menjalankan kewajiban: memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*). Dalam konteks pemahaman seperti inilah, orang dengan disabilitas menjadi isu HAM.

Orang dengan disabilitas sebagai subyek. Dalam perspektif HAM, orang dengan disabilitas diposisikan sebagai subyek bukan obyek bernegara. Hal ini mengisyaratkan, orang dengan disabilitas bukan sebagai sasaran agenda-agenda negara, melainkan harus terlibat secara penuh (*full-meaning participation*) dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil yang dicapai, termasuk turut menikmati hasil-hasil agenda negara. Pergeseran perlakuan mesti dilakukan, dari pandangan orang dengan disabilitas sebagai masalah sosial ke arah orang dengan disabilitas sebagai pemilik yang asasi.

Empat nilai sebagai prasyarat. Secara mendasar ada empat nilai yang menandakan tegaknya nilai kemanusiaan: martabat (*dignity*), otonomi (*autonomy*), persamaan (*equality*), dan solidaritas (*solidarity*). Keempatnya harus diwujudkan dalam menempatkan orang dengan disabilitas sebagai manusia sederajat. Tak ada alasan yang bisa dibenarkan sebagai dasar melakukan tindak diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, pengasingan secara sosial, politik, ekonomi dan budaya terhadap orang dengan disabilitas.

Gelombang gerakan disabilitas. Dalam peta gerakan sosial geneologi, wacana disabilitas bisa dikemas dalam empat gelombang gerakan. Pertama, disabilitas dilihat sebagai persoalan individu. Kedua, disabilitas sebagai hasil dari konstruksi sosial. Ketiga, disabilitas dilihat sebagai persoalan individu dan pada saat yang sama sebagai hasil konstruksi sosial. Keempat, meniadakan wacana disabilitas dalam kehidupan berbangsa. Gerakan ini dibangun berdasarkan pada nalar kesederajatan manusia yang bermartabat sebagaimana diisyaratkan dalam beragam instrumen HAM.

Hambatan sistem dan aturan. Negara harus menghapus semua sistem dan aturan yang menghalangi dinikmatinya HAM bagi orang dengan disabilitas. Berbeda dengan gerakan perjuangan HAM bagi perempuan tanpa disabilitas dan korban politik lainnya yang selalu mendapatkan respons positif. Percepatan penikmatan HAM bagi orang dengan disabilitas diharapkan banyak pihak. Terutama setelah Majelis Umum PBB mengadopsi Aturan Standard PBB Mengenai Persamaan Kesempatan bagi Orang dengan Disabilitas (*The United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with Disabilities*) dalam resolusi 48/96 pada 20 Desember 1993.

Harapan semakin besar, ketika Majelis Umum PBB pada Desember 2001 mengadopsi Resolusi mengenai Konvensi Internasional yang Komprehensif dan Integral untuk Memajukan dan Melindungi Hak dan Martabat Orang dengan Disabilitas. Setelah adopsi, terus dilakukan berbagai konferensi dan perumusan kebijakan internasional yang dikembangkan untuk kemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM orang dengan disabilitas.

Puncaknya, pada tahun 2006, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tentang Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on the Right People with Disability*), dan terbuka untuk ditandatangani negara anggota pada 30 Maret 2007. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 2011 dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights People with Disability* (Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas). Disabilitas setelah Konvensi.

Saat ini, gerakan HAM orang dengan disabilitas dilakukan dengan mengintegrasikan beragam pendekatan dan strategi dalam berbagai sektor kehidupan orang dengan disabilitas. Beragam model dikembangkan, bukan untuk saling mengadili, melainkan saling melengkapi. Tak ada perubahan sosial terjadi hanya mengandalkan model gerakan berwajah tunggal, melainkan harus saling topang antar satu model dengan model gerakan lainnya. Sebab hanya satu sumbu gerakannya, memperjuangkan HAM bagi orang dengan disabilitas.

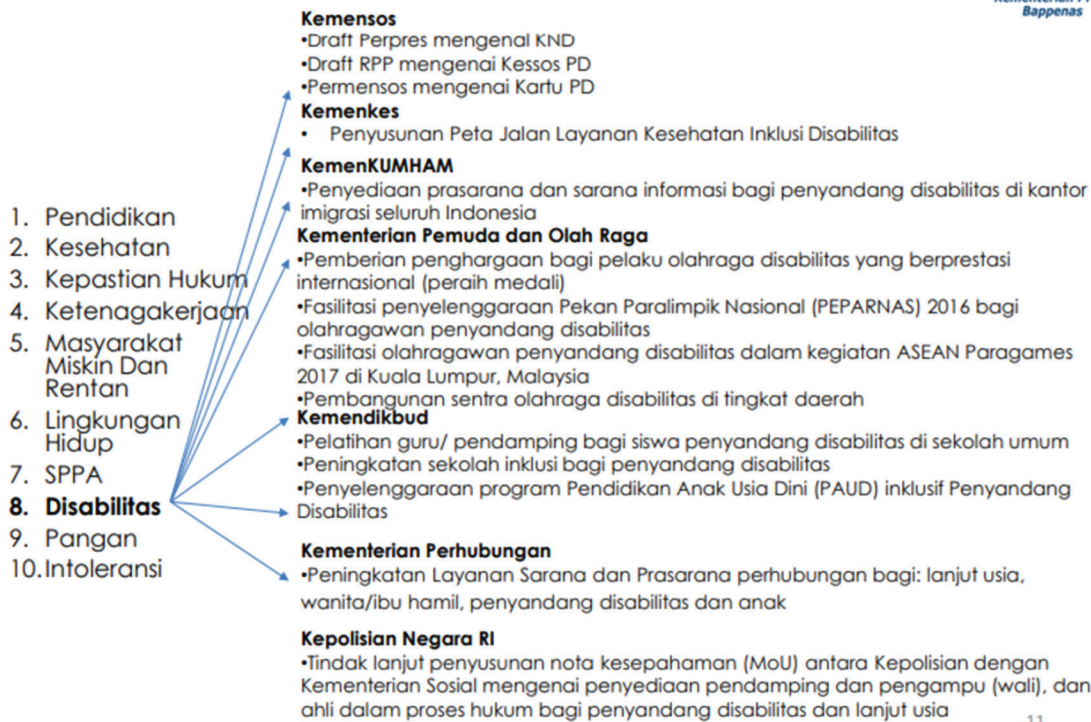
## KERANGKA REGULASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS



## RPJMN 2015-2019 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM



## DISABILITAS DALAM PRIORITAS RENCANA AKSI HAM 2017



11

## ISU STRATEGIS DALAM UU NO. 8/2016



Kewajiban Negara (Pemerintah dan Pemda) = 61 Pasal



Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas = 4 Pasal  
Paling lama terbentuk 3 tahun sejak UU diundangkan



Kartu Penyandang Disabilitas = 3 Pasal



Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu dan/atau Wicara) = 4 Pasal



18 tanggung jawab utama Kementerian/Pemda yang wajib dilaksanakan:

- |              |                             |                                 |  |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| - Pendidikan | - Keolahragaan              | - Perlindungan bencana          | - Kewarganegaraan  |
| - Pekerjaan  | - Kebudayaan dan pariwisata | - Rehabilitasi dan rehabilitasi | - Perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, & eksploitasi), |
| - Kesehatan  | - Kesejahteraan sosial      | - Pendataan                     | - subyek hukum.  |
| - Politik    | - Aksesibilitas             | - Berekspres dan kominfo        |  |
| - Keagamaan  | - Pelayanan publik          | - Pelibatan masyarakat          |  |

12

## BAHAN BACAAN

### HAK ANAK

#### Anak

Siapakah anak? Batasan usia anak secara umum disebutkan sebagaimana tertera pada pasal 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Selain dari batasan usia, didalam Mukadimah Konvensi disebutkan pula bahwa, anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.

#### Hak Anak

Hak Anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Untuk apakah hak anak? Anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

#### Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di dunia yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Pasca Perang Dunia I protes para aktivis perempuan yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban setelah perang dunia I. Pada tahun 1923, sepuluh butir pernyataan tentang Hak Anak yang telah dikembangkan oleh Eglantyne Jebb diadopsi oleh Save The Children Fund International Union dan setahun kemudian deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang lebih dikenal dengan Deklarasi Jenewa.

Setelah Perang Dunia II PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Kemudian di tahun 1959 PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak merupakan deklarasi internasional kedua. Pada tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan Hak Anak dan mengikat secara yuridis, inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak.

Pada tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Rancangan inilah yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak. 2 September 1990, Konvensi Hak Anak diberlakukan sebagai Hukum Internasional. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat materi hukum hak-hak anak yang kemudian dikelompokkan dalam empat kategori hak anak. Memastikan anak mendapat hak-hak mereka adalah sebuah kewajiban bagi orang tua dan orang dewasa. Jika anak-anak mendapat hak mereka secara penuh sejak kecil maka kelak negara ini akan memiliki generasi yang hebat.

Lalu, apa saja empat hak dasar anak yang harus orang tua lindungi sejak dini?

1. Hak Hidup

Menjaga kualitas hidup anak adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang tua dan orang dewasa. Menjaga hak hidup anak antara lain dengan menyediakan keperluan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak bagi anak. Selain itu mendapat akta lahir adalah salah satu bagian dari hak hidup.

2. Hak Tumbuh Kembang

Anak juga memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang bahkan sejak masih dalam kandungan. Salah satu cara untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak adalah dengan memastikan mereka mendapat gizi yang seimbang serta pelayanan kesehatan yang baik.

3. Hak Mendapat Perlindungan

Lingkungan yang penuh dengan kasih sayang akan sangat mendukung tumbuh kembang anak. Itu sebabnya anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan seperti dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, eksploitasi fisik dan sosial, dan berbagai kekerasan lainnya.

4. Hak Berpartisipasi

Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat.

Ada 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak

1. Non-diskriminasi tanpa perbedaan apapun.
2. Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan (*The rights to life, survival and development*) bahwa hak hidup yang melekat pada dirisetiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*) bahwa pendapat anak, yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam tiap pengambilan keputusan.

Konvensi Hak Anak dibuat sebagai perlindungan anak terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan anak. Secara umum, anak perlu dilindungi dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi termasuk tindak kekerasan, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, penelantaran dan diskriminasi.

Secara umum permasalahan anak antara lain, kehamilan usia muda, penyalahgunaan alkohol dan obat, merokok, keamanan internet, rundung (*bullying*), stres serta pelecehan dan penelantaran anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990, sesegera mungkin setelah rancangan Konvensi Hak Anak dibuat. Hal ini dikarenakan Indonesia merasa bahwa Hak Anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi demi terciptanya masa depan bangsa yang maju dan membanggakan. Dalam hal ini Indonesia juga membuat Undang-Undang khusus untuk melindungi anak. Antara lain Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014.



Dalam setiap tahapan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak (KHA) sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita melaksanakan dan menghormati KHA. Untuk melaksanakan KHA Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan sosialisasi KHA kepada semua pihak termasuk kepada anak. Dalam implementasinya pun harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Hal ini mempertegas pernyataan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan mengingat segala instrumen hukum yang dibutuhkan baik pada level internasional, nasional hingga daerah sudah tersedia.

## BAHAN BACAAN

# HAK PEKERJA MIGRAN

## Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Dalam UU No. 18/2017 ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di BAB II Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan/rumah tangga; dan
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan- badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia. Demikian pula aparat sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.

## Hak dan Kewajiban Pekerja Migran

UU Perlindungan PMI juga menegaskan, setiap calon PMI dan pekerja migran berhak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan tanpa diskriminasi selama pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang- undangan di Indonesia dan di negara tujuan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja; berserikat dan berkumpul di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan;
11. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan
12. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

## Kewajiban:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

## Masalah Internasional

Pekerja migran merupakan isu internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa pun memberikan perhatian khusus bagi pekerja migran. Pada 19 September 2016, misalnya, PBB menggelar konferensi tingkat tinggi tentang pengungsi dan migran tengah digelar di New York. Dilansir BBC Indonesia, dalam konferensi tersebut terungkap ragam masalah pekerja migran di seluruh dunia. Sebuah kelompok yang mewakili buruh migran Aliansi Migran Internasional misalnya mengeluarkan peringatan, mimpi mereka tentang masa depan adalah kebohongan belaka. “Sebagian besar dari kami, janji tentang masa depan yang lebih baik sudah menjadi kebohongan,” kata ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong.

“Kami terjatuh utang, diperdagangkan, terjebak dalam perbudakan, hak-hak dasar kami dinafikkan, kami rentan terhadap penyalahgunaan. Banyak di antara kami hilang dan bahkan meninggal dunia. Mimpi kami telah menjadi mimpi buruk,” tambah Eni.

## Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Bagaimana peran negara dalam perlindungan PMI terdapat di dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI. Selanjutnya tujuan dari perlindungan calon PMI adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya.

Penguatan peran negara baik di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan peran negara yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama ini dominasi peran swasta dalam pengelolaan buruh migran menghantarkan PMI dalam situasi yang rentan pelanggaran HAM. Dalam UU lama (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) peran swasta sangat dominan mulai memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra-pemberangkatan, penampungan, medical check-up, memberangkatkan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulauan. Dalam UU baru peran swasta hanya memberangkatkan PMI yang sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap (LTSA), melaporkan kepulauan dan menyelesaikan masalah. Berikut ini pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI sebagai berikut:

**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			
PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAH DESA
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak PMI	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja.	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja	Melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya
Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	Menerbitkan ijin kantor cabang perusahaan PMI dan melaporkan hasil evaluasinya secara berjenjang	Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan PMI kepada Pemprov.	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI
Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu	Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	Menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI.	Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi
Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus PMI	Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI.	Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI	Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI
Mengurus kepulangan PMI	Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI	Mengurus kepulangan PMI	Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI
Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota	
		Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya	

Dari tabel tersebut di atas terlihat penguatan peran negara dari tingkat desa, kabupaten/kota, Propinsi dan Pemerintah Pusat yang meliputi perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja, melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI, menerbitkan ijin perusahaan PMI dan mengevaluasinya, membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu, membentuk layanan terpadu satu atap (termasuk pos bantuan), mengurus kepulangan PMI, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI.

Sumber Rujukan:

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

<https://reaktor.co.id/pengertian-pekerja-migran-indonesia/>

# TATA KELOLA PEMERINTAHAN

<b>POKOK BAHASAN</b>	:	<b>6. TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>
<b>TUJUAN</b>	:	Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami konsep dasar dan pendekatan pembangunan inklusif.</li><li>2. Memahami prinsip dan kewenangan dalam Perencanaan pembangunan desa dan daerah</li><li>3. Memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li><li>4. Memahami mekanisme penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat</li></ol>
<b>SUB POKOK BAHASAN</b>	:	<b>6.1. KONSEP DASAR DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN INKLUSIF</b> <b>6.2 PRINSIP DAN KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH</b> <b>6.3 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b> <b>6.4 MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>
<b>WAKTU</b>	:	8 Jampel @ 45 menit = 90 menit

- POKOK BAHASAN** : **6. TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **6.1 KONSEP DASAR DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN INKLUSIF**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep dan pendekatan kebijakan pembangunan di tingkat desa dan daerah
  2. Menjelaskan dan menganalisa pelaku dan kepentingan dalam pembangunan desa dan daerah
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<p>Lembar Penyajian PB (M.6.1.1)</p> <p>Lembar Penyajian SPB (M.6.1.2)</p>
<p>2. <b>Curah Pendapat dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator memandu curah pendapat terkait dengan pengalamannya atau pengetahuan peserta terkait perencanaan dan pembangunan baik desa maupun daerah;</p> <p>c. Fasilitator menuliskan poin-poin jawaban peserta pada metaplan. Pastikan ungkapan peserta telah mencakup hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Konsep pembangunan;</li> <li>(ii) Bentuk-bentuk pembangunan di desa dan daerah;</li> <li>(iii) Pelaku dalam pembangunan desa dan daerah;</li> <li>(iv) Kepentingan yang mereka wakili atau yang disuarakan;</li> <li>(v) Keterlibatan kelompok miskin, perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya.</li> </ul> <p>d. Fasilitator mengelompokkan jawaban peserta kepada 5 hal di atas dan menyimpulkan ketiganya;</p> <p>e. Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat desa maupun daerah serta kesesuaiannya dengan konsep serta memastikan peserta memahami bahwa pembangunan bukan hanya terkait fisik, namun juga sumber daya manusia;</p> <p>f. Fasilitator menjelaskan konsep pembangunan dan dasar kebijakan pembangunan desa dan daerah mengacu pada Bahan Bacaan Konsep dan Pendekatan Pembangunan Inklusif (M.6.1.3) atau slide presentasi yang telah disiapkan;</p> <p>g. Fasilitator menyimpulkan hasil pembahasan diskusi kelompok dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau klarifikasi;</p> <p>h. Fasilitator menempelkan catatannya pada papan flipchart atau dinding kelas dan membahas bersama peserta terkait tantangan dan peluang pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan desa dan daerah.</p>	75'	<p>Bahan Bacaan Konsep dan Pendekatan Pembangunan Inklusif (M.6.1.3)</p>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan dengan memberikan penekanan pada konsep kebijakan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.</p>	10'	



## BAHAN BACAAN

**KONSEP DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN INKLUSIF**

Paradigma pembangunan di negara-negara berkembang sejak era tahun 80-an bertumpu kepada pembangunan ekonomi dengan *output* berupa pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan prokapital seperti ini menghasilkan suatu kondisi kemiskinan, deprivasi, dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah suatu kondisi individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi yang tidak memiliki akses sosial politik kepada sumberdaya sosial, kurang berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang kurang memadai.

Pilihan konsep pembangunan demikian oleh sebagian dikritik karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi semata, seperti tingkat pertumbuhan *gross domestic product* (GDP), dan kurang memerhatikan aspek-aspek non-ekonomis. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan eksklusif yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Pembangunan sejauh ini menghasilkan kesejahteraan untuk sebagian kecil warga kota dan kondisi deprivasi sosial untuk sebagian besar warganya. Kondisi demikian disebabkan penetapan paradigm pembangunan yang terlalu bertumpu kepada pembangunan ekonomi dengan capaian pertumbuhan ekonomi. Kapitalisasi ruang kota telah menyebabkan rusaknya tatanan sosial masyarakat kota, masyarakat menjadi asing satu sama lain dan kehilangan kontak dengan tetangga di sebelah, apalagi dengan saudarasebangsa di pulau lain, padahal transportasi dan telekomunikasi sudah semakin modern. Ikatan-ikatan sosial yang inklusif dan kebhinekaan telah diganti oleh pengelompokan eksklusif berdasarkan kaidah-kaidah yang dangkal dan untuk kepentingan individu. Uang telah menggantikan ucapan salam yang kita sampaikan ketika berjumpa sesama. Fasilitas material menggantikan jabat tangan hangat antara orang-orang yang bekerja bersama. Keanggotaan sebuah klub eksklusif menjadi lebih penting daripada kewarganegaraan.

Eksklusi sosial sering muncul sebagai pemicu konflik dan kekerasan, kemiskinan, ketidakpedulian terhadap kelompok marginal, dan sebagainya. Eksklusi sosial menggejala di Indonesia, seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan dan mencapai puncaknya dalam bentuk berbagai krisis ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mereduksi persoalan eksklusi sosial, kita semua membutuhkan pendekatan pembangunan inklusif yang diharapkan terjadi inklusi sosial yang memungkinkan munculnya rasa saling percaya, modal bersama untuk membangun hidup yang lebih manusiawi, dan tidak menuju kemusnahan sebuah peradaban kota.

Menurut *International Disability and Development Consortium* (IDDC) yang ditampilkan di website [www.make-development-inclusive.org](http://www.make-development-inclusive.org), pembangunan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok/kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Tantangannya saat ini mendefinisikan kembali atau mengonseptualisasikan istilah pembangunan secara luas sebagai suatu proses

perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju suatu kondisi inklusi sosial, yakni suatu kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Inklusi sosial merupakan pendekatan baru yang ingin mengembangkan keterbukaan; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya dalam suatu proses pembangunan.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

*Sumber Rujukan:*

Henny Warsilah, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 17 No. 2 Tahun 2015

<https://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif/>

<http://www.karinakas.or.id/index.php/id/berita/124-konsep-pembangunan-inklusif-apakah-perlu>

- POKOK BAHASAN** : **6. TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **6.2. PRINSIP DAN KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan prinsip perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah
  2. Menjelaskan kewenangan desa dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan daerah
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.6.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator meminta salah seorang peserta menceritakan pengalamannya mengikuti atau berbagi pengetahuan tentang proses/tahapan pembangunan di desa dan satu orang di daerah;</p> <p>b. Fasilitator mencatat dan menyimpulkan jawaban peserta serta memberikan penegasan tentang proses atau tahapan pembangunan desa dan daerah mengacu pada Bahan Bacaan Prinsip dan Kewenangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah (6.2.2) atau slide presentasi yang telah disiapkan;</p> <p>c. Fasilitator menunjuk satu orang relawan memandu sesi untuk mendapatkan poin-poin mengenai prinsip dan kewenangan desa dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>d. Fasilitator memberikan apresiasi dan menanggapi proses fasilitasi terkait kesesuaian hasil atau poin yang didapat dengan Bahan Bacaan Prinsip dan Kewenangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah (6.2.2) dan berdasarkan PP yang mengatur tentang kewenangan;</p> <p>e. Fasilitator menyimpulkan hasil fasilitasi.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Prinsip dan Kewenangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah (6.2.2)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan pentingnya pemahaman prinsip dan kewenangan desa dan daerah dalam pembangunan serta pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p>	10'	

## BAHAN BACAAN

**PRINSIP DAN KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH**

Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga UU: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa. Keputusan ini semakin menggiatkan gerakan pada pejuang Desa. Pada tahun 2007, pemerintah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU Desa. Baru pada bulan Januari 2012 Presiden mengeluarkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR, dan kemudian DPR RI membentuk Pansus RUU Desa.

Baik pemerintah maupun DPD dan DPR membangun kesepahaman untuk meninggalkan Desa lama menuju Desa baru. Mereka berkomitmen untuk mengakhiri perdebatan panjang dan sikap politik yang tidak jelas kepada Desa selama ini, sekaligus membangun UU Desa yang lebih baik, kokoh dan berkelanjutan. Setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013), dan pembahasan intensif 2012-2013, RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013. Mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, DPR, DPD, para Kepala Desa dan perangkat Desa, hingga para aktivis pejuang Desa menyambut kemenangan besar atas kelahiran UU Desa. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, UU Desa yang diundangkan menjadi UU No. 6/2014, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Visi dan komitmen tentang perubahan Desa juga muncul dari pemerintah, setelah melewati deliberasi yang panjang dan membangun kompromi agung dengan DPR.

Desa kuat dan desa mandiri, merupakan sebuah kesatuan organik. Dalam Desa kuat terdapat kemandirian Desa, dan dalam Desa mandiri terdapat kandungan Desa kuat. Kapasitas Desa menjadi jantung kemandirian Desa. Secara khusus dalam Desa kuat terdapat dua makna penting. Pertama, Desa memiliki legitimasi di mata masyarakat Desa. Masyarakat menerima, menghormati dan mematuhi terhadap institusi, kebijakan dan regulasi Desa. Tentu legitimasi bisa terjadi kalau Desa mempunyai kinerja dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, bukan hanya manfaat secara administratif, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi. Kedua, Desa memperoleh pengakuan dan penghormatan (rekognisi) dan kepercayaan dari pihak negara (institusi negara apapun), pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain. Jika mereka meremehkan Desa, misalnya menganggap Desa tidak mampu atau Desa tidak siap, maka Desa itu masih lemah. Rekognisi itu tidak hanya di atas kertas sebagaimana pesan UU Desa, tetapi juga diikuti dengan sikap dan tindakan konkret yang tidak meremehkan tetapi memercayai.

Rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan Desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan antara Desa dengan warga atau antara pemimpin Desa dengan warga masyarakat. Rekognisi, subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan dalam UU Desa. Rekognisi dan subsidiaritas, seperti halnya desentralisasi, hendak membawa negara, arena dan sumberdaya lebih dekat kepada Desa; sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat Desa pada negara, arena dan sumberdaya. Tanpa demokrasi, rekognisi-subsidiaritas dan kemandirian Desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke Desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiaritas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumberdaya dan negara.

## Desa sebagai suatu Kesatuan Pemerintahan dan Masyarakat

Desa sebagai sebuah kesatuan organik, Desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki Desa. Desa memiliki masyarakat berarti Desa ditopang oleh institusi lokal atau modal sosial. Dalam UU Desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan. Sementara masyarakat memiliki Desa bisa disebut juga sebagai tradisi berdesa, atau masyarakat menggunakan Desa sebagai basis dan arena bermasyarakat, bernegara, berpolitik atau berpemerintahan oleh masyarakat.

Desa sebagai basis sosial merupakan tempat menyemai dan merawat modal sosial (kohesi sosial, jembatan sosial, solidaritas sosial dan jaringan sosial) sehingga Desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, Desa menyediakan arena kontestasi politik bagi kepemimpinan lokal, sekaligus arena representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan Desa. Dengan kalimat lain, Desa menjadi arena bagi demokratisasi lokal yang paling kecil dan paling dekat dengan warga. Sebagai basis pemerintahan, Desa memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan dan layanan dasar yang bermanfaat untuk warga. Sebagai basis ekonomi, Desa sebenarnya mempunyai aset-aset ekonomi (hutan, kebun, sawah, tambang, sungai, pasar, lumbung, perikanan darat, kerajinan, wisata, dan sebagainya), yang bermanfaat untuk sumber-sumber penghidupan bagi warga. Hakekat Desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan itu ditemukan dalam lintasan sejarah. Banyak cerita yang memberikan bukti bahwa Desa bermakna dan bermanfaat bagi warga. Banyak peran dan manfaat Desa bagi masyarakat di masa lalu, seperti menjaga keamanan Desa, mengelola persawahan dan irigasi, penyelesaian sengketa, pendirian sekolah-sekolah rakyat dan sekolah dasar, dan masih banyak lagi.

Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukum yang dipakai waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

Namun, pada praktiknya meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya terbengkalai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten, usulan program prioritas dari desa itu pun harus kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan desa saat ini, berbeda dengan sistem yang dianut oleh UU No. 32 tahun 2004. Pedoman perencanaan Desa sekarang adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. UU No.6 tahun 2014 pada pasal 79 ayat (4) menegaskan bahwa Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

Pihak lain di luar pemerintah desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut. Dapat dipahami bahwa Perencanaan Desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

## Prinsip dalam Perencanaan Desa

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
3. Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa.
5. Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
6. Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
7. Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
8. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

## Kewenangan Desa dan Jenis-jenis Kewenangan Desa

Dalam mengatur dan mengurus Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, kewenangan desa tidak hanya diperoleh melalui pelimpahan atau pemberian, karena desa memiliki kewenangan asli (*indigenous authority* atau *genuine authority*) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. Sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat merupakan salah satu faktor pengikat yang diakui dan ditaati bersama oleh masyarakat setempat (selain faktor-faktor lainnya). Sistem nilai adat istiadat sebagai faktor pengikat yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat setempat inilah yang merupakan hak asal usul desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Mengingat adanya perbedaan sistem nilai adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia, maka kewenangan asli desa senantiasa berbeda-beda antara desa-desa di Indonesia, meskipun pada hal-hal tertentu adanya kesamaan nilai adat istiadat antar suku-suku bangsa di Indonesia, seperti nilai-nilai perdamaian dalam menyelesaikan masalah perdata dalam kehidupan masyarakat desa.

Kewenangan asli desa inilah yang merupakan kewenangan utama desa dalam menyelenggarakan rumah tangga desa, sehingga kewenangan desa yang bersifat pelimpahan atau pemberian dari pemerintah atasan, pada dasarnya merupakan kewenangan tambahan, karena Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan secara nasional.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **Kedudukan Desa dalam Pembangunan Daerah**

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. kedudukan Desa sendiri sudah dinyatakan dalam UU lain, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Wilayah Negara. Pada Bab II (Pembagian Wilayah Negara) UU tersebut dinyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang kemudian dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Klausul ini sejatinya menekankan pada hal pembagian wilayah secara geografis saja, bukan menyangkut pembagian pemerintahan. Pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota.

Perubahan kedudukan Desa dari UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan UU No 6/2014 bertujuan agar Desa bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara tegas: "Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa adat"

Di samping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Elemen penting otonomi Desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



Berdasarkan pengaturan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, maka dapat dikatakan kedudukan desa berada diluar susunan NKRI yang hanya dibagi-bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya, desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktur Negara. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Berdasarkan definisi tersebut, Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*).

Desa secara administratif berkedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (*local self government*). Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Desa yang berada diwilayah Kabupaten/Kota dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dimana berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dibagi atas dua pemerintahan daerah otonom yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi dibagi atas pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota tidak dapat ditafsirkan sebagai daerah otonom tingkat III atau suatu jenis pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk itu desa yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan sendirinya akan berada dibawah lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

Kedudukan administrasi pemeritah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*) inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan.

Dengan kewenangan yang besar, desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Desa. Sebenarnya pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan Desa sudah dimulai dari program program pemberdayaan. Program program pemberdayaan tersebut dijalankan karena ada pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa kurang efektif.

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 80 ayat 1 undang Undang Desa no 06 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

**Tabel Rencana Pembangunan Desa sebelum dan sesudah disahkannya UU Desa**

SEBELUM UU 6 TAHUN 2014	SESUDAH UU 6 TAHUN 2014
<p>Acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>(ii) UU 25/2004 Tentang SPPN;</li> <li>(iii) PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa;</li> <li>(iv) Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa.</li> </ul>	<p>Acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) UU 6/2014 tentang Desa;</li> <li>(ii) Permendagri 114/2014.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musrenbang Menyusun RPJM Desa 5 tahunan dan RKP Desa tahunan;</li> <li>• Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masyarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah;</li> <li>• APBD letak banyak untuk membiayai program/proyek daerah dan desa hanya sebagai lokus bukan sebagai pertanggungjawaban.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa);</li> <li>• Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.</li> </ul>

## Pembangunan Desa dalam Sistem Pembangunan Nasional

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum dan peluang besar kepada Desa untuk menjadi Desa yang Mandiri tanpa meninggalkan jati dirinya. Undang-Undang ini mengatur Desa dan Desa Adat atau sebutan lain sesuai dengan Pasal 1 serta mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa mendapat perhatian yang luar biasa karena dipandang sebagai horizon baru pembangunan. Desa diletakkan sebagai pusat arena pembangunan, bukan lagi semata lokasi keberadaan sumber daya (ekonomi) yang dengan mudah dieksploitasi oleh wilayah lain (kota) untuk beragam kepentingan. Dengan demikian hal ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara desa-kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015, tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas itu, salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

### Sumber Rujukan:

Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Lembar Informasi Pendamping Desa, Kompetensi Umum, Kementerian Desa PDTT  
<https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/pahami-9-prinsip-dalam-perencanaan-desa.html>

**POKOK BAHASAN** : **6. TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

**SUB POKOK BAHASAN** : **6.3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan urgensi partisipasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2. Menjelaskan peluang dan jaminan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Menjelaskan pemanfaatan ruang partisipasi untuk mendorong perubahan kebijakan
4. Memahami dan mempraktikkan beberapa model pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa hingga Kabupaten

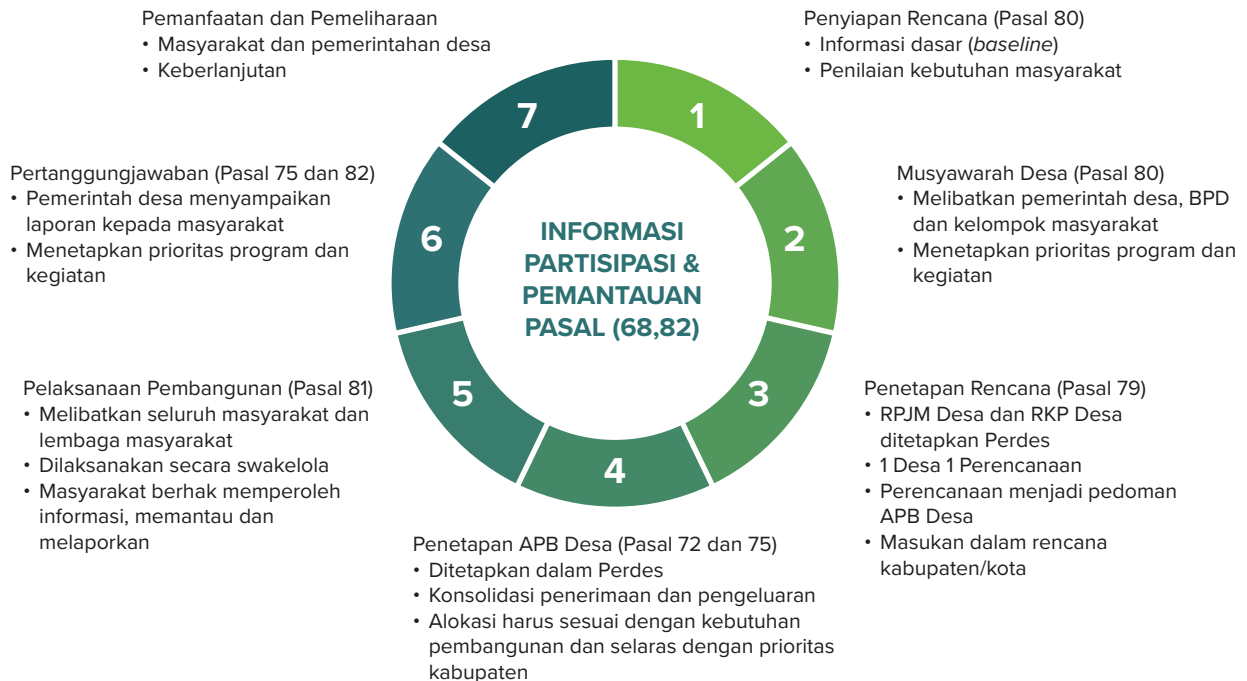
**WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.6.3.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah, Simulasi dan Tanya Jawab</b></p> <p>a. Fasilitator memandu diskusi dengan menampilkan gambar dalam Lembar Penyajian Pentingnya Partisipasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (M.6.3.2) dan menjelaskan latar belakang serta pelaksanaan Musrena Keren berdasarkan Bahan Bacaan (M.6.3.4);</p> <p>b. Fasilitator meminta peserta melakukan simulasi pelaksanaan Musrena Keren di dalam 2 kelompok mengacu pada Lembar Panduan Simulasi (M.6.3.3);</p> <p>c. Fasilitator menyampaikan slide presentasi atau memberikan penjelasan tentang partisipasi warga dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, regulasi terkait, peluang dan tantangan serta hambatan terwujudnya partisipasi dengan mengacu pada Bahan Bacaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan (M.6.3.4);</p> <p>d. Fasilitator membuka diskusi dengan peserta untuk memberikan tanggapan dari presentasi yang disampaikan atau klarifikasi apabila dibutuhkan.</p>	80'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian Partisipasi dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan (M.6.3.2)</li> <li>Lembar Panduan Simulasi (M.6.3.3)</li> <li>Bahan Bacaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan (M.6.3.4)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan tentang peran Mentor dan Kader dalam mendorong partisipasi kelompok rentan dalam mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa melalui Musrena Keren.</p>	5'	

## M. 6.3.2

## LEMBAR PENYAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



## M. 6.3.3

## LEMBAR PANDUAN PRAKTIK SIMULASI

1. Ada 4 kelompok yang akan melakukan simulasi yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Musrena Keren (menghasilkan usulan prioritas untuk Musrenbang RKPDes)
  - b. Musrenbangdes RPJMDes
  - c. Musrenbang Kecamatan (menghasilkan usulan prioritas hingga merumuskan daftar DU RKP)
  - d. Forum OPD
2. Sampaikan bahwa setiap kelompok harus mendiskusikan dan menyiapkan simulasi selama 10 menit;
3. Setiap kelompok akan tampil dengan durasi masing-masing 15 menit;
4. Setiap penampilan kelompok memastikan dalam simulasi membahas:
  - a. Kualitas usulan
  - b. Menentukan prioritas usulan
  - c. Menyepakati perlunya penunjukan utusan
  - d. Syarat atau kriteria utusan yang akan memperjuangkan usulan pada tingkat yang lebih tinggi (kecuali pada Kelompok Forum OPD);
5. Setelah 10 menit, minta salah satu kelompok tampil dan setelah itu berikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk menanggapi;
6. Catat poin-poin penting dalam simulasi untuk ditindaklanjuti pada sesi pembahasan setelah semua kelompok selesai tampil.

## BAHAN BACAAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:

- a. penataan Desa
- b. perencanaan Desa
- c. kerja sama Desa
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa
- e. pembentukan BUM Desa
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa, dan
- g. kejadian luar biasa.

Meletakkan kepentingan masyarakat Desa sebagai prinsip demokrasi Desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat Desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan Desa. Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat.

Musyawarah sebagai prinsip demokrasi Desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat Desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat urban, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat Desa.

**Partisipasi**

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di Desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya.

Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga Desa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendes No. 2 Tahun 2015, diatur bahwa setiap unsur masyarakat berhak “menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa” (Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendes PDDT No. 2 tahun 2015).

Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan Desa. Maksud kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas sesuatu hal. Makna selanjutnya, (2) sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekerasan serta politik uang (*money politic*).

Prinsip sukarela sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi (*self sovereignty*). Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain. Dalam masyarakat Desa, prinsip ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dikembangkan untuk mencapai kehidupan Desa yang demokratis.

## Membangun Kemandirian Desa

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun. Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwakriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Menyusun sebuah rencana yang baik sangat penting dan harus didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Sebelum melaksanakan kegiatan membangun perencanaan bersama masyarakat desa, beberapa komponen penting perlu diketahui dan dihayati oleh seorang pendamping masyarakat, antara lain:

- a. pemahaman tentang kondisi umum masyarakat
- b. pemahaman tentang peran dan fungsi pendamping
- c. pemahaman tentang daur program pembangunan desa
- d. pemahaman tentang arti penting data dalam menyusun sebuah perencanaan
- e. pemahaman atas berbagai metode-metode partisipatif, dan
- f. bagaimana memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kaitannya dengan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, setiap anggota masyarakat memiliki hak berpartisipasi. Baik secara langsung, melalui wakilnya di wilayah tempat tinggalnya (RT/RW/Dusun) maupun mengajukan diri untuk terlibat dalam berbagai tim atau panitia yang dibentuk dalam semua tahapan pembangunan desa. Beberapa di antaranya adalah terlibat dalam:

- a. Panitia pemilihan kepala desa
- b. Tim penyusun RPJM Desa
- c. Tim Penyusun RKP Desa
- d. Musyawarah Dusun
- e. Musyawarah Desa
- f. Musrenbang Desa
- g. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material
- h. Kegiatan pembangunan fisik
- i. Kegiatan rapat/diskusi/musyawara yang ada di desa
- j. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa
- k. Menyusun dan melaporkan pengaduan hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
- l. Lembaga Kemasyarakatan Desa

*Sumber Referensi:*

*Serial Bahan Bacaan "Perencanaan Pembangunan Desa untuk Pendamping Lokal Desa" Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*

*Serial Bahan Bacaan "Demokratisasi Desa" Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*



- POKOK BAHASAN** : **6. TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **6.4. MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan media atau saluran pengaduan dan laporan inklusif dan aksesibel yang dapat digunakan oleh masyarakat.
  2. Menjelaskan mekanisme penanganan pelaporan dan pengaduan
  3. Mampu menyusun pengaduan dan laporan yang sesuai dengan standar media pengaduan dan laporan
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.6.4.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memandu diskusi untuk menggali pengetahuan peserta tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Saluran pengaduan dan pelaporan yang selama ini ada di desa beserta kelebihan dan kekurangannya;</li> <li>(ii) Hambatan bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan dan pelaporan yang selama ini ada di desa;</li> <li>(iii) Peluang yang bisa dimanfaatkan atau yang bias dikembangkan dalam pengaduan dan pelaporan masyarakat.</li> </ul> <p>b. Fasilitator mencatat poin-poin pendapat peserta pada kertas plano;</p> <p>c. Fasilitator membuka diskusi dengan peserta untuk memberikan tanggapan dari presentasi yang disampaikan;</p> <p>d. Fasilitator menyimpulkan pendapat peserta berdasarkan poin-poin tersebut dan menambahkan penjelasan menggunakan slide presentasi yang telah disiapkan atau mengacu pada Bahan Bacaan Mekanisme Penanganan Pelaporan dan Pengaduan (M.6.4.2) mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <i>Evidence based</i> dalam pengaduan;</li> <li>(ii) Masalah pengaduan dan pelaporan serta salurannya;</li> <li>(iii) Gambaran singkat mengenai cara dan konten pengaduan.</li> </ul> <p>e. Fasilitator memberikan kesempatan Tanya jawab dan menyimpulkan sesi.</p>	10'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Mekanisme Penanganan Pelaporan dan Pengaduan (M.6.4.2)</li> </ul>
<p>3. <b>Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kelompok 1 dan 2: menyusun dan menulis Pengaduan berikut data yang dibutuhkan dari saluran yang ada di Desa;</li> <li>(ii) Kelompok 3 dan 4: menyusun dan menulis Pengaduan berikut data yang dibutuhkan dari saluran yang ada di Kabupaten.</li> </ul> <p>b. Fasilitator meminta setiap kelompok presentasi dan saling menanggapi;</p> <p>c. Fasilitator menyimpulkan hasil pembahasan.</p>	20'	
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan tentang pentingnya pengetahuan mengenai mekanisme dan saluran pengaduan dan pelaporan; serta keterampilan dalam merumuskan, memilih serta menguasai teknik penyampaian pengaduan dan pelaporan.</p>	5'	

## BAHAN BACAAN

**DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN DI DESA**

Kunci utama demokrasi perwakilan adalah bekerjanya fungsi BPD sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa. Pada satu sisi, BPD mengontrol pemerintah Desa agar berkinerja efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada sisi lainnya, BPD membatasi kekuasaan di Desa dengan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada elit Desa.

Kualitas kinerja BPD sangat ditentukan oleh kapasitas anggota-anggotanya. Kapasitas anggota BPD yang rendah menjadi penyebab BPD gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa. Apabila BPD gagal membatasi kekuasaan kepala Desa, maka kepala Desa atau sekelompok orang yang dekat dengan kepala Desa akan dengan mudah menggunakan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan dan manfaat sepihak terhadap sumberdaya yang ada di Desa. Kondisi ini melahirkan situasi ketidakadilan sosial yang justru mengawetkan ketidakberdayaan masyarakat Desa di dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dominasi elit Desa ini bertentangan dengan mandat Undang-Undang Desa yaitu keuangan dan aset Desa didayagunakan untuk kesejahteraan bersama.

BPD merupakan faktor kunci penyelenggaraan Desa yang demokratis. Karenanya, penguatan akuntabilitas sosial di Desa dimulai dari upaya memperkuat fungsi BPD sebagai lembaga penyeimbang pemerintah Desa dan sebagai kanal aspirasi warga Desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. BPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemerintah Desa dan/atau sebagai masukan dalam penyusunan peraturan Desa.

Pemerintahan Desa yang demokratis, sesuai kerangka kerja demokrasi permusyawaratan, sangat ditentukan oleh adanya partisipasi warga desa dalam penyelenggaraan Desa. Utamanya, partisipasi warga Desa dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik di Desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keputusan musyawarah desa merupakan wujud kepentingan bersama masyarakat yang menjadi tali pengikat solidaritas sosial. Kehendak bersama kepala Desa, BPD dan warga Desa, yang dirumuskan melalui proses demokrasi musyawarah mufakat, dituangkan dalam bentuk produk hukum desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Peraturan Desa ini memiliki fungsi strategis sebagai sabuk pengikat beragam kepentingan yang ada di ranah Desa. Kehendak bersama dihadirkan dalam wujud keterikatan warga desa kepada hukum positif yang dirumuskan secara bersama-sama.

Setiap orang yang hidup dan menetap di Desa akan terikat sebagai warga Desa bukan dikarenakan urusan administrasi kependudukan. Lebih daripada itu, warga Desa merupakan pemegang kedaulatan yang berhak menentukan jalannya pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa, dalam prosedur demokrasi permusyawaratan, sejatinya merupakan "bejana kuasa rakyat" yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam bingkai pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Keberhasilan penyelenggaraan Desa, yang dikelola berdasarkan prosedur demokrasi permusyawaratan, ditentukan partisipasi warga Desa. Partisipasi warga Desa merupakan faktor kunci penyelenggaraan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas sosial penyelenggaraan Desa pun ditentukan oleh kualitas partisipasi warga Desa. Namun demikian, partisipasi warga Desa tersebut tidak cukup dimaknai sebagai jumlah aspirasi yang disalurkan kepada BPD atau jumlah aspirasi yang disuarakan di musyawarah Desa. Kualitas partisipasi masyarakat ditentukan oleh kapasitas warga Desa dalam menyampaikan aspirasi tentang pertanggungjawaban kinerja pemerintahan Desa yang disusun berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan pengetahuan yang benar tentang pemerintahan Desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat yang berkualitas, praktek demokrasi permusyawaratan hanya akan berujung pada munculnya tirani mayoritas atas nama rezim partisipatif dalam penyelenggaraan Desa.

Selama ini, banyak konsep akuntabilitas sosial yang telah dikembangkan dan dipraktikkan di Desa, terutama Desa yang mendapat pendampingan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Mitra Pembangunannya. Praktik-praktik ini terbukti mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.

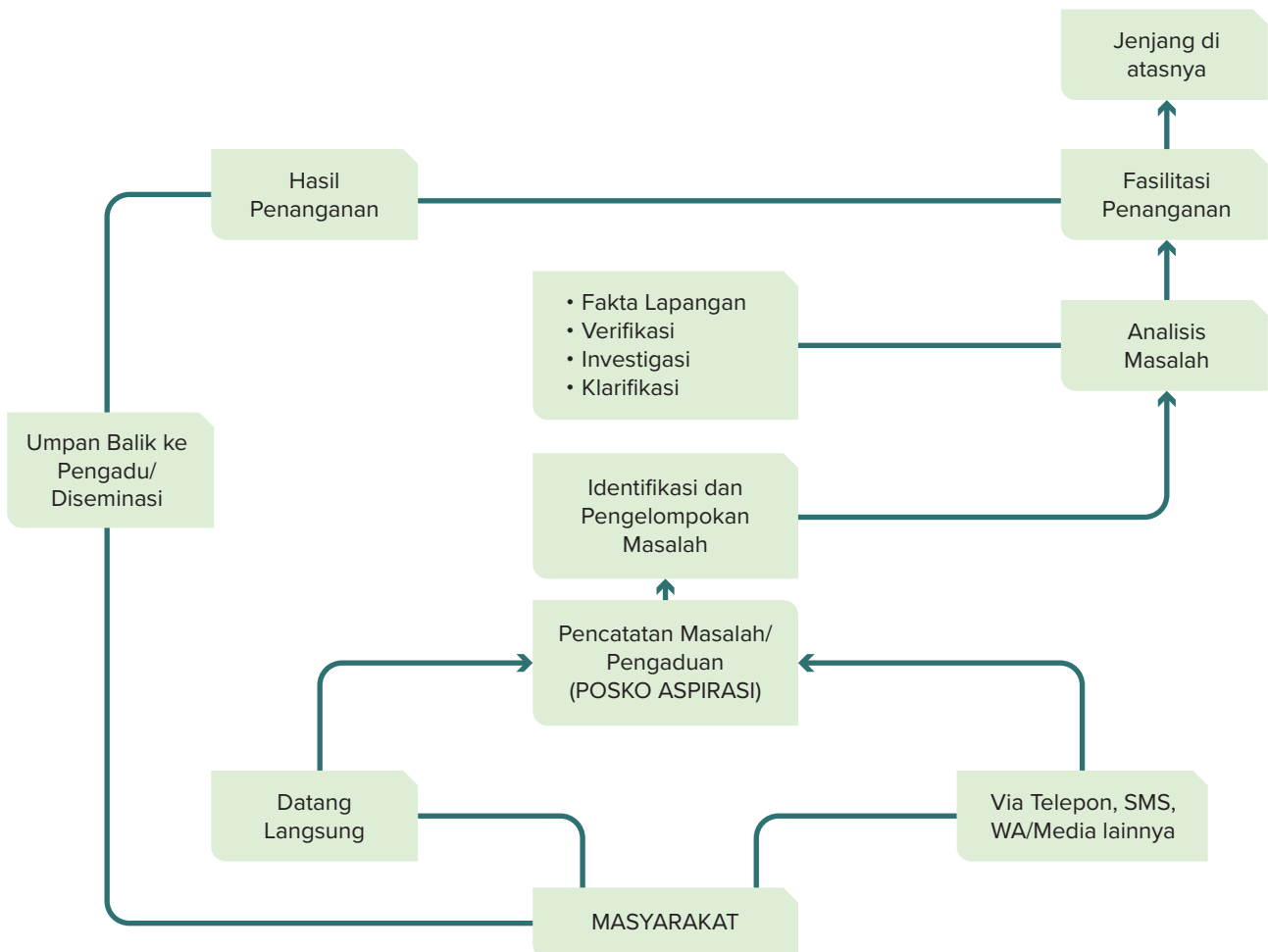
Bentuk-bentuk akuntabilitas sosial yang telah dipraktikkan tersebut, antara lain: Pembentukan Rumah Aspirasi dan Posko Penganduan di Desa, Audit Sosial Desa, Jurnalisme Warga, Kartu Penilaian Warga, layanan informasi dan konsultasi, serta praktik akuntabilitas sosial lainnya.

No	Target Perubahan	Model-Model Akuntabilitas Sosial
1	Perbaiki Layanan di Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD</li> <li>• Kolaboratif Monitoring (<i>Score Cards</i>)</li> <li>• Layanan Informasi dan Konsultasi</li> <li>• Audit Sosial/Analisa Anggaran</li> <li>• Maklumat Layanan (<i>Citizen's Charter</i>)</li> <li>• Jurnalisme Warga</li> </ul>
2	Pengawasan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD</li> <li>• Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif</li> <li>• Audit Sosial/Analisa Anggaran</li> <li>• Maklumat Layanan (<i>Citizen's Charter</i>)</li> <li>• Kolaboratif Monitoring (<i>Score Cards</i>)</li> <li>• Layanan Informasi dan Konsultasi</li> <li>• Jurnalisme Warga</li> </ul>
3	Transparansi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Informasi Desa/Publik</li> <li>• Pendidikan Masyarakat/Kampanye</li> <li>• Audit Sosial/Analisa Anggaran</li> </ul>
4	Pelibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender</li> <li>• Forum/Komite Bersama</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Kader Desa</li> </ul>

## GAMBAR ALUR PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD



## POSKO PENGADUAN SERTA MEKANISME SERAP ASPIRASI & PENGADUAN WARGA DESA





# PENGGORGANISASIAN KOMUNITAS

- POKOK BAHASAN** : **7. PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Memahami konsep, prinsip dan langkah pengorganisasian komunitas
  2. Memahami Konsep dan mampu menerapkan metode dalam Pendidikan Orang Dewasa (POD)
  3. Mampu menerapkan keterampilan dasar fasilitasi
  4. Memahami konsep dan mampu menerapkan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas
- SUB POKOK BAHASAN** : **7.1 KONSEP PRINSIP DAN LANGKAH PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- 7.2 KONSEP DAN PENERAPAN METODE DALAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)**
- 7.3 KETERAMPILAN DASAR FASILITASI**
- 7.4 TEKNIK KOMUNIKASI DALAM PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- WAKTU** : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit



**POKOK BAHASAN** : **7. PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**

**SUB POKOK BAHASAN** : **7.2 KONSEP, PRINSIP DAN LANGKAH PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Memahami konsep pengorganisasian komunitas
2. Memahami pentingnya pengorganisasian komunitas
3. Mengidentifikasi prinsip pengorganisasian komunitas
4. Mengetahui langkah langkah pengorganisasian komunitas

**WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.7.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.7.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Permainan, Ceramah Curah Pendapat, Diskusi Kelompok</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok untuk melakukan permainan Menara Sedotan mengacu Lembar Permainan (M.7.1.3);</p> <p>c. Fasilitator melanjutkan sesi dengan memberikan penjelasan konsep, prinsip dan langkah dalam pengorganisasian komunitas dengan media presentasi atau menjelaskannya dengan mengacu pada Media Bantu Ppt yang telah disiapkan atau Bahan Bacaan Pengorganisasian Komunitas (M.7.1.5);</p> <p>d. Fasilitator menanyakan kepada peserta:</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) Siapa yang disebut sebagai pengorganisir komunitas?</p> <p style="margin-left: 20px;">(ii) Apa saja perannya?</p> <p style="margin-left: 20px;">(iii) Faktor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya?</p> <p>e. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada kertas plano yang telah ditempel dengan format Lembar Identifikasi Jati Diri dan Faktor Keberhasilan Pengorganisasian Komunitas (M.7.1.4);</p> <p>f. Fasilitator kembali menayangkan media bantu atau menjelaskan jawaban dari ketiga pertanyaan di atas dan menghubungkannya dengan pendekatan POD/Andragogi serta Paulo Freire;</p> <p>g. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab atau menanggapi dan melengkapinya jika dibutuhkan;</p> <p>h. Fasilitator menyimpulkan jawaban peserta.</p>	80'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Panduan Permainan Menara Sedotan (M.7.1.3)</li> <li>• Lembar Identifikasi Jati Diri dan Faktor Keberhasilan Pengorganisasian Komunitas (M.7.1.4)</li> <li>• Bahan Bacaan Pengrganisasian Komunitas (M.7.1.5)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menegaskan kembali konsep, prinsip, langkah pengorganisasian masyarakat serta pentingnya Mentor dan Kader Sepeda Keren menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa (<i>adult education/Andragogi</i>) dalam proses pengorganisasian komunitas.</p>	5'	

## LEMBAR INSTRUKSI PERMAINAN MENARA SEDOTAN

1. Bagikan 30 buah sedotan kepada setiap kelompok;
2. Instruksikan kepada setiap kelompok untuk membuat sebuah bangunan seperti rumah, gedung, rumah ibadah, jembatan, dan lain lain hanya dengan memanfaatkan atau menyusun sedotan yang telah dibagikan;
3. Informasikan bahwa bangunan dibuat selama 10 menit, harus kokoh dan tidak gampang roboh ketika ditiup angin dan akan dibuktikan atau diuji oleh fasilitator;
4. Pemenang adalah peserta yang dapat membuat bangunan yang lebih tinggi dan kokoh dari pada yang lainnya dalam batas waktu yang telah ditentukan;
5. Setelah 10 menit, tiup bangunan satu per satu dan berikan penilaian;
6. Lakukan review dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
  - a. Bagaimana kelompok menyepakati bangunan yang akan dibuat?
  - b. Bagaimana pembagian peran dalam membuat bangunan?
  - c. Masalah apa saja yang ditemui dalam membuat bangunan?
  - d. Bagaimana solusi ditemukan, disepakati dan dilaksanakan?
  - e. Jika bangunan diumpamakan sebagai sebuah entitas atau kelompok masyarakat, bagaimana anda menjelaskannya?
7. Fasilitator menuliskan poin-poin pendapat peserta pada metaplan;
8. Fasilitator mengajak peserta mengategorisasi poin-poin pada metaplan ke dalam 3 kategori yakni konsep, prinsip dan langkah pengorganisasian komunitas;
9. Fasilitator mengajak peserta membuat kesimpulan tentang konsep , prinsip dan langkah pengorganisasian komunitas;

## LEMBAR IDENTIFIKASI JATI DIRI DAN FAKTOR KEBERHASILAN PENGORGANISASIAN KOMUNITAS

PENGORGANISIR/KADER KOMUNITAS	PERAN	FAKTOR KEBERHASILAN

## BAHAN BACAAN

**PENGORGANSASIAN KOMUNITAS****Pentingnya pengorganisasian komunitas**

Pengorganisasian komunitas (Community Organizing) sesungguhnya adalah sebuah pemikiran dan pola kerja yang telah ada dan berlangsung sejak berabad-abad yang lampau, yaitu serangkaian upaya membangun komunitas untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Sebagai suatu rumusan konsep pemikiran dan pola kerja paling tidak sudah dikenal pada masa kehidupan Lao Tse di dataran Cina, pada abad 7 sebelum Masehi. Pada abad keduapuluh konsep dari pemikiran dan pola kerja Pengorganisasian Masyarakat tersebut menjadi populer kembali, sebagai reaksi terhadap gagasan dan praktik-praktik pembangunan atau “modernisasi” yang ternyata berujung pada terinjakinjaknya harkat kemanusiaan dan pengurusan secara dahsyat berbagai sumber daya alam untuk kepentingan sekelompok kecil manusia di bumi ini.

**Konsep pengorganisasian komunitas**

Secara umum Pengorganisasian komunitas didefinisikan sebagai : “Proses membangun kekuatan dengan melibatkan komunitas sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemu kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh komunitas sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan komunitas yang ada” ( Dave Beckwith & Cristina Lopez,1997 )1 .

Pengorganisasian komunitas bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan tertentu, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif massa kritis ntuk mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Dalam pengertiannya yang sederhana, adalah suatu kegiatan yang membantu komunitas/ masyarakat atau sekelompok orang yang hidup pada suatu daerah tertentu; misalnya, orang yang tinggal di suatu perkampungan, baik di pedesaan atau di perkotaan untuk dapat mencapai tujuan bersama.

**Prinsip Dasar Pengorganisasian**

- a. Berpihak dan mementingkan komunitas;
- b. Pendekatan holistik tidak kasuistik;
- c. Bersikap independent dan mengembangkan rasa empati;
- d. Adanya pertanggung jawaban pada rakyat
- e. Ada proses saling belajar;
- f. Kesetaraan;
- g. Anti kekerasan;
- h. Mendorong komunitas untuk berinisiatif;
- i. Musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi
- j. Berwawasan ekosistem;
- k. Praksis.

Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang “organiser komunitas adalah:

- a. Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas yang diorganisir.
- b. Bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan.
- c. Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut
- d. Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunitas tersebut.
- e. Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

Prinsip tersebut dirumuskan dari satu cuplikan ajaran Lao Tse (700 sm) yang lebih kurang berbunyi sebagai berikut:

*“Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlh dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu; bangunlah dari apa yang mereka punya; tetapi pedamping yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya”.*

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya untuk dijalankan oleh pengorganisasi komunitas, yaitu:

- a. Mengakar dalam pemimpin masyarakat lokal, organisasi dan agen-agen lokal dan masyarakat local. Orang luar dapat terlibat sebagai fasilitator atau nara sumber.
- b. Merupakan tenaga atau kekuatan pengendali yang diturunkan melalui keinginan dari masyarakat lokal untuk kesejahteraan anak-anak mereka dan mereka sendiri.
- c. Merupakan program aksi yang dibangun secara bersama dengan perwakilan organisasi masyarakat. Program ini merupakan suatu kenyataan yang aktual yang merupakan sekumpulan kesepakatan umum yang mengakibatkan pengembangan dari organisasi lokal.
- d. Merupakan suatu program yang tumbuh dari masyarakat local, bersamaan dengan partisipasi langsung dari semua organisasi di wilayah-wilayah khusus. Hal ini meliputi derajat substansi dari partisipasi masyarakat dan voluntir . Hal ini juga menuntut adanya komitmen yang tinggi pengorganisasi komunitas
- e. Swadana, dan swadaya
- f. Proses pengorganisasian harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan sensitif pada budaya dan situasi sosio-ekonomi-politik lokal agar kehadiran pengorganisasi masyarakat tidak malah memicu konflik horisontal di dalam masyarakat
- g. Pengorganisasi komunitas harus hati-hati agar tidak terjebak dalam paradigma dan prasangka yang dibawanya dan harus belajar mengosongkan diri agar dapat menangkap kondisi dan permasalahan masyarakat secara jernih. Proses pengorganisasian masyarakat harus cukup murni dan tidak terlalu dibebani oleh proyek-proyek tertentu (misalnya pengorganisasian masyarakat ditujukan untuk melobi masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata alam, padahal masyarakat belum tentu butuh, mau dan punya potensi). Kegiatan/aksi apa yang muncul dalam proses pengorganisasian masyarakat harus diupayakan murni dari masyarakat (pilihan bebas mereka).

### **Langkah Pengorganisasian Komunitas**

- a. Integrasi, langkah paling pertama dan utama dari proses pengorganisasian masyarakat adalah menyatunya sang organiser dengan komunitas yang hendak diorganisasikan.
- b. Penyidikan sosial, suatu proses yang sistematis mencari tahu tentang masalah-masalah yang mengitari masalah yang dimaksud.
- c. Program percobaan, Seorang “organiser” memilih suatu bentuk kegiatan yang merupakan kesepakatan kelompok yang jika dilakukan berdampak positif bagi banyak orang.

- d. Landasan kerja, dimaksudkan sebagai bagian awal dari pergerakan masyarakat berdasarkan hubungan orang per orang dalam kelompok dimulai kebersamaan menyuarakan kepentingan.
- e. Pertemuan rutin, pertemuan atau rapat dimaksudkan untuk mempertemukan kepentingan pribadi-pribadi sampai menjadi pengesahan umum meminimalisasi puncak-puncak perbedaan.
- e. Permainan peran, merupakan proses pelatihan setiap orang (semua) dalam kelompok berhadapan dengan pihak luar masyarakat.
- f. Mobilisasi atau aksi, kegiatan mengungkapkan perasaan dan kebutuhan masyarakat secara terprogram.
- g. Evaluasi, Merupakan proses peninjauan ulang apakah langkah-langkah yang sudah ditempuh sebelumnya sudah tepat atau tidak.
- h. Refleksi, proses perenungan ulang secara keseluruhan usaha pembentukan organisasi rakyat yang tangguh dengan melibatkan sebanyak mungkin orang.
- i. Terbentuknya organisasi rakyat (formal/informal), proses berlangsungnya gagasan di antara anggota bukan lagi oleh orang per orang, melainkan sudah kolektif menghadapi dan menyelesaikan persoalan bersama.

**POKOK BAHASAN** : **7. PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**

**SUB POKOK BAHASAN** : **7.2 KONSEP DAN PENERAPAN METODE DALAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA (POD)**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Memahami Filosofi Pendidikan Orang Dewasa (POD)
2. Memahami Azas dan konsep POD
3. Mengidentifikasi teknik/metode pendidikan orang dewasa
4. Mampu menerapkan POD dalam proses pengorganisasian komunitas

**WAKTU** : 3 Jampel @ 45 menit = 135 menit.



## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.7.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Permainan, Curah Pendapat dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator membagikan kertas HVS 1 lembar kepada setiap peserta;</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta melakukan permainan mengacu pada Lembar Petunjuk Permainan (M.7.2.2);</p> <p>d. Fasilitator mengaitkan kesimpulan dengan perbedaan antara model pendidikan orang dewasa dengan anak-anak;</p> <p>e. Fasilitator memaparkan secara filosofis, konsep pendidikan orang dewasa beserta prinsip-prinsipnya mengacu pada Bahan Bacaan Filosofi Pendidikan Orang Dewasa (M.7.2.5).</p>	20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Petunjuk Permainan (M.7.2.2)</li> <li>Bahan Bacaan Filosofi Pendidikan Orang Dewasa (M.7.2.5)</li> </ul>
<p><b>Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator meminta peserta untuk diskusi secara berpasangan;</p> <p>b. Fasilitator meminta setiap pasangan mendiskusikan bentuk-bentuk POD dan metode pembelajaran yang cocok menggunakan Lembar Panduan Diskusi Berpasangan (M.7.2.3);</p> <p>c. Fasilitator menegaskan kembali metode yang biasa digunakan dalam POD;</p> <p>d. Fasilitator membagi peserta dalam 2 kelompok, masing-masing kelompok diminta untuk merancang model simulasi untuk mempraktikkan salah satu metode dalam POD menggunakan Lembar Panduan Praktik Metode dalam POD (M.7.2.4);</p> <p>e. Fasilitator menanyakan kepada peserta hal apa yang menarik dari simulasi;</p> <p>f. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari pendapat peserta sebagai dasar untuk memberikan penegasan pada akhir sesi.</p>	80'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Panduan Diskusi Berpasangan (M.7.2.3)</li> <li>Lembar Panduan Praktik Metode dalam POD (M.7.2.4)</li> <li>Bahan Bacaan Metode dan Media dalam Pendidikan Orang Dewasa (M.7.2.6)</li> </ul>

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Tanya jawab, Penugasan Kelompok dan Ceramah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pendapat atau bertanya pada hal hal yang belum dipahami;</li> <li>b. Fasilitator memberikan respon atas pertanyaan peserta secara langsung maupun diberikan kepada peserta lain yang bisa menanggapi;</li> <li>c. Fasilitator menanyakan pemahaman peserta terkait media fasilitasi POD;</li> <li>d. Fasilitator mencatat poin-poin jawaban peserta pada kertas plano;</li> <li>e. Fasilitator mengulas jawaban peserta mengacu pada Bahan Bacaan Metode dan Media dalam Pendidikan Orang Dewasa (M.7.2.6)</li> <li>f. Fasilitator meminta setiap peserta kembali ke kelompok semula dan mendiskusikan selama 10 menit terkait media apa yang bisa dikembangkan dalam tema fasilitasi dengan penerapan metode sebelumnya;</li> <li>g. Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya;</li> <li>h. Fasilitator membahas keunggulan dan yang harus ditingkatkan dari media fasilitasi yang digunakan oleh kelompok.</li> </ol>	25 ‘	
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menegaskan tentang pentingnya pendidikan orang dewasa berikut langkah-langkah, prinsip dan metode serta media yang digunakan dalam POD dalam konteks pengorganisasian komunitas.</p>	5’	

## M. 7.2.2

**LEMBAR PETUNJUK PERMAINAN**

1. Bagikan 1 lembar kertas HVS kepada setiap peserta;
2. Minta peserta membuat satu lembar kertas tersebut agar tubuh masing-masing dapat masuk ke dalam kertas tersebut dengan cara merobeknya;
3. Robekan kertas tidak boleh ada bagian yang terputus;
4. Tidak diperbolehkan menggunakan lem, selotip maupun perekat lainnya;
5. Setelah ada satu orang yang menyelesaikan permainan dengan benar, berikan apresiasi dan memintanya menunjukkan caranya kepada peserta lain;
6. Fasilitator menanyakan hal penting yang bisa diambil dari permainan dan menggali jawaban peserta yang mengarah pada:
  - a. Sumber belajar adalah sesama peserta
  - b. Harus berani keluar dari arus utama (mainstream)
  - c. Belajar sepanjang hayat tentang apapun yang ada dalam kehidupan
  - d. Dan lain-lain
7. Tuliskan jawaban peserta pada kertas plano;
8. Berikan pertanyaan untuk curah pendapat: Hal menarik apa yang dapat diambil dari penugasan tadi;
9. Simpulkan jawaban peserta dan hubungkan dengan Model Pendidikan Orang Dewasa (POD).

## M. 7.2.3

**LEMBAR PANDUAN DISKUSI BERPASANGAN**

1. Cari pasangan masing-masing (berdua);
2. Diskusikan apa saja bentuk pendidikan orang dewasa yang anda ketahui dan bentuk pendidikan tersebut efektif dengan metode apa saja dan apa kekuatan dari metode tersebut;
3. Tulis jawaban dalam kertas metaplan;
4. Jelaskan kepada peserta (pasangan) lainnya;
5. Tempelkan yang sudah anda jelaskan pada kertas plano yang telah disediakan.

## M. 7.2.4

**LEMBAR PANDUAN PRAKTIK METODE DALAM POD**

1. Peserta dibagi dalam 2 kelompok dengan hitungan 1-2 atau dengan teknik pembagian kelompok lainnya;
2. Fasilitator memberikan instruksi bahwa setiap kelompok merancang model POD dalam beragam metode atau teknik yang tepat dengan terlebih dahulu menyepakati tema dan tujuan fasilitasi;
3. Setiap kelompok melakukan diskusi persiapan selama 10 menit;
4. Setiap kelompok diberi waktu simulasi selama 15 menit;
5. Setelah satu kelompok tampil, minta kelompok lainnya menanggapi terkait pencapaian tujuan dari tema berikut langkah-langkah berikut metode fasilitasi;
6. Setelah kedua kelompok tampil dan saling memberikan tanggapan, fasilitator mengulas secara singkat tampilan simulasi kedua kelompok.

## BAHAN BACAAN

**FISOLOFI PENDIDIKAN ORANG DEWASA**

Pendidikan adalah salah satu wujud dari mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini sasaran didiknya adalah orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental dan keterampilan dalam menghadapi tugas yang diembannya, yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan falsafah pendidikan itu diharapkan bangsa Indonesia maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Untuk itu sewajarnya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila merupakan landasan sekaligus tujuan dalam mewujudkan harapan yang hendak dicapai. Menurut Malcolms Knowles bahwa konsep akhir dari tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik mahir atau mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diperolehnya pada situasi yang serba cepat berubah.

**Azas Pendidikan Orang Dewasa**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan orang dewasa, masih dikenal beberapa asas diantaranya adalah :

- a. Azas Kesatuan: kesatuan ide dalam usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai, kesatuan antara kemampuan jasmani dan rohani, kesatuan antara unsur kejiwaan yaitu akal pikiran, perasaan, kehendak dan lain-lain, kesatuan antara pelajaran teori dan praktek, kesatuan antara yang belajar dan pengajar dan sebagainya
- b. Azas Swadaya: kemampuan atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan
- c. Azas Inovasi: setiap pemecahan masalah hendaknya dianggap sebagai suatu perubahan untuk perbaikan dan kemajuan
- d. Azas Dinamisas: segala gerak usaha pendidikan yang tercermin dalam asas-asas di atas, menunjukkan adanya dinamisasi yang hidup

**Karakteristik Orang Dewasa**

Menurut Knowles dalam bukunya "*The Modern Practice of Adult Education*" 1997, ada 4 (empat) konsep yang membedakan Andragogi dan Paedagogi. Konsep tersebut adalah bahwa apabila seseorang telah dewasa maka dia memiliki :

- a. Konsep Diri (*Self Concept*)  
Konsep diri berkembang dari pribadi yang tergantung pada seseorang menjadi diri sendiri, dengan meningkatkan kedewasaan tersebut, maka berangsur-angsur berkurang rasa ketergantungannya dan mulai meningkatkan keadaan akan kemampuan untuk mengambil keputusan dan arah sendiri. Implikasinya dalam pengorganisasian menyangkut hubungan mengarahkan dan membimbing.
- b. Pengalaman (*Experience*)  
Setiap orang dewasa mempunyai banyak pengalaman yang berbeda. Semua pengalaman bagi orang dewasa mengandung arti yang mendalam serta mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupannya. Implikasi dalam pengorganisasian; pengalaman individu dan komunitas sangat berharga sebagai sumber belajar. Banyak digunakan teknik-teknik pengalaman (*experencial*) komunikatif dan atau banyak arah seperti diskusi, simulasi, roleplay dan *learning by doing* dan sebagainya. Dengan metode tersebut pengalaman semua digunakan sebagai sumber belajar

c. Kesiapan Belajar (*Readiness to Learn*)

Dalam dunia pendidikan dikenal dengan konsep "Kesiapan Belajar" (*readiness to learn*) dan saat mulai mengajar (*teachable moment*). Maka kesiapan untuk belajar merupakan fase perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada setiap orang. Dalam penyuluhan "kesiapan" orang dewasa ditentukan oleh kebutuhan yang berkembang dengan peranan dan fungsinya sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan untuk mencari nafkah ataupun dalam pekerjaannya di rumah tangga. Orang dewasa terdorong untuk belajar kalau ia sadar bahwa kompetensi atau kemampuan untuk dapat melaksanakan peranannya atau fungsinya secara lebih baik. Fasilitator/organiser membantu komunitas mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dan mengusulkan berbagai kompetensi yang dapat dicapai untuk memperlancar pelaksanaan fungsi mereka. Bersama fasilitator, para penyuluh menemukan apa yang perlu dipelajari berdasarkan tuntutan untuk menghadapi fungsi mereka sehari-hari.

d. Perspektif atau Orientasi Waktu

Orang dewasa belajar memenuhi kebutuhan sekarang dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya. Implikasi dalam pendidikan orang dewasa, fasilitator membekali keterampilan untuk keperluan sekarang dengan materi penyuluhan yang orientasinya kepada masalah yang perlu dibahas dan diatasi pada masa kini. Andragogi adalah suatu proses penyempurnaan atau perbaikan situasi dan pengalaman yang berhubungan dengan realitas pada masa kini. Inti proses andragogi adalah "Dimana kita sekarang berada serta kearah mana kita menuju".

## Konsep Pendidikan Orang Dewasa

Menurut Santoso (1956) Pendidikan orang dewasa adalah usaha atau kegiatan yang pada umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri (bukan dipaksakan dari atas) oleh orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas tertinggi kewajiban belajar, dan dilangsungkan di luar lingkungan sekolah biasa. Usaha dan kegiatan berlangsung karena didorong oleh kepentingan-kepentingan perseorangan, kepentingan-kepentingan golongan dimana ia terikat, dan atau kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya untuk memperkaya pengalaman dan atau perbaikan dalam penghidupannya serta mencapai kebahagiaan hidup dalam arti yang seluas-luasnya.

Segala kegiatan atau usaha orang dewasa yang dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak lain untuk mengerjakannya. Segala usaha dan kegiatan itu ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan olehnya serta adanya kepentingan untuk memperkaya pengalaman atau perbaikan dalam penghidupannya. Orang dewasa belajar atau mempelajari sesuatu yang berkelanjutan yang dapat dilakukan secara efektif. Hal ini perlu mendapat kajian secara mendalam agar proses belajar orang dewasa dapat menumbuhkan kegiatan lainnya sehingga dengan cara demikian akan terjadilah suatu kegiatan belajar terus-menerus.

## BAHAN BACAAN

**METODE DAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA**

Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara peserta didik dan guru/pengajar. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkan, sedang guru/pengajar adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar secara efektif. Dengan demikian, maka dapat disampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar sudah pasti akan melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru/pengajar, tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media belajar.

Metode dan media merupakan dua unsur yang sangat penting dan saling terkait dalam proses pembelajaran. Jika kedua unsur ini bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta, maka dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar sehingga peserta senantiasa antusias dalam menerima pelajaran yang diberikan. Lebih dari itu, kesesuaian metode dan media dengan karakteristik peserta juga diyakini akan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta. Karena itu seorang pendidik maupun fasilitator harus menguasai dan dapat melakukan berbagai variasi metode maupun media sehingga yang menjadi tujuan dari pembelajaran bisa tercapai secara maksimal.

**Metode Fasilitasi Dalam POD**

Menurut Hidayat (1990:60) kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud disini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Sedangkan menurut Max Siporin (1975) yang dimaksud metode adalah sebuah orientasi aktifitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas nyata.

Metode adalah suatu model atau cara belajar yang terencana, teratur atau terstruktur, dilakukan dalam penyelenggaraan aktivitas dalam kerangka mencapai tujuan belajar mengajar. Pemilihan metode yang tepat juga akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar dan karenanya membutuhkan kepekaan serta kreativitas dari pengajar/pelatih/mentor/fasilitator. Selain alat mencapai tujuan, metode sekaligus sebagai alat motivasi ekstrinsik dan strategi pengajaran. Makin tepat metode yang digunakan maka akan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, kesalahan dalam menentukan metode mengajar, juga akan berakibat pada menurunnya semangat dan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan belajar.

**Pemilihan Metode Pembelajaran**

Tidak ada petunjuk yang jelas dalam menentukan metode pelatihan. Memilih metode yang akan digunakan adalah proses kreatif dan analitis yang harus mempertimbangkan berbagai masalah. Setiap pelatih memiliki metode personal yang digemarinya, tergantung pada minat, gaya dan pengalaman personal. Bagaimanapun kita, sebagai pelatih, harus mencoba memilih satu metode pelatihan yang tepat tidak hanya berdasarkan minat sendiri tetapi terutama dari sudut pandang peserta.

Orang memiliki gaya pembelajaran mereka sendiri. Beberapa orang cenderung untuk menyimak dan menganalisis, yang lain lebih menyukai pengamatan atau pengalaman dan praktek. Untuk mendukung semua perbedaan cara pembelajaran gaya tersebut, kita, sebagai pelatih, harus menggunakan berbagai metode pelatihan.

Metode Pelatihan	Penerapan
Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memindahkan pengetahuan dari pelatih kepada peserta</li> <li>• Jumlah peserta yang banyak</li> <li>• Memperkenalkan topik dan teori yang baru dan kompleks</li> <li>• Memperkenalkan modul-modul dan tujuan pelatihan</li> </ul>
Diskusi terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertukarkan opini-opini dan ide-ide</li> <li>• Pemecahan masalah, Perencanaan</li> <li>• Strategi perumusan</li> <li>• Masalah-masalah kontroversial</li> </ul>
Diskusi kelompok kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbagi pengalaman</li> <li>• Mempertukarkan ide-ide dan opini-opini</li> <li>• Pemecahan masalah, Perencanaan</li> </ul>
Curah pendapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan ide-ide, pengalaman-pengalaman masa lalu</li> <li>• Pemecahan masalah</li> <li>• Berpikir kreatif/ inovatif</li> <li>• Menyediakan waktu jeda yang menyegarkan dan membentuk minat kelompok</li> </ul>
Studi kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan Analisis situasi kompleks</li> </ul>
Demonstrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran satu keterampilan</li> <li>• Operasi perangkat lunak, mesin-mesin dan instrumen</li> </ul>
Kunjungan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengaitkan teori dengan praktek</li> <li>• Memraktekkan keterampilan</li> <li>• Pengamatan dan refleksi</li> </ul>
Permainan peran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan untuk menghadapi situasi yang saling bertentangan dan menegangkan</li> <li>• Mengajar keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi dan negosiasi</li> <li>• Membawa dimensi kemanusiaan dari suatu studi kasus</li> <li>• Memperkuat pola perilaku empati</li> </ul>
Permainan (games)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah pengelolaan</li> <li>• Pengambilan keputusan dan pembangunan tim</li> </ul>
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep pengelolaan, Pengambilan keputusan</li> <li>• Pembangunan Tim</li> <li>• Perencanaan jangka pendek dan panjang</li> </ul>
<i>Ice breakers</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling mengenal</li> <li>• Mendorong interaksi</li> </ul>
<i>Energizers</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangkitkan semangat, membangunkan peserta yang mengantuk &amp; bosan</li> <li>• Merangsang berpikir kreatif, memecah kebuntuan berpikir</li> <li>• Menantang asumsi dasar</li> <li>• Melengkapi konsep baru</li> <li>• Pembentukan kelompok, Pembangunan tim</li> <li>• Bergembira</li> </ul>

## Media Fasilitas Dalam POD

Media pelatihan adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan peserta sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta pelatihan. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metoda yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran/pelatihan.

Pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan belajar, yaitu berupa sarana yang cepat memberikan pengalaman visual kepada peserta antara lain untuk mendorong motivasi, memperjelas dan mempermudah konsep-konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap belajar. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio maka lahirlah alat bantu audio visual yang terutama menekankan penggunaan pengalaman yang konkrit untuk menghindari penggunaan verbal yang berlebihan.

## Jenis-Jenis Media Pelatihan

Secara umum media pelatihan dapat dikategorikan sebagai berikut di bawah ini:

1. **Media Visual Dua Dimensi Tidak Transparan**, yang termasuk dalam jenis media ini adalah: gambar, foto, poster, peta, grafik, sketsa, papan tulis, flipchart, dan sebagainya.
2. **Media Visual Dua Dimensi yang Transparan**. Media jenis ini mempunyai sifat tembus cahaya karena terbuat dari bahan-bahan plastik atau dari film. yang termasuk jenis media ini adalah: film slide, film strip, movie film, dan sebagainya.
3. **Media Visual Tiga Dimensi**. Media ini mempunyai isi atau volume seperti benda sesungguhnya. yang termasuk jenis media ini adalah: benda sesungguhnya, nodel, diorama, specimen, mock-up, pameran, dan sebagainya.
4. **Media Audio**. Media audio berkaitan dengan alat pendengaran seperti misalnya: Radio, Kaset, Laboratorium bahasa, telepon dan sebagainya.
5. **Media Audio Visual**. Media yang dapat menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan, seperti: Film, Compact Disc, TV, Video, dan lain sebagainya.

Dari beberapa jenis media tersebut di atas, ada beberapa media yang mempunyai “perangkat keras” (*Hardware*) dan “perangkat lunak” (*Software*). Untuk menggunakan berbagai media tersebut diperlukan ketrampilan tersendiri. Namun perlu diingat bahwa “media pelatihan” hanyalah “alat bantu” dalam proses belajar, dan bukan “tujuan”.

## Penggunaan Media Pelatihan Partisipatif

Berdasarkan prinsip pelatihan partisipatif dan andragogis, maka media pelatihan yang digunakan hendaknya mengikuti alur atau siklus belajar berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu dalam pelatihan partisipatif, penggunaan media pelatihan tersebut di atas pada umumnya digunakan untuk:

- a. Membantu dan menstimulasi para peserta pelatihan untuk melakukan pembahasan dan diskusi dan tidak bersifat instruksional.
- b. Membantu dan menstimulasi proses pengungkapan pengalaman, pengungkapan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Membantu menimbulkan “proses mengalami” untuk dapat diungkapkan sebagai bahan diskusi lebih jauh.
- d. Membantu peserta pelatihan untuk “memperkuat” dan “memperteguh” hasil-hasil pembahasan atau hasil-hasil diskusi yang telah dilakukan oleh peserta itu sendiri.



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menggunakan Media Pelatihan dalam Pelatihan Partisipatif adalah:

- a. Media yang dikembangkan dan dipergunakan dalam pelatihan tidak bersifat memberi informasi, tetapi lebih bersifat mengajukan permasalahan yang ada dan tidak bersifat instruksional.
- b. Penyajian media yang ada harus diikuti dengan diskusi dan pembahasan oleh para peserta pelatihan dengan jalan menjawab atau mendiskusikan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator, sesuai dengan siklus belajar berdasarkan pengalaman:
  - Mengalami
  - Mengungkapkan pengalaman
  - Pembahasan / Diskusi atau analisis
  - Menarik kesimpulan
  - Menerapkan, yang akhirnya menimbulkan pengalaman baru

Peran peserta lebih aktif dalam menggunakan media yang ada sebagai alat untuk “mengalami dan mengungkapkan pengalaman”. Sedangkan peran fasilitator lebih untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai.

**POKOK BAHASAN** : **7. PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**

**SUB POKOK BAHASAN** : **7.3. TEKNIK FASILITASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Memahami pengertian dan prinsip dasar fasilitasi
2. Menyebutkan berbagai teknik dan komunikasi dalam memfasilitasi
3. Mempraktikkan teknik fasilitasi dan komunikasi dalam pengorganisasian komunitas

**WAKTU** : 4 Jampel @ 45 menit = 180 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.7.3.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu, Ceramah dan Diskusi Kelompok-Pleno</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator meminta peserta untuk menggambarkan sosok seorang fasilitator mengacu pada Lembar Curah Pendapat (M.7.3.2);</p> <p>c. Fasilitator meminta beberapa relawan untuk mempresentasikan dan atau menjelaskan hasil visualisasinya kepada semua peserta;</p> <p>d. Fasilitator menuliskan poin-poin penting presentasi relawan;</p> <p>e. Fasilitator membahas catatannya dengan mengaitkan poin-poin paparan peserta dengan konsep memfasilitasi dan prinsip dasar memfasilitasi mengacu pada Bahan Bacaan Keterampilan Memfasilitasi (M.7.3.5) atau dengan menampilkan media bantu slide presentasi;</p> <p>f. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok dengan mengacu pada Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.7.3.3);</p> <p>g. Fasilitator mendampingi semua kelompok yang sedang berdiskusi;</p> <p>h. Fasilitator meminta ketiga kelompok tampil praktik fasilitasi dan setiap satu kelompok selesai, langsung ditanggapi oleh kelompok lainnya;</p> <p>i. Fasilitator mencatat poin-poin tanggapan kelompok lain dan membahasnya setelah semua kelompok selesai praktik;</p> <p>j. Fasilitator mengulas poin-poin catatannya dan menghubungkannya dengan nilai dan prinsip dasar dalam memfasilitasi mengacu pada Bahan Bacaan Keterampilan Fasilitasi (M.7.3.5).</p>	90'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Curah Pendapat (M.7.3.2)</li> <li>Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.7.3.3)</li> <li>Bahan Bacaan Keterampilan Memfasilitasi (M.7.3.5)</li> </ul>

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Penugasan Individu, Curah Pendapat, Ceramah</b></p> <p>k. Fasilitator meminta dua orang peserta untuk menjadi relawan dalam memandu diskusi singkat mengacu pada Lembar Tugas Praktik Teknik Komunikasi (M.7.3.4);</p> <p>l. Fasilitator meminta peserta menuliskan pemahamannya tentang pengertian komunikasi serta komponen atau unsur apa saja yang harus ada dalam berkomunikasi pada kertas metaplan. Jawaban ditempel pada papan flipchart atau pada dinding kelas;</p> <p>m. Fasilitator bersama peserta membuat kegorisasi jawaban yang terdiri dari konsep, unsur dan prinsip-prinsip dari komunikasi efektif;</p> <p>n. Fasilitator menjelaskan konsep, unsur dan prinsip-prinsip dari komunikasi efektif mengacu pada Bahan Bacaan Membangun Komunikasi Efektif dalam Pengorganisasian Komunitas (M.7.3.7);</p> <p>o. Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan “pesan berantai” menggunakan Lembar Panduan Permainan (M.7.3.4);</p> <p>p. Fasilitator memberikan penegasan terkait model komunikasi dengan slide yang telah disiapkan atau mengacu pada Bahan Bacaan Membangun Komunikasi Efektif dalam Pengorganisasian Komunitas (M.7.3.7).</p>	<p>30 ‘</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Tugas Praktik Teknik Komunikasi (M.7.3.4)</li> <li>• Lembar Panduan Permainan (M.7.3.5)</li> <li>• Bahan Bacaan Keterampilan Memfasilitasi (M.7.3.6)</li> <li>• Bahan Bacaan Membangun Komunikasi Efektif dalam Pengorganisasian Komunitas (M.7.3.7)</li> </ul>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menegaskan tentang pentingnya seorang Mentor dan Kader SEPEDA KEREN menerapkan keterampilan dasar dengan prinsip dan nilai fasilitasi.</p>	<p>10’</p>	

## M. 7.3.2

**LEMBAR CURAH PENDAPAT**

1. Bagikan satu lembar kertas HVS pada tiap peserta;
2. Instruksikan peserta untuk menggambarkan atau memvisualisasikan pemahaman mereka tentang sosok seseorang yang disebut sebagai fasilitator yang partisipatif pada kertas HVS yang telah dibagikan;
3. Ceritakan atau presentasikan gambar yang telah dibuat;
4. Tempelkan hasil gambar tersebut pada papan yang telah disediakan.

## M. 7.3.3

**LEMBAR TUGAS DISKUSI KELOMPOK**

1. Bentuk kelompok menjadi 4. Pembagian kelompok dilakukan dengan berhitung atau metode lain seperti memilih 4 di antara nama buah, bunga dan binatang, dll;
2. Tugas untuk kelompok: Merancang teknik fasilitasi dan komunikasi pertemuan atau kegiatan pada
  - a. Kelompok perempuan
  - b. Kelompok disabilitas
  - c. Kelompok anak atau kelompok peduli anak
  - d. Kelompok peduli/keluarga/atau pekerja migran purna
3. Pastikan setiap kelompok terdapat peran-peran orang yang memiliki tipikal dominan, pasif, agresif, suka mengacau, masa bodoh, suka membimbing, bijaksana, dll
4. Diskusi dalam kelompok dilakukan selama 10 menit dengan waktu praktik tiap kelompok 15 menit;

## LEMBAR TUGAS PRAKTIK TEKNIK KOMUNIKASI

1. Berikan topik yang sama atau berbeda kepada keduanya;
2. Instruksikan mereka untuk menyiapkan diri selama 5 menit untuk mengomunikasikannya kepada peserta di kelas;
3. Sambil menunggu keduanya mempersiapkan diri, instruksikan kepada peserta lainnya mengamati perbedaan kedua relawan dalam praktik komunikasi mencakup:
  - a. Teknik komunikasi yang dibangun;
  - b. Kejelasan Pesan;
  - c. Kelebihan teknik komunikasi yang ditampilkan;
  - d. Usulan perbaikan teknik komunikasi atau isi pesan.
4. Setelah waktu persiapan habis, persilahkan keduanya tampil secara bergantian;
5. Minta peserta mengungkapkan pendapatnya atas 4 pertanyaan di atas;
6. Catat poin-poin pendapat peserta pada kertas plano atau metaplan;
7. Persilahkan peserta menilai mana teknik komunikasi yang lebih efektif dan alasannya;
8. Simpulkan komunikasi efektif dengan menggunakan catatan sebelumnya.

## LEMBAR PANDUAN PERMAINAN

1. Peserta dibagi dalam 2 kelompok;
2. Instruksikan untuk baris berbanjar lalu menghadap kiri atau kanan sehingga berbentuk memanjang ke belakang;
3. Berikan pesan berisi satu kalimat kepada orang pertama untuk bisa disampaikan secara berantai dan penerima pesan terakhir harus mengulangi apa yang didengarnya dari penyampai pesan sebelum dia;
4. Ajak peserta mengoreksi bagian mana dari kalimat yang salah dan di mana letak salahnya atau sejak kapan kesalahan itu dimulai;
5. Refkesikan bersama makna dari permainan dan kaitkan dengan model-model komunikasi;
6. Meminta peserta berpendapat bagaimana model komunikasi yang selama ini terjadi dimasyarakat dan apa dampaknya.

## BAHAN BACAAN

**KETERAMPILAN MEMFASILITASI**

Fasilitator hendaknya menyadari bahwa seringkali kelompok yang difasilitasi terdiri dari orang-orang yang jauh berpengalaman. Dalam banyak hal, seringkali seorang fasilitator masih memaksakan pandangannya terhadap kelompok yang difasilitasinya. Hal ini terjadi karena fasilitator merasa lebih banyak memiliki pengalaman dari pada kelompok yang difasilitasinya dikarenakan pengalaman memfasilitasinya di masa lampau dengan berbagai permasalahan serupa.

Pada saat seperti ini cara pandang kita sebaiknya dikesampingkan. Lebih penting bagi fasilitator untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan tetap netral dalam memandu proses kelompok untuk menemukan solusi bersama. Sebagai fasilitator hendaknya kita menyadari bahwa tugas yang kita emban lebih banyak mengeksplorasi dengan melontarkan berbagai pertanyaan menganalisis untuk menemukenali permasalahan kelompok yang sebenarnya, ketimbang memberikan banyak pandangan-pandangan pribadi. Oleh karenanya, sudah seharusnya seorang fasilitator menguasai berbagai keterampilan dasar dalam memfasilitasi, agar orang-orang dengan berbagai pengalaman tersebut bisa mendapatkan pembelajaran dari proses fasilitasi dengan kondisi nyaman dan optimal.

**Konsep fasilitasi**

Memfasilitasi berasal dari kata bahasa Inggris "*Facilitation*" yang akar katanya berasal dari bahasa Latin "*facilis*" yang mempunyai arti "membuat sesuatu menjadi mudah". Dalam Oxford Dictionary disebutkan: "*to render easier, to promote, to help forward; to free from difficulties and obstacles*". Secara umum pengertian "*facilitation*" (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai "melayani dan memperlancar aktivitas belajar peserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman". Sedangkan orang yang "mempermudah" disebut dengan "Fasilitator" (Pemandu).

**Nilai-nilai dalam memfasilitasi**

## a. Demokrasi:

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses belajar di mana dia menjadi peserta tanpa prasangka; perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta; dan untuk jangka waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka itu, tidak ada struktur organisasi secara hirarkis yang berfungsi.

## b. Tanggung jawab:

Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya sendiri. Hal ini mencakup pula pada tanggung jawab atas partisipasi seseorang di dalam sebuah pertemuan atau pelatihan. Sebagai fasilitator, bertanggungjawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan seberapa besar para peserta bersedia dan mampu memikul tanggungjawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Melalui pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggungjawab yang semakin besar.

- c. Kerjasama:  
Fasilitator dan para peserta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Sedangkan fasilitasi / memandu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok.
- d. Kejujuran:  
Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Ini juga berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang menjadi kemampuan fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai fasilitator.
- e. Kesamaan derajat :  
Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu; Fasilitator menyadari bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator. Pada saat yang sama, setiap peserta mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan atau pelatihan.

## Prinsip dasar fasilitasi

- a. Menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasa yang mendukung untuk proses belajar
- b. Menciptakan dan mengembangkan kesempatan dan mekanisme untuk menyusun perencanaan partisipatif dalam proses pembelajaran
- c. Mengidentifikasi dan mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar
- d. Merumuskan tujuan-tujuan program pelatihan yang memenuhi kebutuhan kebutuhan belajar
- e. Merencanakan pola pengalaman belajar
- f. Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar dengan teknik-teknik dan materi yang memadai.  
Dalam hal ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui "Siklus Belajar Berdasarkan Pengalaman (*Experiential Learning Cycle*)
- g. Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar.

Karena itu dalam kegiatan pelatihan orang dewasa kegiatan fasilitator bukanlah sekedar memindahkan pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta pelatihan, akan tetapi justru kegiatan utama fasilitator adalah melibatkan peserta pelatihan dalam proses belajar, yaitu proses belajar memahami permasalahan hidup mereka sendiri, memahami kebutuhan belajarnya sendiri, dapat merumuskan tujuan belajar, dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajarnya. Dengan demikian maka dalam pelatihan orang dewasa, fungsi dan peranan fasilitator bukanlah memaksakan program atau kurikulum dari atas, yang mereka buat di atas meja terlepas dari kebutuhan dan permasalahan yang ada.



## Keterampilan Dasar Fasilitasi

Seorang fasilitator hendaknya menyadari bahwa seringkali kelompok yang difasilitasi terdiri dari orang-orang yang jauh berpengalaman. Pada saat seperti ini cara pandang kita sebaiknya dikesampingkan. Lebih penting bagi fasilitator untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan tetap netral dalam memandu proses kelompok untuk menemukan solusi bersama. Sebagai fasilitator hendaknya kita menyadari bahwa tugas yang kita emban lebih banyak mengeksplorasi dengan melontarkan berbagai pertanyaan menganalisis untuk menemukan permasalahan kelompok yang sebenarnya, ketimbang memberikan banyak pandangan-pandangan pribadi. Oleh karenanya, sudah seharusnya seorang fasilitator menguasai berbagai keterampilan dasar dalam memfasilitasi, agar orang-orang dengan berbagai pengalaman tersebut bisa mendapatkan pembelajaran dari proses fasilitasi dengan kondisi nyaman dan optimal.

### a. Seni Bertanya

Kemampuan seorang pelatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kegiatan latihan, sepintas lalu nampaknya tidak penting. Padahal, sesungguhnya justru itulah keterampilan yang sangat penting dan mutlak harus dikuasai oleh seorang instruktur. Tidak jarang ditemukan dan ini merupakan kelemahan umum yang ditemui dalam banyak kegiatan latihan, proses belajar menjadi mandeg atau bahkan “salah arah” hanya karena pelatih/fasilitator/mentor instruktur mengajukan pertanyaan yang tidak tepat pada saat dan cara yang tidak tepat pula. Berikut beberapa hal yang penting diperhatikan dalam bertanya:

- a. Usahakan agar pertanyaan diajukan secara singkat dan jelas, jika perlu ulangi sekali lagi atau dua kali sampai jelas benar, terutama jika pertanyaan itu ditujukan pada salah seorang peserta;
- b. Namun jangan sampai pertanyaan semacam itu justru menjadikan peserta “bingung” atau gugup menjawabnya, dan karenanya hindari pertanyaan tendensius dan gaya bertanya menghakimi (pelatih bukan interogator) kecuali pada kasus-kasus pelanggaran norma dan tata tertib
- c. Dalam meneruskan sebuah pertanyaan dari seorang peserta ke peserta lainnya, hindari jangan sampai terjadi antara peserta yang bersangkutan malah terjadi “perang tanding” (berdebat langsung di luar kendali instruktur)
- d. Jika perlu, pertanyaan dari seorang peserta dikembalikan kepadanya lagi dengan pertanyaan balik seperti : “menurut anda sendiri bagaimana ?” (agar ia sendiri mau berfikir dan tidak menganggap instruktur sebagai orang yang tidak tahu segalanya)

Apapun bentuk atau jenis pertanyaannya, semuanya tetap bertolak dari “kata-kata kunci” pertanyaan yang paling pokok yaitu kata “apa”, “mengapa” “siapa”, “di mana” dan “kapan” serta “bagaimana” 6 kata tersebut digunakan pada pertanyaan tahap mengungkapkan dalam proses daur belajar pengalaman berstruktur karena tahap ini memang bermaksud mengungkap apa yang “senyatanya terjadi atau dilakukan oleh peserta”.

### b. Seni Membuat Parafrase

Parafrase adalah menuturkan kembali pernyataan orang lain dalam bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif tanpa menghilangkan atau mengubah makna aslinya. Parafrase sangat berguna untuk memeriksa pemahaman seseorang. Ketika fasilitator mengulang kalimat-kalimat si pembicara, peserta yang lain juga akan saling memeriksa pemahaman mereka atas pendapat peserta yang mengajukan pendapat. Jika anda salah menangkap pesan yang dimaksud, maka anda dapat langsung melakukan perbaikan terhadap kesalahpahaman tersebut. Contoh kalimat parafrase tersebut adalah: “Baik, Mukidi, kalau tidak salah anda tadi mengatakan...”.

### c. Seni Menggali Lebih Dalam (*Probing*)

Teknik ini merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang fasilitator. Teknik ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi dan menjaga agar orang-orang yang berdiskusi untuk tetap berbicara. Disamping itu, teknik probing ini sangat diperlukan untuk menghindarkan diskusi dari kemacetan. Teknik ini akan menunjukkan perbedaan positif di antara kegiatan fasilitasi pada tingkat kualitas dan kedalaman. Seperti misalnya pada saat kelompok terjebak pada kemacetan atau diskusi yang semakin melebar maka teknik probing ini dapat digunakan untuk memindahkan diskusi kepada hal-hal yang lebih detil dan spesifik. Berikut beberapa cara probing untuk membantu kelompok antara lain:

- Mencari akar masalah;
- Mencerahkan anggota kelompok yang lain;
- Mengeksplorasi perhatian atau gagasan;
- Mendorong anggota kelompok untuk mengeksplorasi gagasan secara lebih mendalam dan untuk menolong proses berpikir mereka sendiri;
- Membuka kelompok agar lebih jujur membagi informasi dan perhatian;
- Menaikkan tingkat kepercayaan dalam kelompok;
- Membongkar fakta-fakta kunci yang belum keluar;
- Meningkatkan kreativitas dan berpikir positif.

### d. Seni Menjelaskan Pelajaran

Penjelasan adalah pemberian informasi untuk menunjukkan hubungan, misalnya antara sebab dan akibat, antara yang diketahui dengan yang belum diketahui, antara lain hukum (dalil, definisi) yang berlaku umum dengan contoh sehari-hari. Memberikan penjelasan adalah salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan instruktur/pengajar. Interaksi di dalam kelas cenderung dipengaruhi oleh kegiatan pembicaraan, baik oleh pengajar sendiri, oleh instruktur/pengajar dengan peserta pelatihan, maupun antara peserta pelatihan. Lebih jauh lagi sebagian besar pembicaraan instruktur/pengajar memberikan penjelasan, misalnya fakta, ide, pendapat, menegur peserta pelatihan memberikan alasan dan sebagainya.

### e. Seni Mendorong Orang Bicara

Dalam proses belajar bersama dengan keanekaragaman latar belakang peserta, selain menjadi faktor pendukung, juga memberi tantangan tersendiri bagi fasilitator. Tak jarang pembelajar dari masyarakat lebih banyak memilih diam dalam sebuah pertemuan ketimbang mengungkapkan pendapatnya. Karena itu, mendorong semua orang untuk berbicara menjadi keterampilan dasar yang penting bagi tercapainya partisipasi penuh dari para pembelajar. Karena itu, mendorong semua orang untuk berbicara menjadi keterampilan dasar yang penting bagi tercapainya partisipasi penuh dari para pembelajar.

### f. Seni Mengamati (*Observing*)

Teknik observasi atau pengamatan adalah kemampuan untuk mengamati apa yang sedang terjadi tanpa menghakimi tanda-tanda non verbal seseorang dan kelompok secara obyektif. Hal ini terjadi karena seringkali orang lebih mudah mengembalikan kata-kata dibandingkan dengan perilaku kita. Sebagai fasilitator, pengamatan memberikan peluang bagi Anda untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari perilakunya. Karena sebenarnya perilaku non verbal dapat mengungkapkan sesuatu pesan secara cukup kuat.

### g. Seni Mendengarkan

Banyak fasilitator melewati substansi komunikasi “dua arah”, yang sejatinya sangat penting dalam meningkatkan kesepahaman antara berbagai pihak. Keterampilan mendengarkan adalah keterampilan kunci seorang fasilitator. Hal ini sangat penting bagi seorang fasilitator karena cara anda mendengarkan akan mempunyai arti yang sangat penting bagi orang yang berbicara dan membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara anda dan orang itu. Di samping itu, fasilitator juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam kelompok dan membantu anggota kelompok untuk saling mendengarkan dengan lebih baik.

### h. Mengelola Bahasa Tubuh

Gerakan dan posisi tubuh fasilitator juga dapat menjadi pesan yang bisa dilihat atau lebih dikenal sebagai bahasa tubuh. Cara fasilitator berdiri, mengambil posisi, duduk, bergerak dan menggerakkan anggota badan, berpengaruh pada apa yang ingin dikatakan atau dilakukan dan mempengaruhi proses pembelajaran. Cara paling sederhana untuk membuat kelompok merasa nyaman adalah dengan bahasa tubuh yang rileks, seperti posisi tangan di samping dan terbuka. Posisi tubuh seorang fasilitator harus bisa mendorong semangat belajar, bukan untuk mendominasi forum pembelajaran. Sebaiknya, berusaha untuk tidak selalu berdiri di depan atau di tengah forum. Fasilitator bisa berada bersama peserta saat diskusi kelompok, duduk bersama dan membantu menuliskan di papan tulis.

### i. Suara & Ekspresi Wajah

Suara fasilitator berpengaruh terhadap atmosfer fasilitasi. Pilihan tekanan suara (tinggi atau rendah) dan *emotional overtone* semangat, sedih, bosan, takut, was-was akan menjadi perhatian pembelajar. Karena itu, kemampuan memainkan variasi tekanan suara saat berbicara menjadi penting, khususnya saat ingin menonjolkan makna-makna tertentu. Begitu juga dalam hal mengatur kecepatan berbicara, terlalu cepat akan melelahkan pembelajar, sebaliknya, bila terlalu lambat juga akan membosankan. Lebih dari itu, ekspresi wajah fasilitator juga amat mempengaruhi energi kelompok. Fasilitator perlu menunjukkan raut wajah yang sesuai dengan suasana (*mood*) yang diharapkan bisa mempengaruhi situasi kelompok.

### j. Memberi Perhatian & Menjaga Kontak Mata

Fasilitator hendaknya selalu memberi perhatian pihak yang difasilitasinya. Salah satunya, dengan menjaga kontak mata dengan pembelajar yang sedang berbicara. Kontak mata bukan berarti memandangi seseorang terus menerus, melainkan menatap si pembicara dengan cara yang santai. Kontak mata memiliki kekuatan untuk memberikan perhatian pada seseorang. Hanya saja, perlu berhati-hati karena pada kebudayaan tertentu, menatap lawan jenis atau orang yang lebih tua terkadang dianggap tidak sopan.

### k. Memberi Semangat

Energi seorang fasilitator bisa mempengaruhi suasana fasilitasinya. Energi positif dan penuh semangat akan menyebar ke seluruh peserta, begitu juga sebaliknya. Menularkan semangat harus dimulai dengan menunjukkan semangat dari fasilitatornya, baik melalui suara, gerak tubuh, ekspresi wajah, ataupun dengan menciptakan permainan-permainan sederhana dan singkat. Dalam keadaan tertentu, tepuk tangan, lelucon atau humor dapat pula dilakukan untuk memberi semangat. Hanya perlu dibatasi agar suasana belajar tetap terjaga.

## BAHAN BACAAN

## MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PENGORGANISASIAN KOMUNITAS

### Konsep Komunikasi dalam pengorganisasian komunitas

Komunikasi secara umum diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Komunikasi juga merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

Sedangkan strategi komunikasi dalam pengorganisasian komunitas merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan sebuah komunikasi yang akan dilakukan pada saat melakukan pengorganisasian komunitas. Dengan kata lain, strategi komunikasi pada proses pemerupakan sarana untuk menciptakan, merancang dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi ataupun pesan yang terjadi pada proses dan hasil pengorganisasian komunitas.

Proses komunikasi tersebut melalui 5 tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama “Penginterpretasian”
- b. Tahap kedua “Penyandian”
- c. Tahap ketiga “Pengiriman”
- d. Tahap keempat “Penerimaan”
- e. Tahap kelima “Feedback/Umpun balik.

### Prinsip Komunikasi yang efektif

- a. Perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Semua orang ingin dihargai dan dihormati dan menjadi kebutuhan setiap individu. Untuk itu organizer harus menghargai lawan bicara.
- b. Empati: Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Komunikasi akan terjalin dengan baik sesuai kondisi psikologis lawan bicara. Ber-empati artinya fasilitator harus menempatkan diri sebagai pendengar yang baik dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh komunitas.
- c. Audible/Dapat didengar :
  - Dapat didengarkan dan dimengerti, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana namun baik dan benar. Hindari bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara.
  - Menggunakan bahasa tubuh. Mimik wajah, kontak mata, gerakan tangan dan posisi badan bisa dengan mudah terbaca oleh lawan bicara.
  - Menggunakan ilustrasi atau contoh. Analogi sangat membantu dalam penyampaian pesan. Dapat digunakan ilustrasi dan contoh nyata.

- d. Kejelasan pesan yang disampaikan. Yakni menetapkan tujuan secara jelas sebelum pelaksanaan kegiatan dan menggunakan intonasi suara yang baik.
- e. Rendah Hati. Sikap rendah hati dapat memberikan respon positif. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbicara terlebih dahulu dan pelatih menjadi pendengar yang baik dapat membangun rasa hormat dan pada akhirnya mengembangkan respek kepada semua orang.

## Model Komunikasi

- a. Model komunikasi linier (satu arah) adalah proses yang hanya terdiri dari dua garis lurus, dimana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan.
- b. Model komunikasi sirkuler (multi arah) adalah proses komunikasi yang tidak hanya berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan, tetapi memperhatikan adanya feedback dari komunikan, sehingga komunikasi sirkuler merupakan proses satu lingkaran penuh. Artinya suatu saat organiser berkedudukan sebagai sumber informasi tetapi pada saat yang lain sebagai penerima informasi, begitu sebaliknya. Komunitas bisa sebagai penerima informasi tetapi bisa juga sebagai sumber informasi. Jadi komunikasi adalah sebuah pemberitahuan atau pertukaran.

## Strategi komunikasi yang efektif dalam pengorganisasian komunitas

- a. Mengenal karakteristik komunikan (lawan bicara)  
Mengenal karakteristik komunikan bertujuan memberikan kita pandangan tentang karakter lawan bicara agar kita mengetahui hal apa yang disukai olehnya dan yang tidak disukai olehnya.
- b. Melakukan prinsip dasar komunikasi  
Strategi komunikasi yang kedua adalah berbicara dengan baik, sopan, memiliki etika, tata krama serta prinsip dasar komunikasi yang lainnya. Penggunaan prinsip dasar ini dalam berkomunikasi akan berpengaruh dalam penilaian komunikan terhadap diri kita sebagai komunikator dan terhadap kerja pengorganisasian yang dilakukan.
- c. Berkomunikasi dengan baik  
Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka lawan bicara/komunitas kita akan merasa puas terhadap apa yang kita terangkan atau apa yang kita informasikan. Misalnya kita sedang berkomunikasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh komunitas, maka pastikan bahwa komunikator memang bisa melakukan penjelasan dengan baik terkait dengan mengapa permasalahan tersebut muncul, bagaimana masalah tersebut jika tidak segera mendapatkan penyelesaian dll.
- d. Memiliki attitude, attention, dan action (3A)  
Dengan 3A tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari lawan bicara. Strategi 3A menunjukkan bahwa kita memiliki sikap, perhatian, dan tindakan yang sesuai dengan omongan kita.
- e. Menggunakan saluran yang ada  
Strategi komunikasi yang digunakan harus mampu diaplikasikan melalui seluruh saluran komunikasi yang ada. Misalnya adalah dengan mempelajari cara untuk melakukan video call, media sosial dengan beragam menunya cara mengetik atau menulis informasi atau pesan yang baik dan benar, termasuk penting juga menentukan saluran komunikasi yang efektif untuk pengorganisasian komunitas.
- f. *Public Relations*  
Hubungan yang baik antara setiap pihak yang tergabung dalam komunitas atau *Public Relations* juga sangat dibutuhkan dalam pengorganisasian komunitas. Oleh karenanya strategi yang akan diterapkan juga harus memperhatikan hal tersebut, untuk menjaga hubungan yang baik dan sinergitas di antara setiap anggota komunitas maupun antar komunitas.

- g. Menentukan tujuan  
Ketika tujuan ini sudah ditentukan, maka komunikasi yang dilakukan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan ataupun target tersebut.
- h. Menerapkan prinsip kekeluargaan  
Strategi ini akan membuat proses komunikasi lebih santai dan lebih mencair, terlebih lagi komunikasi tersebut akan memiliki dampak yang sangat positif untuk komunikasi yang sedang terjalin. Meskipun pada saat komunikasi terjadi perdebatan ataupun adu argument, tapi debat dan adu argument itu tidak akan mampu untuk membuat komunikasi yang berjalan menjadi terhenti karena sudah adanya ikatan kekeluargaan.
- i. Terbuka dan profesional  
Strategi menciptakan sebuah komunikasi yang terbuka dan berusaha agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi akan membuat rasa dan tingkat kepercayaan komunitas akan tercipta dan terjaga dengan baik. Ketika kepercayaan sudah terbangun dan terjaga dengan baik, maka loyalitas antar anggota komunitas juga akan meningkat. Selain itu, profesionalitas di dalam setiap komunikasi juga akan menjadikan komunikasi mengesampingkan kepentingan pribadi dan akan mendahulukan kepentingan bersama.
- j. Terstruktur dan Bersemangat  
Pesan haruslah terstruktur dengan baik dan benar agar pada penerima pesan atau informasi dapat memahaminya dengan baik dan benar. Usahakan untuk selalu memberikan informasi yang bersifat untuk menaikkan semangat dan motivasi anggota komunitas agar tidak mencipayakan rasa segan dan enggan dan dapat mengikuti atau memberikan masukan-masukan yang sangat penting.
- k. Melibatkan anggota  
Partisipasi atau tingkat keterlibatan anggota komunitas akan memberikan tampilan mengenai keadaan hasil pengorganisasian. Jika partisipasi anggota sangat tinggi, maka proses dan hasil pengorganisasian tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Begitu pula sebaliknya ketika partisipasi anggota rendah, maka proses dan hasil pengorganisasian tersebut perlu dipertanyakan kualitasnya.
- l. Saling pengertian dan Netral  
Jika strategi komunikasi ini diterapkan dengan baik, maka akan terjadi saling pengertian serta netralitas di antara setiap anggota komunitas. Contohnya adalah ketika ada suatu perdebatan ataupun hal-hal lain yang sedikit memanas didalam proses pengorganisasian maka setiap anggota masih dapat mengontrol dirinya. Sikap saling pengertian ini sebenarnya masih sama dan berhubungan konteksnya dengan point ke 8, yaitu menerapkan prinsip kekeluargaan.
- m. Ubah suasana komunikasi  
Sekali waktu ubah suasana komunikasinya menjadi informal, lebih santai, baik dari sisi tempat, waktu dan suasananya. Dengan begini suasana komunikasi akan semakin santai, penuh canda tawa dan membuat komunikasi tersebut menjadi lebih efektif.
- n. Tetapkan waktu komunikasi  
Dengan strategi menetapkan waktu ataupun jadwal komunikasi, anggota komunitas yang terorganisir dapat bersiap untuk mengikuti kegiatan. Meskipun begitu, penetapan waktu komunikasi haruslah dilakukan dengan tepat dan tidak berbenturan dengan jadwal lainnya yang sudah lebih dahulu ditetapkan, agar komunikasi yang akan berjalan tersebut tidak terhenti karena adanya agenda lain.
- o. Mengatur Komunikasi  
Mengatur kegiatan komunikasi adalah menentukan siapa yang melakukan apa dan bagaimana orang tersebut melaksanakannya. Pengaturan ataupun strategi ini bisa diaplikasikan ketika sebuah pengorganisasian ingin melakukan komunikasi dengan pemerintah misalnya, maka untuk melakukan komunikasi tersebut organiser biasanya akan mengatur orang-orang yang akan berbicara sesuai dengan kemampuannya.

# ANALISIS SOSIAL

- POKOK BAHASAN** : **8. ANALISIS SOSIAL**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Peserta memahami konsep dan alat analisis sosial
  2. Peserta mampu mempraktikkan analisis sosial berbasis kerentanan
- SUB POKOK BAHASAN** : **8.1 KONSEP DAN ALAT ANALISIS SOSIAL**
- 8.2 ANALISIS SOSIAL BERBASIS KERENTANAN**
- WAKTU** : 5 Jampel @ 45 menit = 225 menit



- POKOK BAHASAN** : **8. ANALISIS SOSIAL**
- SUB POKOK BAHASAN** : **8.1 KONSEP DAN ALAT ANALISIS SOSIAL**
- TUJUAN** : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep analisis sosial
  2. Menjelaskan berbagai aspek dalam analisis sosial
  3. Mempraktikkan penggunaan alat analisis sosial
- WAKTU** : 3 Jampel @ 45 menit = 135 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.8.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.8.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu, Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator membagi dua lembar kartu metaplan kepada peserta dan meminta mereka menuliskan perubahan apa yang terjadi di desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Desa;</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta menempelkan kartu metaplan pada papan flipchart atau dinding kelas sesuai kategorisasi yang telah disiapkan sebelumnya yang mengacu pada Lembar Identifikasi Kondisi Desa (M.8.1.3);</p> <p>d. Fasilitator meminta tiga orang relawan untuk memeriksa kartu metaplan yang tertempel agar tidak ada informasi yang berulang lalu membacakannya. Satu orang memeriksa kondisi sosial, satu orang kondisi ekonomi dan satu orang lainnya kondisi politik;</p> <p>e. Fasilitator mengulas hasil diskusi dan pembahasan dengan mengacu pada Bahan Bacaan Analisis Sosial (M.8.1.6) atau Media Bantu Ppt yang telah disiapkan;</p> <p>f. Fasilitator meminta peserta membentuk 3 kelompok masing-masing dipimpin oleh satu relawan tadi mengacu pada Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.8.1.4);</p> <p>g. Fasilitator menyimpulkan hasil pembahasan dan menambahkan penjelasan terkait Perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada Bahan Bacaan Perencanaan Pembangunan Desa (M.8.1.6) atau menggunakan Media Bantu Ppt yang telah disiapkan sebelumnya.</p>	60'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Identifikasi Kondisi Desa (M.8.1.3)</li> <li>• Lembar Tugas Diskusi Kelompok (M.8.1.4)</li> <li>• Bahan Bacaan Perencanaan Pembangunan Desa (M.8.1.6)</li> </ul>

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Penugasan Individu, Curah Pendapat, Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator meminta masing-masing satu orang peserta yang memiliki pengalaman, pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan alat Pengkajian Keadaan Desa yakni Sketsa Desa, Bagan Kelembagaan, Kalender Musim dan SWOT untuk maju ke depan kelas;</p> <p>b. Fasilitator meminta mereka menjelaskan teknik penggunaan dan output dari alat kajian tersebut;</p> <p>c. Fasilitator menanyakan dari keempat alat kajian tersebut, mana yang paling tepat digunakan untuk:</p> <p>(i) Melihat masalah dan potensi atau sumber daya kelompok rentan, mengapa?</p> <p>(ii) Melihat peran dan posisi kelompok rentan di dalam pembangunan di desa, mengapa?</p> <p>(iii) Melihat struktur ekonomi kelompok rentan di desa, mengapa?</p> <p>(iv) Melihat pembagian kerja atau beban rumah tangga?</p> <p>d. Fasilitator mencatat jawaban peserta pada kertas plano dan menyimpulkan;</p> <p>e. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi dan mempraktikkan alat-alat kajian mengacu pada Lembar Tugas Kelompok (8.1.5);</p> <p>f. Fasilitator memberikan beberapa penegasan yang dibutuhkan terkait pengertian dan cara melakukan analisa SWOT mengacu pada Bahan Bacaan Analisa SWOT (M.8.1.8);</p> <p>g. Fasilitator menyimpulkan hasil presentasi dan pembahasan.</p>	60'	<p>Lembar Tugas Kelompok (8.1.5)</p> <p>Bahan Bacaan Analisis Sosial (M.8.1.7)</p> <p>Bahan Bacaan Beberapa Alat Analisa Sosial (M.8.1.8)</p>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menegaskan pentingnya pemahaman terhadap kondisi desa termasuk peran dan posisi kelompok rentan agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sumber daya dan pembangunan dapat dirasakan semua kelompok atau golongan yang ada di desa.</p>	10'	

## LEMBAR IDENTIFIKASI KONDISI DESA

Periode	Kondisi Ekonomi	Kondisi Sosial	Kondisi Politik
Sebelum UU Desa			
Setelah UU Desa			

## LEMBAR TUGAS DISKUSI KELOMPOK

1. Informasikan bahwa setiap kelompok akan berdiskusi selama 15 menit
2. Pembagian tugas kelompok:
  - a. Kelompok 1: Faktor-faktor penyebab perubahan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah ddiberlakukannya UU Desa
  - b. Kelompok II: Faktor-faktor penyebab perubahan kondisi sosial sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Desa
  - c. Kelompok III: Faktor-faktor penyebab perubahan kondisi politik sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Desa
4. Fasilitator meminta perwakilan peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lainnya;
5. Fasilitator mencatat poin-poin diskusi untuk menjadi dasar pembahasan berikutnya mengenai sistem, konstruksi dan struktur;
6. Fasilitator memandu pembahasan dan mengarahkan peserta pada pemahaman sistem, konstruksi dan struktur ekonomi, sosial dan politik di desa serta hubungannya dengan kondisi desa saat ini.

## LEMBAR TUGAS KELOMPOK

1. Informasikan bahwa yang akan dibuat tiap kelompok membayangkan situasi desa sesuai dengan penugasan masing-masing.
2. Pembagian kelompok:
  - a. Kelompok 1: Menggunakan alat Sketsa Desa
  - b. Kelompok 2: Menggunakan Alat Diagram Venn
  - c. Kelompok 3: Menggunakan Alat Kalender Musim
  - d. Kelompok 4: Menggunakan Alat SWOT
3. Setelah semua alat kajian selesai diisi, lakukan:
  - a. Identifikasi masalah
  - b. Identifikasi potensi penyelesaian masalah
4. Persilahkan perwakilan kelompok untuk presentasi dan ditanggapi oleh kelompok lainnya;
5. Ulas hasil diskusi dan pembahasan.

## BAHAN BACAAN

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA****Mengapa Perlu Perencanaan Desa**

Pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai *self governing community* (masyarakat berpemerintahan). Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran top down dan sentralistik, telah terbukti menimbulkan sikap apriori dan apatis masyarakat terhadap proses penyelenggaraan musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Bahkan, menjurus pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini terjadi karena forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan out put dokumen yang dihasilkan hanya diposisikan sebagai input “pelengkap penderita” tanpa pernah diakomodasi lebih jauh oleh pemerintah supra-desa.

Perencanaan desa yang sudah disepakati dalam bentuk Perdes ataupun Keputusan Kepala Desa seakan-akan tidak memiliki arti apapun. Musrenbang di masa lalu hanya sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah menjadi “mobilisasi” atau pengerahan orang untuk dating. Sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra “*good governance*”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita besar membangun kemandirian desa.

Guna membangkitkan semangat partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat, diperlukan keberanian dan inovasi daerah untuk menyusun peraturan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat desa melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari desa sampai kabupaten. Menjadi penting kedepan, bagaimana menjadikan satu dokumen perencanaan untuk semua dan satu dokumen anggaran desa untuk semua. Perencanaan desa akan dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan termaktub/ terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat lebih terjamin. Hal tersebut menjadi landasan bagaimana UU Desa diimplementasikan kedepan.

## Pengertian dan Prinsip

Sesuai ketentuan umum pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa).

Prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut;

1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
3. Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Penggalaninformasidesa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa.
5. Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
6. Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguat-kan dan memberdayakan masyarakatterutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya
7. Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
8. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

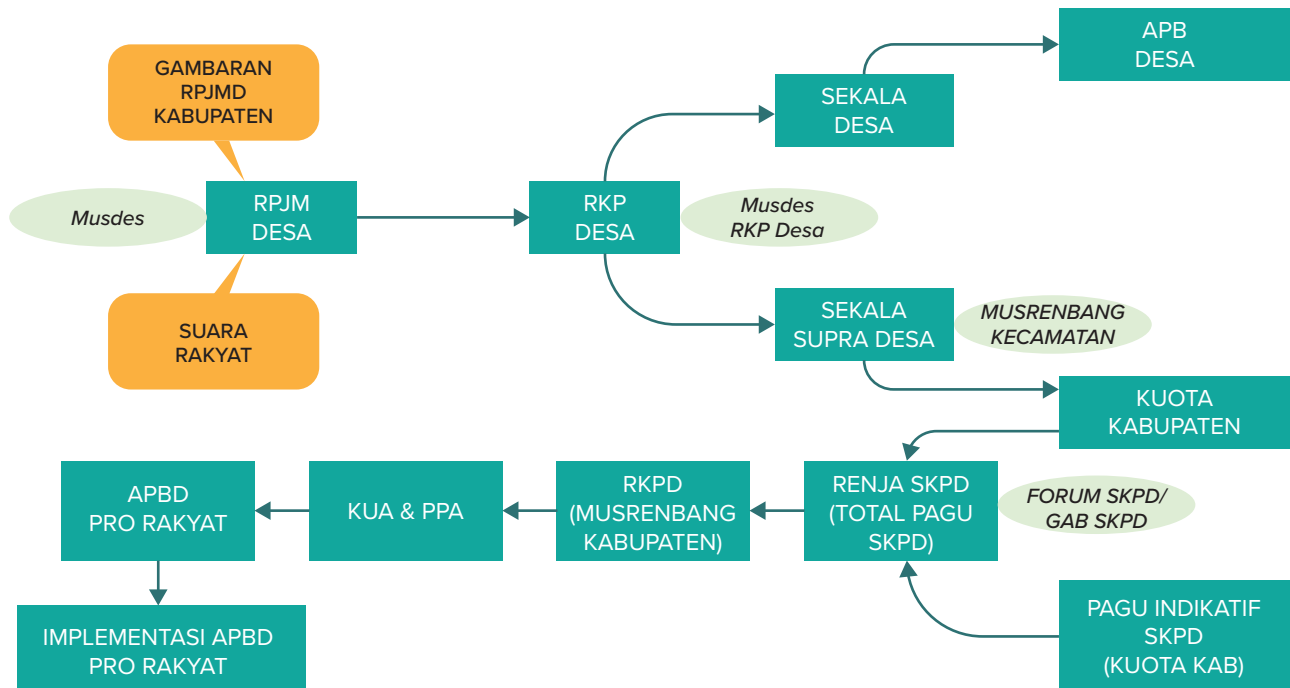
Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dua yaitu;

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun;
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan dibedakan antara 2 jenis kegiatan perencanaan; 1). Kegiatan yang akan didanai APB Desa, terutama berdasarkan kewenangan lokal skala desa dan 2). Kegiatan yang tidak mampu dibiayai melalui APB Desa dan bukan merupakan kewenangan lokal skala desa seperti kegiatan yang mencakup kawasan perdesaan yang perlu diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan hingga Kabupaten.

RKP Desa memuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan APB Desa.

Antara RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten haruslah terkonsolidasi satu sama lain. Dalam arti RPJM Desa harus mengacu pada program prioritas dan visi misi daerah, RPJMD Kabupaten juga harus mau menjadikan RPJM Desa sebagai acuan penyusunan RPJMD. Sehingga akan dicapai arah kebijakan pembangunan yang saling mendukung, karena pendekatan dari bawah bertemu dengan arah kebijakan pembangunan yang diinisiasi dari atas. Berikut ini skema hubungan antara RPJMD, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.



## Pelaku, Peran dan Tanggungjawab

Pada hakikatnya pemerintah desa adalah pihak yang paling berkompeten dan bertanggung jawab menyelenggarakan forum-forum perencanaan pembangunan desa. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur pada pasal 80 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa. Warga maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, Kelompok Dasa Wisma yang biasanya kebanyakan perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, keluarga buruh migran sampai dengan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus harus menyambut gembira inisiatif pemerintah desa menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan. Contohnya, melakukan pertemuan-pertemuan warga menjelang musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyatukan persepsi dan aspirasi tentang kebutuhan prioritas bersama yang nantinya akan diusulkan menjadi program prioritas desa melalui forum musyawarah desa.



## RPJM Desa dan RKP Desa

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa siklus perencanaan desa dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan, siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Kegiatan pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut harus selesai sebelum bulan Oktober. Kemudian bulan Oktober hingga Desember adalah saatnya bagi pemerintah desa mengembangkan kedua dokumen kebijakan tersebut menjadi dokumen APB Desa. Untuk pelaksanaan APB Desa, dalam arti pembelanjaan anggaran pembangunan dilakukan mulai bulan Januari hingga Desember yang sering disebut sebagai tahun anggaran. Terakhir, pelaporan atas pelaksanaan APB Desa dilakukan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Januari. Kesepakatan-kesepakatan masyarakat desa yang disusun dalam perencanaan pembangunan desa harus disusun berdasarkan siklus waktu tersebut.

Pasal 114 PP No 43/2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Sedangkan Pasal 116 menyebutkan bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah desa perencanaan pembangunan.

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan kabupaten/kota serta visi dan misi kepala desa dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Kemudian RKP Desa akan menjadi dasar penetapan APB Desa.

## Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014, tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa secara singkat dilakukan dalam tiga tahapan besar yaitu;

1. Persiapan. Pada tahapan ini pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perencanaan desa dan membentuk tim atau pokja perencanaan desa.
2. Musyawarah Dusun. Tahapan ini adalah tahapan musyawarah antarwarga di tingkat wilayah teritorial terkecil desa yaitu dusun. Musdus diharapkan dapat menghasilkan daftar potensi aset dan assesment permasalahan dasar masyarakat di masing-masing dusun, sehingga nantinya akan diperoleh potret potensi dan masalah yang berbeda antar dusun.
3. Musyawarah Desa. Hasil musdus sangat mungkin mencerminkan gambaran kebutuhan, permasalahan serta agenda prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat. Dusun yang kondisi kehidupan masyarakatnya banyak yang putus sekolah tentu memiliki permasalahan dan harapan yang berbeda dengan dusun yang banyak penduduknya bersekolah secara berkelanjutan. Dusun yang terletak di pegunungan pasti memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda dengan dusun yang berada di dataran rendah.

Karena itu, forum musyawarah desa menjadi penting. Musdes diselenggarakan oleh BPD yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk kaum miskin dan perempuan. Forum ini berperan strategis menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengelompokkan (*clustering*) kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga, melakukan perengkingan ataupun menemukan permufakatan atas agenda-agenda prioritas yang nantinya akan didahulukan sebagai agenda prioritas pembangunan desa. Musyawarah Desa diharapkan bisa menghasilkan rumusan prioritas berdasarkan potensi aset dan masalah dasar, visi dan misi desa serta arah kebijakan pembangunan, serta kebijakan keuangan desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Secara khusus mekanisme dan proses Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan dibahas materi teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan diselenggarakan oleh Kepala Desa. Musyawarah diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara. Beberapa agenda penting yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa RPJM Desa, diantaranya;

Pertama, pembahasan visi dan misi desa. Menentukan visi dan misi desa bukanlah hal yang mudah. Mengapa?, karena pada hakikatnya menyatukan imajinasi cita-cita dan harapan dari Kepala Desa terpilih dengan warganya. Karenanya dibutuhkan kecakapan khusus, bagi seorang fasilitator untuk meramu perbedaan cita dan harapan tersebut yang semula bersifat individualistik menjadi visi dan misi yang bersifat kolektif.

Kedua, Pembahasan matrik kegiatan enam tahunan termasuk memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten. Penguasaan perangkat desa dan warga tentang jenis kewenangan yang dimiliki desa akan turut menentukan skala prioritas antar program sekaligus membantu memudahkan menemukan dari mana sumber dana yang dibutuhkan nanti. Program yang berkaitan dengan kewenangan lokal berskala desa tentu tidak perlu diajukan menjadi program desa yang didanai APB Desa, cukuplah didanai dengan APB Desa.

Ketiga, pembahasan draft Raperdes. Sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (3) UU Desa, maka arah kebijakan pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam bentuk dokumen RPJM Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Karena itu, forum musyawarah perencanaan pembangunan desa ini hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk pembahasan rancangan Perdes tersebut, sehingga masyarakat berkesempatan membahasnya.

Keempat, penandatanganan berita acara. Kesepakatan ataupun permufakatan yang tercapai dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa diutamakan untuk diberita acarkan, sehingga memiliki kekuatan hukum. Jika sudah berkekuatan hukum, maka pemerintah desa atau pihak lainnya tidak bisa merubah seenaknya sendiri.

Kelima, memilih delegasi desa, masyarakat ataupun kelompok kepentingan sektoral yang nantinya akan menjadi utusan desa dalam forum musrenbang di tingkat kecamatan. Delegasi inilah yang nantinya akan melanjutkan usulan masyarakat yang muncul dalam menjadi agenda prioritas desa, namun skalanya adalah skala kabupaten. Karena sumber pendanaannya dari APBD atau bahkan APBN, maka usulan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

## BAHAN BACAAN

# ANALISIS SOSIAL

Analisis sosial upaya yang dilakukan dalam menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, agama dan lain sebagainya. Analisis sosial dilakukan melalui sebuah proses yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis.

Melalui analisis sosial seseorang dapat menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data terkait fenomena atau masalah sosial yang akan dianalisis dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Pada praktiknya, analisis sosial mengajukan berbagai pertanyaan kunci untuk mendapatkan jawaban terhadap apa yang sedang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Dengan begitu, setiap orang berusaha mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan di balik sebuah fenomena atau masalah sosial yang terjadi. Dibutuhkan tafsiran terhadap gejala sosial yang jelas nampak dan dirasakan serta memiliki dampak yang luas. Masalah-masalah itu dapat berupa kemiskinan, kekerasan, masalah usaha mikro/kecil atau menengah; pengabaian sistem dan lembaga sosial berupa tradisi, sistem pemerintahan, sistem pertanian, sekolah, pusat layanan kesehatan, dan pemerintahan desa; serta kebijakan publik yang berdampak buruk bagi keseimbangan hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti perdes, perda, undang-undang, dan lain sebagainya.

Analisis sosial dilakukan pada sistem yang ada dan berlaku di dalam komunitas sampai negara berikut berbagai pola hubungan dan relasi kekuasaan di antara para pelaku. Pelaku di sini bukan hanya individu namun juga organisasi atau struktur kekuasaan (seperti pemerintahan) yang hidup dan saling berinteraksi. Dalam analisis sosial, pola hubungan atau relasi kekuasaan dilihat kaitannya dengan nilai, norma, yang hidup di masyarakat, kesadaran atau logika berfikir serta ideology.

### **Pendekatan Dalam Analisis Sosial**

1. Historis: Mempertimbangkan konteks struktur serta kerja strategis yang berbeda dalam tiap periode.
2. Struktural: Menekankan pentingnya pemahaman atas bagaimana sebuah komunitas dibentuk dan dioperasikan termasuk pola yang terbangun dan saling berkaitan di antara kelembagaan sosial dalam sebuah ruang sosial yang ada.

Analisis sosial dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Karena sifatnya yang melihat pola relasi dan hubungan kekuasaan di antara aktor-aktor yang ada, maka analisis sosial tidaklah bebas nilai. Artinya analisis sosial memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok tertentu agar fenomena atau masalah sosial dapat terurai dan diketahui penyebab mendasarnya serta dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.

Analisis sosial digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami persoalan- secara lebih detil, mendalam dan berdasarkan data serta fakta. Hasil identifikasi dan pemahaman sangat berguna untuk melihat sebuah persoalan sampai pada akarnya, tidak hanya di permukaan (yang nampak) saja dan bukan pula masalah yang timbul sebagai dampak dari masalah yang lainnya. Digunakan untuk mengetahui potensi yang kekuatan dan kelemahan sistem maupun struktur yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Dengan melakukan analisis sosial,

kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih baik atau akurat terkait kelompok masyarakat yang paling dirugikan atau yang diuntungkan agar keberpihakan kita jelas ditujukan kepada pihak yang mana di dalam fenomena atau masalah social yang akan ditangani.

## Langkah-Langkah Ansos

Proses analisis sosial meliputi beberapa tahap antara lain:

1. Memilih dan menentukan objek analisis  
Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional dalam arti realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi.
2. Pengumpulan data atau informasi penunjang  
Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung di lapangan. Re-cek data atau informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data.
3. Identifikasi dan analisis masalah  
Merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel, seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komprehensif diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek.
4. Mengembangkan persepsi  
Setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut.
5. Menarik kesimpulan  
Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang; akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial.

M. 8.1.8

BAHAN BACAAN

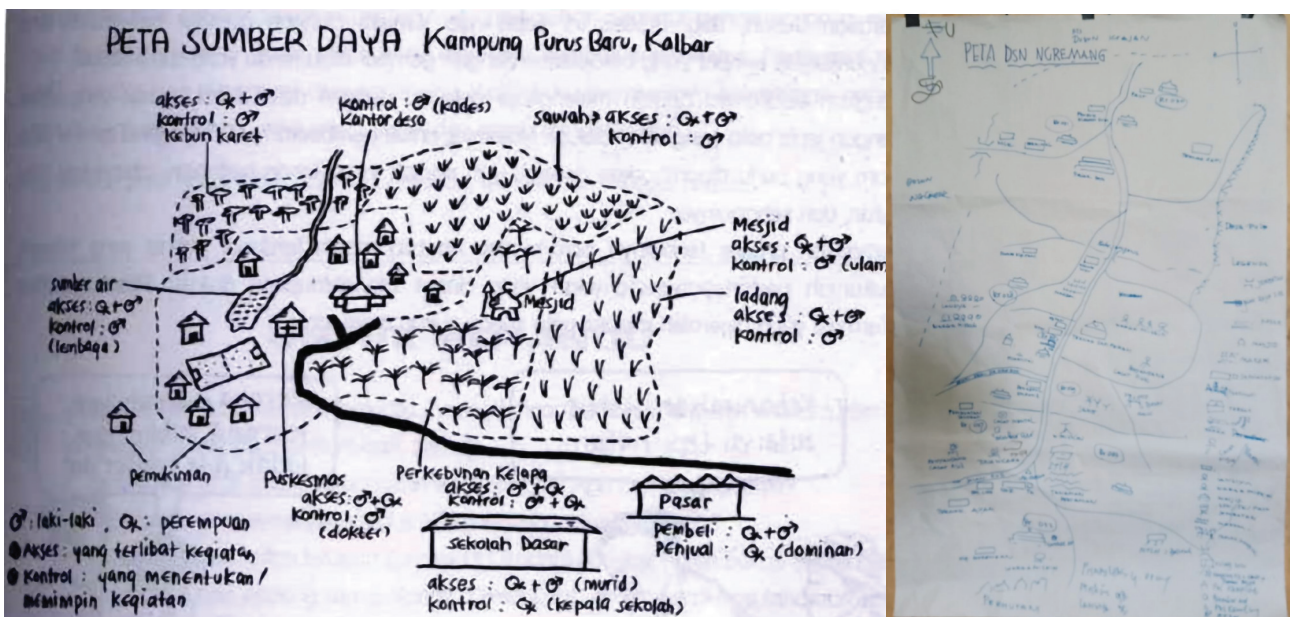
**BEBERAPA ALAT ANALISA SOSIAL**

**1. Sketsa Desa**

Sketsa desa (gambar desa) adalah gambaran desa secara umum tentang keadaan sumber daya fisik desa (alam maupun buatan). Sketsa desa sebagai alat kajian digunakan untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Sebelum mulai musyawarah, terlebih dahulu pemandu atau fasilitator harus mengetahui keadaan desa dengan mempelajari sumber tertulis yang tersedia, misalnya profil desa, potensi, dan peta desa. Selain itu, pemandu dapat pula mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat;
- Menjelaskan kepada peserta tentang tujuan pembuatan sketsa desa dan cara pembuatannya. Menyepakati simbol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber daya dengan menggunakan biji-bijian, guntingan kertas warna-warni, atau gambar dengan spidol warna-warni;
- Peserta diajak untuk membuat sketsa desa ditanah atau dilantai dengan menggunakan alat bantu, batang kayu, batu, daun-daun atau bahan alam lain sebagai batas-batas atau simbol. Sketsa desa dapat juga dibuat pada kertas dinding atau Koran, pembuatan gambar dapat dilakukan dua atau tiga orang dan peserta lain memberi masukan. Arah mata angin, lingkup, dan simbol-simbol yang dipakai untuk menggambarkan sumber daya alam dan sumber daya fisik terlebih dahulu harus disepakati bersama;
- Peserta diajak untuk mulai menggambar hal yang paling dikenal, misalnya balai desa, masjid, atau gereja. Bangunan tersebut digambar secara kasar sesuai dengan letaknya didesa dan dilanjutkan dengan gambar sarana lain sehingga diperoleh gambaran lengkap tentang keadaan desa. Sketsa desa sebaiknya dibuat dilantai atau halaman dengan melibatkan sebagian besar peserta;
- Penempatan suatu gambar dan simbolnya perlu disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah.

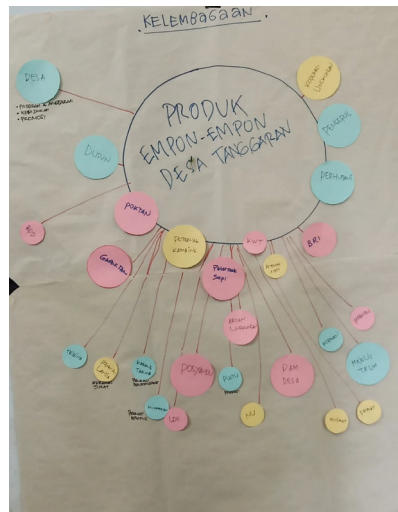
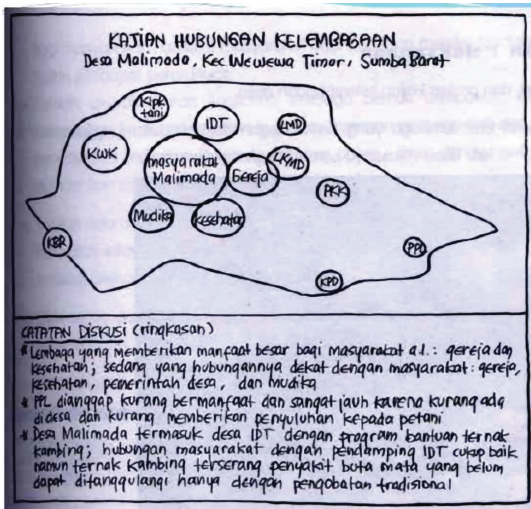
*Contoh Hasil Penggunaan Alat Analisis Sketsa Desa*



## 2. Diagram Venn

Merupakan teknik yang digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara masyarakat dengan lembaga – lembaga yang terdapat di lingkungannya. Hasil pengkajian dituangkan ke dalam diagram venn (sejenis diagram lingkaran) yang akan menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh dan dekatnya hubungan suatu lembaga dengan masyarakat. Informasi yang dikaji semua lembaga yang berhubungan dengan masyarakat sesuai dengan topik yang dikaji. Ukuran lingkaran merupakan penilaian terhadap manfaat yang didapat dari keberadaan lembaga dengan masyarakat (objek kajian) sementara tanda Panah menunjukkan jarak hubungan di antara masyarakat (objek kajian) dengan lembaga-lembaga yang ada.

### Contoh Penggunaan Alat Analisis Diagram Venn



Pengkajian kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan yang terjadi berulang dalam satu kurun waktu tertentu (musiman) dalam kehidupan masyarakat. Dituangkan dalam kalender kegiatan. Biasanya dalam jarak waktu 1 tahun (12 bulan). Informasi yang biasanya muncul adalah: iklim, curah hujan, ketersediaan air, pola tanam/panen, biaya usaha, hasil usaha dan tingkat produksi; ketersediaan pangan; ketersediaan tenaga kerja; musim bekerja ke kota; masalah hama dan penyakit, pola pengeluaran; kerawanan kawasan hutan; kebakaran hutan; dan produksi hasil hutan tertentu.

### Contoh Penggunaan Alat Analisis Kalender Musim

**KALENDER MUSIM UNTUK KAJIAN SUMBER PENGHASILAN \*1**  
Dusun Mbarungkelii, Desa Sambirasi, Kec. Riang, Kab. Ngada, NTT

SUMBER PENGHASILAN	1 JAN	2 FEB	3 MARET	4 APRIL	5 MEI	6 JUNI	7 JULI	8 AGUST	9 SEPT	10 OKT	11 NOV	12 DES	MASALAH
JABUNG	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	ijon
KAPAK	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	sempit manfaat
ASAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	perlu dibantu dengan
KAPAS	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	belum dibantu oleh petugas
KOPRA	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	
Dalu ubi kayu (diper-sempitan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manis, kembang tahu, ruda, Bawang, sopi	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	terrak (car-jawa, pambung-sopi, kurang bahan dan air
KEM TERBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**\*) Catatan:**

- Kawasan hutan Akurawang masalah beban yang dihadapi petani, yaitu: curi-rangi karena tidak ada terasering yang pembibitan kemiri masih muda perapian lahan sering terlambat curah hujan tidak teratur.
- Parak tanaman seperti: kelapa, lontar, mada mete, nasi karena eseringin dan saringan hang terakir (jika karena kebutuhan hasil kurang)
- Sistem pengembalian tidak berjalan karena lokasi tidak dipergunakan (tidak ada paksa) sehingga terjadi masalah ternak icpa.
- Status kawasan hutan lindung Akurawang belum jelas, masih berdasarkan informasi lisan dari dinas kehutanan Ngada.
- Tanah masyarakat yang termasuk seri A masuk dalam kawasan cagar alam sehingga pembayaran pajak masih berjangka karena masyarakat belum membuat surat penarikan pembayaran pajak (tidak tahu membuat surat)

**KALENDER MUSIM**  
Desa Kumpul, Kec. Wewewa

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REK
Angin													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
Hujan	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	1) Hujan yang sering turun 2) Hujan yang sering turun 3) Hujan yang sering turun
Solan													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
Saran	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
Asam													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
KAPAS													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
KEM TERBU													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang
IKAN													1) Tidak ada angin kencang 2) Tidak ada angin kencang

## 4. SWOT

Analisa SWOT merupakan analisa paling dasar untuk melihat permasalahan dari 4 sisi yg berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi utk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yg ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dgn benar, analisa SWOT akan membantu kita utk melihat sisi-sisi yg terlupakan atau tidak terlihat selama ini.

### 1. *Strengths* (kekuatan).

- Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program sekarang.
- Bersifat internal dari organisasi, entitas masyarakat atau sebuah program baik secara kualitatif maupun kuantitatif seperti jumlah anggota dalam sebuah organisasi atau kelompok (kuantitatif) atau pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang ada atau terlibat dalam sebuah program atau kegiatan (kualitatif).

### 2. *Weaknesses* (kelemahan).

- Sesuatu, bisa berupa kondisi atau situasi yang menyebabkan rencana tidak berjalan dengan baik atau berupa keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan.
- Bersifat internal seperti masalah komunikasi atau jaringan di antara orang-orang yang terlibat

### 3. *Opportunity* (kesempatan)

- Faktor positif yang muncul dari lingkungan yang memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya.
- Bersifat eksternal seperti kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal atau dalam mengakses sumber daya, respon masyarakat atas isu yang sedang diperjuangkan, dll.

### 4. *Threat* (Ancaman)

- Faktor negatif dari lingkungan yang menghambat berkembang atau berjalannya rencana, perjalanan sebuah organisasi dan program atau kasus yang sedang diperjuangkan.
- Bersifat eksternal seperti adanya pengaruh teknologi yang membawa dampak negatif atau keberadaan pihak lain yang dapat membuat kegagalan rencana

### Contoh Penggunaan Alat Analisis SWOT

	<b>STRENGTHS (S)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan organisasi	<b>WEAKNESSES (W)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan organisasi
<b>OPPORTUNITY (O)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang organisasi	<b>STRATEGI SO</b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>STRATEGI WO</b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>THREATS (T)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman organisasi	<b>STRATEGI ST</b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b>STRATEGI WT</b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

#### Sumber Rujukan:

<https://risehtunong.blogspot.com/2016/10/langkah-langkah-dalam-membuat-sketsa.html>

<http://fokus-umkm.com/melakukan-pemetaan-potensi-bisnis/>

[https://www.academia.edu/14542858/Dasar-Dasar\\_Penyuluhan\\_Partisipatif\\_berdasarkan\\_PRA](https://www.academia.edu/14542858/Dasar-Dasar_Penyuluhan_Partisipatif_berdasarkan_PRA)

**POKOK BAHASAN** : **8. ANALISIS SOSIAL**

**SUB POKOK BAHASAN** : **8.2 ANALISIS SOSIAL BERBASIS KERENTANAN**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep kerentanan
2. Mampu melakukan analisa masalah dan solusi kelompok rentan di desa
3. Mampu menyusun strategi rekonstruksi sosial terhadap kelompok rentan di desa

**WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.



## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.8.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang konsep kerentanan dan siapa saja yang disebut sebagai kelompok rentan serta alasannya;</p> <p>b. Fasilitator mencatat poin-poin pendapat peserta pada kertas plano dan mengulasnya secara singkat mengacu pada Bahan Bacaan Kerentanan (M.8.2.2) atau menggunakan media bantu Ppt yang telah disiapkan;</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan solusi atas permasalahan atau fenomena yang terjadi pada berbagai kelompok rentan yang ada di masyarakat;</p> <p>d. Fasilitator menginstruksikan setiap kelompok untuk berdiskusi selama 15 menit menjawab pertanyaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kembali fenomena sosial atau masalah apa yang dialami kelompok rentan?</li> <li>Siapa yang paling dirugikan dari masalah atau fenomena sosial yang terjadi?</li> <li>Siapa yang paling diuntungkan dari masalah atau fenomena sosial yang terjadi?</li> <li>Apa saja tawaran solusi untuk mengatasi masalah tersebut?</li> <li>Dukungan apa dan dari mana yang dibutuhkan agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik?</li> </ol> <p>e. Fasilitator mempersilahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan meminta peserta dari kelompok lain menanggapi;</p> <p>f. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari presentasi dan pembahasan dan menyimpulkan sesi.</p>	30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Kerentanan (M.8.2.2)</li> <li>Bahan Bacaan Rekonstruksi Sosial di Desa (M.8.2.3)</li> </ul>

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>3. <b>Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator menjelaskan bahwa setelah ini peserta akan kembali berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan dan melakukan analisa masalah kelompok rentan dan rekonstruksi sosial untuk mengatasinya;</p> <p>b. Fasilitator menjelaskan rekonstruksi sosial di desa mengacu pada Bahan Bacaan Konstruksi Sosial di Desa (M.8.2.3) atau menggunakan media bantu Ppt yang telah disiapkan.</p> <p>c. Fasilitator meminta peserta memilih sendiri akan terlibat membahas masalah kelompok rentan yang mana (perempuan, disabilitas, anak) dan mempersilahkan kelompok untuk memulai diskusi selama 20 menit;</p> <p>d. Fasilitator menginformasikan bahwa setiap kelompok ditugaskan untuk:</p> <p>(i) Melakukan identifikasi dan analisa masalah masing-masing kelompok rentan dalam hal partisipasi, akses, manfaat serta kontrol atas sumber daya dan pembangunan di desa menggunakan analisa SWOT;</p> <p>(ii) Menyusun rencana strategi rekonstruksi sosial di desa untuk pelibatan kelompok rentan dalam mengakses, memanfaatkan dan mengontrol sumber daya dan pembangunan di desa berdasarkan 5 pertanyaan pada sesi sebelumnya;</p> <p>e. Fasilitator menginstruksikan setiap kelompok menempelkan hasil diskusinya pada flipchart atau dinding kelas dan mempersilahkan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sementara kelompok lain diminta berbaur untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik atau pertanyaan;</p> <p>f. Fasilitator mencatat poin-poin diskusi dan pembahasan yang berkembang sebagai bahan untuk menyimpulkan;</p> <p>g. Fasilitator membuka sesi tanya jawab, klarifikasi dan menyimpulkan pembahasan sesi.</p>	50'	
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menegaskan pentingnya keberpihakan dan penerapan nilai-nilai Gender dan Inklusi Sosial serta nilai-nilai SEPEDA KEREN untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan dalam memberdayakan diri dan merubah situasi sosial yang tidak menguntungkan mereka saat ini.</p>	5'	

## BAHAN BACAAN KERENTANAN

Kerentanan dapat berupa kondisi fisik maupun keadaan atau situasi yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka yang mengalami kerentanan fisik sebagai contoh dapat mencakup perempuan, bayi dan anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat. Sebagai contoh, bayi dan anak kecil pada umumnya lebih berisiko terpapar virus dan penyakit ketimbang orang dewasa. Demikian halnya para penyandang disabilitas maupun masyarakat adat, mengalami lebih sedikit manfaat sosial ekonomi ketimbang yang lain, termasuk minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kondisi seperti ini akan dialami oleh kita semua dalam waktu cepat atau lambat (*projected vulnerable groups*).

Mereka yang berada dalam situasi rentan dapat mencakup orang-orang yang tidak sedang bekerja (pengangguran); korban pelanggaran HAM; mereka yang tinggal di daerah rentan bencana; dan pengungsi yang sedang mengalami konflik, intoleran, maupun terpapar oleh bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya. Kelompok-kelompok warga yang tinggal di dataran rendah lebih berisiko kehilangan mata pencaharian, pendapatan, dan aset mereka akibat banjir atau rob ketimbang mereka yang berada di lokasi-lokasi yang lebih tinggi.

Kerentanan juga dapat disebabkan keterkaitan dengan kekuasaan atau pengaruh satu kelompok terhadap dominasi kelompok yang lain, misalnya keberadaan kelompok minoritas terhadap mayoritas (dan sebaliknya) dalam konteks dan wilayah tertentu. Dengan kata lain, kerentanan juga terkait erat dengan masalah keberdayaan atau ketidakberdayaan. Kombinasi kerentanan mengakibatkan kelompok-kelompok tersebut lebih berisiko menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan dasar hingga perlindungan sosial – terutama manakala informasi tidak tersedia secara memadai – tidak dapat diakses atau bahkan tidak dibagikan (ditujukan secara khusus) untuk mereka, tidak hadir secara fisik maupun tidak mempertimbangkan fasilitas wajar yang diperlukan. Dilihat dari sudut pandang HAM, keterbatasan akses merupakan kegagalan mencapai HAM yang disepakati secara internasional.

Kerentanan juga membawa sifat dinamis dan menyangkut keberdayaan maupun ketidakberdayaan (kuasa untuk menghapuskan kerentanan yang dialami). Mereka yang kurang mampu menghadapi risiko-risiko disebut rentan. Mereka disebut tidak rentan hanya manakala risiko-risiko tersebut dapat dihapuskan. Pelaksanaan TPB sedapat mungkin menghilangkan risiko tersebut untuk dapat menghapuskan daftar kelompok-kelompok rentan dalam pembangunan. Prinsip inklusi sosial sesungguhnya telah tercermin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengedepankan pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, setiap orang berhak terbebas dari perilaku tidak adil, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri).

Kelompok warga yang paling rentan adalah mereka yang paling terpengaruh oleh struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil dan lingkungan yang memburuk, hidup dalam konteks yang rapuh, dan menjadi pihak pertama yang harus menanggung dampak gagalnya rezim pembangunan. Pada konteks Indonesia, kelompok warga paling rentan terwakili oleh wajah-wajah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat adat, dan minoritas agama dan keyakinan. Keempat kelompok warga ini adalah pihak yang tidak saja mengalami ketidakadilan struktur politik, ekonomi dan sosial, akan tetapi juga berbagai (lebih dari satu) bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang jamak dan saling berkelindan (*multiple and intersecting forms of discriminations and injustice*).

## Kondisi Obyektif Kelompok Rentan

### 1. Perempuan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Disamping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan.

Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai isteri atau ibu rumah tangga semata. Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. sehingga kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut sanksinya.

### 2. Disabilitas

Masalah yang dihadapi adalah beragamnya hasil pendataan tergantung kepada penyelenggara pendataan dan peruntukannya. Dengan kata lain tidak adanya sistem pendataan tunggal. Selain itu, data yang dihasilkan relatif belum menggambarkan kondisi senyatanya dari penyandang disabilitas dan tidak rinci. Pada sisi lain, ada pula inisiatif pendataan yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang berpeluang untuk dimanfaatkan oleh Kementerian dan BPS. Termasuk didalamnya proses pendataan yang partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas didalamnya.

Sementara itu pada isu pelayanan publik, masalah yang dihadapi adalah berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak dapat diimplementasikan secara maksimal, karena masih dalam tataran prinsip umum, belum secara penuh diturunkan menjadi ketentuan yang lebih teknis. Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana melayani penyandang disabilitas juga menjadi permasalahan lainnya.

Selama ini penganggaran penyandang disabilitas juga masih menjadi tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu seperti Dinas Sosial/Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, berbagai Perda Disabilitas yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh sekitar 29 Pemda belum mencerminkan perbaikan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Salah satunya karena belum dijabarkan secara spesifik tentang hak berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, tidak adanya aturan turunan dan tidak dilakukannya monitoring atas penerapan Perda dimaksud.

### 3. Anak

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pelanggaran Hak Asasi yang menyangkut masalah Pekerja Anak, Perdagangan Anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan adalah beberapa masalah utama yang dihadapi. Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sementara anak yang dilacurkan atau menjadi pekerja seks komersial mengindikasikan ketika orang tua memperdagangkan anaknya, biasanya didukung oleh peran tokoh formal dan informal setempat misalnya untuk mendapat KTP atau memalsukan umur anak. Pada abak jalanan, pada umumnya hampir tidak mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Keberadaan mereka cenderung ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami penggarukan (*sweeping*) oleh pemerintah kota setempat. Lebih parah lagi, pada anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS.

*Sumber Referensi:*

*Iskandar Hoesin, 2003, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

*INFID, 2019, Kelompok Warga Rentan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*

*PATTIRO, 2019, Policy Paper: Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas*

## BAHAN BACAAN

# REKONSTRUKSI SOSIAL DI DESA

Membahas rekonstruksi sosial dimulai dari kata konstruksi sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan yang menjelaskan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi.

Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan.

Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk. Setiap orang memiliki perspektif berbeda-beda dalam memandang dunia bersama yang bersifat intersubjektif. Perspektif orang yang satu dengan yang lain tidak hanya berbeda tetapi sangat mungkin juga bertentangan. Namun, ada persesuaian yang berlangsung terus-menerus antara makna-makna orang yang satu dengan yang lain tadi. Ada kesadaran bersama mengenai kenyataan di dalamnya menuju sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini kemudian mengacu kepada suatu dunia yang sama-sama dialami banyak orang. Jika ini sudah terjadi maka dapat disebut dengan pengetahuan bersama, yakni pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan hidup sehari-hari dialami bersama oleh orang-orang. Pengalaman terpenting orang-orang berlangsung dalam situasi tatap-muka, sebagai proses interaksi sosial. Dalam situasi tatap-muka ini, orang-orang terus-menerus saling bersentuhan, berinteraksi, dan berekspres. Dalam situasi itu pula terjadi interpretasi dan refleksi. Interaksi tatap-muka sangat memungkinkan mengubah skema-skema tipifikasi orang.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 1) mengembalikan seperti semula; 2) penyusunan (penggambaran) kembali. Konsep rekonstruksi sosial sangat besar peranannya dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat. Di dalamnya termasuk bagaimana cara memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat, menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktur adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Theodore Brameld, pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membangun individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Para rekonstruksionis sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial.

Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksinis sosial menentang intimidasi, menakut-nakuti dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (crucial) dan kerja sama atau bergotong royong untuk memecahkannya. Ada beberapa ciri yang khusus dimiliki dalam desain kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu sebagai berikut:

### 1. **Asumsi**

Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial, yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika. Masalah-masalah masyarakat bersifat universal dan hal ini dapat dikaji dalam kurikulum.

### 2. **Masalah-masalah sosial yang mendesak**

Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan, seperti: Dapatkah kehidupan seperti sekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan mengganggu integritas kemanusiaan? Dapatkah tata ekonomi dan politik yang ada dibangun kembali agar setiap orang dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia seadil mungkin. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang pengungkapan lebih mendalam, bukan saja dari buku-buku dan kegiatan laboratorium tetapi juga dari kehidupan nyata dalam masyarakat.

### 3. **Pola-pola organisasi**

Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan dan lain-lain. Topik-topik dengan berbagai kegiatan kelompok ini merupakan jari-jari. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan sebagai bingkai.

Sistem sosial masyarakat Indonesia yang tercermin pada perilaku sosial masyarakat menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan hal demikian dianggap sebagai perilaku yang pantas yang akhirnya menjadi budaya dan menjadi bagian dari sistem yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang sudah menjadi suatu rangkaian. Wujud konkrit keterkaitan di atas terlihat jelas pada sistem budaya di Indonesia khususnya di Jawa. Keadaan Indonesia dengan heterogenitas budayanya dan sikap bangsa yang terbuka akan adanya perubahan, akan tetapi dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang disesuaikan dengan unsur-unsur yang sebelumnya sudah ada yaitu nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

Apabila melihat masalah yang berkaitan dengan sistem sosial masyarakat khususnya masyarakat desa yang telah berkurang budaya gotong royongnya, misalnya gotong royong dalam membuat rumah. Dahulu masyarakat itu membuat rumah bersama-sama dan saling bekerja sama. Sehingga didalamnya terdapat hubungan timbal balik antar orang yang satu dengan yang lain. Setiap kesibukan yang ada didalam individu, bisa menjadi kesibukan juga buat orang lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu solidaritas antar individu yang ada menjadi menurun. Karena adanya interaksi budaya yang dimiliki dengan budaya yang lain yang berbeda. Dan kebudayaan yang lain itu dianggap lebih maju dan dapat mengerjakan sesuatu secara efisien.

Pergantian sistem gotong royong menjadi sistem borongan atau pekerjaan buruh mengakibatkan budaya gotong royong menjadi menurun. Sebenarnya dengan adanya gotong royong akan mendorong masyarakat untuk berkumpul, bekerja sama dalam lokasi yang sama. Sehingga ini bisa meningkatkan solidaritas antar anggota masyarakat. Budaya gotong royong telah diadopsi oleh bangsa Indonesia khususnya Jawa sejak masa

kolonialisme Belanda di Indonesia. bahkan hingga saat ini masih bertahan. Namun, ada perbedaan yang jelas antara gotong royong pada saat itu dan masa sekarang ini. Dahulu kala, gotong royong yang dituangkan dalam bentuk kerja bakti tidak hanya dilakukan pada hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti halnya membangun masjid, pembangunan jembatan dan lain-lain yang sifatnya adalah fasilitas untuk kepentingan umum. Bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi seperti hajatan-hajatan rumah tangga yang juga melibatkan banyak orang.

Menurut para ahli yang mengamati interaksi antar individu di dalam masyarakat, gejala diatas merupakan corak kehidupan masyarakat desa yang mempunyai solidaritas mekanik. Perilaku masyarakat yang sudah membudaya dengan adanya kebersamaan menjadikan gotong royong tersebut sebagai budaya yang perlu dilestarikan untuk mengikat kesatuan kolektif antar kelompok. Hal itu dilakuakn untuk meningkatkan integrasi terhadap lokalitas dan in group feeling di dalam masyarakat.

Budaya gotong royong tersebut sekarang ini seakan-akan sudah tergerus oleh zaman seiring dengan arus globalisasi yang ada dan canggihnya teknologi sert alih fungsi tenaga kerja menjadi tenaga mesin. Seiring dengan ditemukannya banyak discovery menyebabkan pola pikir masyarakat lebih mendasarkan pada cara kerja yang efektif dan efisien, termasuk dengan alih fungsi tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Hal inilah yang menyebabkan sistem budaya gotong royong mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, istilah gotong royong ini selalu melekat pada tradisi kebudayaan masyarakat jawa yang memiliki tingkat kekerabatan yang tinggi.

Indonesia sebagai negara yang terbuka akan masuknya kebudayaan asing, terutama budaya- budaya yang memberikan dampak negatif. Seperti halnya sistem budaya kapitalistik yang nantinya membuat masyarakat lebih bersifat individual dan mengendorkan nilai-nilai sosialistik di dalam masyarakat.Mereka lebh cendrung fokus pada pekerjaan masing-masing dan menilai semuanya dengan uang.Hal ini dapat di lihat pada masyarakat perkotaan. Selain itu masuknya budaya barat juga mempengaruhi budaya masyarakat dalam kehidupan sosialnya lebih cuek, bersifat acuh tak acuh dan bersifat egoistik.

Melunturnya sistem budaya sosialistik yang di gantkan dengan sistem budaya kapitalistik berpengaruh pada perilaku masyarakat yang tercermin pada sistem sosial masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sistem budaya yang sudah menjadi tonggak atau sendi dari kebudayaan. Apabila sekarang ini gaya hidup masyarakat sudah mengikuti gaya gidup budaya barat(westernisasi) tidak menutup kemungkinan perilaku sosial masyarakat juga akan berubah. Jadi, perubahan yang demikian akan mengancam integrasi di dalam masyarakat dalam istilah Sosiologi adalah antended change(perubahan yang tidak di kehendaki).

Faktor perubahan sosial tidak hanya di pengaruhi dengan masuknya kebudayaan dalam masyarakat(difusi, asimilasi,penetrasi dan akulturasi) melainkan karena perubahan pola pikir masyarakat terhadap ketidak puasan terhadap situasi yang ada dan ingin merubahnya, mungkin masyarakat yang sampai saat ini masih mempertahankan budaya gotong royoong pun mulai berpikir bahwa kegitan-kegiatan yang sifatnya sosial tersebut dapat dikerjakan sendiri dengan membayar orang atau melalui sitem borongan. Kalau sudah seperti ini orang-ornag yang ada disekitarnya pun enggan untuk turut membantunya, mungkin ini cocok diterapkan untuk masyarakat perkotaan dengan corak hubungannya yang gesselschaft. Karena hubungan yang terjadi diantara mereka hanya berdasar pada kontrak dan kesibukan-kesibukan yang menuntut mereka untuk fokus bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk membaur dengan orang-orang yang ada disekiternya, apalagi untuk kegiatan seperti gotong royong. Padahal mereka merasa tanpa gotong royongpun bisa dikerjakan.



Masalah seperti diatas sekarang sudah menjalar pada masyarakat pedesaan, yang notabenenya memiliki budaya gotong royong yang sanagt kental sekarang sudah mulai memudar pula. *Motivational force* masing-masing individu berbeda. Hal ini terkait dengan pola pikir yang membentuk mereka untuk bertindak, seperti adanya pengetahuan tentang perbedaan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Dala hal ini termasuk individu yang ada di dalam masyarakat menginginkan adanya kebebasan-kebebasan dalam bertindak tanpa dibatasi oleh adanya adat dan tradisi. Kemudian, pola pikir terhadap perubahan di dorong adanya kebutuhan-kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan produksi atau prestasi kerja yang keduanya disesuaikan dari upaya yang dilakukan individu terhadap hasil yang telah dilakuaknnya. Jadi mereka tidak mengharapkan adanya bantuan dai masyrakat lain, dan merekapun juga tidak membantu masyarakat lain.

Selain itu, pola pikir yang ada dalam individu adalah bentukan dari keluarga. Sedangkan keluarga merupakan tempat untuk sosialisasi yang pertama dalam proses sosialisasi yang disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana di dalam proses sosialisasi individu dikenalkan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat termasuk adat dan tradisi (khususnya masyarakat desa). Hal ini bertujuan supaya individu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkunagn, sehingga nantinya tidak terjadi kejutan budaya (*cultural shock*).

Kemudian keluarga akan membentuk masyarakat berdasarkan pada nilai yang telah ditanamkan di dalam keluarga (reorganisasi). Masyarakat kota di dalam keluarga menanamkan niali-nilai individual itulah yang nantinya i terapkan di dalam masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat desa menanamkan nilai-nilai gotong royong dan kerja sama. Itulah nantinya yang diterapkan individu dalam masyarakat.

Jadi, untuk menangani masalah seperti diatas dan mengembalikan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka hal utama yang harus diutamakan adalah merekonstruksi budaya yang ada didalam masyarakat tersebut. Karena dengan merekonstruksi budaya secara otomatis akan mengubah perilaku sosial. Misalnya dengan menggiatkan budaya yang dahulunya telah luntur kembali, yaitu gotong royong, kerja bakti, bersih desa dan sebagainya.

*Disadur dari berbagai sumber:*

<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-rekonstruksi-sosial/>

<https://trimahendrasosiologi.wordpress.com/2012/09/01/rekonstruksi-budaya-dalam-mengubah-perilaku-sosial-masyarakat/>

<https://leviyamani.wordpress.com/2013/04/18/rekonstruksi-sosial/>



# ADVOKASI

- POKOK BAHASAN** : **9. ADVOKASI**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Memahami advokasi kebijakan untuk perubahan sosial
  2. Memahami dan mempraktikkan keterampilan advokasi.
- SUB POKOK BAHASAN** : **9.1 ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL**
- 9.2 KETERAMPILAN ADVOKASI**
- WAKTU** : 4 Jampel @ 45 menit = 180 menit

- POKOK BAHASAN** : **9. ADVOKASI**
- SUB POKOK BAHASAN** : **9.1 ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian advokasi dan kebijakan publik
  2. Menjelaskan prinsip advokasi kebijakan publik
  3. Mampu melakukan analisa keterlibatan kelompok rentan dalam advokasi kebijakan publik
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian PB (M.9.1.1)</li> <li>Lembar Penyajian SPB (M.9.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Diskusi Kelompok-Pleno, Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator menanyakan kepada peserta kebijakan apa saja yang pernah mereka dengar atau ketahui terkait dengan hak-hak dan kepentingan perempuan dan kelompok rentan;</p> <p>c. Fasilitator mencatat poin-poin jawaban peserta pada kertas plano;</p> <p>d. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa untuk memahami berbagai bentuk kebijakan dan aturan terkait kepentingan kelompok rentan, dalam hal ini perempuan, disabilitas, anak dan pekerja migran, peserta akan mendiskusikan dua studi kasus dalam 4 kelompok. 2 kelompok membahas kasus perempuan dengan disabilitas dan 2 kelompok lainnya akan membahas kasus anak pekerja migran;</p> <p>e. Fasilitator membagikan lembar cerita kasus kepada masing-masing kelompok dan menugaskan peserta untuk membaca kasus serta mendiskusikan hal-hal berikut (M.9.1.3);</p> <p>f. Apa saja aturan-aturan yang diberlakukan pada perempuan / disabilitas / anak / pekerja migran dalam kasus tersebut?</p> <p>g. Siapa saja yang berperan dalam membuat dan melanggar aturan-aturan tersebut?</p> <p>h. Fasilitator meminta salah seorang relawan memandu peserta untuk presentasi dan saling menanggapi hasil diskusi kelompok;</p> <p>i. Fasilitator mencatat pendapat peserta pada kertas plano dan mengulasnya;</p> <p>j. Fasilitator menanyakan pendapat peserta mengenai apa saja kelompok rentan lainnya yang ada di desa dan aturan apa yang diberlakukan serta siapa saja pelanggeng aturan bagi kelompok mereka;</p> <p>k. Fasilitator mencatat poin-poin pendapat peserta pada kertas plano dan menyimpulkan pembahasan dan mengarahkan pada pemahaman mengenai advokasi dengan mengacu pada Bahan Bacaan Tentang Perubahan dari Eksklusi menjadi Inklusi (M.9.1.4);</p> <p>l. Fasilitator menyimpulkan hasil pembahasan.</p>	80'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerita Perempuan Disabilitas dan Anak (M.9.1.3)</li> <li>Bahan Bacaan Tentang Perubahan dari Eksklusi menjadi Inklusi (M.9.1.4)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan dengan memberikan penekanan pada peran advokasi Mentor dan Kader SEPEDA KEREN dalam mendorong perubahan social bagi kelompok rentan di desa.</p>	5'	

## LEMBAR STUDI KASUS

### STUDI KASUS PEREMPUAN DISABILITAS DI DESA

Ani adalah seorang perempuan dengan disabilitas fisik berusia 30 tahun menikah dengan Anto seorang laki-laki bukan disabilitas yang bekerja sebagai guru honorer. Ani tinggal dilingkungan dengan keluarga besar suaminya yang cukup kaya dirumah mertuanya. Bahwa suaminya sebagai guru honorer mempunyai menerima gaji 300 rb/ bulan dari sekolah. Sementara Ani merupakan perempuan disabilitas menggunakan alat bantu 2 tongkat ketiak untuk keseharian bergantian dengan kursi roda. saat ini Ani mengalami kehamilan dengan usia 5 bulan, pernah datang ke posyandu sekali tetapi kemudian tidak lagi datang karena petugas menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. setelah sampai di puskesmas disarankan oleh Bidan puskesmas untuk melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan karena melihat bahwa kehamilannya berisiko. Ani kebingungan untuk datang ke dokter kandungan di RS karena tidak mempunyai kartu BPJS dan tidak mempunyai biaya yang cukup, dengan vonis awal bidan kalau kehamilannya berisiko. sementara Ani yang sebelum menikah cukup aktif menjalankan usaha makanan ringan dan memasarkan di kota tempat asal dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (modifikasi), tetapi setelah menikah dan berpindah ke desa suami yang cukup jauh dari kota, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena dari rumah menuju jalan desa bertangga dan tidak mungkin dilalui dengan sepeda motor roda 3, dan keluarga besar suaminya melarang Ani keluar rumah dan berkumpul dengan masyarakat di lingkungan barunya karena dianggap merepotkan dan malu, karena proses pernikahan Ani dan Anto yang dilakukan di rumah Ani tidak diketahui oleh semua tetangga di lingkungan rumah Anto.

### STUDI KASUS ANAK

Giza adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun, merupakan siswa berprestasi sekolah kelas 8 SMP di desa Karang, bahwa Giza mempunyai adik laki-laki yang bernama Dino berusia 3 tahun. mereka tinggal bersama nenek dan kakeknya karena ibunya bekerja di luar negeri yang kembali kedesa setiap 3 tahun. tahun terakhir ibunya pulang adalah untuk melahirkan Dino dan kembali bekerja setelah anaknya berusia 4 bulan. Setelah kepergian ibunya maka Giza yang mengurus Dino karena kondisi neneknya yang sudah sering sakit. Dalam kesehariannya Giza seringkali mendapatkan bullying dari teman sekolahnya karena sering disebut sebagai anak “oleh-oleh” dan mempunyai adik “oleh-oleh” karena ibunya melahirkan anak setelah bekerja di luar negeri dan sudah bercerai dari suaminya setelah kelahiran Giza yang secara fisik tidak seperti pada umumnya orang desa.

Tekanan yang dialami Giza sebetulnya banyak dialami oleh anak-anak lain yang ibunya bekerja di luar negeri, sehingga mereka seringkali diajak berkumpul sampai malam dirumah salah satu temannya yang tidak terdapat orang dewasa/ orang tua. disana Giza melihat temannya mencoba minum minuman keras, narkoba dan bahkan melakukan hubungan sex. Giza merasa tidak nyaman karena selalu dipaksa mencoba sementara dia merasa bahwa harus sekolah dan mempunyai adik bayi yang harus diurus. sampai pada waktu tertentu teman perempuannya mengalami kehamilan, dan ketahuan oleh sekolah yang kemudian keputusan sekolah dikeluarkan. Giza sedih sekali melihat teman dekatnya dengan kondisi itu, tetapi tidak tahu harus bagaimana, sementara disaat yang sama dia juga mengalami kesulitan karena ibunya sudah beberapa bulan tidak mengirim uang sekolah. Giza mendapatkan tagihan dari sekolah untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan sebelum ujian akhir sekolah untuk dapat naik kelas 9 dan adiknya sudah ingin masuk PAUD yang akan membutuhkan biaya dan ditanyakan tentang Akta lahir Dino. Giza tidak tahu kemana harus bekerja dan mencari uang untuk membayar sekolah, karena hasil tani kakeknya hanya cukup untuk makan sehari-hari, juga tidak tahu bagaimana mencari akta lahir bagi Dino. Di antara kebingungan untuk terus sekolah dan kesedihan itu Giza sudah didekati oleh orang-orang yang berjanji untuk mencarikan pekerjaan baginya di restoran di dalam dan luar negeri, tetapi Giza tidak tega untuk meninggalkan Dino.

## BAHAN BACAAN

## TENTANG PERUBAHAN DARI EKSLUSI MENJADI INKLUSI

- a. **Inklusi sosial** memiliki pengertian dinamis, unik, dan dengan varian beragam sesuai konteks persoalan di tingkat lokal, nasional dan global. Konsep inklusi sosial dalam pembangunan di Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pasalnya, prinsip inklusi yakni keberagaman (kebhinekaan) adalah nilai dasar bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Keberagaman telah menjadi nilai mendasar dalam kehidupan bersama yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan secara luas dan komprehensif serta menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, solidaritas (*solidarity*), kesetaraan (*equality*), otonomi (*autonomy*), martabat (*dignity*) dan keadilan sosial dijamin dalam konstitusi.

Sebagai sebuah catatan penting:

Konsep Inklusi sosial pada tataran praktik yang dikembangkan berbagai pihak, mengalami penyempitan pemaknaan. Ada kecenderungan inklusi sosial lebih dilekatkan kepada orang dengan disabilitas. Kesenjangan pemahaman inklusi sosial tidak terlepas dari hambatan sikap khalayak yang terbentuk secara sosial dan kultural terhadap orang dengan disabilitas. Tetapi sebetulnya inklusi sosial ini bukan hanya berkaitan dengan isu disabilitas

- b. **Eksklusi sosial** merupakan proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, migran atau berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan (Beall dan Piron (2005)). Eksklusi sosial meliputi berbagai aspek kehidupan. Istilah ini menunjukkan sekumpulan orang miskin, menganggur dan kurang bernasib baik yang tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat biasa (Sheppard, 2006). Eksklusi sosial sebagai individu, kumpulan atau masyarakat yang kurang bernasib baik dan tersingkir atau disingkirkan dari kehidupan masyarakat.

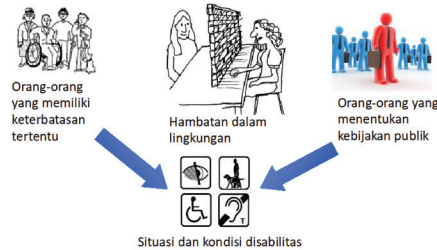
Eksklusi sosial merupakan sebuah konsep yang menerangkan tentang

1. perkara keadaan atau hasil, dan
2. proses yang dinamis.

Sebagai keadaan atau hasil, bahwa eksklusi sosial dimana individu atau kumpulan individu tidak boleh berperanan sepenuhnya dalam masyarakat karena identitas sosial seperti bangsa, gender, etnik, kasta atau agama. Sebagai sebuah proses yang dinamis merujuk kepada hubungan sosial dan institusi yang menghalang pencapaian keperluan hidup pembangunan dan hak-haknya sebagai warganegara. Inklusi sosial terkait dengan disabilitas memberikan pemahaman bahwa disabilitas adalah merupakan sebuah kondisi konstruksi dua arah.



**DISABILITAS ADALAH SEBUAH KONDISI YANG KONSTRUKSI DUA ARAH**

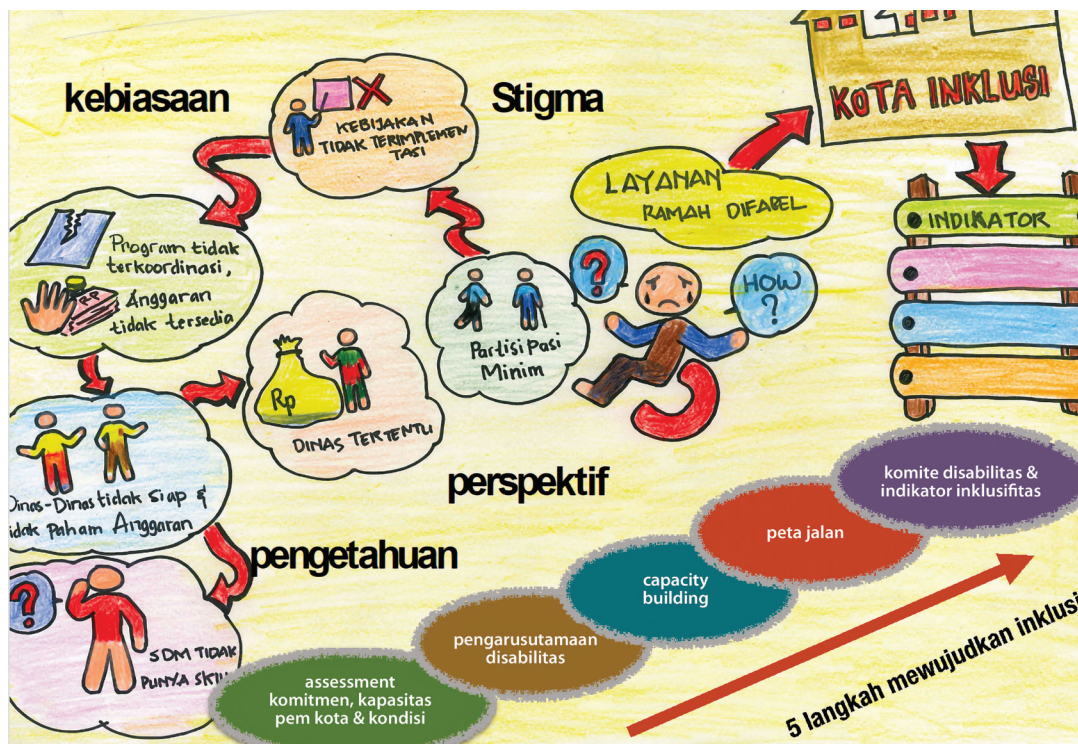


Sehingga upaya advokasi untuk membangun inklusi sosial sangat berkaitan dengan beberapa hal yaitu :

1. melakukan dekonstruksi pola pikir penyandang disabilitas terhadap dirinya sendiri yang berhubungan erat pola relasi serta penerimaan dalam keluarga sebagai makhluk sosial yang mampu berperan sosial secara produktif dan positif.
2. melakukan dekonstruksi / pola pikir, perubahan nilai dan perilaku masyarakat untuk memposisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang mempunyai kapasitas dan mampu berperan sosial, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. perubahan pola pikir, nilai dan perilaku akan mendorong adanya kesadaran untuk melakukan perubahan/ adaptasi lingkungan fisik / infrastruktur menjadi aksesibel.
3. melakukan perubahan dalam kebijakan yang diawali dengan perubahan pemahaman dan keahlian pembuatan kebijakan dan ketepatan implementasi dalam program dan anggaran.

Berapa ilustrasi terkait dengan langkah melakukan perubahan dalam advokasi pelayanan public ramah disabilitas/ difabel adalah sebagai berikut:

**Hambatan & Tantangan dalam Menginisiasi Layanan Publik Ramah Difabel**



**POKOK BAHASAN** : **9. ADVOKASI**

**SUB POKOK BAHASAN** : **9.2 KETERAMPILAN ADVOKASI**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

Menjelaskan dan mampu mempraktikkan penyusunan strategi advokasi kebijakan publik

Menjelaskan dan mampu mempraktikkan teknik advokasi kebijakan publik di desa

**WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M..9.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Ceramah, Penugasan Individu, Diskusi Kelompok-Pleno dan Bermain Peran</b></p> <p>Fasilitator mengingatkan kembali bahwa keterlibatan dan partisipasi Mentor SEPEDA KEREN mempengaruhi kebijakan publik sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang lebih baik;</p> <p>Fasilitator membagikan Juknis SEPEDA KEREN kepada peserta dan menginstruksikan untuk membacanya selama 5 menit;</p> <p>Fasilitator meminta peserta membentuk 4 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok membahas beberapa hal pada Lembar Panduan Diskusi Kelompok Juknis SEPEDA KEREN (M.9.2.2); dan Lembar Panduan Bermain Peran (M.9.2.3).</p>	80'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Panduan Diskusi Kelompok Juknis SEPEDA KEREN (M.9.2.2)</li> <li>Lembar Panduan Bermain Peran (M.9.2.3)</li> <li>Bahan Bacaan Pemahaman Dasar Advokasi (M.9.2.4)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan pentingnya advokasi dalam mendorong perubahan sosial bagi kelompok rentan di desa tujuan dari keterlibatan kelompok rentan dalam advokasi kebijakan adalah mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada mereka. Melalui slide presentasi atau mengacu pada Bahan Bacaan Pemahaman Dasar Advokasi (M.9.2.4).</p>	5'	

## LEMBAR PANDUAN DISKUSI JUKNIS SEPEDA KEREN

1. Kelompok 1 dan 2 membahas Akses/Partisipasi perempuan, disabilitas, anak, pekerja migran dalam pembangunan dan kepemimpinan di desa
2. Kelompok 3 dan 4 membahas Integrasi Musrena Keren ke dalam Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten
3. Setiap kelompok menjawab pertanyaan yang sama:
  - a. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar akses/partisipasi atau Integrasi dapat tercapai?
  - b. Siapa saja aktor-aktor yang dapat terlibat (mendukung) dan tidak?
4. Waktu diskusi kelompok adalah 10 menit;

## LEMBAR PANDUAN BERMAIN PERAN

1. Setiap kelompok selesai mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, informasikan kepada bahwa kelompok yang membahas hal yang sama akan bergabung menjadi satu kelompok untuk bermain peran;
2. Setiap kelompok diberi waktu mempersiapkan diri selama 10 menit;
3. Setiap kelompok bermain peran selama 15 menit dan saling mengamati penampilan kelompok lain;
4. Selama kegiatan bermain peran berlangsung catat poin-poin penting untuk refleksi dan evaluasi;
5. Setelah kedua kelompok tampil dan saling memberikan tanggapan, sampaikan dan bahas bersama catatan poin-poin yang telah ditulis dan simpulkan proses serta hasil.

## BAHAN BACAAN

**PEMAHAMAN DASAR ADVOKASI****Pengertian**

Pengertian advokasi berubah-ubah sepanjang waktu dan dibuat secara kontekstual. Advocate dalam bahasa Inggris dapat berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis. Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Sementara itu, Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Beberapa definisi advokasi lainnya yang dapat kita temui seperti:

- a. Proses yang terorganisir, sistematis dan sengaja untuk mempengaruhi perkara penting dan bersifat umum dalam kehidupan masyarakat
- b. Proses mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat yang terpinggirkan dan dikucilkan dari proses politik
- c. Proses meloby yang terfokus untuk mempengaruhi kebijakan
- d. Proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela yang efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat
- e. Proses perubahan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di dalam masyarakat lebih demokratis sekaligus menjamin orang-orang yang terpinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan public dan membuat hidup dan lingkungan mereka lebih sehat, aman dan produktif.

**Tujuan Advokasi**

Mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik.

**Strategi Advokasi**

Menurut Loue (2006), strategi advokasi terbagi menjadi:

- Advokasi melalui media
- Advokasi melalui pengadilan
- Advokasi menggunakan jejaring
- Advokasi melalui legislasi, perundangan dan peraturan

Sementara Mastuti, dkk (2001) mengategorikan strategi advokasi menjadi:

BERDASARKAN KEKUATAN APA YG DITONJOLKAN (fisik atau non fisik)	BERDASAR PENDEKATAN PADA PENGAMBIL KEPUTUSAN	BERDASAR AKTIFITAS PEKERJA ADVOKASI
Advokasi dengan <b>kekerasan</b>	Strategi <b>konfrontatif</b>	Advokasi yang <b>PROAKTIF</b> (proaktif mempengaruhi kebijakan) a. Lobby (lobi) b. <i>Public hearing</i> (dengar pendapat) c. Kampanye
Advokasi non violence	Strategi kooperatif	Advokasi yang REAKTIF (mempengaruhi kebijakan ses kebijakan diundangkan/ ditetapkan secara hukum) a. Demonstrasi b. <i>Legal standing</i> (tuntutan hukum) c. <i>Class Action</i> (gugatan perwakilan) d. Boikot e. Revolusi

## ASPEK PENTING DALAM ADVOKASI

**Legitimasi** akan merujuk pada Siapa (kelompok kepentingan) yang diwakili oleh lembaga apa? Siapa berbicara atas nama siapa? Dari mana dan/atau bagaimana otoritas didapatkan? Apa hubungan lembaga ini dengan kelompok yang berkepentingan melakukan advokasi? Bagaimana pendamping (kelembagaan) tahu apa yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh komunitas/masyarakat? Bagaimana komunitas/masyarakat terlibat dalam menentukan berbagai masalah advokasi apa atau yang mana yang menurut mereka penting?

Sementara **kredibilitas** merujuk pada: Seberapa jauh organisasi pendamping dapat dipercaya? Bagaimana hubungan antara organisasi pendamping selama ini dibangun dengan komunitas? Apa saja fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa organisasi pendamping dapat dianggap kredibel, terkait dengan informasi, argumentasi, reputasi, tokoh yang diperhitungkan, jaringan (pengakuan).

**Akuntabilitas** merujuk pada pertanggungjawaban publik, bagaimana kebijakan dan program kerja, dampak program termasuk memantau jalannya perubahan sebagai hasil dari advokasi (tindaklanjut dari hasil sebuah rangkaian proses advokasi). Akuntabilitas juga mencakup transparansi (keterbukaan dan keterjangkauan proses pembuatan keputusan dan proses informasi dalam lembaga atau pemerintahan) serta pertanggungjawaban internal organisasi dan kampanye advokasi menyangkut siapa yang membuat keputusan dan apa jenis keputusannya? seberapa transparannya pengambilan keputusan tersebut? kepada siapa pertanggungjawaban atas putusan yang telah dibuat ditunjukkan? atas dasar apa pertanggungjawaban itu dilakukan? apakah ada mekanisme yang dibangun dalam pertanggungjawaban tersebut? Bagaimana dan apa saja informasi yang diberikan kepada konstituen/anggota? Ini dapat memperbesar pengaruh, kekuasaan dan kelanjutan organisasi serta menjamin hubungan kekuasaan lebih demokratis dalam kelompok/organisasi.

**Kekuasaan** merujuk pada (bersifat) Unilateral, yakni terkait memaksa dan otoriter serta Relasional, yakni sikap timbal balik, transformasi dan empati.

## Jenis Advokasi

- a. Advokasi litigasi, adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti *class-action*, *judicial review*, dan *legal standing*.
- b. Advokasi nonlitigasi, dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demonstrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya

## Prinsip Advokasi

- a. Realitas: Memilih isu dan agenda yang realistis, jangan buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.
- b. Sistematis: Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media yang efektif.
- c. Taktis: Advokasi tidak mungkin bekerja sendiri, jalin koalisi dan aliansi terhadap sekutu. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.
- d. Strategis: Kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategis jitu agar advokasi berjalan dengan sukses.
- e. Berani: Jadikan isu dan strategis sebagai motor gerakan dan tetapkan berpijak pada agenda bersama.

## Pendekatan Dalam Advokasi

Beberapa pendekatan yang umum dilakukan dalam melakukan advokasi adalah:

1. Melibatkan para pemimpin.  
Para pembuat undang-undang, mereka yang terlibat dalam penyusunan hukum, peraturan maupun pemimpin politik, yaitu mereka yang menetapkan kebijakan publik sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah sosial termasuk kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu sangat penting melibatkan mereka semaksimal mungkin dalam isu yang akan diadvokasikan.
2. Bekerja dengan media massa.  
Media massa sangat penting berperan dalam membentuk opini publik. Media juga sangat kuat dalam mempengaruhi persepsi publik atas isu atau masalah tertentu. Mengenal, membangun dan menjaga kemitraan dengan media massa sangat penting dalam proses advokasi.
3. Membangun kemitraan.  
Dalam upaya advokasi sangat penting dilakukan upaya jaringan, kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi-organisasi dan sektor lain yang bergerak dalam isu yang sama. Kemitraan ini dibentuk oleh individu, kelompok yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang sama/ hampir sama.
4. Memobilisasi massa.  
Memobilisasi massa merupakan suatu proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi ke dalam kelompok-kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Dengan mobilisasi dimaksudkan agar termotivasi individu dapat diubah menjadi tindakan kolektif.
5. Membangun kapasitas.  
Membangun kapasitas disini di maksudkan melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi.

## Tahapan Advokasi

1. Membentuk lingkaran inti:  
Langkah pertama dari proses advokasi adalah membentuk lingkaran inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedemikian pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap isu yang diadvokasi.
2. Memilih isu strategis:  
Tugas pertama dari lingkaran inti adalah merumuskan isu tertentu yang diadvokasi. Isu yang dirumuskan tersebut dapat dikatakan menjadi suatu isu strategis jika: Aktual, Penting dan mendesak, Sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Berdampak positif pada perubahan sosial yang lebih baik, Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar. Untuk dapat memilih isu strategis yang akan diadvokasi serta merancang sasaran dan strategi perlu dilakukan:
  - a. Pemetaan. Pemetaan dilakukan dengan terlebih dahulu.
  - b. Menentukan kondisi ideal yang diharapkan di masa depan
  - c. Membandingkannya dengan kondisi yang ada saat ini. Di dalamnya perlu dilakukan
3. Analisa sosial makro.  
Bagaimana hubungan antara masyarakat, Negara dan Pasar terkait siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dalam hubungan tersebut.
4. Pemilahan dan analisis masalah.  
Dengan memfokuskan perhatian pada:
  - a. Apa saja masalah yang dihadapi saat ini yang dapat menjadi penghalang tercapainya kondisi ideal?
  - b. Siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan dalam masalah tersebut?
  - c. Apa saja faktor penyebabnya?
  - d. Apa saja solusi yang bisa ditawarkan untuk dapat keluar dari masalah tersebut?
5. Mendefinisikan masalah dan membingkai isu.  
Untuk dapat mendefinisikan masalah, perlu dibuat daftar periksa masalah dengan melakukan pengkajian terhadap beberapa hal berikut:
  - a. Apakah masalah yang akan ditangani dirasakan secara luas oleh masyarakat?
  - b. Apakah masalah yang akan ditangani dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat?
  - c. Apakah masalah yang akan ditangani dapat dimenangkan?
  - d. Apakah masalah yang akan ditangani memberikan perasaan kepada komunitas bahwa mereka memiliki kekuatan sendiri?
  - e. Apakah masalah yang akan ditangani member peluang bagi komunitas untuk belajar tentang politik dan dilibatkan dalam proses politik?
  - f. Apakah pelaku advokasi memiliki target advokasi yang jelas?
  - g. Apakah masalah yang akan ditangani memiliki kerangka waktu yang jelas?
  - h. Apakah masalah yang akan ditangani membangun nilai dan visi komunitas?
  - i. Apakah masalah yang akan ditangani menghubungkan kepedulian setempat dengan masalah global dan konteks kebijakan makro
  - j. Apakah organisasi kita sudah kuat dan memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan kekuasaan?
  - k. Apakah komunikasi yang dibangun dalam proses advokasi mudah dimengerti semua pihak?
6. Tentukan tujuan dari advokasi yang ingin dicapai.  
Lakukan penggalangan dan analisa kekuatan aliansi atau kelompok-kelompok pendukung atau yang memiliki kepentingan yang sama atas pencapaian tujuan advokasi yang telah ditetapkan sebelumnya (terkait dengan peluang dan ancaman pencapaian tujuan terhadap kelompok-kelompok aliansi tersebut).



7. Menyusun kegiatan dan taktik strategi:
  - a. Subjek advokasi
  - b. Tujuan umum
  - c. Tujuan khusus
  - d. Langkah-langkah pelaksanaan
  - e. Siapa bertanggungjawab terhadap apa
  - f. Kapan dilaksanakan
  - g. Alat bantu/media apa yang dibutuhkan
  - h. Dukungan apa/siapa yang dibutuhkan serta kapan evaluasi dilakukan
  - i. Bagaimana tindaklanjut setelah itu).

Dalam merancang dapat digunakan metode SMART, yaitu:

1. **Specific**; rumusan sasaran memang spesifik, kongkrit, dan jelas.
2. **Measurable**; hasilnya punya indikator yang jelas, dapat dipantau dan diketahui perkembangannya.
3. **Achievable**; dapat dijangkau
4. **Realistic**; dapat dicapai dengan kondisi saat ini
5. **Time Bound**; punya batas waktu yang jelas.

Mengolah data dan mengemas informasi: Salah satu cara yang dikenal dalam mengolah data dalam proses advokasi adalah dengan melakukan riset advokasi. Riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian kebijakan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya sebagai informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan isu strategis, sebagai bahan proses legislasi, untuk keperluan lobby dan kampanye, dan sebagainya

#### Sumber Rujukan

- Mastuti, Sri, dkk., *Panduan advokasi anggaran, FITRA, Pustaka Aksara, Palembang, 2001*  
 Miller, Valeri., *Pedoman Advokasi; Perencanaan, Tindakan dan Refleksi, Yayasan Obor, Jakarta, 2005*



# KEPEMIMPINAN

- POKOK BAHASAN** : **10. KEPEMIMPINAN**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Kepemimpinan sebagai Faktor Perubahan Sosial
  2. Memahami Pemimpin sebagai Pelaku Perubahan Sosial
- SUB POKOK BAHASAN** : **10.1 PEMIMPIN SEBAGAI FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL**
- 10.2 PEMIMPIN SEBAGAI PELAKU PERUBAHAN SOSIAL**
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

- POKOK BAHASAN** : **10. KEPEMIMPINAN**
- SUB POKOK BAHASAN** : **10.1 PEMIMPIN SEBAGAI FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan makna kepemimpinan
  2. Mampu mengidentifikasi faktor kepemimpinan yang mempengaruhi perubahan sosial
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.10.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.10.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Ceramah, Diskusi Kelompok-Pleno</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator menanyakan pendapat peserta tentang arti kata “kepemimpinan“ dan mencatat poin-poin jawaban peserta pada kertas plano atau metaplan;</p> <p>c. Fasilitator mengulas hasil curah pendapat dan menjelaskan arti kata dan makna kepemimpinan dengan menampilkan slide presentasi atau megacu pada Bahan Bacaan Makna dan Fungsi Kepemimpinan (10.1.4);</p> <p>d. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok untuk membaca dan membahas Tipe Kepemimpinan (M.10.1.3). Setiap kelompok hanya membaca dan membahas 1 tipe kepemimpinan selama 10 menit dengan pertanyaan berikut:</p> <p>(i) Siapa atau di mana kita bisa melihat tipe kepemimpinan seperti ini?</p> <p>(ii) Cocok digunakan untuk menjadi pemimpin apa atau pada bidang apa?</p> <p>(iii) Apa kelebihanannya dan kekurangannya?</p> <p>e. Fasilitator meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi dan ditanggapi oleh kelompok lainnya;</p> <p>f. Fasilitator mencatat poin-poin pembahasan dan menyimpulkan.</p>	35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Diskusi Tipe Kepemimpinan (M.10.1.3)</li> <li>• Bahan Bacaan Makna dan Fungsi Kepemimpinan (10.1.4)</li> </ul>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan terkait makna dan tipe kepemimpinan serta mendorong peserta untuk mengasah jiwa kepemimpinan, mengambil peran sebagai pemimpin bahkan lebih dari itu melahirkan pemimpin yang berasal dari kelompok rentan.</p>	5'	

## LEMBAR DISKUSI TIPE KEPEMIMPINAN

### A. Kepemimpinan regresif

Dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang bersifat otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain sebagainya yang sudah pasti ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama dalam garis kekerabatan, agama, etnis, atau yang lain) serta desa-desa korporatis (tunduk pada kebijakan regulasi negara) biasanya melahirkan pemimpin seperti ini.

### B. Kepemimpinan konservatif-involutif

Merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekayaan dan kekuasaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa.

### C. Kepemimpinan inovatif-progresif

Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan, serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Namun demikian, unsur yang paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah faktor legitimasi. Hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan, dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan termasuk kewenangan untuk memimpin, memerintah serta menjadi wakil dari masyarakat itu sendiri.

## BAHAN BACAAN

**MAKNA DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN**

Secara umum kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Secara khusus kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya untuk melakukan suatu kegiatan yang harus dilakukan sekaligus juga merupakan suatu kualitas kepribadian yang dapat mempengaruhi orang lain yang menjadi bawahannya dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dengan demikian melihat seseorang apakah dia menjadi pemimpin atau tidak adalah kemampuannya mempengaruhi dan mengontrol orang lain sebagai anggota atau bawahannya dalam suatu organisasi.

Kepemimpinan diibaratkan sebagai suatu bentuk kualitas yang muncul dari suatu pikiran dan tindakan seseorang, dan biasanya kepemimpinan ini berada dalam suatu organisasi dan manajemen. Dulu kepemimpinan identik dengan kaum laki-laki, khususnya kepemimpinan politik. Kini kepemimpinan sudah tidak lagi memiliki kecenderungan pada perbedaan jenis kelamin, melainkan pada kualitas seseorang. Sekarang para pemimpin perempuan baik di dunia bisnis maupun politik akan dipandang tidak berbeda dengan laki-laki, baik dalam pertarungan dan perebutan posisi dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah faktor utama dalam setiap proses perubahan.

Selain sebagai sumber gagasan, otoritas yang dipercaya menetapkan tujuan dan memandu arah, kepemimpinan juga memberi dorongan, teladan dan inspirasi serta menjamin rasa aman. Oleh karena itu, seorang pemimpin tentu saja bukan orang biasa. Seorang pemimpin adalah mereka yang dianugrahi bakat istimewa untuk, mendorong dan menjadi teladan, selain orang yang mampu membuat keputusan-keputusan yang baik di waktu yang tepat. Nilai merupakan unsur penting lainnya dalam kepemimpinan.

Aspek nilai dalam kepemimpinan biasanya dimulai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sang pemimpin secara personal, baru kemudian menyusul nilai-nilai yang dikembangkannya dalam organisasi atau kelompok. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan atas kepemimpinan ditemukan bahwa, kekuatan personal seorang pemimpinlah banyak mewarnai gerak dan langkah organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan (Muang, 2008).

Seorang pemimpin adalah seorang yang sanggup mendayagunakan organisasi secara optimal untuk mencapai apa yang diinginkannya. Yang paling klasik dari kepemimpinan

adalah batasan yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan. Salah satu dimensi kepemimpinan yang penting saat ini, baik di dunia bisnis maupun politik, adalah dimensi kemampuan manajerial. Artinya seorang pemimpin selain memang harus berpikir besar, mestinya juga memiliki kemampuan untuk bertindak benar. Tugas seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah mengulurkan tangan, dapat membuka hati dan pikiran serta menyediakan waktu dan tenaga untuk bekerja bagi orang-orang yang dipimpinya. Yang dimaksud dengan bekerja dalam hal ini adalah menciptakan dan membangun harapan bersama, merumuskan cita-cita bersama, menetapkan tujuan, mengelola dan menetapkan arah, mencari jalan keluar, mendorong dan melindungi, dan seterusnya.



**POKOK BAHASAN** : **10. KEPEMIMPINAN**

**SUB POKOK BAHASAN** : **10.2 PEMIMPIN SEBAGAI FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL**

**TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:

1. Menjelaskan makna menjadi seorang pemimpin
2. Mampu mengidentifikasi pemimpin sebagai pelaku perubahan sosial
3. Mampu menganalisa kekuatan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam melakukan perubahan sosial

**WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.10.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Curah Pendapat, Ceramah dan Penugasan Individu</b></p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dengan cara seakrab mungkin untuk menghilangkan jarak dengan peserta;</p> <p>b. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa yang terpikirkan ketika mendengar kata “Pemimpin” dan menuliskan jawaban peserta pada kertas metaplan;</p> <p>c. Fasilitator memberikan penjelasan mengenai sosok seorang pemimpin mengacu pada Bahan Bacaan Pemimpin dan Kepemimpinan (M.10.2.2) atau menggunakan media bantu Ppt yang telah disiapkan;</p> <p>d. Fasilitator membagikan kertas HVS kepada setiap peserta dan menginstruksikan peserta untuk menuliskan tokoh pemimpin yang paling dekat dengan dirinya atau berada di lingkungan sekitarnya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan apa yang didorongnya;</li> <li>Bagaimana sikap yang dikembangkannya;</li> <li>Apa saja pengetahuan yang dimilikinya yang mendukung keberhasilan atas perubahan yang telah dicapainya;</li> <li>Bagaimana sosok atau karakter kepemimpinannya;</li> <li>Apa saja strategi perubahan yang diterapkannya.</li> </ol> <p>e. Fasilitator merangkum hasil pembahasan dan mempertegas nilai dan prinsip serta keberpihakan yang harus dibangun sebagai seorang pemimpin dengan mencontohkan kepemimpinan Ibu Siti mengacu pada Bahan Bacaan Profil Kepala Desa Perempuan (M.10.2.3).</p>	35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan Bacaan Pemimpin dan Kepemimpinan (M.10.2.2)</li> <li>Bahan Bacaan Profil Kepala Desa Perempuan (M.10.2.3)</li> </ul>
<p>4. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan bahwa perempuan disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya sebenarnya memiliki potensi dan karenanya berpeluang mengisi posisi kepemimpinan baik dalam keluarga maupun masyarakat.</p>	5'	

## BAHAN BACAAN

## PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN

**Pengertian pemimpin**

Dalam bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama “pimpin.” Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan “pemimpin”.

Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. (Kartini Kartono, 1994 : 181).

Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi “LEADER”, yang mempunyai tugas untuk LEAD anggota di sekitarnya. Sedangkan makna LEAD adalah:

1. *Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
2. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya.
3. *Advice*, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.
4. *Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

**Kriteria Seorang Pemimpin**

Pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. Pengaruh  
Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh ini menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin.

## 2. Kekuasaan/power

Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan/power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan/kekuatan yang dimiliki sang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki sang pemimpin, tanpa itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan

## 3. Wewenang

Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal/kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan apabila sang pemimpin percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga bawahan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari sang pemimpin.

## 4. Pengikut

Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan/power, dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sang pemimpin. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin tidak akan ada. Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri.

## Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain:

1. Melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi
2. Terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan
3. Adanya tujuan bersama yang harus dicapai.

Orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan mampu mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk menepati tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi.

Tugas utama seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai tujuan.

## Gaya Kepemimpinan

Selanjutnya Ishak Arep dan Tanjung menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan diatas, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia lazimnya digunakan 4 (empat) macam gaya kepemimpinan, yaitu:

### 1. Demokratis

Menitikberatkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan

2. Diktator atau Otokratis  
Menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan/atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko apapun.
3. Paternalistik  
Gabungan bentuk demokratik dan diktator. Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya menerapkan kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis.
4. *Free Rein*  
Gaya kepemimpinan yang menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian Manajemen Sumber Daya Manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka.

## Tipe Kepemimpinan

Tipe pemimpin yang dikemukakan oleh W.J. Reddin dalam *What Kind of Manager* yang disunting oleh Wajosumidjo, yaitu:

- a. Berorientasikan tugas (*task orientation*)
- b. Berorientasikan hubungan kerja (*relationship orientation*)
- c. Berorientasikan hasil yang efektif (*effective orientation*)

Berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut maka terdapat delapan tipe kepemimpinan, yaitu:

1. Tipe *Deserter* (Pembelot)  
Sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan, sukar diramalkan
2. Tipe Birokrat  
Sifatnya: *correct*, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma; ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin, dan keras.
3. Tipe Misionaris (*Missionary*)  
Sifatnya: terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah.
4. Tipe *Developer* (Pembangun)  
Sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan.
5. Tipe Otokrat  
Sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong. Bandel.
6. *Benevolent Autocrat* (otokrat yang bijak)  
Sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan diri.
7. Tipe *Compromiser* (kompromis)  
Sifatnya: plintat plintut, selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit.
8. Tipe Eksekutif  
Sifatnya: bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, tekun.

Unsur-Unsur Mendasar Kepemimpinan

1. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
2. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
3. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber Rujukan

<http://referensi-kepemimpinan.blogspot.com/2009/03/pengertian-pemimpin.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita.html>

## BAHAN BACAAN

**PROFIL KEPALA DESA PEREMPUAN**

Ibu Siti seorang Kepala Desa perempuan di Desa Karas Kepoh menjabat sebagai Kepala Desa dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya dirumah. Dalam konstruksi budaya Jawa, sepandai dan setinggi apapun karir seorang perempuan tetaplah menganggap bahwa seorang istri adalah teman belakangnya bagi suami. Bahwa seorang istri harus bisa memasak untuk suami dan anak-anaknya, harus bisa dandan sebagai bentuk bakti kepada suami agar suami betah dirumah. Selain itu seorang perempuan harus bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Dalam hal ini keturunan mengandung arti bahwa seorang perempuan bisa melahirkan, menyusui, menjaga, memelihara, merawat dan mendidik anak. Dari peran tersebut semuanya diterima dan dilaksanakan oleh Ibu Siti dengan senang hati, tanggung jawab, sabar, setia dan bakti.

Bagi keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya, Ibu Siti itu termasuk sosok istri dan ibu yang tanggung jawab, tidak melupakan keluarga, penyayang dan bisa dikatakan ideal. Ibu Siti dengan tegas, cepat dan tanggap menyesuaikan diri ketika terpilih menjadi Kepala Desa terhadap aturan yang ada, sehingga dapat memenuhi harapan yang diharapkan masyarakat. Selama kepemimpinannya Ibu Siti berusaha menyeimbangkan urusan rumah tangganya dan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa, Ibu Siti terlebih dahulu mengadakan musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa dan tidak lupa mengundang masyarakat melalui wakil-wakilnya yaitu tokoh masyarakat, ketua RT dan ketua RW. Melalui musyawarah desa itu, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan ide dan gagasan walaupun tidak semua ide dan gagasan masyarakat itu diterima. Ide dan gagasan yang berasal dari masyarakat ditampung agar pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ibu Siti percaya bahwa apabila program pembangunan yang menentukan masyarakat itu sendiri maka secara otomatis masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya pembangunan itu akan dinikmati, dimanfaatkan oleh masyarakat serta dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, apabila masyarakat dimintai tenaga atau meteri untuk pembangunan desanya maka masyarakat berusaha untuk memberikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Disini peran Kepala Desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa.

Sebagai Kepala Desa, Ibu Siti berusaha memberikan dorongan atau semangat kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ibu Siti menjalankan dan mengajak masyarakat Desa Karas Kepoh untuk maju dan berkembang di beberapa sector. Pada sector pertanian Ibu Siti mengajak masyarakat yang kurang mampu untuk dapat menggarap bengkok desa. Di sini Ibu Siti memang sengaja tidak menggarap bengkok sendiri karena bengkok itu untuk masyarakat dan untuk hasilnya nanti masyarakat memberikan semampunya untuk Ibu Siti tidak harus dijatah. Rencana-rencana Ibu Siti kedepannya sangat cemerlang dan mengarah pada kemajuan. Sehingga, sejak Bu Siti memimpin Desa Karas Kepoh sedikit demi sedikit Desa Karas Kepoh mengalami kemajuan.

Di sektor pembangunan, Ibu Siti mengajak masyarakat Desa Karas Kepoh untuk tetap menjaga pembangunan yang ada dengan baik, yaitu dengan cara memotivasi masyarakat agar masyarakat mau mengikuti kegiatan yang ada di desa. Dalam hal ini Bu Siti tidak hanya memotivasi saja, tapi juga menyetujui, menggerakkan, sebagai koordinator, memberi arahan dan masukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan serta selalu melakukan

pengecekan dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Disini yang menjadi pelaku utama atau subjek dan objeknya tetap masyarakat Desa Karas Kepoh dan Ibu Siti berkewajiban mengarahkannya.

Sejak Desa Karas Kepoh dipimpin oleh Ibu Siti telah banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya bangunan, yaitu jembatan gantung yang digunakan masyarakat desa Karas Kepoh untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke desa lainnya, dibawah jembatan gantung juga terdapat adanya sungai dan waduk yang digunakan masyarakat untuk irigasi pertanian.

Secara umum pelayanan publik yang dilaksanakan Ibu Siti dengan dibantu perangkat desa memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertahanan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor desa atau Balai Desa maupun diluar jam kerja dirumah Kepala Desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya. Pelayanan tersebut tentunya dengan ditunjang adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai jadi lebih memudahkan Kepala Desa dan perangkat desa untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan Ibu Siti tidak pernah membedakan golongan dan status sosial seseorang, semuanya sama rata. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Kepala Desa Karas Kepoh selalu memperhatikan setiap apa yang dilakukan masyarakatnya dan tetap memperhatikan potensi apa saja yang dimiliki desa.

Potensi yang dimiliki desa Karas Kepoh cukup banyak yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan, kerajinan batik tulis yang terus dikembangkan, memiliki efektifitas ekonomi yang cukup, satu ragam budaya religi (hadroh), tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan kondisi politik yang kondusif. Di Desa Karas Kepoh juga mempunyai sumber daya yang diandalkan untuk menunjang penghidupan masyarakat. Sumber daya manusianya, khususnya yang perempuan menjadi pengrajin batik, untuk itu dengan adanya sumber daya manusia yang ada Bu Siti sebagai Kepala Desa perempuan mencoba menguri-uri atau mempertahankannya dengan terus melatih masyarakat dan melestarikan batik Lasem yang ada di Desa Karas Kepoh supaya tetap berkembang dan tidak punah, dengan membuat ini Bu Siti mengaharapkan sumber daya manusianya semakin kreatif dan hasilnya juga dapat digunakan untuk tambahan kehidupan rumah tangganya.

Bu Siti menjadi panutan dan contoh yang baik, mengajarkan masyarakat supaya lebih kreatif dan rajin yaitu dengan membuat dan kerja bakti. Dalam mengajarkan membuat dan kerja bakti, Bu Siti terjun langsung bersama perangkat desa dan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat yang dilontarkan Ki Hajar Dewantoro yaitu "*ing ngarso sung tulodo*" bermakna "*di depan memberi contoh*". Ibu Siti mencerminkan ke-idealannya sebagai seorang pemimpin. Meskipun seorang perempuan, pola kepemimpinannya tegas misalnya saja dalam kegiatan kerja bakti Bu Siti sering memberikan motivasi, memberikan wejangan-wejangan atau bimbingan dan mengoordinasi serta selalu mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa mengikuti kegiatan kerja bakti. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pemimpin yang ideal adalah "*ing madyo mangunkarso*" artinya "*di tengah memberi bimbingan atau motivasi*".

Pola kepemimpinan yang diterapkan Ibu Siti tegas dan sabar. Disamping memberikan motivasi, juga memberikan dorongan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk selalu semangat dalam melakukan kegiatan yang ada di desa. Bu Siti memberikan kebebasan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk berinisiatif, berkreasi dan berpendapat serta tetap berpengaruh dalam kegiatan yang dilakukan perangkat desa dan masyarakat.

Namun begitu, selalu ada hambatan yang dialami oleh seorang pemimpin di Desa. Di antaranya masalah terkait aspek sosial, aspek budaya dan kondisi penduduk. Rendahnya tenaga kerja, masyarakat malas untuk mengikuti kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kedua aspek budaya, yaitu rendahnya peranan wanita dalam pembangunan. Masyarakat masih menganggap bahwa kepemimpinan Kepala Desa perempuan itu masih rendah dibandingkan kepemimpinan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh budaya zaman dulu yang menganggap perempuan hanyalah teman belakangnya laki-laki. Ketiga kondisi penduduk, yaitu keadaan penduduk yang beranekaragam

memungkinkan adanya perbedaan antara masyarakat dengan Kepala Desa. Bu Siti sering menemui orang yang sifatnya kaku dan tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di desa. Ibu Siti selalu menasehati sedikit demi sedikit sampai orang itu sadar dan mengikuti kegiatan pembangunan yang ada di desa. Contoh dari hal terkecil yaitu dengan mengadakan kerja bakti yang sengaja dilaksanakan supaya masyarakat mengikuti dan berpartisipasi.

Faktor pendukung yang mempengaruhi kepemimpinan Ibu Siti di antaranya adalah dukungan sosial yang merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam proses menjabat sebagai Kepala Desa. Dukungan masyarakat telah mengantarkan Ibu Siti sebagai pemimpin yang dikagumi. Pada awalnya masyarakat desa Karas Kepoh ragu dan tidak suka pada pemimpin perempuan. Tetapi lama kelamaan setelah masyarakat melihat sendiri kepemimpinan Bu Siti selama bertahun-tahun yang semakin maju dalam hal pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatpun memuaskan, akhirnya masyarakat percaya akan kualitas kepemimpinannya.

Kedua, dukungan keluarga. Keluarga Ibu Siti mendukung sepenuhnya apa saja yang dilakukan. Bagi beliau keluarga itu sebagai kekuatan untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya sebagai Kepala Desa. Ketiga, dukungan budaya yang juga menjadi faktor yang sangat penting. Untuk menjadi pemimpin, perilaku yang ditunjukkannya dengan mengajak, mempengaruhi orang lain untuk ikut dalam aktivitasnya dengan pemahaman kultur atau budaya masyarakat yang akan dipimpinya memudahkan langkah Ibu Siti dalam mengajak masyarakat untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai Kepala Desa yang bertanggungjawab atas warganya, maka Kepala Desa Karas Kepoh selalu berusaha mengatasi masalah-masalah dan mencari jalan keluar demi kesejahteraan masyarakat Desa Karas Kepoh.



# EVALUASI

- POKOK BAHASAN** : **11. EVALUASI**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Melakukan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN
  2. Menyusun rencana tindak lanjut
- SUB POKOK BAHASAN** : **11.1 EVALUASI PELATIHAN CALON MENTOR SEPEDA KEREN**
- 11.2 MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT**
- WAKTU** : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit

- POKOK BAHASAN** : **11. EVALUASI**
- SUB POKOK BAHASAN** : **11.1 EVALUASI PELATIHAN CALON MENTOR SEPEDA KEREN**
- TUJUAN** : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan tujuan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN
  2. Menjelaskan manfaat evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN
  3. Melakukan evaluasi pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penyajian PB (M.11.1.1)</li> <li>• Lembar Penyajian SPB (M.11.1.2)</li> </ul>
<p>2. <b>Diskusi Kelompok-Pleno dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator meminta peserta membuat kelompok kecil sesuai dengan minatnya namun tetap memperhatikan keseimbangan jumlah anggota kelompok untuk melakukan evaluasi pelatihan. Kelompok tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bina Suasana dan Orientasi belajar</li> <li>(ii) Fitrah Manusia</li> <li>(iii) SEPEDA KEREN</li> <li>(iv) Gender dan Inklusi Sosial</li> <li>(v) HAM - Hak Perempuan, Disabilitas dan Anak</li> <li>(vi) Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>(vii) Pengorganisasian Komunitas</li> <li>(viii) Analisis Sosial</li> <li>(ix) Advokasi</li> <li>(x) Kepemimpinan</li> </ul> <p>b. Setiap kelompok mendiskusikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Topik pembahasan yang paling menarik, mengapa?;</li> <li>(ii) Topik pembahasan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, mengapa?;</li> <li>(iii) Keunggulan proses pelatihan, mengapa?;</li> <li>(iv) Hal yang harus diperbaiki dalam pelatihan, mengapa?.</li> </ul> <p>c. Fasilitator meminta setiap perwakilan kelompok presentasi dan kelompok lainnya menanggapi, bertanya atau klarifikasi.</p>	35'	
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan pentingnya evaluasi dalam pelatihan agar dapat mengetahui pencapaian tujuan pelatihan dengan proses yang dilalui, kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta, peningkatan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.</p>	5'	

- POKOK BAHASAN** : **11. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**
- SUB POKOK BAHASAN** : **11.2 MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT PELATIHAN CALON MENTOR SEPEDA KEREN**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan tujuan penyusunan rencana tindak lanjut
  2. Menjelaskan manfaat penyusunan rencana tindak lanjut
  3. Mampu melakukan penyusunan rencana rencana tindak lanjut
- WAKTU** : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.11.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Individu dan Ceramah</b></p> <p>a. Fasilitator memberikan penegasan bahwa ada dua macam laporan yakni:</p> <p>(i) Laporan kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibuat dengan memastikan semua rencana yang dibuat di dalam tabel RTL dapat dilaksanakan dan tercapai outputnya mengacu pada Lembar RTL ToT Calon Mentor SEPEDA KEREN (11.2.2)</li> <li>Bisa dalam bentuk tulisan, bisa video, vlog, fotografi, dll</li> </ul> <p>(ii) Laporan Individu: Dalam bentuk Cerita Menarik Praktik Penugasan Lapangan.</p> <p>b. Fasilitator membagikan 1 lembar kertas HVS kepada setiap peserta;</p> <p>(i) Fasilitator menginstruksikan peserta untuk: menyusun rencana tindak lanjut mengacu pada Lembar RTL ToT Calon Mentor SEPEDA KEREN (M.11.2.2);</p> <p>(ii) Setiap peserta menuliskan rencana tindak lanjut selama 20 menit;</p> <p>(iii) Setelah selesai peserta dikelompokkan dan setiap kelompok membuat RTL bersama.</p>	35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar RTL ToT Calon Mentor SEPEDA KEREN (M.11.2.2)</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator memberikan penegasan pentingnya menyusun tindakan terencana sebagai acuan dalam melakukan aktivitas sekaligus alat ukur perkembangan kegiatan atau pencapaian tugas lapaangan dan menutup sesi.</p>	5'	

## LEMBAR RTL CALON MENTOR/KADER SEPEDA KEREN

TIM Mentor :  
 Nama Pembimbing :  
 Lokasi Penugasan :

Key Output	Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan	Kapan Dilaksanakan	Dimana Dilaksanakan	Pihak Yang Terlibat
Pemetaan Tokoh dan kelembagaan, Pola relasi di Desa				
Analisa Kerentanan, potensi dan solusi				
Profil Pemimpin Perubahan Sosial				
Akses dan paratisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Desa				





# PRAKTIK LAPANGAN DAN PENGORGANISASIAN KOMUNITAS

- POKOK BAHASAN** : **12. PRAKTIK LAPANGAN DAN PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Peserta mempraktikkan pengorganisasian komunitas
  2. Peserta mengevaluasi praktik pengorganisasian komunitas
- SUB POKOK BAHASAN** : **12.1 PRAKTIK PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- 12.2 MENGEVALUASI PRAKTIK PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- WAKTU** : 20 Jampel @ 45 menit = 900 menit

<b>POKOK BAHASAN</b>	: <b>12. PRAKTIK LAPANGAN DAN PENGORGANISASIAN KOMUNITAS</b>
<b>SUB POKOK BAHASAN</b>	: <b>12.1 PRAKTIK PENGORGANISASIAN KOMUNITAS</b>
<b>TUJUAN</b>	: SPB membantu peserta untuk mempraktikkan rencana pengorganisasian komunitas Melakukan evaluasi pelatihan Calon Mentor dan Kader SEPEDA KEREN
<b>WAKTU</b>	: 20 Jampel @ 45 menit = 900 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. Peserta secara berkelompok di setiap desa mempraktikkan Pengorganisasian Komunitas berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemetaan Tokoh dan kelembagaan, Pola relasi di Desa</li><li>b. Analisa Kerentanan, potensi dan solusi</li><li>c. Profil Pemimpin Perubahan Sosial</li><li>d. Akses dan paratisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Desa</li></ul>	900'	Lembar RTL Peserta
<p>2. Peserta menyusun laporan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Laporan kelompok:<ul style="list-style-type: none"><li>• Dibuat dengan memastikan semua rencana yang dibuat di dalam tabel RTL mengacu pada Lembar RTL ToT Calon Mentor/Kader SEPEDA KEREN</li><li>• Laporan bisa disusun dalam bentuk tulisan, bisa video, vlog, fotografi, dll</li></ul></li><li>b. Laporan Individu: Dalam bentuk Cerita Menarik</li></ul>		

- POKOK BAHASAN** : **12. PRAKTIK LAPANGAN DAN PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- SUB POKOK BAHASAN** : **12.1 MENGEVALUASI PRAKTIK PENGORGANISASIAN KOMUNITAS**
- TUJUAN** : Setelah penyajian Sub Pokok Bahasan ini, diharapkan peserta dapat:
1. Mempresentasikan hasil praktik pengorganisasian komunitas
  2. Menganalisa kelemahan, hambatan dan peluang dalam pengorganisasian masyarakat
  3. Menyusun pembelajaran pengorganisasian komunitas berdasarkan pengalaman praktik lapangan
- WAKTU** : 20 Jampel @ 45 menit = 900 menit.

## PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN	WAKTU (Menit)	MEDIA BELAJAR
<p>1. <b>Pengantar</b></p> <p>Fasilitator menyampaikan SPB, tujuan dan waktu yang diperlukan.</p>	5'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar Penyajian SPB (M.12.2.1)</li> </ul>
<p>2. <b>Penugasan Kelompok</b></p> <p>a. Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan proses praktik lapangannya berikut analisa terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelemahan</li> <li>Hambatan</li> <li>Peluang</li> </ol> <p>dalam pengorganisasian masyarakat;</p> <p>b. Setelah setiap kelompok presentasi dilanjutkan dengan presentasi individu;</p> <p>c. Fasiitator meminta kelompok lainnya menanggapi presentasi kelompok maupun individu dan memberikan masukan perbaikan;</p> <p>d. Fasilitator mencatat poin-poin yang disampaikan pada kertas plano;</p> <p>e. Setelah semua kelompok presentasi, fasilitator meminta masing-masing kelompok menyusun Rencana Langkah Pengorganisasian Komunitas berdasarkan catatan perbaikan hasil masukan kelompok lain;</p> <p>f. Fasilitator meminta setiap kelompok menyusun catatan pembelajaran dan/atau praktik baik pengorganisasian masyarakat bersumber dari catatan atas presentasi kelompok dan individu dalam bentuk tulisan minimal 2 halaman;</p> <p>g. Fasilitator melakukan review hasil pembelajaran praktik lapangan dan rencana pengorganisasian komunitas kelompok maupun individu.</p>	880'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar RTL ToT Calon Mentor/Kader SEPEDA KEREN</li> <li>Laporan Pengorganisasian Komunitas Kelompok</li> <li>Laporan Pengorganisasian Komunitas Individu</li> </ul>
<p>3. <b>Penegasan</b></p> <p>Fasilitator menutup sesi dengan memberikan penegasan terkait pentingnya melakukan pengorganisasian komunitas dengan memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahapan yang jelas</li> <li>Terencana</li> <li>Dukungan data</li> <li>Pendokumentasian proses lapangan sebagai bahan evaluasi untk perbaikan langkah pengorganisasian yang dilakukan.</li> </ol>	15'	





SEKOLAH PEREMPUAN,  
DISABILITAS, ANAK DAN  
KELOMPOK RENTAN LAINNYA

# Sepeda keren

ISBN 978-623-6080-08-5 (PDF)

